



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(R P J M D)

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2016 - 2021



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional.
- (2) Tujuan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dan RKPD.
 - b. Bahan penyusunan dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.
 - c. Pedoman Pemerintah Daerah dalam Penyusunan RKPD.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 memuat sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 serta Pengendalian Dan Evaluasi.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sistematika penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

BAB I.	PENDAHULUAN
BAB II.	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III.	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV.	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V.	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI.	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII.	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII.	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX.	PENUTUP

- (2) Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 15 Februari 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Ttd

SUPIAN HADI

Diundangkan Di Sampit
Pada tanggal 15 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR,**

Ttd

HALIKINNOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01, 10/2019

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM,

NINO ANDRIA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Kotawaringin Timur **H. SUPIAN HADI, S.Ikom** dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur **Drs. H.M. TAUFIQ MUKRI, S.H., M.M.** dalam janji politiknya yang terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015.

Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun setiap 5 (lima) tahun sekali dan mutlak tersedia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak terpisahkan dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 258

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016-2021



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	8
1.3.1 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019	9
1.3.2 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dengan RTRWN	11
1.3.3 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah	11
1.3.4 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dengan RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035	14
1.3.5 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dengan RTRWK Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035	15
1.4 Maksud dan Tujuan	15
1.4.1 Maksud	15
1.4.1 Tujuan	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	18
2.1 Aspek Geografi dan Demokrasi	18
2.1.1 Aspek Geografi	18
2.1.2 Aspek Demografi	34
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	36
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi.	37
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	42
2.2.2 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	47
2.3 Aspek Pelayanan Umum	48
2.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib	48
2.3.2 Fokus Pelayanan Urusan Pilihan	75
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	81
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	81
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	91
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	105
3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2010-2017	105
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	105
3.1.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	109



3.1.1.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah	120
3.1.1.3 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah	127
3.2 Analisa Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017	128
3.2.1 Solvabilitas Jangka Pendek	128
3.2.1.1 Menentukan Komponen Pembilang	128
3.2.1.2 Menentukan Komponen Penyebut	128
3.2.2 Solvabilitas Jangka Panjang	129
3.2.2.1 Menentukan Komponen Pembilang	129
3.2.2.2 Menentukan Komponen Penyebut	129
3.2.3 Solvabilitas Anggaran	130
3.2.3.1 Menentukan Komponen Pembilang	130
3.2.3.2 Menentukan Komponen Penyebut	130
3.2.4 Kemandirian Keuangan	131
3.2.4.1 Menentukan Komponen Pembilang	131
3.2.4.2 Menentukan Komponen Penyebut	131
3.2.5 Fleksibilitas Keuangan	132
3.2.5.1 Menentukan Komponen Pembilang	132
3.2.5.2 Menentukan Komponen Penyebut	133
3.2.6 Solvabilitas Layanan	133
3.2.6.1 Menentukan Komponen Pembilang	133
3.2.6.2 Menentukan Komponen Penyebut	135
3.3 Proyeksi Keuangan Tahun 2016-2021	135
3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah	135
3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah	135
3.3.1.2 Dana Perimbangan	138
3.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	138
3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah	139
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	147
4.1 Permasalahan Pembangunan	147
4.1.1 Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah	147
4.1.2 Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan	147
4.1.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	147
4.1.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	149
4.1.2.3 Urusan Pilihan	153
4.1.2.4 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	154
4.2 Isu Strategis	154
4.2.1 Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019	155
4.2.2 Penetapan Isu Strategis	157
4.2.2.1 Infrastruktur	157
4.2.2.2 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	159
4.2.2.3 Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif,	



Demokratis Dan Terpercaya	165
4.2.2.4 Ketahanan Pangan	167
4.2.2.5 Penguatan Pemerintahan Desa	169
4.2.2.6 Pemberdayaan Ekonomi	172
4.2.2.7 Pelestarian Lingkungan Hidup	174
4.2.2.8 Penanggulangan Bencana	175
4.2.2.9 Pariwisata Dan Pelestarian Budaya	176
4.3 Tata Ruang Dan Pembangunan Kewilayahan	181
4.3.1 Pusat-Pusat Kegiatan	182
4.3.2 Wilayah Pengembangan Produk Unggulan	183
4.3.3 Pusat Perdagangan Dan Jasa	185
4.3.4 Kawasan Industri Dan Pergudangan	186
4.4 Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	187
4.5 Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya	192
4.6 Telaah Atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i> / SDGs)	195
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	198
5.1 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur	198
5.2 Misi Pembangunan	202
5.3 Tujuan Dan Sasaran	202
5.4 Janji Bupati dan Wakil Bupati	210
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	219
6.1 Strategi	219
6.2 Arah Kebijakan	221
6.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan	222
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	354
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	450
BAB IX PENUTUP	453
9.1 Kaidah Transisi	453
9.2 Kaidah Pelaksanaan	454



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Misi Nasional	10
Tabel 1.2	Keterkaitan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Misi Provinsi	12
Tabel 2.1	Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur	18
Tabel 2.2	Data Beberapa Sungai Besar di Kabupaten Kotawaringin Timur	28
Tabel 2.3	Luas Tutupan Lahan Tahun 2017	30
Tabel 2.4	Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Tahun 2017	34
Tabel 2.5	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Tiap Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012-2016	35
Tabel 2.6	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Per Kecamatan Tahun 2017	35
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Kotawaringin Timur Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2017	36
Tabel 2.8	Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017	37
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013-2017	37
Tabel 2.10	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013-2017	38
Tabel 2.11	Jumlah Rumah Tangga Menurut Status Kesejahteraan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015	41
Tabel 2.12	Jumlah individu menurut status kesejahteraan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015	42
Tabel 2.13	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017	48
Tabel 2.14	Perkembangan Organisasi dan Prasana Olah Raga Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	48



Tabel 2.15	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam persen) ..	49
Tabel 2.16	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam persen) ..	50
Tabel 2.17	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam persen)	50
Tabel 2.18	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam persen)	51
Tabel 2.19	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam persen)	51
Tabel 2.20	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur	52
Tabel 2.21	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur	52
Tabel 2.22	Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur	52
Tabel 2.23	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam persen)	53
Tabel 2.24	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam persen)	53
Tabel 2.25	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam persen)	53
Tabel 2.26	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur	54
Tabel 2.27	Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur	54



Tabel 2.28	Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur	54
Tabel 2.29	Perkembangan Angka Angka Melanjutkan (AM) Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam persen)	55
Tabel 2.30	Perkembangan Kondisi Bangunan Sekolah Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam persen)	55
Tabel 2.31	Kualifikasi Pendidikan Guru Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam persen)	55
Tabel 2.32	Hasil Kinerja Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	57
Tabel 2.33	Hasil Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	59
Tabel 2.34	Hasil Kinerja Urusan Perumahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	60
Tabel 2.35	Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Kotawaringin Timur	61
Tabel 2.36	Kapasitas Produksi PDAM Sampit	61
Tabel 2.37	Pemenuhan Air Bersih Dengan PDAM	61
Tabel 2.38	Hasil kinerja Urusan Perumahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2013-2017	61
Tabel 2.39	Hasil Kinerja Urusan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	61
Tabel 2.40	Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	62
Tabel 2.41	Hasil Kinerja Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	62
Tabel 2.42	Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	63
Tabel 2.43	Hasil Kinerja Urusan Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2011-2017	64
Tabel 2.44	Hasil Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode	



2013-2017	65
Tabel 2.45 Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	66
Tabel 2.46 Hasil Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	66
Tabel 2.47 Hasil Kinerja Urusan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	67
Tabel 2.48 Hasil Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	68
Tabel 2.49 Hasil Kinerja Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	68
Tabel 2.50 Hasil Kinerja Urusan Penanaman Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	69
Tabel 2.51 Hasil Kinerja Urusan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	70
Tabel 2.52 Hasil Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	70
Tabel 2.53 Hasil Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	71
Tabel 2.54 Hasil Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	73
Tabel 2.55 Hasil Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	73
Tabel 2.56 Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	74
Tabel 2.57 Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	74
Tabel 2.58 Hasil Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah	



	Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	74
Tabel 2.59	Hasil Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	75
Tabel 2.60	Hasil Kinerja Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	76
Tabel 2.61	Hasil Kinerja Urusan Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	77
Tabel 2.62	Hasil Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	77
Tabel 2.63	Hasil Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	78
Tabel 2.64	Hasil Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	79
Tabel 2.65	Hasil Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	80
Tabel 2.66	Hasil Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	80
Tabel 2.67	Hasil Kinerja Urusan Ketrasmigrasian Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017	81
Tabel 2.68	PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017 Menurut Pengeluaran (dalam miliar rupiah)	81
Tabel 2.69	Proporsi Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017 (dalam persen)	82
Tabel 2.70	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017 (dalam persen)	83
Tabel 2.71	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017	83
Tabel 2.72	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017 (dalam persen, berdasarkan PDRB ADHB)	84
Tabel 2.73	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah	



	Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017 dalam persen, berdasarkan PDRB ADHK)	85
Tabel 2.74	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017	86
Tabel 2.75	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017	90
Tabel 2.76	Perkembangan Ekspor Netto Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017 (dalam miliar rupiah)	90
Tabel 2.77	Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 - 2017	91
Tabel 2.78	Standar Waktu Pelayanan Perizinan di Kabupaten Kotawaringin Timur	92
Tabel 2.79	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017	93
Tabel 2.80	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017	94
Tabel 2.81	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur	95
Tabel 3.1	APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010- 2017	107
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	109
Tabel 3.3	Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	110
Tabel 3.4	Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2015	111
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	111
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	111



Tabel 3.7	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	112
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	113
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	113
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	114
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	114
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	115
Tabel 3.13	Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	116
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017 ...	116
Tabel 3.15	Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	117
Tabel 3.16	Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017 ...	117
Tabel 3.17	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	118
Tabel 3.18	Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	118
Tabel 3.19	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011-2017	118
Tabel 3.20	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	120
Tabel 3.21	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	121



Tabel 3.22	Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	121
Tabel 3.23	Target dan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	122
Tabel 3.24	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	123
Tabel 3.25	Target dan Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2010-2017	123
Tabel 3.26	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010-2017	123
Tabel 3.27	Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	124
Tabel 3.28	Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	124
Tabel 3.29	Target dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017 ...	125
Tabel 3.30	Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	126
Tabel 3.31	Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	126
Tabel 3.32	Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017 ...	127
Tabel 3.33	Rincian Estimasi dan Realisasi SiLPA Kabupaten Kotawaringin Timur T.A. 2010-2017	127
Tabel 3.34	Dimensi Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur T.A. 2013-2017	135
Tabel 3.35	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2021	137
Tabel 3.36	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur T.A. 2016-2021	139
Tabel 3.37	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016-2021 (dalam juta rupiah)	141



Tabel 4.1	Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, dan Prioritas Pembangunan	177
Tabel 4.2	Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Isu Strategis Nasional	181
Tabel 4.3	Integrasi Isu Strategis KLHS dalam Isu Strategis RPJMD	187
Tabel 4.4	Identifikasi RPJMD Daerah Lain (Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan)	193
Tabel 5.1	Visi dan Misi Kepala Daerah	201
Tabel 5.2	Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur	204
Tabel 5.3	Janji Bupati dan Wakil Bupati	210
Tabel 5.4	Keterkaitan Urusan, Prioritas dan Penjabaran Program Aksi Sahati dalam Trisakti yang dilaksanakan oleh PD	211
Tabel 6.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur	224
Tabel 6.2	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan	233
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 (dalam juta rupiah)	355
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	356
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kotawaringin Timur	450
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	450



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	9
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kabupaten Kotawaringin Timur	19
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur	20
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Kotawaringin Timur	22
Gambar 2.4	Peta Topografi Kabupaten Kotawaringin Timur	23
Gambar 2.5	Peta Geologi Kabupaten Kotawaringin Timur	27
Gambar 2.6	Peta Hidrologi Kabupaten Kotawaringin Timur	29
Gambar 2.7	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017	31
Gambar 2.8	PDRB Per Kapita Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012-2017 (dalam rupiah)	39
Gambar 2.9	Inflasi di Kota Sampit, Provinsi Kalteng, dan Nasional Tahun 2010-2017	40
Gambar 2.10	Perkembangan Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kab. Kotim Tahun 2010-2017	41
Gambar 2.11	Perkembangan IPM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017	43
Gambar 2.12	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017	44
Gambar 2.13	Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (dalam tahun) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017	44
Gambar 2.14	Usia Harapan Hidup (UHH) Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013- 2017	45
Gambar 2.15	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012-2017	46
Gambar 2.16	Ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011-2017	47



Gambar 2.17	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017 (dalam persen, berdasarkan PDRB ADHB)	86
Gambar 2.18	Perkembangan PMTB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017	88
Gambar 2.19	Struktur dan Laju Pertumbuhan PMTB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017	89
Gambar 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	109
Gambar 3.2	Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	110
Gambar 3.3	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	112
Gambar 3.4	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	115
Gambar 3.5	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	120
Gambar 3.6	Target dan Realisasi Belanja Belanja Hibah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	122
Gambar 3.7	Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	125
Gambar 3.8	Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017	126
Gambar 4.1	Pusat-pusat Kegiatan	183
Gambar 4.2a	Wilayah Pengembangan Produk Unggulan	184
Gambar 4.2b	Wilayah Pengembangan Produk Unggulan	185
Gambar 4.2c	Wilayah Pengembangan Produk Unggulan	185
Gambar 4.3	Pusat Perdagangan dan Jasa	186
Gambar 4.4	Kawasan Industri dan Pergudangan	186



Gambar 6.1	Identifikasi faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT	220
Gambar 6.2	Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah	221
Gambar 6.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur	222



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas menjadi salah satu kunci dalam mendorong pembangunan daerah, dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus pelaksanaan pembangunan. Penyusunan perencanaan yang terarah dapat mewujudkan pembangunan lebih berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan maupun sasaran pembangunan daerah, dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tingkat daerah yang disusun setiap 5 (lima) tahun sekali dan mutlak tersedia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak terpisahkan dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan Tahap III RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025, serta penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Kotawaringin H. SUPIAN HADI, S.Ikom dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Drs. H.M. TAUFIQ MUKRI, SH., MM. yang telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 dan 2018.

Perubahan struktur organisasi daerah yang didasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat



Daerah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri terdapat point penting terkait Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Maka berdasarkan Instruksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan evaluasi RPJMD guna penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 pada tahun 2018 sesuai dengan Perangkat Daerah yang baru.

Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 tahun 2106 tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2021. Hal lain yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah hasil



pengendalian dan evaluasi RPJMD 2016-2021 yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Kotawaringin tahun 2016-2021 menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai dasar penyusunan. Dasar tersebut telah diubah setelah terbitnya peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk merevisi RPJMD sesuai Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Perubahan kewenangan daerah yang berimplikasi pada perubahan kewenangan tupoksi PD terkait yang berdampak pada:
 - a. Capaian kinerja PD yang secara kumulatif berpengaruh pada capaian kinerja daerah;
 - b. Perubahan kemampuan daerah dalam melakukan pungutan sumber-sumber PAD yang secara kumulatif berpengaruh pada ruang fiskal daerah.
4. Hasil evaluasi atas pelaksanaan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 bahwa:
 - a. Secara makro banyak indikator kinerja sasaran yang seharusnya indikator *outcome* adalah indikator *output*;
 - b. Struktur penyusunan sasaran daerah yang masih banyak terdapat tumpang tindih dengan kewenangan teknis PD;



- c. Masih terdapat indikator yang tidak terukur (belum mengacu pada kaidah SMART-C).

Hasil dari evaluasi dokumen RPJMD yang telah dilaksanakan, menganjurkan Pemerintah Daerah untuk melakukan rasionalisasi indikator kinerja serta memstrukturalisasi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai upaya guna mencapai target kinerja daerah yang belum terpenuhi.

Mengingat bahwa perubahan RPJMD ini dilakukan pada tahun 2018 dimana masih tersisa tiga tahun masa jabatan di dalamnya, dengan demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 harus berpedoman kepada perubahan RPJMD dengan mengacu tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. RPJMD ini bersifat indikatif dan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Maka RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi seluruh alur pembangunan serta landasan dalam mewujudkan visi Kabupaten Kotawaringin Timur pada akhir periode pembangunan jangka menengah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105];
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 359);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025;



35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235).

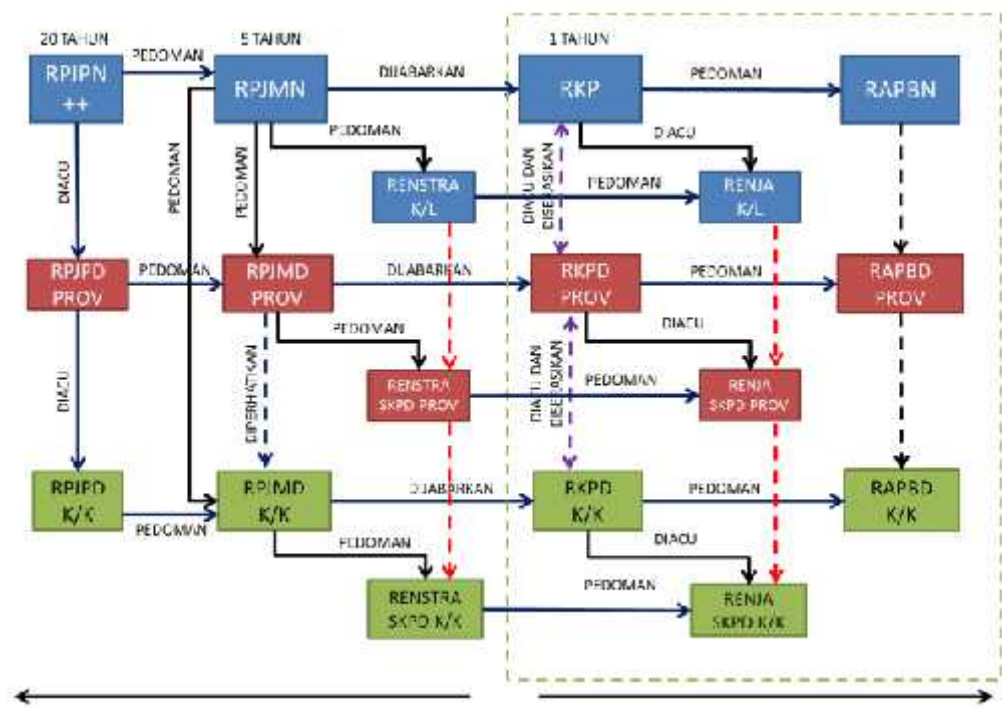
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik ditingkat pusat maupun daerah.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020 memuat keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dan diupayakan saling bersinergi seperti RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 -2035 dengan tetap memperhatikan arahan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.



RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan akan dipedomani dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk lebih jelasnya hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3.1 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019

Pengintegrasian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 kedalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur terutama adalah pada agenda pembangunan nasional yang dinamakan Trisakti yang terdiri dari 3 (tiga) Pilar yaitu Berdaulat Dalam Bidang Politik, Berdikari Dalam Bidang Ekonomi dan Berkepribadian Dalam Bidang Kebudayaan, yang kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) agenda pembangunan, yaitu (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) Meningkatkan

kualitas hidup manusia Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda pembangunan nasional tersebut kemudian menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah yang dituangkan sesuai dengan kewenangannya yang akan dijabarkan pada Bab. V. Disamping itu, program-program pembangunan kementerian yang direncanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur juga akan didukung dan disinergikan dengan program-program yang ada di masing-masing Perangkat Daerah Terkait. Keterkaitan misi dan isu strategis Kabupaten Kotawaringin Timur dengan misi dan isu strategis Nasional dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Keterkaitan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Misi Nasional

			Misi dalam RPJMD Kabupaten			
			Misi 1	Misi 2	Misi 3	Misi 4
Misi dalam RPJMN	1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan		√		√
	2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum	√		√	
	3	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim		√		√
	4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	√	√	√	√
	5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	√	√	√	√
	6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional		√		√
	7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	√		√	√

Sumber: RPJMN (diolah)

Keterangan:

Misi 1

:

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak

Misi 2

:

Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan



- Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
Misi 4 : Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa:

-) Misi 1 RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan misi ke 2, 4, 5, dan 7 pada RPJMN
-) Misi 2 RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan misi ke 1, 3, 4, 5, dan 6 pada RPJMN
-) Misi 3 RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan misi ke 2, 4, 5, dan 7 pada RPJMN
-) Misi 4 RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan misi ke 1, 3, 4, 5, 6, dan 7 pada RPJMN

1.3.2 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dengan RTRWN

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Sampit sebagai ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam sistem perkotaan nasional, sehingga dukungan terhadap pembangunan Kota Sampit terutama terhadap sarana dan prasarana perkotaan akan secara otomatis dilakukan oleh pemerintah pusat. Demikian juga dengan penetapan kawasan andalan Sampit-Pangkalan Bun dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, industri, dan pariwisata. Hal ini tentu saja akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk itu dalam kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur juga akan memprioritaskan program-program yang terkait.

1.3.3 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

Hingga disusunnya dokumen ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum menetapkan Perda tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, berdasarkan misi pembangunan dan isu strategis yang disampaikan dalam konsultasi publik RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dapat disusun keterkaitan seperti yang terlihat pada Tabel 1.2.



Tabel 1.2
Keterkaitan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Misi Provinsi

NO	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021	MISI RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
1	Misi 1 : Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi	Misi 2 : Mengembangkan Penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan submerdaya alam yang berwawasan lingkungan. Misi 4 : Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industry pengolahan, serta pariwisata dan budaya
2	Misi 2 : Pengelolaan Infrastruktur	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak Misi 2 : Mengembangkan Penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan submerdaya alam yang berwawasan lingkungan. Misi 4 : Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industry pengolahan, serta pariwisata dan budaya.
3	Misi 3 : Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai	Misi 2 : Mengembangkan Penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan submerdaya alam yang berwawasan lingkungan. Misi 4 : Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industry pengolahan,



NO	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021	MISI RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
		serta pariwisata dan budaya.
4	Misi 4 : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak Misi 2 : Mengembangkan Penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Misi 4 : Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industry pengolahan, serta pariwisata dan budaya.
5	Misi 5 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Misi 4 : Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industry pengolahan, serta pariwisata dan budaya
6	Misi 6 : Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak Misi 2 : Mengembangkan Penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan



NO	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021	MISI RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
		efisien Misi 4 : Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industry pengolahan, serta pariwisata dan budaya
7	Misi 7 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Misi 2 : Mengembangkan Penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Misi 4 : Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industry pengolahan, serta pariwisata dan budaya
8	Misi 8 : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Misi 2 : Mengembangkan Penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Misi 4 : Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industry pengolahan, serta pariwisata dan budaya

1.3.4 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dengan RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015, tentu saja mengakomodir Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai salah satu pengembangan wilayah di provinsi Kalimantan Tengah yang



merupakan wilayah yang strategis. Hal ini tergambar dari perencanaan penataan ruangnya maupun indikasi program prioritasnya dalam perwujudan Struktur Ruang, Pola Ruang, maupun Kawasan Strategisnya.

1.3.5 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dengan RTRWK Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035

Hubungan antara kedua dokumen ini sangat erat kaitannya terutama dalam indikasi program prioritas dalam perwujudan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis. Penetapan Sampit sebagai PKW dalam sistem perkotaan nasional, juga akan disambut dengan penetapan 3 (tiga) ibukota kecamatan (Parenggean, Samuda, dan Simpang Sebabi) yang diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Lingkungan Promosi (PKLp) untuk memperkuat keberadaan kota Sampit, juga penetapan ibu kota kecamatan lainnya sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), serta beberapa desa unggulan yang menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Tidak kalah penting dengan perencanaan jaringan transportasi baik darat, laut, maupun udara yang terus dikembangkan serta jaringan jalan, jaringan sumberdaya air pendukung lahan pertanian, pelayanan air minum, kelistrikan dan telekomunikasi. Dalam pola ruang pengembangan kawasan budidaya diharapkan akan sejalan dengan pelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan. Penetapan kawasan strategis kabupaten yaitu kawasan strategis perkotaan (Kota Sampit), Kawasan Industri Bagendang, Kawasan Agopolitan di Kecamatan Teluk Sampit, dan Kawasan Strategis Pariwisata Ujung Pandaran. Tiga kawasan strategis ini dipandang akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta permasalahan/isu strategis pembangunan. Hasil perubahan RPJMD ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah:



1. Perubahan RPJMD sebagai pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur didalam pelaksanaan pembangunan pada periode jabatan;
2. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah sampai dengan tahun 2021 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Perubahan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
4. Perubahan RPJMD sebagai upaya mempertajam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan ditingkat daerah dengan merasionalisasi indikator kinerja serta merestrukturisasi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan ditingkat daerah, tanpa mengubah misi, prioritas, target kinerja daerah dan target pendapatan daerah, agar mencapai target kinerja yang belum terpenuhi;
5. Perubahan substansi RPJMD berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah



dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun rencana.

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang akan diselenggarakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga disampaikan arah pengembangan wilayah yang terdiri dari strategi dan arah kebijakan yang menyesuaikan rencana pengembangan kawasan strategis.

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan kebijakan pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam RKPD tahun berkenaan.

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah.

BAB IX Penutup

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

A. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan satu dari 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Posisi geografis Kabupaten Kotawaringin Timur terletak di antara 112° 4' 3"-113° 16' 11" Bujur Timur dan 1° 11' 35"-3° 18' 8" Lintang Selatan dengan luas wilayah kurang lebih 1.679.600 ha. Luas wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut adalah luas wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002. Sedangkan luas wilayah fungsi berdasarkan perencanaan pemanfaatan ruang seluas kurang lebih 1.554.584,6 ha. Adapun batas-batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Katingan;
Sebelah Timur : Kabupaten Katingan;
Sebelah Selatan : Laut Jawa;
Sebelah Barat : Kabupaten Seruyan.

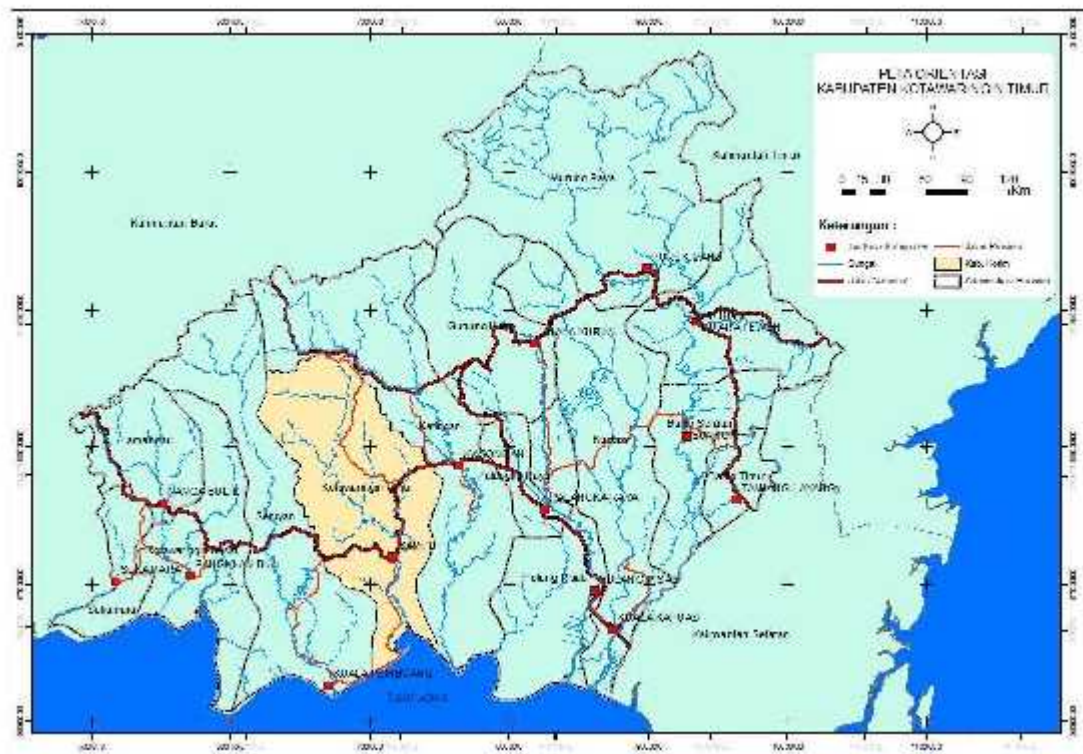
Sejak tahun 2011 Kabupaten Kotawaringin Timur terbagi atas 17 kecamatan. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat dilihat pada 2.1.

Tabel 2.1
Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur

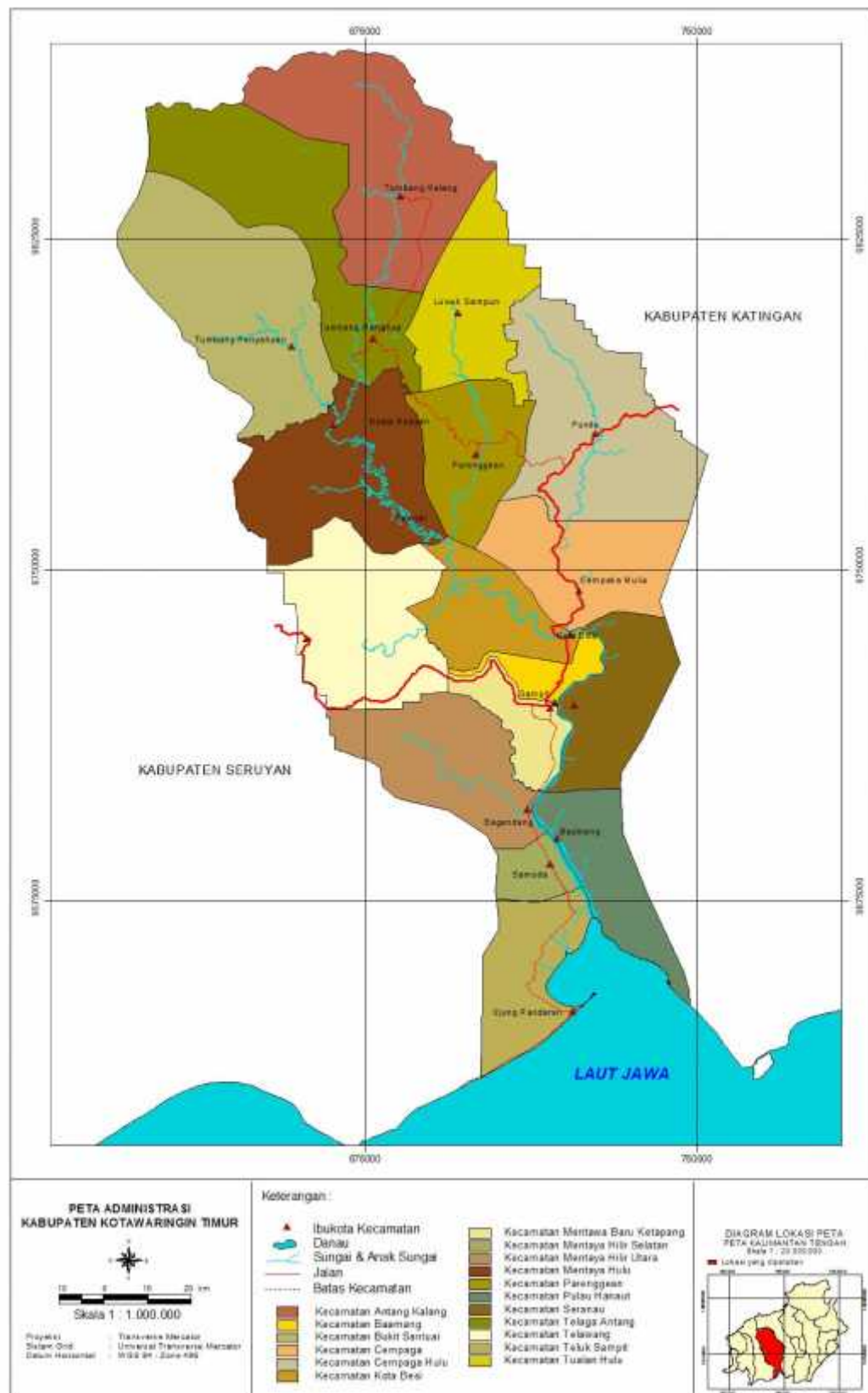
No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Km2)	Luas Berdasarkan Pemanfaatan Ruang (Ha)
1	Mentaya Hilir Selatan	Samuda	10	318,00	21.058,1
2	Teluk Sampit	Ujung Pandaran	6	610,00	66.449,4
3	Pulau Hanaut	Bapinang	14	620,00	62.515,6
4	Mentaya Hilir Utara	Bagendang	7	725,00	96.443,7
5	Mtw. Baru Ketapang	Ketapang	11	726,00	34.900,3
6	Baamang	Baamang	6	639,00	20.640,7
7	Seranau	Mentaya Seberang	6	548,00	71.115,8
8	Kota Besi	Kota Besi	11	1.889,00	63.581,2
9	Cempaga	Cempaka Mulia	8	1.253,00	88.297,1
10	Cempaga Hulu	Pundu	11	1.183,00	151.045,9
11	Parenggean	Parenggean	15	493,15	71.147,1
12	Mentaya Hulu	Kuala Kuayan	16	1.712,79	131.926,2

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Km2)	Luas Berdasarkan Pemanfaatan Ruang (Ha)
13	Antang Kalang	Tumbang Kalang	15	1.579,00	160.402,4
14	Bukit Santuai	Tb. Penyahuan	14	1.636,00	168.005,1
15	Telawang	Sebabi	6	317,00	116.412,3
16	Telaga Antang	Tumbang Mangkup	18	1.456,21	146.133,1
17	Tualan Hulu	Luwuk Sampun	11	1.456,21	84.510,8
	Luas Total		185	16.796,00	1.554.584,6

Sumber: KDA (BPS, 2017)



Gambar 2.1 Peta Orientasi Kabupaten Kotawaringin Timur



Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur

B. Topografi

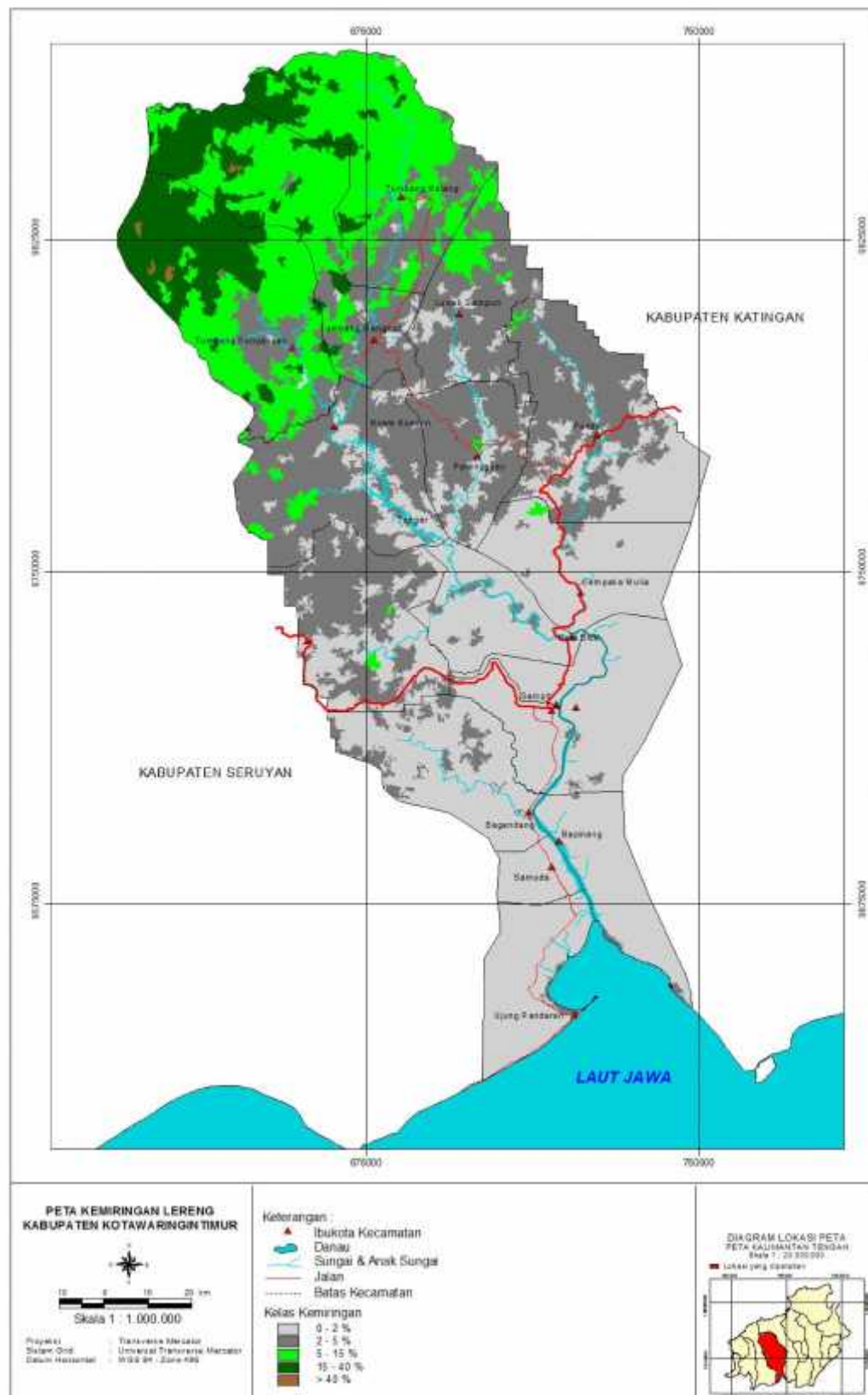
Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki topografi yang bervariasi, dapat dibagi dalam lima kelompok lereng yaitu 0-2%, 2-5%, 5-15%, 15-40%, dan > 40%. Wilayah Selatan didominasi oleh kemiringan lereng 0-2%, wilayah tengah didominasi kemiringan 2-5%, sedangkan wilayah Utara didominasi kemiringan lereng 5-15% dan 15-40%. Umumnya pembagian lini topografi di kelompokkan



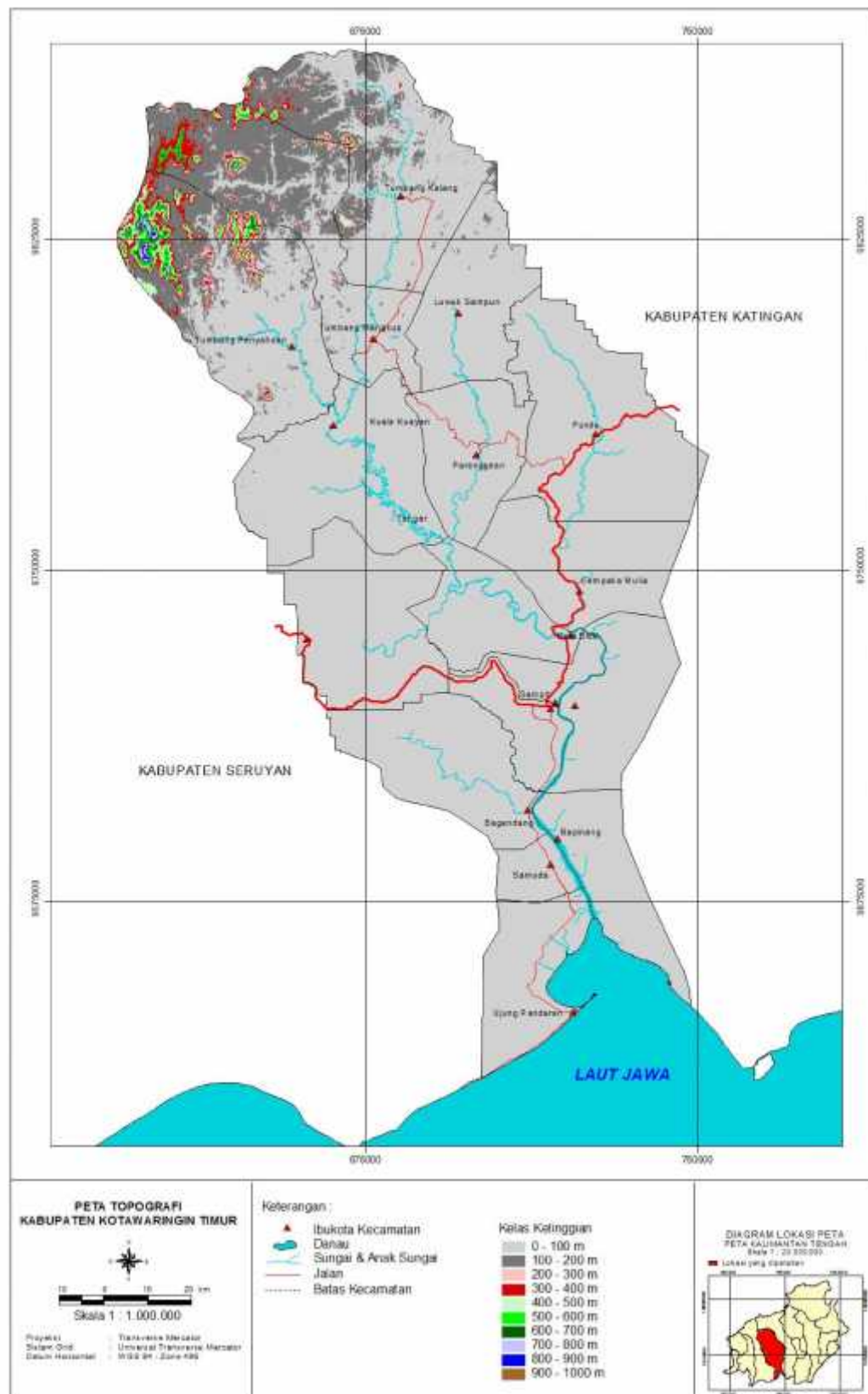
dalam dua zona, yaitu :

-) Wilayah Selatan dan Tengah dengan ketinggian tempat 0-100 m-dpl.
-) Wilayah Utara dengan ketinggian tempat bervariasi antara 0-1000 m-dpl, tempat tertinggi terdapat di Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan Telaga Antang, dan Kecamatan Bukit Santuai.

Daerah ini merupakan wilayah berbukit hingga pegunungan yang terdiri dari batuan intrusi masam terdapat di Bagian Utara, sedangkan Bagian Tengah sampai Selatan didominasi oleh dataran rendah. Dataran Bagian Tengah terdiri dari dome gambut serta dataran rendah endapan sungai (*fluvial*) serta backswamp atau rawa belakang di sepanjang aliran sungai. Dibagian selatan, dataran rendah didominasi oleh dataran rendah endapan pantai (*fluviomarine*) dan pesisir pantai.



Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Kutawaringin Timur



Gambar 2.4 Peta Topografi Kabupaten Kotawaringin Timur

C. Fisiografi

Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dibagi ke dalam beberapa wilayah fisiografis, yaitu:

1. Dataran rendah, endapan pantai

Wilayah ini terdapat di tepi pantai, tepatnya pantai yang berbatasan dengan Laut Jawa, yang berjarak 2-5 km dari pantai. Dataran ini terbentuk dari hasil



pengendapan pantai, yang berupa tanah kering atau sedikit tergenang dan memiliki tekstur kasar.

2. Dataran rendah, endapan sungai

Wilayah ini terdapat di tepian sungai yang berbelok-belok (*meander*) atau danau kecil. Letaknya agak tinggi, namun kadang-kadang tergenang dan banjir akibat limpahan air sungai. Dataran ini bertekstur tanah sedang sampai halus. Seluruh wilayah dataran rendah, baik yang berupa endapan sungai maupun endapan pantai, masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

3. Lahan gambut

Wilayah ini terletak di belakang wilayah endapan sungai (*levee*), yang terbentuk akibat hutan rawa monoton telah mencapai klomaks, sehingga terbentuk gambut yang cembung (*dome*).

4. Dataran rendah, batuan endapan pantai

Wilayah ini terletak agak ke hilir/tengah, terutama di sekitar Sungai Mentaya. Dataran ini membentang dari Pangkalan Bun sampai Palangkaraya terus ke timur. Pada wilayah ini air sulit mengalir keluar karena wilayah ini sangat datar, sehingga pada beberapa tempat drainase agak terhambat. Dataran ini memiliki tekstur tanah yang kasar.

5. Pegunungan/perbukitan batuan intrusi masam

Wilayah ini merupakan daerah patahan (*told*) dan lipatan (*fault*), terdapat di bagian hulu. Bentuk wilayah ini berbukit dan bergunung, yang didominasi oleh batuan endapan pasir dan liat dan diselingi dengan batuan intrusi yang umumnya masam.

6. Delta/Pulau

Merupakan daratan dengan luasan yang kecil di tengah laut maupun sungai.

7. Lain-lain

Bagian yang termasuk lain-lain adalah tubuh air, diantaranya danau dan rawa, yaitu merupakan depresi atau cekungan yang airnya masih dalam. Pada daerah ini belum sempat terbentuk gambut.

Kabupaten Kotawaringin Timur didominasi oleh pegunungan/ perbukitan intrusi masam dan dataran rendah batuan pantai. Pegunungan atau perbukitan terdapat pada bagian Utara wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pegunungan/perbukitan tersebut terdiri dari batuan intrusi dan endapan masam, sehingga memiliki kendala dalam pembudidayaan lahan.

Dataran rendah endapan pantai banyak ditemui pada bagian tengah dan pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain dataran rendah dengan batuan pantai, pada bagian tengah Kabupaten Kotawaringin Timur juga memiliki kondisi



fisiografis yang terdiri dari dome gambut, serta dataran rendah endapan sungai dan *backswamps* di sepanjang aliran sungai. Sedangkan pada bagian Selatan, fisiografis wilayahnya merupakan *dome* gambut dan dataran rendah endapan sungai. Pada bagian pesisir fisiografis wilayahnya terdiri dari dataran rendah endapan pantai. Kendala yang dihadapi Kabupaten Kotawaringin Timur terutama dalam membangun saluran air, dimana air sulit mengalir keluar serta kadang-kadang tergenang dan banjir.

D. Klimatologi

Kondisi iklim Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk beriklim tropis basah (lembab) dengan tipe B (menurut Schmidt dan Ferguson) dengan kelembaban nisbi berkisar antara 82%-89% dan suhu rata-rata bulanan berkisar antara 27°C-36°C.

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan curah hujan bervariasi. Pada daerah pedalaman kecenderungan curah hujannya tinggi sedang dikawasan pantai memiliki curah hujan sedang. Jumlah curah hujan rata-rata di wilayah kabupaten ini berkisar antara 1.934 mm/tahun.

E. Geologi

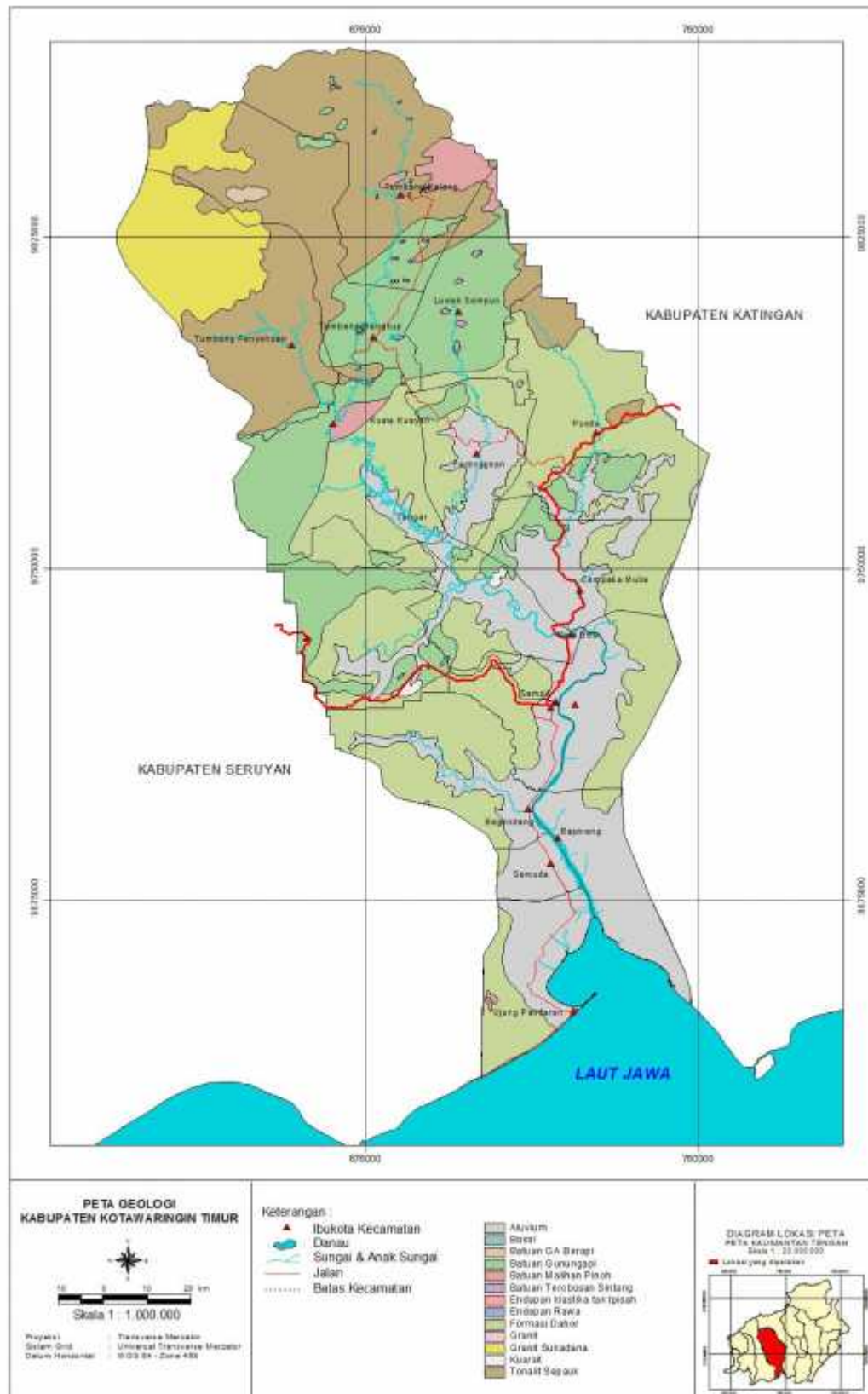
Geologi daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersusun oleh lima jenis formasi yaitu Formasi Dahor, Formasi Kuayan, Formasi Mentaya, Formasi Pembuang dan endapan Aluvial. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi masing-masing formasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Formasi Dahor dapat ditemui di sebagian besar selatan wilayah kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya pada bagian belakang disepanjang Daerah Aliran Sungai Mentaya. Satuan batuan (satuan *litologi*) penyusun formasi Dahor ini terdiri dari konglomerat dengan komponen fragmen kuarsif dan basal berselingan dengan batu pasir, batu lempung. Umur formasi ini diperkirakan Miosen Tengah sampai Pleistosen, berdasarkan korelasi dengan formasi Dahor dilembar Tewah (Sumintadipura, 1976). Tebal formasi ini diperkirakan 300 m yang diendapkan dilingkungan paralik.
- b. Formasi Kuayan terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya di Utara. Satuan batuan (satuan *litologi*) penyusun formasi Kuayan ini terdiri dari breksi dengan komposisi andesit dan basal, aliran lava, batu pasir tufaan dan tuf. Formasi ini tidak dapat ditentukan umurnya, tetapi di Kalimantan Barat, Van Emmichoven (1939) op. Cit. Margono U, dkk (1995) menemukan fosil di formasi ini berumur Trias.
- c. Formasi Mentaya terletak disekitar Kota Kuala Kuayan. Satuan batuan (satuan *litologi*) penyusun Formasi Mentaya ini dibagian bawah didominasi oleh batu

pasir sedangkan dibagian atas batu pasir arkosa berbutir halus-kasar, terdapat struktur silang siur (*cross bedding*) dan gelembur gelombang. Setempat terdapat sisipan konglomerat kuarsa dan batu lempung yang kadang-kadang mengandung batubara. Formasi ini diendapkan pada kala Eosen-Oligosen dalam lingkungan pengendapan litoral, setempat berupa rawa-rawa.

- d. Formasi Pembuang terletak dibagian selatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama di sekitar Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun Formasi Pembuang ini terdiri dari batupasir karbonan (*carbonaceous sandstone*), konglomerat (*conglomerate*), batu lanau (*siltstone*), batu lempung (*claystone*) dan gambut (*peat*).
- e. Endapan aluvial, tersusun oleh endapan delta (*deltaic deposit*) dan endapan klastika tak terpisahkan (*undifferentiated clastic deposit*). Endapan delta terdiri dari pasir kasar-halus (*coarse to fine grained sands*), lanau (*silt*) dan lumpur (*mud*). Sedangkan endapan klastika tak terpisahkan terdiri dari pasir (*sand*), lanau (*silt*), lempung (*clay*) dan gambut (*peat*). Struktur geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah struktur sesar/patahan (*fault*) dan kekar (*join*). Struktur patahan dapat memicu terjadinya bencana alam geologi. Daerah yang rawan terhadap bencana alam geologi ini antara lain Kecamatan Mentaya Hulu karena pada daerah ini terdapat struktur sesar/patahan. Potensi pertambangan bahan galian yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain batubara, bijih besi, emas primer (dengan asosiasi mineral perak dan atau mineral tembaga timah hitam atau seng), emas sekunder, kwarsa kristal (termasuk kecubung atau amethyst), bentonit, kaolin, pasir kwarsa, granit, basalt, gambut, dan tanah liat.

Selain itu, Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari berbagai macam batuan, endapan, dan di beberapa bagian terdapat sesar. Struktur geologi tersebut mengakibatkan wilayah ini memiliki cukup banyak potensi bahan galian tambang yang dapat dimanfaatkan, baik bahan galian A, B, maupun C. Bahan-bahan galian yang banyak terdapat di wilayah ini meliputi batubara, air raksa, emas, kaolin, bijih besi, pasir kwarsa, granit, gambut, bauksit, dan lain-lain. Potensi bahan galian ini tersebar hampir di seluruh wilayah.



Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Kotawaringin Timur

F. Hidrologi

Secara umum pola sungai di Kotawaringin Timur adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan demikian tinggi hingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah-daerah yang ada di sekitar aliran sungai,



khususnya di bagian hilir sungai.

Dalam Wilayah Kotawaringin Timur terdapat sungai besar yang dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai prasarana transportasi. Beberapa sungai tersebut dapat dilayari oleh sarana perhubungan seperti kapal, *speed boat*, dan *long boat*. Sungai besar tersebut antara lain yaitu : Sungai Mentaya, Sungai Cempaga, Sungai Tualan, Sungai Kuayan, Sungai Kalang, Sungai Sampit, Sungai Lenggana, Sungai Mentobar, Sungai Seranau, dan Sungai Penyahuan. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, cuci, kakus (mck), air minum, serta persawahan.

Selain air sungai, penduduk juga memanfaatkan air danau, rawa-rawa, dan air tanah untuk keperluan sehari-hari.

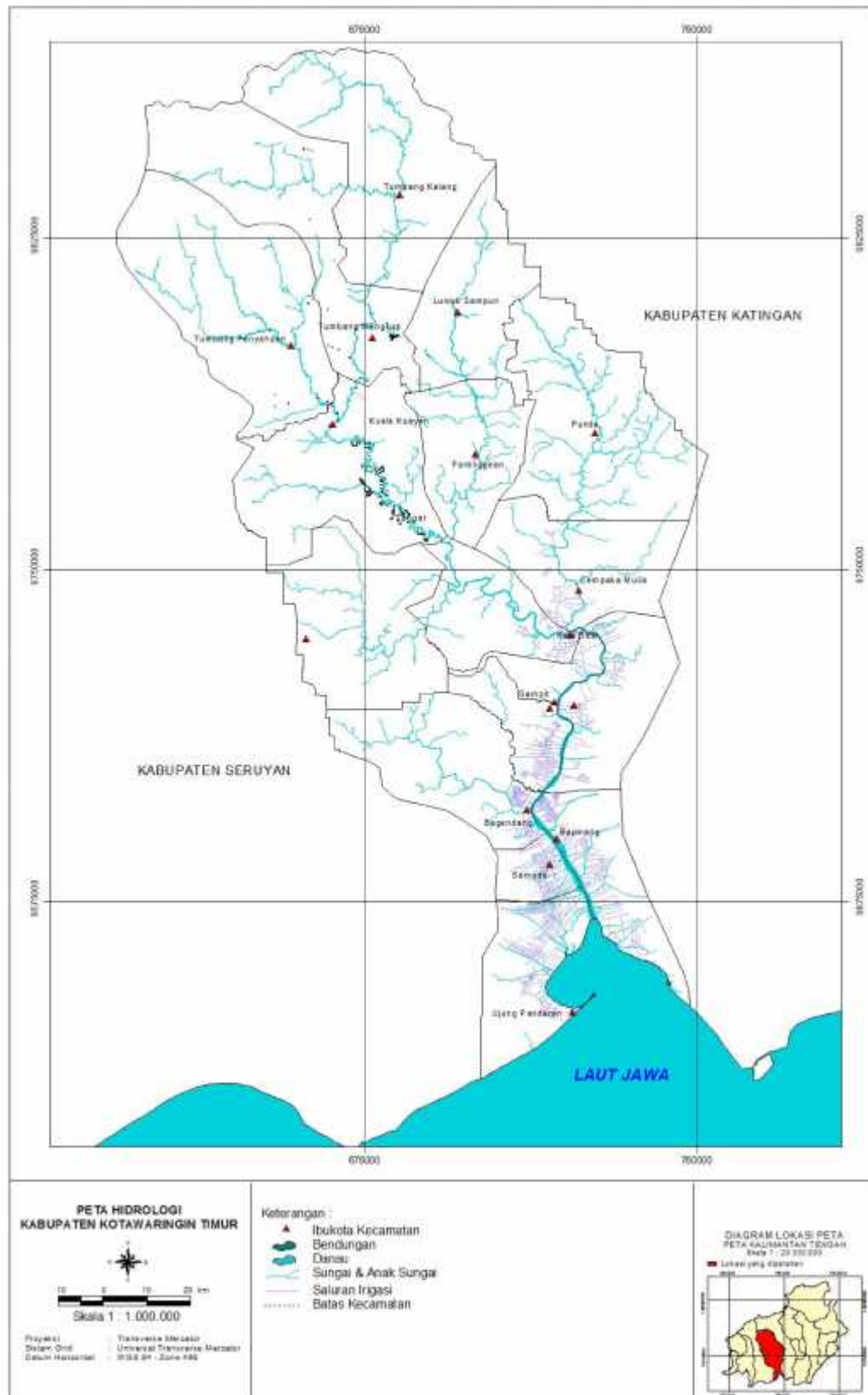
Tabel 2.2
Data Beberapa Sungai Besar di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Panjang yang dapat dilayari (Km)	Kedalaman (Km)	Lebar (m)
1	Mentaya	400	270	6	400
2	Cempaga	42	38	6	250
3	Sampit	46	40	6	200
4	Kuayan	48	40	6	200
5	Kalang	18	18	3	200
6	Seranau	21	21	3	200

Sumber: RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur

Sebaran danau paling banyak di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat di wilayah Kecamatan Mentaya Hulu. Danau tersebut sebenarnya merupakan bekas alur sungai lama yang saat ini telah berpindah alirannya.

Di wilayah Kecamatan Telaga Antang terdapat sebuah bendungan yang dibangun dengan memanfaatkan topografi dan pola aliran sungai di sekitarnya, yaitu Bendungan Tanjung Harapan.



Gambar 2.6 Peta Hidrologi Kabupaten Kotawaringin Timur

G. Tutupan Lahan

Tutupan lahan sedikit memberi gambaran pola penggunaan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Meskipun tidak serinci klasifikasi penggunaan lahan, jenis tutupan lahan bisa menggambarkan pola, sebaran, dan luas dari masing-masing jenis tersebut.

Berdasarkan data tutupan lahan dari Kementerian Kehutanan tahun 2017

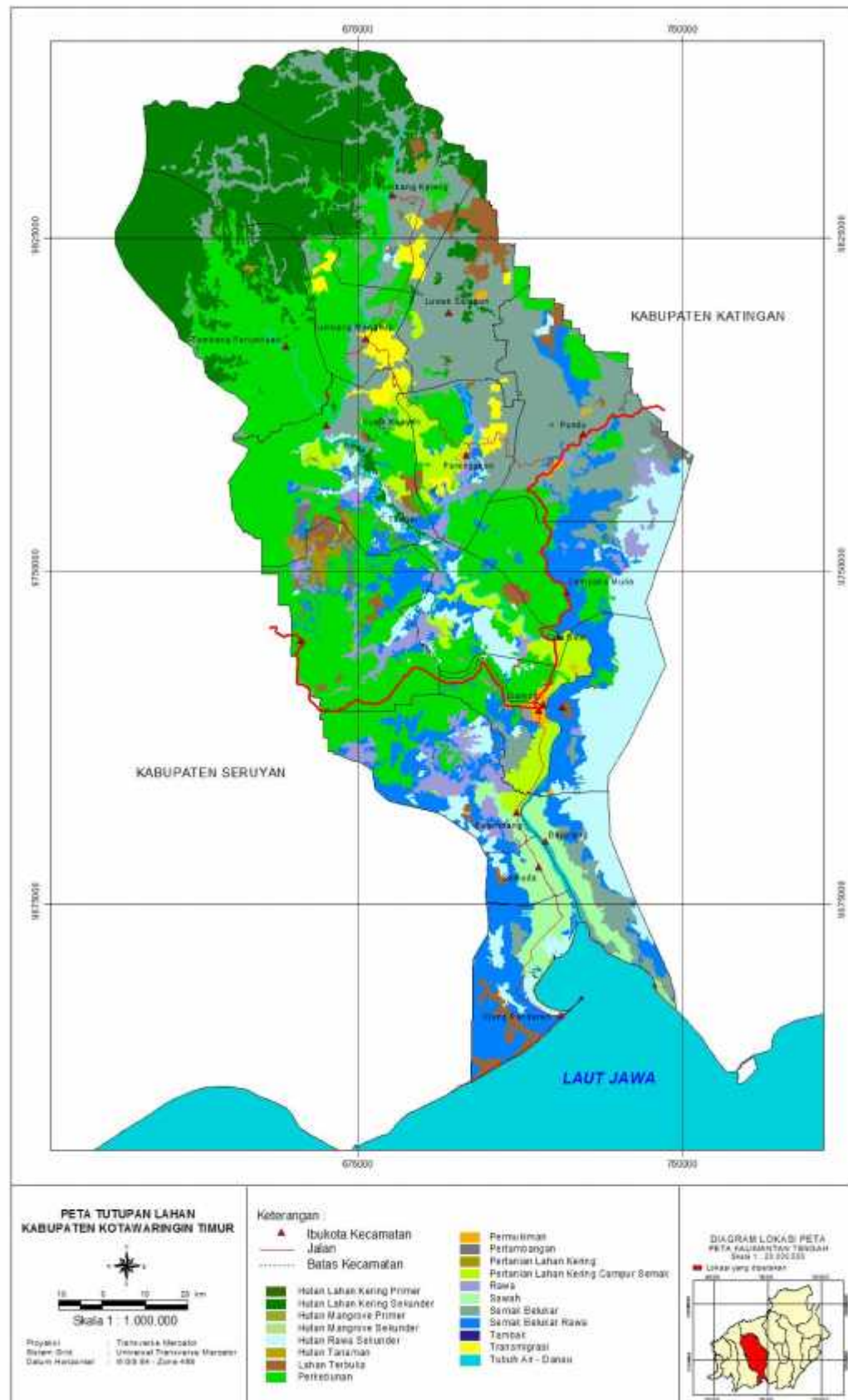


hasil interpretasi citra satelit, diperoleh informasi bahwa tutupan lahan terbesar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah perkebunan dengan luas 617.850 Ha dari luasan wilayah kabupaten, diikuti dengan Hutan Lahan Kering Primer seluas 234.472 Ha.

Tabel 2.3
Luas Tutupan Lahan Tahun 2017

Tutupan Lahan 2017	Luas Ha
Bandara/Pelabuhan	35
Hutan Lahan Kering Primer	65
Hutan Lahan Kering Sekunder	234.472
Hutan Mangrove Primer	249
Hutan Mangrove Sekunder	4.862
Hutan Rawa Sekunder	107.056
Hutan Tanaman	216
Lahan terbuka	36.803
Pemukiman	7.339
Perkebunan	617.850
Pertambangan	12.227
Pertanian Lahan Kering	51.465
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	125.443
Rawa	29.722
Sawah	7.443
Semak Belukar	142.813
Semak Belukar Rawa	157.126
Tambak	67
Transmigrasi	8.955
Tubuh Air	10.504
Total	1.554.713

Sumber: UPT KPHP Wilayah Kerja Kab. Kotim, 2017



Gambar 2.7 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017

H. Ekosistem Wilayah Pesisir

Ekosistem Mangrove

Ekosistem Hutan mangrove di Pesisir Kotawaringin Timur meliputi type/bentuk pantai; bentuk muara sungai/laguna dan bentuk pulau. Hutan mangrove ini merupakan habitat alami ikan dimana berfungsi sebagai tempat pemijahan ikan atau biota laut lainnya, perlindungan terhadap kehidupan pantai dan laut disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut dan pelindung usaha budidaya di belakangnya. Sebaran hutan mangrove di pesisir Kotawaringin Timur terdiri dari hutan mangrove primer terdapat di Kecamatan Teluk Sampit dan Kecamatan Pulau Hanaut, sedangkan hutan mangrove sekunder terdapat di Kecamatan P. Hanaut.

Di wilayah Pesisir dan Laut Kotawaringin Timur mempunyai jenis –jenis flora dan fauna yang beragam baik ukuran maupun jenis. Jenis-jenis flora diantaranya adalah bakau, cemara laut, jambu mete, kelapa, nipah dan galam serta jenis tumbuhan yang hidup sebagai semak belukar. Tumbuhan yang hidup di perairan yang tergolong plankton terutama chlorophyta, cyanophyta, diatomae, pyropphyta.

Jenis fauna yang ditemukan antara lain : Bekantan, siamang, ular rawa, burung elang, udang (*Penaeus monodon*), udang manis (*Penaeus semisulcatus*), udang putih (*Penaeus merguensis*), kepiting (*Scylla serrata*), rajungan (*Portunus pelagicus*), dan kerang-kerangan. Jenis ikan yang ditemukan antara lain : ikan kakap (*Lates calcarifer*), tembang (*Sardinella longicep*), tenggiri (*Scomberomerus commerson*), bambangan (*Lutjanus malabaricus*), kembung lelaki (*Rastrelliger kanagurta*), kembung perempuan (*Rastrelliger neglectus*), belanak (*Valamugil speigleri*), bawal putih (*Pampus argenteus*), tongkol (*Auxis thazard*), pari kembang (*Oryzias latipes*), pari burung (*Actomyces nichofie*), cucut hiu (*Hemigaleus balfour*), sembilang (*Plotosus cavatus*), telang (*Scomberomerus guttatus*), selungsungan (*Scomberomerus australis*), selangat (*Dorosoma chacunda*) dan bandeng (*Chanos chanos*).

Ekosistem mangrove dapat dibedakan dalam tiga tipe utama, bentik antai/delta, bentuk muara sungai/laguna, dan bentuk pulau. Ketiga tipe tersebut terwakili di sebagian besar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang paling produktif dan merupakan sumber hara untuk perikanan pantai. Hutan ini menyokong kehidupan sejumlah besar spesies binatang dengan menyediakan tempat berbiak, berpijah, dan makan. Spesies tersebut meliputi berbagai jenis burung, ikan, kerang dan krustasea seperti udang, kepiting. Hutan bakau juga berfungsi sebagai pelindung pantai dan penstabilisasi serta berperan sebagai penyangga pencegah erosi yang disebabkan

oleh arus, gelombang, dan angin. Mereka juga memainkan peranan penting sebagai pengendali banjir dan pemelihara permukaan air di bawah tanah.

Ada tiga tipe akar yang biasa dijumpai pada hutan mangrove, yaitu akar lutut, akar nafas dan akar tunjang. Jenis hutan mangrove (bakau) yang ditemukan di pesisir wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Secara langsung atau tidak langsung, hutan mangrove melindungi dan menyediakan makanan bagi komunitas binatang, termasuk burung-burung pantai dan banyak organisme laut. Hutan mangrove mempunyai fauna yang kaya akan udang-udangan yang besar dan moluska, juga merupakan tempat yang penting untuk memijah dan pembibitan bagi udang dan banyak jenis ikan pelagis bernilai komersil penting.

Jenis mangrove yang dominan ditemukan pada kawasan pesisir pantai Kotawaringin Timur terdapat disebelah timur (pesisir teluk sampit) antara lain Api-api (*Avicennia alba*) dan bakau-bakauan (*Rhizophora spp.*). Sementara dibagian ujung timur didominasi jenis cemara laut. Pada pantai sebelah barat jenis nipah (*Nympae, sp.*) mendominasi vegetasi mangrove sebelah dalam, sementara pada arah keluar mendekati pantai, jenis Api-api (*Avicennia alba*) dan bakau-bakauan (*Rhizophora spp.*) yang lebih dominan. Bagian kawasan pantai paling luar yang berbatasan dengan laut umumnya berpasir dan tidak ditumbuhi vegetasi.

Pada kawasan Timur Selatan tidak ditemukan komunitas mangrove yang berarti, sedangkan pada sebelah utara teluk sampit terdapat endapan/sedimen lumpur yang mulai ditumbuhi oleh vegetasi mangrove secara alamiah dari jenis Api-api dan bakau. Dipantai barat, sedimenasi yang cukup kuat juga terjadi sehingga mengakibatkan lingkungan dermaga tradisional milik masyarakat setempat dan pertumbuhan komunitas mangrove yang cukup besar dari jenis api-api, bakau, rambai. Bibit mangrove yang tumbuh disebelah utara teluk sampit berpeluang besar berasal dari pantai barat teluk sampit yang cukup rapat ditumbuhi beberapa mangrove.

Ekosistem Terumbu Karang (Coral Reefs)

Komunitas terumbu karang tidak ditemukan pada perairan laut dangkal (pesisir) dalam wilayah kajian. Berdasarkan informasi nelayan, komunitas terumbu karang ditemukan sekitar 3 mil dari pantai, namun demikian keberadaan terumbu karang harus diperhatikan karena selain sebagai komunitas penting dalam ekosistem perairan laut (sebagai habitat berbagai jenis biota laut, *nursery area*, *pawning area* serta *feeding area* dan bernilai ekonomi penting, juga memiliki nilai ekologis penting sebagai *natural barrier* bagi daratan karena fungsinya menjadi *breaker water* yang melindungi daratan dari peluang abrasi gelombang.



Estuaria

Estuaria adalah daerah litoral yang agak tertutup (teluk) di pantai, tempat sungai bermuara dan air tawar dari sungai bercampur dengan air asin dari laut, biasanya berkaitan erat dengan pertemuan perairan sungai dengan air laut. Produktivitas estuaria dan lautan dangkal sekitar pantai menunjang perikanan pantai yang sangat kaya. Sungai Mentaya secara terus menerus membawa endapan, mineral dan zat-zat hara ke dalam estuaria, memperbaharui bahan-bahan yang hilang untuk memelihara produktivitas yang tinggi. Produktivitas estuaria lebih dari dua kali yang didapatkan kebanyakan ekosistem darat dan dua puluh kali lebih besar dari pada samudra terbuka (laporan ITB tahun 2002).

2.1.2 Aspek Demografi

Perencanaan pembangunan selalu melihat dan mempertimbangkan faktor-faktor pendukungnya, sehingga dapat mewujudkan output rencana yang dapat mengakomodasi kebutuhan yang diharapkan. Dalam menyusun rencana pembangunan, faktor penduduk menjadi salah satu pertimbangan, sehingga disajikan data kependudukan dalam bentuk *time series*.

A. Jumlah dan Sebaran Penduduk

Tabel 2.4
Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Tahun 2017

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Laki-laki		Jumlah	Sex Ratio
			Laki- laki	Perempuan		
1	Mentaya Hilir Selatan	6.597	12.279	11.911	24.190	103,09
2	Teluk Sampit	2.605	5.382	5.009	10.391	107,45
3	Pulau Hanaut	4.523	9.195	8.799	17.994	104,50
4	Mentawa Baru Ketapang	23.614	45.058	41.781	86.839	107,84
5	Seranau	2.762	5.618	5.201	10.819	108,02
6	Mentaya Hilir Utara	5.239	9.639	8.068	17.707	119,47
7	Kota Besi	4.620	10.050	9.427	19.477	106,61
8	Telawang	5.530	12.230	9.643	21.873	126,83
9	Baamang	15.202	30.223	28.791	59.014	104,97
10	Cempaga	5.432	13.507	12.616	26.123	107,06
11	Cempaga Hulu	7.550	17.169	14.687	31.856	116,90
12	Parenggean	8.396	15.810	13.333	29.143	118,58
13	Tualan Hulu	3.807	15.801	12.994	28.795	121,60
14	Mentaya Hulu	8.187	6.812	5.792	12.604	117,61
15	Bukit Santuai	2.797	9.027	7.231	16.258	124,84
16	Antang Kalang	4.450	6.765	5.196	11.961	130,20
17	Telaga Antang	5.876	11.274	9.776	21.050	115,32
Total		117.187	235.839	210.255	446.094	112,17

Sumber: BPS, 2018



B. Jumlah Dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kotawaringin Timur dari tahun 2012 hingga 2016 mengalami peningkatan. Data kependudukan yang digunakan sebagai dasar pengamatan kecenderungan pertumbuhan penduduk adalah data kependudukan dalam kurun waktu 2012–2016.

Tabel 2.5
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Tiap Kecamatan Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2012-2016

No	Kecamatan	2012		2013		2014		2015		2016	
		Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%
1	Mentaya Hilir Selatan	21.314	(0,32)	22.327	4,54	22.822	2,17	23.287	2,00	23.750	1,99
2	Teluk Sampit	9.155	(1,04)	9.591	4,55	9.803	2,16	10.003	2,00	10.201	1.98
3	Pulau Hanaut	15.855	(2,89)	16.609	4,54	16.977	2,17	17.324	2,00	17.667	1,98
4	Mentawa Baru Ketapang	78.183	(6,99)	81.526	4,10	82.981	1,75	84.313	1,58	85.623	1,55
5	Seranau	9.740	(1,48)	10.157	4,11	10.339	1,76	10.504	1,57	10.667	1,55
6	Mentaya Hilir Utara	16.050	(0,39)	16.712	3,96	16.988	1,62	17.237	1,44	17.482	1,42
7	Kota Besi	15.841	0,33	16.880	6,16	17.528	3,70	18.169	3,53	18.823	3,60
8	Telawang	17.789	(1,51)	18.956	6,16	19.684	3,70	20.404	3,53	21.140	3,61
9	Baamang	52.579	(3,68)	54.950	4,31	56.045	1,95	57.063	1,78	58.068	1,76
10	Cempaga	20.470	3,78	21.986	6,90	22.998	4,40	24.014	4,23	25.063	4,37
11	Cempaga Hulu	24.961	(0,11)	26.811	6,90	28.045	4,40	29.284	4,23	30.563	4,37
12	Parenggean	36.410	(2,47)	26.330	(38,28)	27.582	4,54	28.114	1,89	28.643	1,88
13	Tualan Hulu			11.768		11.321	(3,95)	11.539	1,89	11.756	1,88
14	Mentaya Hulu	29.165	(6,13)	26.799	(8,83)	27.252	1,66	27.778	1,89	28.300	1.88
15	Bukit Santuai	8.962	4,89	9.827	8,80	10.477	6,20	11.152	6,05	11.863	6,38
16	Antang Kalang	29.389	(4,24)	15.069	(95,03)	15.387	2,07	15.684	1,89	15.979	1,88
17	Telaga Antang			19.402		19.922	2,61	20.307	1,90	20.688	1,88
Jumlah			385.863	(2,90)	4,89	416.151	2,51	426.176	2,35	436.276	2,37

Sumber: BPS, 2018

Keterangan:

% : pertumbuhan penduduk dalam persen

C. Kepadatan Penduduk

Tabel 2.6
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Per
Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk/km
1	Mentaya Hilir Selatan	24.190	318,00	76,07
2	Teluk Sampit	10.391	610,00	17,03
3	Pulau Hanaut	17.994	620,00	29,02
4	Mentawa Baru Ketapang	86.839	726,00	119,61



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk/km
5	Seranau	10.819	548,00	19,74
6	Mentaya Hilir Utara	17.707	725,00	24,42
7	Kota Besi	19.477	1.889,00	10,31
8	Telawang	21.873	317,00	69,00
9	Baamang	59.014	639,00	93,35
10	Cempaga	26.123	1.253,00	20,85
11	Cempaga Hulu	31.856	1.183,00	26,93
12	Parenggean	29.143	493,15	59,10
13	Tualan Hulu	28.795	1.090,85	26,40
14	Mentaya Hulu	12.604	1.712,79	7,36
15	Bukit Santuai	16.258	1.636,00	9,94
16	Antang Kalang	11.961	1.579,00	7,58
17	Telaga Antang	21.050	1.456,21	14,46
Total		446.094	16.796,00	26,56

Sumber: BPS, 2018; diolah

D. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Kotawaringin Timur Menurut Kelompok Umur,
Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
0-4	22.158	21.598	43.756	102,5928
5-9	20.803	19.959	40.762	104,2287
10-14	20.239	18.992	39.231	106,5659
15-19	19.712	18.584	38.296	106,0697
20-24	20.750	18.765	39.515	110,5782
25-29	22.328	19.379	41.707	115,2175
30-34	22.014	19.862	41.876	110,8348
35-39	21.500	18.428	39.928	116,6703
40-44	19.359	16.074	35.433	120,4367
45-49	15.377	12.451	27.828	123,5001
50-54	11.632	9.168	20.800	126,8761
55-59	8.378	6.644	15.022	126,0987
60-64	5.370	4.292	9.662	125,1165
65+	6.219	6.058	12.277	102,6576
Jumlah	235.839	210.254	446.093	112,1686

Sumber: BPS, 2018; diolah

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam Pembangunan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Dalam bagian ini akan diuraikan



beberapa indikator yang menggambarkan tingkat Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur diarahkan untuk mencapai pertumbuhan yang stabil, menjamin pemerataan dan mendorong perluasan kesempatan berusaha sehingga secara simultan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. Secara makro hal ini dicerminkan oleh peningkatan pendapatan per kapita yang diikuti dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berada diatas tujuh persen dalam empat tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukan tren atau kecenderungan positif seperti yang terlihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017

Tahun	PDRB ADHK Tahun 2010		PDRB per Kapita ADHK Tahun 2010 (rupiah)	PDRB per Kapita ADH Berlaku (rupiah)
	Jumlah (juta rupiah)	Pertumbuhan (%)		
2013	14.006.208,40	12,70	11.968.352,30	7,79
2014	15.363.977,50	8,47	12.851.015,70	7,37
2015	17.292.454,30	12,99	13.835.997,90	7,66
2016*	19.622.842,90	NA	14.932.700,00	7,93
2017**	22.429.623,10	NA	16.126.058,20	7,99

Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

Sumber: KDA 2018 (BPS, 2018, Diolah)

Tabel 2.8 memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami percepatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Percepatan tersebut lebih dikarenakan adanya pertumbuhan positif yang signifikan pada beberapa lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 adalah pengadaan listrik dan gas yakni sebesar 13,18 persen. Lebih detail dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,21	8,64	8,64	6,90	8,64
2. Pertambangan dan pengalihan	62,08	(18,72)	9,42	10,37	9,42
3. Industri pengolahan	3,82	13,53	8,80	11,19	8,80
4. Pengadaan listrik dan gas	6,52	30,49	13,18	4,47	13,18
5. Pengad an air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	3,10	2,56	5,41	0,86	5,41
6. Konstruksi	4,77	11,93	5,06	4,17	5,06
7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	2,84	10,25	8,07	8,70	8,07
8. Transportasi dan pergudangan	15,62	0,35	12,21	9,08	12,21



Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,79	11,57	6,74	5,21	6,74
10. Informasi dan komunikasi	10,73	18,63	3,48	3,52	3,48
11. Jasa keuangan dan asuransi	9,30	8,96	3,01	7,06	3,01
12. Real estate	8,10	6,34	5,04	4,80	5,04
13. Jasa perusahaan	7,60	4,01	5,26	5,50	5,26
14. Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	3,90	5,64	0,12	(0,28)	0,12
15. Jasa pendidikan	5,61	7,30	5,35	4,14	5,35
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6,82	8,29	3,98	4,90	3,98
17. Jasa lainnya	4,18	8,47	5,85	6,05	5,85
Produk Domestik Regional Bruto	7,79	7,37	7,66	7,93	7,99

Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

Sumber : PDRB Kab. Kotim Tahun 2017 (BPS, 2018) dan KDA 2018 (BPS, 2018)

B. Struktur Ekonomi

Berdasarkan data tentang kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur, struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2013 hingga tahun 2017 tidak mengalami perubahan. Tiga lapangan usaha yang secara konsisten menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB dari tahun 2013 hingga tahun 2016 yaitu pertama adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; kedua adalah industri pengolahan; dan ketiga adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sedangkan pada tahun 2017 yaitu pertama industri pengolahan; kedua adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan ketiga adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Lebih detail dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	22,31	23,24	22,45	22,33	21,56
2. Pertambangan dan penggalan	8,78	4,00	3,00	3,08	3,09
3. Industri pengolahan	20,24	21,98	22,00	22,20	23,56
4. Pengadaan listrik dan gas	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05
5. Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
6. Konstruksi	8,91	9,40	9,85	9,65	9,44
7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	15,26	16,85	17,22	17,40	17,92
8. Transportasi dan pergudangan	10,20	9,93	10,46	10,89	10,73
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,25	1,31	1,41	1,40	1,34
10. Informasi dan komunikasi	0,68	0,74	0,72	0,68	0,62
11. Jasa keuangan dan asuransi	3,83	4,00	3,91	3,68	3,59
12. Real estate	1,53	1,59	1,58	1,56	1,52
13. Jasa perusahaan	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03
14. Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	2,27	2,23	2,38	2,16	1,91
15. Jasa pendidikan	2,96	2,93	3,07	3,08	2,85
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,96	1,04	1,07	1,03	1,01
17. Jasa lainnya	0,64	0,65	0,67	0,66	0,65
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

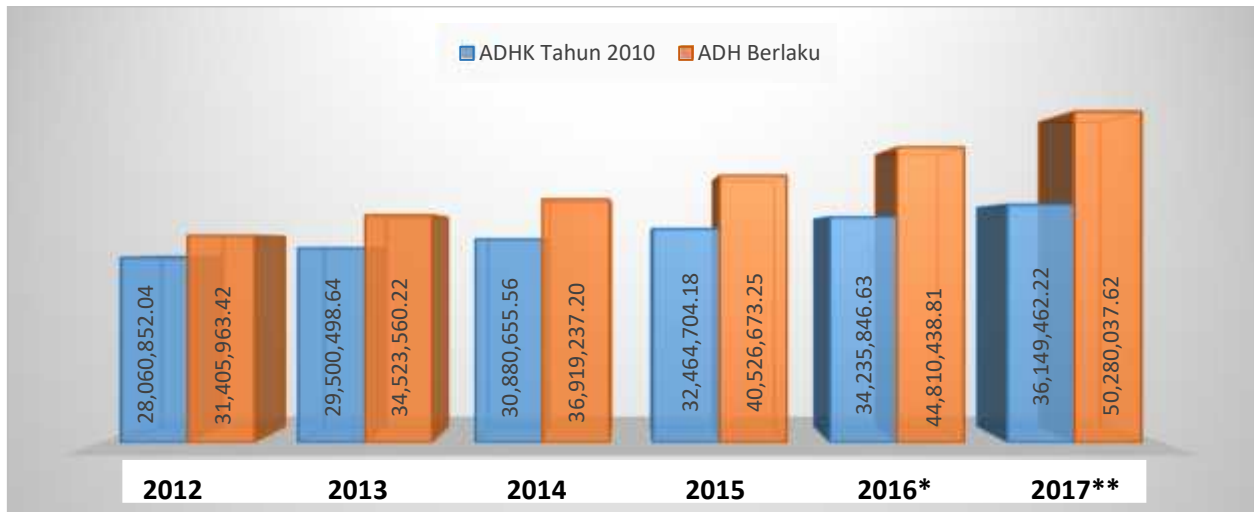
*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

Sumber: PDRB Kab. Kotim Tahun 2017 (BPS, 2018)

C. PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Variabel yang dipergunakan untuk melihat pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur adalah PDRB per Kapita. Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2012 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 2.8 di bawah ini:



Sumber: KDA 2018 (BPS, 2018)

Keterangan:

*) : Angka sementara

***) : Angka sangat sementara

Gambar 2.8 PDRB Per Kapita Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012-2017 (dalam rupiah)

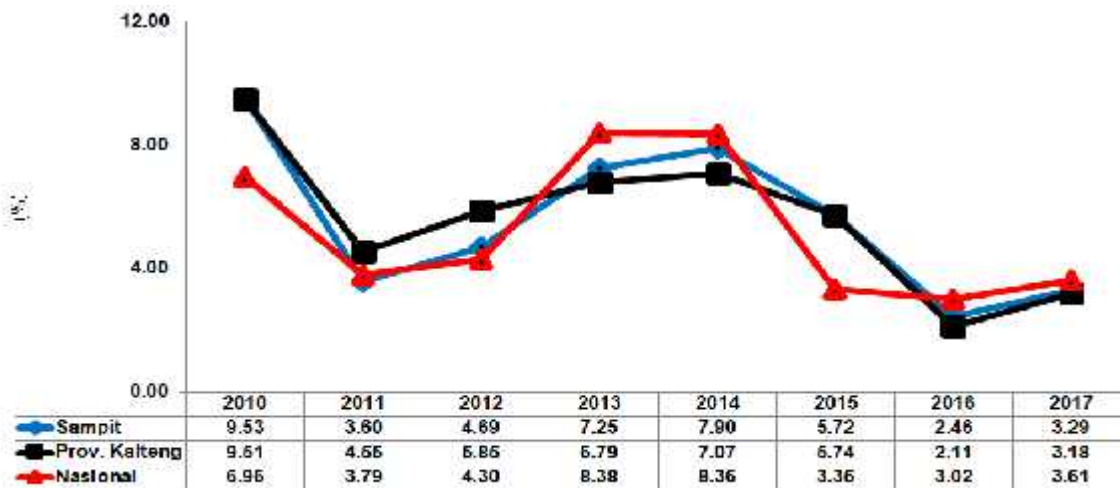
PDRB per kapita Kabupaten Kotawaringin Timur cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Gambar 2.8 memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 terjadi peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 10,35 persen atau terjadi peningkatan dari 44,81 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 50,28 juta rupiah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan PDRB per Kapita, tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur meningkat.

D. Inflasi

Secara konseptual, inflasi terjadi karena aktivitas pada sektor moneter dan riil. Laju inflasi juga dapat dicermati dari sisi penawaran dan permintaan. Berdasarkan sisi penawaran, sumber inflasi karena naiknya biaya produksi (*cost-push-inflation*) seperti kenaikan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, peningkatan biaya transportasi serta kelangkaan ketersediaan barang akibat pengaruh cuaca. Sedangkan dari sisi permintaan, laju inflasi tergantung pada sisi



belanja konsumen yang berlebihan (*demand-pull-inflation*). Perkembangan inflasi di Kota Sampit dari tahun 2010 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 2.9.



Sumber: BPS Provinsi Kalteng

Gambar 2.9 Inflasi di Kota Sampit, Provinsi Kalteng, dan Nasional Tahun 2010-2017

Perkembangan inflasi Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun ke tahun masih fluktuatif, tercatat tingkat inflasi pada tahun 2017 sebesar 3,29%. Angka tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi Nasional, namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Tengah. Penyebab inflasi di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah antara lain karena masih tingginya pemasukan kebutuhan pokok dari daerah lain maupun dari luar pulau Kalimantan. Pada tahun 2017 tingkat inflasi berada pada tingkat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Timur harus dipercepat sehingga meminimalkan menurunnya daya beli masyarakat.

E. Tingkat Kemiskinan

Secara umum tren jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Timur terus menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Timur mencapai 31.369 jiwa dan turun menjadi 28.400 jiwa pada tahun 2011. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan kembali menjadi 26.900 jiwa. Pada tahun 2013 menurun dari sisi persentase, tapi naik dari sisi jumlah penduduknya yaitu menjadi 28.000 jiwa, hal ini diakibatkan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya garis kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Timur dan tahun 2014 turun lagi dari persentase dan jumlah penduduknya menjadi 27.900 jiwa. Pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 27.260 jiwa, selajutnya pada tahun 2016 menjadi 27.390 jiwa dan 27.700 jiwa pada tahun 2017. Untuk lebih jelas



dapat dilihat pada Gambar 2.10.



Sumber: TNP2K, Basis Data Terpilih untuk (2018)

Gambar 2.10 Perkembangan Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kab. Kotim Tahun 2010-2017

Jumlah keluarga miskin dan jumlah penduduk miskin berdasarkan Agregat Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 *by name by address* per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.10 dan 2.11.

**Tabel 2.11
Jumlah Rumah Tangga Menurut Status Kesejahteraan Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2015**

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga				
	Desil 1 *)	Desil 2 *)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	Total
Mentaya Hilir Selatan	130	819	1.206	760	2.915
Teluk Sampit	81	567	639	210	1.497
Pulau Hanaut	201	848	962	495	2.506
Mentawa BaruKetapang	59	427	1.003	1.151	2.640
Seranau	213	703	679	339	1.934
Mentaya Hilir Utara	58	393	581	401	1.433
Kota Besi	206	659	682	397	1.944
Telawang	8	71	136	152	367
Baamang	28	342	910	1.198	2.478
Cempaga	118	567	668	393	1.746
Cempaga Hulu	46	301	627	450	1.424
Parenggean	19	153	422	709	1.303
Tualan Hulu	5	84	310	447	846
Mentaya Hulu	90	371	405	268	1.134
Bukit Santuai	148	373	169	67	757
Antang Kalang	81	451	447	467	1.446
Telaga Antang	36	279	565	807	1.687
Jumlah	1.527	7.408	10.411	8.711	28.057

Sumber: TNP2K, Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (2015)



Tabel 2.12
Jumlah Individu Menurut Status Kesejahteraan Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2015

Nama Kecamatan	Jumlah Individu				
	Desil 1 *)	Desil 2 *)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	Total
Mentaya Hilir Selatan	679	3.173	3.921	1.579	9.352
Teluk Sampit	451	2.454	1.962	429	5.296
Pulau Hanaut	1.130	3.578	3.092	1.031	8.831
Mentawa BaruKetapang	353	2.097	4.153	3.347	9.950
Seranau	1.078	2.686	2.242	822	6.828
Mentaya Hilir Utara	339	1.786	2.130	1.073	5.328
Kota Besi	1.132	2.686	2.418	1.150	7.386
Telawang	48	374	566	327	1.315
Baamang	166	1.780	3.907	3.696	9.549
Cempaga	683	2.550	2.337	869	6.439
Cempaga Hulu	288	1.538	2.470	1.171	5.467
Parenggean	111	659	1.666	2.137	4.573
Tualan Hulu	36	385	1.129	1.397	2.947
Mentaya Hulu	561	1.781	1.561	777	4.680
Bukit Santuai	938	1.393	376	222	2.929
Antang Kalang	487	1.932	1.429	1.358	5.206
Telaga Antang	222	1.383	2.353	2.470	6.428
Jumlah	8.702	32.235	37.712	23.855	102.504

Sumber: TNP2K, Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (2015)

Catatan

- Desil 1: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)
- Desil 2: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11%-20% terendah di Indonesia)
- Desil 3: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21%-30% terendah di Indonesia)
- Desil 4: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31%-40% terendah di Indonesia)

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

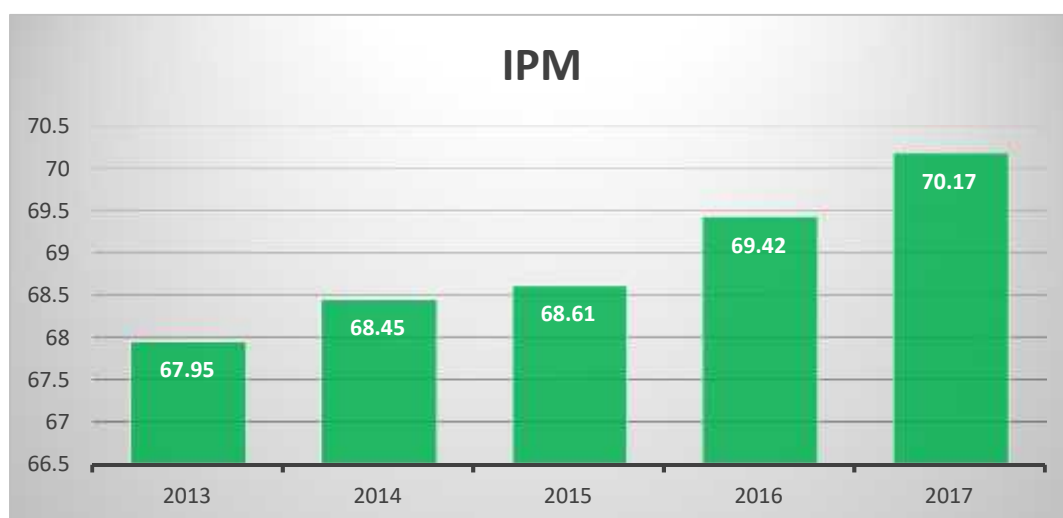
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan sosial sehingga warganya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan PDRB per kapita saja melainkan juga diukur dari capaian Pembangunan Manusia yang meliputi Pendidikan dan Kesehatan. Untuk melihat keberhasilan Pembangunan Manusia manusia tersebut digunakan Indeks pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks yang menggambarkan capaian

disektor kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus.

A. Aspek Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator makro yang mencerminkan capaian pembangunan manusia di bidang Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi. Kemajuan perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Kotawaringin Timur setiap tahun mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan hal ini dapat dilihat dari Angka IPM Kotawaringin Timur hanya mengalami sedikit peningkatan dari 67,95 pada tahun 2013 dan 68,45 pada Tahun 2014 pada 68,61 pada Tahun 2015 menjadi 69,42 pada Tahun 2016 serta menjadi 70,17 pada tahun 2017. Namun demikian dalam jangka panjang IPM bila dibandingkan dengan Tahun 2013, maka kenaikan yang terjadi pada Tahun 2017 terlihat cukup signifikan, Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dipahami, mengingat dampak dari investasi di sektor kesehatan dan pendidikan khususnya terhadap peningkatan indikator penyusun IPM terlihat secara nyata dalam jangka panjang.



Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur

Gambar 2.11 Perkembangan IPM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017

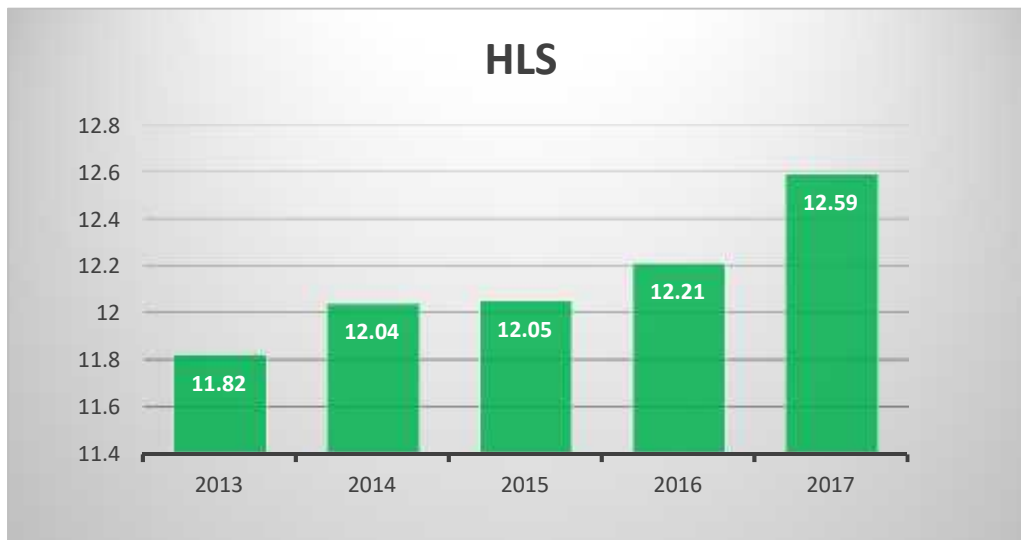
Dengan meningkatnya nilai IPM setiap tahunnya menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan cukup berhasil, dan nilai IPM sebesar 70,17 pada tahun 2017 maka Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk dalam klasifikasi menengah. Adapun yang menjadi komponen IPM Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

1) Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan Indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia yang merepresentasikan kemajuan



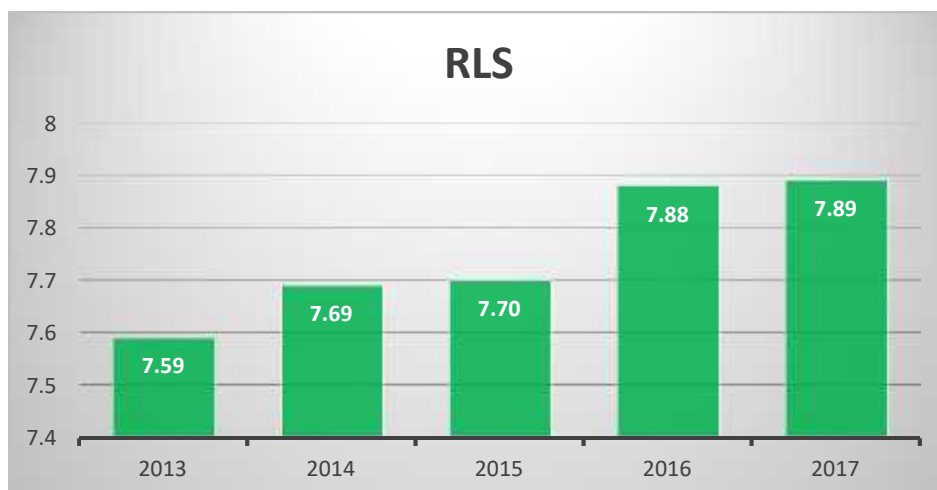
perkembangan Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Perkembangan Harapan lama sekolah penduduk Kotawaringin Timur pada tahun 2017 memiliki rata-rata bersekolah 12 tahun yaitu sebesar 12,59 Tahun.



Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur

Gambar 2.12 Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017

Sedangkan rata-rata lama sekolah secara rata-rata Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur terlihat masih rendah yaitu pada tahun 2017 sebesar 7,89 Tahun, artinya rata-rata penduduk hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 1 SMP, Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang percepatan penuntasan buta aksara dan wajib belajar sembilan tahun, maka beberapa kebijakan telah dibuat pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu dengan terbitnya Perda nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

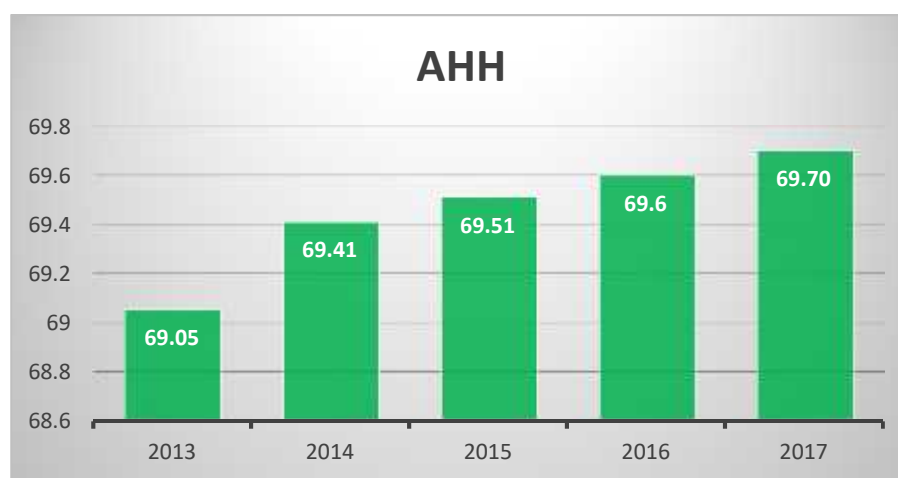


Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur

Gambar 2.13 Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (dalam tahun) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017

2) Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)

Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka harapan hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Tren perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur selama kurun waktu tahun 2013 hingga 2017 terus mengalami kenaikan, terlihat pada tahun 2013 sebesar 69,05 menjadi 69,70 pada tahun 2017.



Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur

Gambar 2.14 Usia Harapan Hidup (UHH) Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013- 2017

Dari Pada gambar di atas terlihat bahwa selama periode 2013-2017 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur selalu meningkat, meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, rata-rata penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur dapat bertahan hidup yaitu sampai usia 69–70 tahun.

3) Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (*Purchasing Power Parity*) masyarakat, dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah. Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sangat sulit diperoleh, sehingga dalam kegiatan Susenas data ini didekati melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.



Distribusi pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di negara berkembang dengan tingkat gizi yang masih rendah, pemenuhan kebutuhan makanan sebagai kebutuhan dasar untuk hidup masih merupakan prioritas utama.



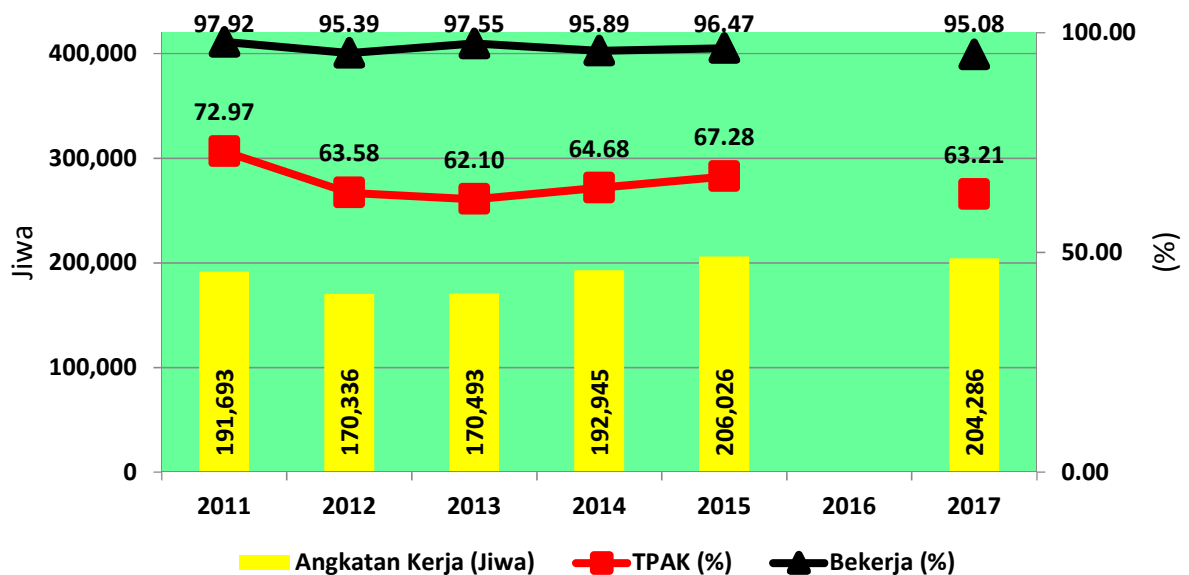
Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur

Gambar 2.15 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012-2017

Sementara itu, pengeluaran penduduk perkapita pada tahun 2012 sebesar Rp. 10.170.000,00 per tahun dan selalu meningkat setiap tahunnya yang pada tahun 2017 menjadi Rp. 11.249.000,00 per tahun.

B. Aspek Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 mencapai 4,29 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 3,53 persen. Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2011 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 2.16.



Sumber: KDA (BPS, 2018; diolah)
Keterangan:
Tahun 2016 tidak tersedia data ketenagakerjaan

Gambar 2.16 Ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011-2017

Gambar 2.16 memperlihatkan bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2017 terjadi fluktuasi tingkat pengangguran terbuka. Hal ini terjadi karena banyaknya arus tenaga kerja yang keluar masuk Kabupaten Kotawaringin Timur mengikuti perkembangan kebijakan PBS yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.2.2 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

A. Kebudayaan

Pembangunan urusan kebudayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bertujuan agar setiap komponen masyarakat tetap memegang teguh kearifan lokal dalam setiap aspek aktivitas kehidupannya. Perkembangan pembangunan urusan kebudayaan dapat dilihat pada capaian indikator urusan kebudayaan tahun 2013-2017 pada Tabel 2.13.



Tabel 2.13
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	2	3	3	3	3
2.	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

B. Olah Raga

Pembangunan bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Jumlah organisasi olahraga ada tren kenaikan yaitu pada tahun 2013 sebesar 20 organisasi menjadi 30 organisasi pada tahun 2017, hal ini terlihat besarnya antusias masyarakat terhadap kemajuan olahraga di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal lain juga terlihat pada peningkatan jumlah lapangan olahraga yang pada tahun 2013 sebesar 198 buah menjadi 205 buah pada tahun 2017.

Tabel 2.14
Perkembangan Organisasi dan Prasana Olah Raga Pemerintah
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah organisasi olahraga	20	24	30	30	30
2.	Jumlah kegiatan olahraga	16	16	16	16	16
3.	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	7	9	10	10	10
4.	Lapangan olahraga	198	200	205	205	205
5.	Jumlah gedung olahraga (selain milik swasta)	0	0	3	3	3
6.	Jumlah gedung olahraga (milik swasta)	26	26	26	26	26

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek pendidikan selama lima tahun terakhir dari 2013 sampai dengan 2017.

A.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

A.1.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang



sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terus mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan kenaikannya, hal ini terlihat pada data tahun 2013 sebesar 16,11% terus mengalami kenaikan yang pada tahun 2017 menjadi 29,77%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam persen)

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	16,11	16,42	16,84	19,84	29,77

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur

A.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



terus mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan kenaikannya, hal ini terlihat pada data tahun 2013 sebesar 27,83% terus mengalami kenaikan yang pada tahun 2017 menjadi 31,68%. Dilihat dari jumlah APK tersebut masih ada selisih dengan APM, hal ini menandakan adanya anak usia diluar jenjang PAUD yang bersekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam persen)

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	27,83	28,63	28,81	31,50	31,68

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur

A.2 Pendidikan Dasar

A.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Adapun perkembangan angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tingkat pendidikan dasar dimana data terakhir tahun 2017 untuk usia 7-12 tahun (usia Sekolah Dasar) berada di posisi angka 99,25% dimana pada tahun 2013 masih berada di posisi angka 99,04% dan untuk usia 13-15 tahun (usia Sekolah Menengah Pertama) pada data terakhir tahun 2017 sebesar 92,52% dimana pada tahun 2013 masih sebesar 87,61%. Ini menandakan terjadinya peningkatan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam persen)

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTS					
	Usia 7-12 Tahun	99,04	99,32	100,00	99,67	99,25
	Usia 13-15 Tahun	87,61	91,39	90,59	91,06	92,52

Sumber: BPS, Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur



Angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 7 hingga 12 tahun mencapai 99,25. Ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7 hingga 12 tahun memiliki kesadaran yang tinggi untuk menimba untuk mencari ilmu. Seiring meningkatnya kelompok umur, angka partisipasi sekolahnya semakin menurun. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih berorientasi pada menamatkan jenjang pendidikan dasar dan kesadaran untuk menimba ilmu di tingkat pendidikan semakin tinggi semakin berkurang.

A.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A pada tahun 2017 telah mencapai 96,66 persen dan SMP/MTs/Paket B telah mencapai 72,14 persen untuk Kabupaten Kotawaringin Timur, hal ini sudah terus mengalami kenaikan sejak tahun 2013 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar
Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam
persen)

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	APM SD/MI/Paket A	81,91	97,72	97,54	96,20	96,66
2.	APM SMP/MTs/Paket B	54,98	78,29	78,28	75,45	72,14

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur

A.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Perkembangan angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tingkat pendidikan dasar dimana data terakhir tahun 2017 untuk jenjang SD/MI/Paket A sebesar 110,86 persen dimana pada tahun 2013 masih berada di posisi angka 107,10 persen. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen, hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017 Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar
Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam
persen)

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	APK SD/MI/Paket A	107,10	107,42	109,05	110,87	110,86
2.	APK SMP/MTs/Paket B	83,68	84,63	85,65	99,48	91,99

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur



A.2.4 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Berikut diuraikan Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017.

Tabel 2.20
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar	171	169	166	NA	369

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur

A.2.5 Rasio Guru/Murid

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut diuraikan Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017.

Tabel 2.21
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio guru/murid Pendidikan Dasar	17	16	16	NA	17

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur

A.2.6 Rasio Guru/Murid Menurut Perkelas Rata-Rata

Rasio ini melihat rata-rata ketersediaan tenaga pengajar per kelasnya dan juga untuk mengukur idealnya rata-rata siswa perkelas. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar menurut perkelas rata-rata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017.

Tabel 2.22
Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan Dasar	11,59	26,31	10,70	11,04	15,77

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur

A.3 Pendidikan Menengah

A.3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk pendidikan menengah, Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat dilihat pada Tabel 2.23.



Tabel 2.23
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan
Menengah Tahun 2013-2014 di Kabupaten Kotawaringin Timur
(dalam persen)

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA (Usia 16-18 Tahun)	67,04	74,16	40,36	60,28	63,68

Sumber: BPS, Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

A.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum untuk jenjang Pendidikan Menengah pada tahun 2017 telah mencapai 46,91 persen untuk Kabupaten Kotawaringin Timur, hal ini sudah terus mengalami kenaikan sejak tahun 2013, walaupun ada penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017, yang mana tahun 2014 sebesar 69,18 persen, tapi rata-rata terus mengalami kenaikan. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan
Menengah Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur
(dalam persen)

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	APM SMA/MA/SMK	58,86	59,26	57,05	69,18	46,91

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur

A.3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Perkembangan angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tingkat pendidikan menengah ini tidak terlalu signifikan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) dimana data terakhir tahun 2017 untuk jenjang SMA/MA/SMK sebesar 53,26 persen dimana pada tahun 2013 masih berada di posisi angka 63,68. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017 Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 2.25
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan
Menengah Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur
(dalam persen)

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	APK SMA/MA/SMK	53,26	63,38	67,95	50,28	63,68

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur

A.3.4 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Berikut diuraikan Rasio Ketersediaan Sekolah /Penduduk usia sekolah



Pendidikan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017.

Tabel 2.26
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah Pendidikan Menengah	297	296	295	296	297

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur

A.3.5 Rasio Guru/Murid

Berikut diuraikan Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017.

Tabel 2.27
Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio guru/murid Pendidikan Menengah	14	13	13	NA	21

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur

A.3.6 Rasio Guru/Murid menurut perkelas rata-rata

Berikut ini diuraikan gambaran mengenai Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah menurut perkelas rata-rata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017.

Tabel 2.28
Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah Tahun 2013-2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan Menengah	47	46	45	44	44

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur

A.4 Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) ini adalah seberapa besar persentase siswa yang melanjutkan dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, di Kabupaten Kotawaringin Timur tingkat melanjutkan sangat tinggi, menurut data dari Dinas Pendidikan rata-rata melebihi 100 persen. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017.



Tabel 2.29
Perkembangan Angka Angka Melanjutkan (AM) Tahun 2013-2017
di Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam persen)

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	108,44	109,64	111,77	100,00	100,00
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,93	101,42	102,91	97,91	85,74

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur

A.5 Fasilitas Pendidikan

Kondisi sekolah yang masih rusak berat, sedang maupun ringan banyak didominasi oleh pendidikan dasar. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai persentase kondisi sekolah dengan kondisi baik di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017.

Tabel 2.30
Perkembangan Kondisi Bangunan Sekolah Tahun 2013-2017 di
Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam persen)

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kondisi ruang kelas bangunan baik	83	85,10	86	86	85
2	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi ruang kelas bangunan baik	71	72	72	72	72
3	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi ruang kelas bangunan baik	62	63	63	63	63
4	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi ruang kelas bangunan baik	83	90,34	73	73	72

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur

A.6 Kualifikasi Tenaga Pendidik

Tenaga Pendidik sampai dengan tahun 2015 yang mempunyai kualifikasi pendidikan S1/D-IV/S2/S3 sebesar 76,94 persen, jadi masih ada sekitar 33 persen yang belum memenuhi kualifikasi sebagai Tenaga Pendidik. Berikut ini diuraikan persentase kualifikasi pendidikan guru di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017.

Tabel 2.31
Kualifikasi Pendidikan Guru Tahun 2013-2017 di Kabupaten
Kotawaringin Timur (dalam persen)

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV/S2/S3	69,72	72,38	76,94	76,94	77,94

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur



B. Kesehatan

Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Kotawaringin Timur berfluktuasi. Tahun 2015 rasio 7,23 dalam 1.000 balita, tahun 2016 rasion 7.06 dalam 1.000 balita dan pada tahun 2017 rasio 7.24 dalam 1.000 balita. Total jumlah posyandu sampai dengan tahun 2017 sebanyak 315 posyandu.

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sudah menjangkau sampai ke seluruh kecamatan yaitu dengan dibangunnya puskesmas dan puskesmas pembantu. Sampai dengan tahun 2017 terdapat 21 puskesmas dan 142 puskesmas pembantu. Jumlah puskesmas tahun 2017 mengalami perubahan, yaitu beroperasi alnya Puskesmas Luwuk Sampun Kecamatan Tualan Hulu, sehinga menjadi 21 puskesmas. Sedangkan jumlah puskesmas pembantu sampai dengan tahun 2017 menjadi 142 puskesmas pembantu.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan tahun 2017 terdapat dua rumah sakit umum yaitu RSUD Dr. Murjani Sampit, dan RS Pratama Parenggean. Rasio rumah sakit persatuan penduduk sampai dengan 2017 sebesar 0,004. Jumlah tenaga dokter tahun 2017 sebaran dokter umum dan dokter gigi di kecamatan sebanyak 35 orang dokter umum dan 13 orang dokter gigi. Rasio dokter per satuan penduduk tahun 2017 sebesar 0,154% atau 15,4 dalam 100.000 penduduk. Menurun dibanding tahun 2016 sebesar 0,176%, atau 17,6 dalam 100.000 penduduk. Kondisi ini masih kurang memadai, karena idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Sedangkan rasio tenaga medis per satuan penduduk di tahun 2017 sebesar 0,270% atau 27 dalam 100.000 penduduk atau mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2015-2017 mencapai presentasi maksimal. Tahun 2015-2017 berada di angka 100%. Hal ini disebabkan semua kasus komplikasi kebidanan yang ditemukan mendapat penanganan sesuai standar.

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2017 sebesar 74,68 % sedangkan di tahun sebelumnya (tahun 2016) sebesar 73,60%. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dari tahun 2016 ke tahun 2017 cenderung meningkat. Peningkatan presentase persalinan yang ditolong tenaga kesehatan menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan semakin baik.

Perkembangan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) cenderung menurun, jika pada 2016 mencapai 60,00% persen maka tahun 2017 hanya mencapai 55,10% yang artinya masih ada desa/kelurahan yang persentase



bayi mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun masih kurang dari 80%. Tidak tercapainya target karena tingginya angka sasaran yang ditetapkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes.

Perkembangan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menunjukkan kinerja yang optimal dimana dari 2015 sampai 2017 mencapai 100 persen, dengan kata lain balita gizi buruk sudah tertangani seluruhnya. Penemuan balita gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Timur bukan murni gizi buruk, melainkan balita yang sakit kronis disertai dengan penurunan berat badan sehingga menyebabkan status gizi balita tersebut buruk.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sudah mencapai 100 persen pada tahun 2017. Sedangkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD menunjukkan kinerja yang optimal dimana selama periode 2013-2017 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100 persen. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin masih rendah yaitu 2,40 persen pada tahun 2017 dan 0,15 persen pada 2013.

Perkembangan cakupan kunjungan bayi menunjukkan kinerja yang fluktuatif, dimana pada 2013 cakupan kunjungan bayi 93,44 persen. Pada tahun selanjutnya mengalami penurunan menjadi 85,65 persen pada 2014 dan 84,46 persen pada 2015. Selanjutnya dalam dua tahun terakhir terus kembali mengalami penurunan menjadi 69,00 persen pada 2016 dan 75,50 persen pada 2017.

Kinerja cakupan puskesmas selama periode 2013-2017 diatas 100 persen yang menunjukkan bahwa semua kecamatan telah mempunyai puskesmas dan ada kecamatan yang mempunyai lebih dari satu puskesmas. Sedangkan cakupan puskesmas pembantu masih dibawah 100 persen yang artinya masih ada desa yang belum memiliki puskesmas pembantu. Akan tetapi kalau dilihat perkembangan cakupan puskesmas pembantu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Cakupan puskesmas pembantu pada tahun 2013 adalah 69,7 persen dan mengalami peningkatan menjadi 76,2 persen pada 2017.

Tabel 2.32
Hasil Kinerja Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
	Kesehatan					
1	Rasio posyandu per satuan balita	6.89	7.06	7.23	7.06	7.24
2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0.46	0.51	0.49	0,44	0,43
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.003	0.003	0.002	0,002	0,004
4	Rasio dokter per satuan penduduk	0.058	0.078	0.096	0,176	0,154
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.073	0.098	0.121	0,277	0,270



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	97.17%	100%	100%	100%	100%
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90.38%	87.78%	83.65%	73,60%	74,68%
8	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	85.96%	76.22%	76.76%	60,00%	55,10%
9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	28.64%	28.02%	37,81%	100%	100%
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0.15%	2.20%	6,18%	3,13%	2,40%
13	Cakupan kunjungan bayi	93.44%	85.65%	84.46%	69,00%	75,50%
14	Cakupan puskesmas	117.6%	117.6%	117.6%	117,6%	123,5%
15	Cakupan pembantu puskesmas	69.7%	76.2%	76.2%	76,2%	76,2%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

C. Pekerjaan Umum

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Pada umumnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Kotawaringin Timur cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi masih berada pada tingkatan yang belum memadai guna mendukung pergerakan pembangunan disegala sektor.

Tahun 2013 total panjang jaringan jalan kabupaten adalah 1.574,88 km dimana dalam kondisi baik mencapai 660,93 km dan pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/541/HUK-DPU/2014 tanggal 20 November 2014 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan di Desa/Kelurahan/Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur total panjang jalan kabupaten mengalami peningkatan menjadi 2.024,06 km.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk drainase yang sengaja dibuat mengikuti pola jaringan jalan (saluran pembuangan mikro) ada beberapa ruas jaringan jalan yang masih menjadi area rawan banjir dan genangan. Penyebab terjadinya daerah rawan banjir dan genangan adalah karena tertutupnya *street inlet* sehingga air hujan tidak bisa masuk ke dalam saluran drainase, adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran, konstruksi drainase yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta pengalih fungsian lahan dari kondisi alami menjadi lahan dengan fungsi komersil seperti pertokoan, *mall*, jalan, perumahan, dan lain-lain sehingga tutupan lahan pun berubah fungsinya yang mengakibatkan meningkatnya atau tidak tertampungnya debit limpasan.



Potensi kerusakan jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur bisa terjadi, baik dalam kondisi basah (musim hujan) maupun kondisi kering (musim kemarau). Untuk kerusakan jalan pada kondisi basah disebabkan air sering tidak tertampung dan menggenangi banyak segmen jalan, baik saluran pinggir jalan maupun saluran-saluran pembuangan lainnya sedangkan untuk kondisi kering masih banyaknya truk angkutan atau truk CPO yang membawa muatan melebihi tonase beban jalan yang diperbolehkan.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya, untuk drainase yang dalam kondisi baik mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 adalah 5.040 meter drainase yang aliran airnya tidak tersumbat menjadi 197.878 meter pada tahun 2017.

Untuk data jembatan dalam kondisi baik cenderung mengalami penambahan meskipun tidak signifikan baik dalam jumlah maupun kondisi jembatan. Pada tahun 2013 jumlah jembatan kayu sebanyak 152 buah dengan total panjang 3.536,50 meter, jembatan beton berjumlah 27 buah dengan total panjang 314,50 meter sedangkan untuk jembatan baja berjumlah 6 buah dengan total panjang 460 meter dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu untuk jembatan kayu menjadi 154 buah dengan total panjang 3.875,50 meter, jembatan beton 34 buah dengan total panjang 325 meter dan jembatan baja 8 buah dengan total panjang 630 meter.

Tabel 2.33
Hasil Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Urusan Pekerjaan Umum						
1	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi baik	146,43	176,21	202,53	242,64	259,13
2	Panjang Jalan dilalui roda 4	935,825	1589,96	1707,232	1.792,59	1.882,22
3	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	428,16	507,07	616,67	647,50	679,87
4	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	481,458	605,958	660,42	669,53	710,93
5	Rumah tinggal bersanitasi	48.360	48.500	48.700	48.700	54.514
6	Lingkungan Pemukiman	10.500	11.375	11.500	11.500	11.500
7	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	5.040	5.040	5.040	196.928	197.878
8	Jenis Jembatan (buah)					
	a. Jumlah Jembatan Kayu	152,0	154,0	154,0	153	153
	b. Jumlah Jembatan Beton	27,0	34,0	35,0	36	38
	c. Jumlah Jembatan Baja	6,0	8,0	10,0	10	12
9	Panjang Jembatan (meter)					



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
	a. Jembatan Kayu	3.536,5	3.561,5	3.561,5	3.566,50	3.566,50
	b. Jembatan Beton	314,5	331,0	348,0	358	365
	c. Jembatan Baja	460,0	630,0	750,0	750	870
10	Jembatan dalam kondisi baik (buah)					
	a. Jembatan Kayu	126,0	139,0	144,0	153,0	153,0
	b. Jembatan Beton	27,0	34,0	35,0	36,0	38,0
	c. Jembatan Baja	6,0	8,0	10,0	10,0	12,0
11	Jembatan dalam kondisi rusak (buah)					
	a. Jembatan Kayu	59,0	57,0	55,0	56,0	54,0
	b. Jembatan Beton	-	-	-	-	-
	c. Jembatan Baja	-	-	-	-	-
12	Rasio jaringan irigasi	2,73/km	2,88/km	2,96/km	2,96/km	2,96/km
13	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	52,79%	72,59%	58,25%	17,91%	19,69%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kotim

D. Perumahan

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Perkembangan cakupan rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Kotawaringin Timur, mengalami kenaikan setiap tahunnya dikarenakan jumlah Kepala keluarga (KK) yang membutuhkan bertambah, maka bertambah pula rumah tangga pengguna air bersih yang harus dilayani. Tahun 2013 rumah tangga pengguna air bersih sudah mencapai 53,54 persen dan tahun 2017 mengalami kenaikan mencapai 76,62 persen. Kawasan pemukiman kumuh mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2015 yang mencapai 49,44 Ha, menjadi 0,28 Ha pada tahun 2017 hal ini dikarenakan kawasan kumuh menjadi penanganan prioritas pemerintah dalam beberapa tahun terakhir baik melalui penanganan pemerintah daerah, maupun penanganan dari pihak pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Untuk jumlah bangunan yang mengajukan IMB mengalami penurunan dari tahun 2015 sejumlah 579 unit menjadi 326 unit.

Tabel 2.34
Hasil Kinerja Urusan Perumahan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rumah tangga yang menggunakan air bersih	53,54%	65,69%	62,10%	72,64%	76,62%
2	Cakupan pelayanan air minum/bersih	391.604	399.894	475.469	441.079	436.276
3	Penduduk berakses air minum	209.658	262.680	295.271	320.421	334.264

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kotim



Tabel 2.35
Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Tahun	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah Kebutuhan Air Bersih (Liter atau dm ³)
1	2011	168.939	62 L/det
2	2012	189.279	66 L/det
3	2013	102.758	69 L/det
4	2014	262.680	94,5 L/det
5	2015	295.271	105 L/det

Sumber : UPTD Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kotim

Tabel 2.36
Kapasitas Produksi PDAM Sampit

No.	Sumber Air	Kapasitas Terpasang	Debit Produksi	Idle
1	Air Permukaan	357 LITER/DETIK	307	22,5 liter/detik (27,5 liter/detik rusak berat sudah tidak dapat dioperasikan)

Sumber : PDAM Sampit

Tabel 2.37
Pemenuhan Air Bersih Dengan PDAM

No.	Tahun	Jumlah KK yang tersambung dengan PDAM (KK)
1	2013	24.074
2	2014	25.014
3	2015	25.597
4	2016	26.029
5	2017	26.930

Sumber : PDAM Sampit

Tabel 2.38
Hasil kinerja Urusan Perumahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2013-2017

Kotawaringin Tahun persekut 2013-2017						
No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
Urusan Perumahan		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rumah Tidak Layak Huni	-	5.612 Unit	9.542 Unit	456 Unit	212 Unit
2	Rumah Tangga pengguna air bersih	53,54%	65,69%	65,69%	72,64 %	76,62 %
3	Kawasan kumuh	49,44 Ha	49,44 Ha	49,44 Ha	-	0,28 Ha

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Kotim

E. Penataan Ruang

Tabel 2.39
Hasil Kinerja Urusan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penataan Ruang						
1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	NA	NA	NA	NA	NA
2	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	146	160	579	459	326



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
3	Ruang publik yang berubah peruntukannya	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kotim

F. Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 disahkan pada tahun 2008 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025. Dokumen RPJP ini menjadi arah pembangunan daerah selama kurun waktu 20 tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2025.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2015 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2015. RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Tabel 2.40
Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Perencanaan Pembangunan						
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kab. Kotim

G. Perhubungan

Tabel 2.41
Hasil Kinerja Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Perhubungan						
1	Jumlah Arus penumpang angkutan umum	20.509	16.26	444.93	245.693	275.937
2	Rasio ijin trayek	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	502	1.671	1.671	812	824
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1/1/3	1/1/3	1/1/3	1/1/4	1/1/4



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
5	Angkutan darat	-	4582	4431	9.765	10.956
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	29	29	29	327	540
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
9	Pemasangan rambu-rambu lalu lintas (jumlah rambu)	-	271	271	190	190

Sumber : Dinas Perhubungan

Kabupaten Kotawaringin Timur selain merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat yaitu 3 kabupaten (Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau) dan 1 Kabupaten dari wilayah selatan (Seruyan) menuju ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Palangkaraya serta penopang jalur distribusi perekonomian Kalimantan Tengah. Kondisi sarana prasarana perhubungan merupakan unsur penting yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal.

H. Lingkungan Hidup

Persentase penanganan sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2013 sampai 2017 sebesar 58 persen. Persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2013 sebesar 51,68 persen mengalami peningkatan menjadi 74,93 persen pada tahun 2017.

Tabel 2.42
Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Lingkungan Hidup						
1	Persentase Penanganan Sampah	68	70	70	58	58
2	Persentase penduduk berakses air minum	51,68	63,12	69,28	73,44	74,93
3	Pencemaran status mutu air	117	117	117	49	50
4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	70	67	57	100	100
5	Penegakan hukum lingkungan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotim

I. Pertanian

Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2011 sejumlah 166,2 persen dan pada tahun 2017 mencapai 200,3 persen. Sedangkan penyelesaian kasus tanah negara pada tahun 2011 sampai dengan 2013 mencapai 100 persen, pada tahun 2014 penyelesaian mencapai 88 persen dan pada tahun 2017 baru mencapai 53 persen.

Penyelesaian izin lokasi dari tahun 2011 sampai dengan 2017 telah mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh permohonan izin lokasi diselesaikan



secara keseluruhan. Sedangkan pada tahun 2017 penyelesaian izin lokasi mencapai 91 persen.

Tabel 2.43
Hasil Kinerja Urusan Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2011-2017

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanahan								
1	Persentase luas lahan bersertifikat	166,2	7,76	330,2	655,2	200,3	200,3	200,3
2	Penyelesaian kasus tanah negara	100	100	100	88	53	53	53
3	Penyelesaian izin lokasi	100	100	100	100	91	91	91

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur

J. Kependudukan dan Catatan Sipil

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang Undang No. 24 tahun 2013 Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Seiring dengan lajunya perkembangan penduduk yang kian pesat, Kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki wilayah ±16.496 Km² yang terdiri dari 17 Kecamatan, 168 Desa dan 17 Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 452.464 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 123.372 KK, yang persebarannya tidak merata dengan konsentrasi di pinggiran sungai.

Saat ini masih banyak peristiwa kependudukan seperti pindah, dating, kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian belum tercatat secara tertib, sehingga hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terekam dalam database kependudukan belum dapat secara maksimal didayagunakan untuk kepentingan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan baik Pemerintahan maupun swasta. Oleh sebab itu perlu diupayakan penertiban administrasi kependudukan dan dilaksanakan secara konsisten, sehingga dapat tercapai pelayanan yang prima khususnya kepada masyarakat, pemerintah dan swasta dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Diketahui bahwa tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2013 sebanyak 54,86 persen, dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017 menjadi 79,10 persen. KTP Nasional berbasis NIK diterapkan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2009. Sedangkan kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2013



mencapai 25,40 persen dan pada akhir 2017 mencapai 40,53 persen.

Kabupaten Kotawaringin Timur telah menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) sejak tahun 2009. Database kependudukan skala Kabupaten Kotawaringin Timur selama periode 2013-2017 juga tersedia. Disamping itu, untuk publikasi dan mempermudah pelayanan informasi kependudukan maka sejak tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur telah meluncurkan website www.disdukcapilkotim.net.

Tabel 2.44
Hasil Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kependudukan dan Catatan Sipil						
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,55	0,71	0,71	0,55	0,54
2	Rasio anak berakte kelahiran	0,19	0,23	0,64	0,29	0,38
3	Rasio pasangan berakte nikah	0,04	0,04	0,05	0,14	0,17
4	Kepemilikan KTP	54,86	70,63	70,75	78,31	79,10
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	25,40	24,94	33,73	37,80	40,53
6	Ketersediaan Database kependudukan skala Kabupaten Kotawaringin Timur	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim

K. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi kaum perempuan dalam dunia kerja dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan, baik itu dalam lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta. Pada tahun 2011 dan 2012 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah hanya mencapai 2,58 persen, akan tetapi pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 7,16 persen. Pada tahun 2014 turun menjadi 6,55 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 mencapai 6,84 persen.

Sedangkan partisipasi perempuan di lembaga swasta pada tahun 2011 mencapai 44,57 persen, akan tetapi mengalami penurunan dalam kurun 2012-2013, penurunan paling besar pada tahun 2012 yaitu 24,77 persen. Namun, pada tahun 2015 partisipasi perempuan di lembaga swasta meningkat tajam dari tahun 2014 hingga mencapai 84,79 persen.

Partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana diketahui pada tahun 2011 partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 47,71 persen dan pada 2015 meningkat menjadi 91,65 persen.

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berfluktuasi, dimana kejadian



KDRT terbanyak terjadi pada tahun 2014 mencapai 0,63 persen dan 2015 mencapai 0,31 persen. Dalam hal penyelesaian terhadap kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan masih relatif kecil, akan tetapi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2013 hanya 19 persen kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang terselesaikan dan pada 2017 meningkat menjadi 22 persen pengaduan yang dapat terselesaikan.

Tabel 2.45
Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	7,16	6,55	6,84	6,90	7,13
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	25,54	39,78	84,79	57,88	61,25
3	Rasio KDRT	0,31	0,63	0,31	0,27	0,19
4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	-	-	-	-
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	55,41	91,20	91,65	NA	27,45
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	19	22	21*	16	22

Sumber : Badan P3AP2KB Kab. Kotim

L. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Apabila dilihat dari perkembangannya,rasio akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif pada tahun 2013 rasio akseptor KB mencapai 77,35 persen, pada tahun 2017 turun menjadi 75,41 persen. Demikian pula dengan cakupan peserta KB aktif, jika pada tahun 2013 mencapai 77,35 persen, pada tahun 2017 menjadi 75,41 persen. Bagi PD terkait hal ini menjadi perhatian dalam kaitannya dengan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk sebagaimana kebijakan pemerintah.

Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I mengalami penurunan, hal ini menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Jika pada tahun 2013 jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I mencapai 41,55 persen, maka pada tahun 2015 turun menjadi 16,55 persen.

Tabel 2.46
Hasil Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	218,11	267,86	316,42	291,12	295,21
2.	Rasio akseptor KB	77,35	72,41	76,56	78,07	75,41
3.	Cakupan peserta KB aktif	77,35	76,56	76,56	78,07	75,41
4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	41,55	38,94	16,55	NA	NA

Sumber : Badan P3AP2KB Kab. Kotim

M. Sosial

Keberadaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan tahun 2015 hanya berupa Panti Asuhan yang menampung anak-anak yatim piatu dari keluarga tidak mampu sebanyak delapan buah. Sedangkan panti jompo dan panti rehabilitasi masih belum ada.

Disisi lain, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan dari pemerintah daerah juga masih rendah, hanya 11.39 persen pada tahun 2015. Sedangkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial mengalami peningkatan dari 10.67 persen pada 2011 menjadi 78.50 persen pada tahun 2015.

Tabel 2.47
Hasil Kinerja Urusan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sosial						
1.	Sarana sosial :					
	- Panti Asuhan	8	8	8	8	8
2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	49.58%	19.69%	11.39%	NA	NA
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	22.31%	0.049%	78.50%	NA	NA

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotim

N. Ketenagakerjaan

Angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kotawaringin Timur selama kurun waktu 2013-2017 fluktuatif. Angka angkatan kerja paling tinggi terjadi pada tahun 2013 mencapai 97,55 persen. Pada tahun 2017 angka partisipasi angkatan kerja berada pada angka 95,08 persen. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja kurang mengalami lonjakan yang cukup signifikan, jika pada tahun 2013 tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 62,10 persen pada di tahun 2017 meningkat menjadi 63,21 persen.

Indikator keselamatan dan perlindungan mengukur jumlah perusahaan yang menerapkan K3 dibandingkan dengan jumlah perusahaan di wilayah kabupaten dalam satu tahun. DiKabupaten Kotawaringin Timur keselamatan dan perlindungan yang diberikan perusahaan terhadap tenaga kerja cenderung



mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 keselamatan dan perlindungan hanya 61,76 persen, maka tahun 2017 meningkat secara signifikan menjadi 72,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian perusahaan terhadap keselamatan dan perlindungan tenaga kerja cukup tinggi.

Penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pihak perusahaan juga mengalami peningkatan selama periode 2011-2015. Tahun 2013 jumlah penyelesaian perselisihan antara pekerja dan perusahaan hanya mencapai 57,5 persen, sedangkan tahun 2017 mencapai 66,09 persen.

Tabel 2.48
Hasil Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ketenagakerjaan						
1.	Angkatan kerja	97,55	95,89	96,47	NA	95,08
3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	62,10	64,68	67,28	NA	63,21
4.	Pencari kerja yang ditempatkan	593	915	380	415	357
5.	Tingkat pengangguran terbuka	2,45	4,11	3,53	NA	4,92
6.	Keselamatan dan perlindungan	61.76	67.65	71.57	70,11	72,11
7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	57.5	63.5	65.2	64,88	66,09

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

O. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi memegang peran strategis bagi perekonomian daerah dan memberikan peluang dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah koperasi primer yang terdata di Kotawaringin Timur 2013 sampai tahun 2017 berjumlah sekitar 308 unit koperasi, koperasi aktif 239 unit, koperasi tidak aktif 69 unit, koperasi KUD 30 unit dan koperasi non KUD 278 unit.

Tabel 2.49
Hasil Kinerja Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah					
	1. Jumlah Induk Koperasi/Koperasi Sekunder	-	-	-	-	-
	2. Jumlah Koperasi Primer	320	325	355	370	308
	3. Koperasi Aktif	234	239	269	268	239
	4. Koperasi Tidak Aktif	86	86	86	102	69
	5. Koperasi KUD	30	30	30	30	30
	6. Koperasi Non KUD	290	295	325	340	278
2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:	9.233	10.017	10.865	12.318	15.876
	Mikro	8.259	9.043	9.637	10.699	14.198
	Kecil	972	972	1.226	1.617	1.674
	Menengah	2	2	2	2	4

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kotim



Selain koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah merupakan potensi ekonomi yang besar karena mengalami peningkatan yang signifikan tahun 2013 berjumlah 9.233 terdiri dari mikro 8.259, kecil 972, menengah 2, dan jumlah seluruhnya 15.876 untuk tahun 2017 terdiri 14.198 mikro, kecil 1.674 dan menengah 4.

P. Penanaman Modal

Jumlah nilai investasi PMDN mengalami penurunan dari 2016 berjumlah Rp. 10.420.000,57 menjadi Rp. 8.746.000,54 pada 2017. Sedangkan nilai investasi PMA juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, apabila tahun 2016 jumlah nilai investasi PMA US\$ 6.372.000,15 menurun menjadi US\$ 2.072.000,15 pada 2017.

Kenaikan maupun penurunan nilai realisasi investasi PMDN belum dapat disajikan karena tingkat kepatuhan perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih rendah. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus berupaya untuk menarik investasi, baik investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel 2.50
Hasil Kinerja Urusan Penanaman Modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional PMDN(dalam Rp.juta)	76.870,00	131.963,00	1.296.792,00	10.420,57	8.746,54
2	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional PMA (dalam US\$. Ribu dan dalam Rp.juta)	295.331,00	55.889,00	5.283,70	6.372,15	2.072,15

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

Q. Kebudayaan

Dalam upaya untuk melestarikan seni dan budaya daerah, Kabupaten Kotawaringin Timur pada setiap tahunnya menyelenggarakan 3 (tiga) kali kegiatan festival seni dan budaya, Festival Habaring Hurung yang diselenggarakan untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Kotawaringin Timur. Berbagai jenis lomba yang diselenggarakan dalam kegiatan Festival Habaring Hurung antara lain: Lomba tari tradisional pedalaman dan pesisir, lomba karungut, lomba dan pertandingan olah raga tradisional seperti balogo, bagasing, maloto/mangaruhi, sepak sawut, manyumpit, dayung tradisional, besei kambe, dan sebagainya.

Sampai dengan tahun 2017 terdapat 3 (tiga) sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu: Stadion 29 November, Gedung Serba Guna, dan Taman Miniatur Budaya.



Rumah Betang Tumbang Gagu yang telah berusia ratusan tahun, Sandung sebanyak 72 buah dan Sapundu 383 buah, serta dua buah tugu/monumen bersejarah yang tersebar di beberapa Kecamatan merupakan warisan budaya yang patut untuk dilestarikan. Namun sangat disayangkan upaya pemeliharaan terhadap situs budaya tersebut masih sangat minim. Diharapkan kedepannya situs dan kawasan budaya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dikelola dan dimanfaatkan sebagai salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 2.51
Hasil Kinerja Urusan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	2	3	3	3	4
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	3	3	3	3	3
3	Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0	0	0	1	1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

R. Kepemudaan dan Olah Raga

Tabel 2.52
Hasil Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kepemudaan dan Olah Raga						
1.	Jumlah organisasi pemuda	20	24	30	35	35
2.	Jumlah organisasi olahraga	16	16	16	23	23
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	7	9	10	18	18
4.	Jumlah kegiatan olahraga	16	16	16	18	18
5.	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	0	0	3	3	3
6.	Lapangan olahraga	26	26	26	37	42

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim

Data yang tersaji menggambarkan masih perlu dioptimalkannya kinerja dalam urusan kepemudaan dan olahraga. Jumlah organisasi pemuda aktif yang sejak tahun 2013-2017 relatif memiliki kenaikan signifikan, kondisi ini mengindikasikan bahwa minat pemuda untuk terlibat dalam organisasi dan pembangunan semakin bertambah. Didalam kegiatan keolahragaan pemerintah akan terus meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Kotawaringin Timur mengingat jumlah lapangan olahraga yang dimiliki pemerintah sampai saat ini semakin bertambah. Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat melalui olahraga



dilakukan dengan menambah jumlah dan mengoptimalkan lapangan olahraga di setiap wilayah/kecamatan dengan penambahan jumlah yang sangat signifikan yaitu menjadi 42 lapangan olahraga di tahun 2017.

S. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melakukan pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan yang diselenggarakan 1 kali dalam setiap tahun.

Dalam pembinaan politik daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan satu kali setiap tahun yang diselenggarakan sejak tahun 2013-2017. Disamping itu untuk menjaga kondisi daerah agar tetap kondusif, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melaksanakan program pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela negara dan ketahanan ideologi bangsa, penanganan konflik dan pengawasan orang asing, peningkatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelkam, pembinaan dan peran serta parpol dalam berdemokrasi dan pendidikan politik masyarakat.

Jumlah LSM aktif di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2013 berjumlah 45 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sebanyak 36 dan tahun 2015 jumlah LSM yang aktif menjadi 38. Akan tetapi pada tahun 2016 jumlah LSM aktif kembali mengalami kenaikan menjadi 65 dan pada tahun 2017 terjadi penurunan kembali terdapat 53 LSM yang masih aktif.

Tabel 2.53
Hasil Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-
2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	1	1	1
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	1	1	1
3	Jumlah LSM (aktif)	45	36	38	65	53

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotim

T. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2013-2017 penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sudah cukup optimal dilakukan. Untuk meningkatkan pelayanan publik dalam pelayanan perizinan maka sejak tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menerapkan sistem informasi

pelayanan perijinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana pelayanan perijinan dilaksanakan secara online.

Dengan jumlah personil Polisi Pamong Praja pada tahun 2013 sebanyak 1.750 persen kemudian turun pada tahun 2017 sebanyak 74 orang atau dengan rasio 1.650 persen, kegiatan penegakan Perda pada tahun 2013 mencapai 0.83 persen dan mengalami peningkatan menjadi 100 persen pada tahun 2016 dan 2017. Cakupan penegakan Perda masih belum optimal dan tidak sepenuhnya dapat menjangkau sampai ke pelosok kecamatan/desa mengingat jumlah personil dan kondisi geografis serta jarak dari ibukota Kabupaten yang cukup jauh, sehingga memungkinkan adanya pelanggaran Perda yang lepas dari pemantauan dan tidak dapat ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 7,79 persen dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 7,99 persen.

Pada tahun 2014 jumlah kebakaran lahan dan hutan dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah 443 kebakaran hutan dan lahan dan 44 kebakaran rumah. Sedangkan jumlah titik api pada tahun 2014 berjumlah 265 titik api, terbesar terdapat di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Sampai dengan September 2015 terdapat 4.083 titik api yang terbesar terdapat di Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dibidang administrasi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menerapkan sistem informasi keuangan daerah sejak tahun 2013. Pada tahun 2013 pengelolaan keuangan daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan mengalami peningkatan opini pada tahun 2014 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selanjutnya selama dalam 4 (empat) tahun berturut-turut dari 2014-2017 selalu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut. Disamping itu, sejak tahun 2012 pengadaan barang dan jasa pemerintah telah dilakukan secara elektronik melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik telah dilakukan survei terhadap indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada beberapa unit pelayanan, antara lain Badan kepegawaian Daerah, RSUD Dr. Murjani Sampit dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Beberapa jenis pelayanan yang masih sering dikeluhkan masyarakat dan dicarikan solusi yang tepat, misalnya penyediaan air bersih, pelayanan kelistrikan, pengelolaan sampah,



drainase dalam kota, dan sebagainya.

Tabel 2.54
Hasil Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1.750	1.622	1.647	1.690	1.650
2	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	75.129	86.477	67.862	71.621	71.621
3	Pertumbuhan Ekonomi	7,79	7,37	7,62	7,93	7,99
4	Kemiskinan	6,85	6,67	6,42	6,32	6,24
5	Penegakan PERDA	0.83	0.83	NA	100	100
6	Cakupan patroli petugas Satpol PP	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
7	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten per 10.000 Penduduk	0.008	0.007	NA	0.109	0.109

Sumber : Satpol PP Kab. Kotim, BPBD Kab. Kotim, dan BPS Kab. Kotim

U. Ketahanan Pangan

Dibidang Ketahanan Pangan, Kabupaten Kotawaringin Timur telah memiliki regulasi berupa Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Ketersediaan pangan utama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2013 ketersediaan pangan utama sebesar 75,61 persen dan pada tahun 2017 menjadi 143,40 persen, naik sebesar 67,79 persen dalam empat tahun.

Tabel 2.55
Hasil Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ketahanan Pangan						
1	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan pangan utama	75,61	69,56	111,06	116,60	143,40

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kotim

V. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan dengan meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan, berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa, meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa, meningkatnya peran



perempuan di perdesaan, dan sebagainya. Dari hasil kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2017 jumlah PKK aktif 192 buah dan posyandu aktif 315 buah.

Tabel 2.56
Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-
2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	PKK aktif	192	192	192	192	192
2	Posyandu aktif	281	295	296	305	315

Sumber : LKPD Kab. Kotim Tahun 2013-2017 dan BPS Kab. Kotim

W. Statistik

Selama kurun waktu 2013-2017 Buku “Kotawaringin Timur Dalam Angka” disediakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur yang memuat data dan informasi tentang Geografi dan Iklim, Pemerintahan, Penduduk dan Ketenagakerjaan, Sosial, Pertanian, Perindustrian dan Energi, Perdagangan, Transportasi, Komunikasi dan Pariwisata, Bangunan dan Agraria, Keuangan dan Perbankan, Harga-harga dan Pendapatan Regional di Kabupaten Kotawaringin Timur. Disamping itu Buku “PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur” juga tersedia yang memuat data dan informasi terkait kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam periode 2013-2017.

Tabel 2.57
Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Statistik						
1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kab. Kotim

X. Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.58
Hasil Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

Daerah Kabupaten Melawangi Tahun Periode 2016-2017						
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Komunikasi dan Informatika						
1	Jumlah jaringan komunikasi	4	4	4	4	4
2	Jumlah surat kabar nasional/lokal	6	6	6	6	6
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	6	6	6	2	2
5	Website milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1
6	Pameran/expo	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika (diolah)



Perkembangan jaringan telekomunikasi beberapa tahun terakhir tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, jika dilihat dari sebaran tiap ibu kota kecamatan yang ada, maka jaringan telepon telah menjangkaunya seluruh ibu kota kecamatan, namun masih ada beberapa desa yang tidak dapat jaringan telekomunikasi sejumlah 25 Desa di 6 Kecamatan. Jumlah surat kabar nasional tidak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, namun untuk jumlah penyiaran radio mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 sejumlah 6 stasiun, menjadi 2 stasiun pada tahun 2017.

Y. Perpustakaan

Tabel 2.59
Hasil Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Perpustakaan						
1	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	5.005	5.026	7.281	15.955	16.371
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	13.718 Judul	14.298 Judul	15.158 Judul	15.954 Judul	16.146 Judul

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotim

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan terlihat naik di tahun 2016. Untuk jumlah koleksi perpustakaan pada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat. Peningkatan tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 5.005 orang Tahun 2013 menjadi 16.371 orang Tahun 2017.

2.3.2 Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

Komoditi tanaman pangan memiliki peranan pokok sebagai pemenuh kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri. Produktivitas padi dan jagung masih rendah, dimana ada kesenjangan antara produktivitas riil dengan potensi hasil yang semestinya dapat dicapai. Di Kabupaten Kotawaringin Timur sendiri produktivitas padi hanya berkisar 35,00 Kw/Ha untuk padi sawah dan 22,51 Kw/Ha untuk padi ladang/gogo.

Pada tahun 2013, luas panen padi, produksi padi dan produktivitas padi di Kabupaten Kotawaringin Timur meningkat. Luas panen padi pada tahun 2013 mencapai 16.098 ha, sedangkan produksinya mencapai 48,54 ribu ton. Sementara itu produktivitasnya juga meningkat dari 26,25 kwintal per hektar pada tahun 2012 menjadi 30,15 kwintal pr hektr pada tahun 2013.



Dilihat dari sisi produktivitasnya, tanaman palawija yang perkembangannya cukup baik di Kotawaringin Timur adalah ubi kayu dan ubi jalar. Namun demikian pada tahun 2013 produksi sangat jauh menurun, hal ini disebabkan menurunnya luas panen. Luas panen ubi kayu dan ubi jalar pada tahun 2013 adalah 295 Ha dan 76 Ha. Sementara produksinya masing-masing sebesar 3.530 Ton dan 532 Ton.

Sektor pertanian adalah sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanian sedikit mengalami penurunan jika dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 20,19 persen. Penurunan kontribusi ini disebabkan karena peningkatan/laju pertumbuhan pada sektor lainnya yang melebihi pertumbuhan sektor pertanian.

Kawasan Selatan di Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan daerah pertanian, yang menjadi andalan dalam produksi tanaman pangan terutama padi. Lebih lengkap tentang hal ini tersaji dalam tabel 2.60 berikut.

Tabel 2.60
Hasil Kinerja Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah PERTANIAN	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produksi Padi atau bahan utama lokal lainnya per Hektar					
	a. Padi	48.538 Ton	45.807 Ton	75.034 Ton	84.529 Ton	78.430 Ton
	b. Jagung	120 Ton	28 Ton	4 Ton	0 Ton	176 Ton
	c. Kedelai	6 Ton	6 Ton	20 Ton	20 Ton	12 Ton
	d. Kacang Tanah	42 Ton	42 Ton	58 Ton	66 Ton	60 Ton
	e. Ubi Kayu	3.530 Ton	2.716 Ton	2.689 Ton	5.225 Ton	24.653 Ton
	f. Ubi Jalar	532 Ton	388 Ton	409 Ton	456 Ton	570 Ton
2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	19,61	20,11	19,95	20,26	20,19
3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	0,86	0,87	1,17	1,26	1,13
4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	18,10	18,50	18,07	18,30	18,43

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

Keterangan:

) Tahun 2013-2017 ATAP (Angka Tetap)

) Tahun 2017 ARAM. I (Angka Ramalan. I)

B. Kehutanan

Tahun 2017, proporsi sub sektor kehutanan terhadap kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 0,42 persen. Jika diperhatikan angka ini cenderung menurun jika dibandingkan pada tahun 2013 sampai tahun 2016. Secara detail dapat diperhatikan pada tabel 2.61.



Tabel 2.61
Hasil Kinerja Urusan Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,65	0,59	0,54	0,49	0,42

Sumber: PDRB (BPS, 2018; diolah)

C. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Timur mulai terlihat sejak tahun 2013 yang ditandai dengan laju pertumbuhan positif setelah tiga tahun sebelumnya secara berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan produksi hasil tambang yang sangat signifikan di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu pada komoditas bijih besi dan bauksit. Tingginya produksi hasil tambang dari dua komoditas tersebut menyebabkan pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian mencapai 108,68 persen, sehingga mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur secara signifikan. Sementara hasil tambang zirkon menurun dari tahun sebelumnya menjadi 3.192 kg. Sektor pertambangan memberikan kontribusi sebesar 0,90 persen terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2013.

Tabel 2.62
Hasil Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	5,72	3,45	3,00	3,08	3,09

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng dan BPS Kab. Kotim

D. Pariwisata

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki beberapa obyek wisata alam yang cukup menarik dan dapat dijadikan sebagai obyek wisata andalan, antara lain:

-) Pantai Ujung Pandaran dan Danau Burung, Kecamatan Teluk Sampit.
-) Konservasi Hutan Sagonta Kota, Kecamatan Baamang.
-) Danau Tangkarobah, Virgint Forest Sarpadu, Desa Wisata Pemantang (Batu Sapau, Batu Bakajang, Batu Banama), Kecamatan Mentaya Hulu.
-) Air Terjun Bukit Balawan, Kecamatan Telaga Antang.
-) Riam Sandung Angui, Kecamatan Antang Kalang.

Obyek wisata tersebut diatas apabila ditata dan dikelola dengan baik kedepannya diharapkan akan meningkatkan daya saing daerah, apalagi didukung dengan perkembangan sarana transportasi dan akomodasi di Kota Sampit yang



cukup pesat.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang cukup signifikan terjadi pada periode 2016-2017, dimana jumlah kunjungan pada tahun 2016 sebanyak 91.312 maka pada tahun 2017 menjadi 126.609 atau mengalami pertumbuhan sangat signifikan.

Tabel 2.63
Hasil Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kunjungan Wisata	30.000	57,465	61.070	91.312	126.609

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

E. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki kelautan yang berpotensi sangat bagus untuk dikembangkan, akan tetapi dilihat dari kontribusi sektor perikanan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur dibawah lima persen dan mempunyai pertumbuhan negatif. Pertumbuhan sektor perikanan tahun 2013 pertumbuhannya negatif sebesar -2,01, hal ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi hampir semua komoditas perikanan baik perikanan darat maupun perikanan laut. Pada perikanan laut, dari 23 komoditas perikanan laut Kabupaten Kotawaringin Timur hanya ada empat komoditas yang produksinya meningkat yaitu ikan senangin, udang putih, rajungan dan udang lainnya. Sedangkan pada komoditas perikanan darat dari 15 komoditas yang ada, juga hanya empat komoditas yang produksinya meningkat yaitu ikan, patin, nila, gurame dan udang sungai.

Berdasarkan analisa perekonomian daerah, sektor Pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan dan menjadi andalan utama dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur. Meskipun kontribusi sub sektor perikanan hanya sekitar 2,94 persen terhadap sektor pertanian dalam pembentukkan PDRB ADHB Kabupaten Kotawaringin Timur, namun kecenderungan peningkatan setiap tahun dengan pertumbuhan 16,60 persen berada diatas laju rata-rata pertumbuhan sektor pertanian yakni 14,19 persen. Indikator ini memberikan korelasi positif terhadap peran pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan data capaian tahun 2012, potensi Kelautan dan Perikanan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari tingkat produksi perairan laut



masih sangat rendah, yaitu 10.359,2 ton atau sekitar 23,91 persen dari potensi yang ada. Selain itu potensi tambak hanya terberdayakan sebesar 2,7 persen dari keseluruhan potensi pengembangan tambak (Potensi tambak di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit sebesar 13.125 Ha). Jika diasumsikan dengan tingkat pertumbuhan yang sama yakni 16,60 persen, maka pridiksi PDRB dari sub sektor perikanan tahun 2014 menjadi Rp.420.988.840.241. tetapi jika diasumsikan menggunakan pendekatan produksi berdasarkan IKU tahun 2014 (11.163,02 ton perikanan tangkap, 7.630,182 ton perikanan budidaya, dan 1.232,595 ton pengolahan perikanan) maka pridiksi PDRB dari sub sektor perikanan tahun 2014 menjadi Rp.505.738.584.417,49 dengan rata-rata pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan pertahun meningkat mencapai 30,61 persen. Kondisi ini harus didukung dengan peningkatan investasi pembangunan sektor perikanan dan pendukung lainnya.

Terkait kecenderungan terjadinya inflasi di Kota Sampit (tahun 2013) yang salah satu pemicunya dari sub sektor perikanan yakni ikan tenggiri dan ikan gabus dan deflasi dari jenis udang basah. Kecenderungan ini juga berimplikasi pada kebijakan investasi pada upaya peningkatan produksi terutama peningkatan prasarana sarana penangkapan, diversifikasi usaha budidaya dan pengolahan perikanan.

Tabel 2.64
Hasil Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produksi Perikanan Tangkap					
	a. Perairan laut (Ton)	7.702,6	7.834,3	7.867,2	8.941,4	8.942,7
	b. Nilai produksi perairan laut (Rp.000)	136.672.500	138.039.000	157.344.000	223.535.000	223.567.500
	c. Perairan umum (ton)	2.746,5	2.806,2	2.814,6	2.973,8	2.980,3
	d. Nilai produksi PUD (Rp.000)	79.281.800	72.961.800	84.438.000	104.083.000	104.310.500
2.	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/Kap/Tahun)	36,59	36,45	37,17	40,00	42,95
5.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	7,48	5,67	5,20	5,27	5,39

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

F. Perdagangan

Kontribusi dan pertumbuhan sektor perdagangan dipengaruhi oleh produksi sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan serta permintaan domestik atas barang impor yang menjadi komponen dalam



pembentukan sektor perdagangan (sub sektor perdagangan besar dan eceran). Sub sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi sebesar 27,88 persen terhadap PDRB dan memiliki peranan paling besar dalam perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 2.65
Hasil Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor perdagangan (sub sektor perdagangan besar dan eceran) terhadap PDRB	15,35	15,65	17,22	17,40	17,92
2	Ekspor bersih perdagangan	US\$32.22 7.951	US\$253.0 66.061,53	US\$258.9 60.000	US\$160.1 00.000	US\$274.4 00.000
3	Cakupan bina kelompok perdagangan/usaha non formal (unit usaha)	221 unit usaha	231 unit usaha	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

G. Perindustrian

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur tidak dapat dipisahkan dari peranan sektor industri pengolahan yang mencakup sub sektor industri non migas karena di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak terdapat industri migas.

Sektor industri pengolahan masih menempati posisi ketiga terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2013, setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selama tahun 2013, Nilai Tambah Bruto (NTB) pada sektor industri pengolahan terus meningkat. Pada tahun 2013, NTB sektor industri pengolahan mencapai lebih dari 1,67 triliun rupiah. Pertumbuhan sektor industri pengolahan akan selalu berkaitan erat dengan pertumbuhan sub sektor perkebunan dan kehutanan karena komoditas dari kedua sub sektor tersebut terutama hasil kebun kelapa sawit dan hasil hutan berupa kayu dan rotan merupakan komoditas terbesar kontribusinya dalam industri pengolahan.

Tabel 2.66
Hasil Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	20,24%	21,98%	22,00%	22,20%	23,56%
2	Pertumbuhan industri	127%	2,50%	0,20%	0,50%	1,36%

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim



H. Ketransmigrasian

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terakhir menerima penempatan transmigran dari luar kabupaten pada tahun 2010 sebanyak 350 KK terdiri dari 1.421 jiwa yang ditempatkan di beberapa UPT. Sejak tahun 2011 dan seterusnya Pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur melalui PD yang membidangi transmigrasi hanya melakukan kegiatan pembinaan terhadap transmigran yang ditempatkan dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur pada 1 UPT yaitu UPT Kandan.

Tabel 2.67
Hasil Kinerja Urusan Ketransmigrasian Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Transmigran Swakarsa	1	1	1	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotim dan BPS Kab Kotim

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Tinjauan PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Pengeluaran

Kondisi perekonomian Kotawaringin Timur menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.68 bahwa terdapat tujuh komponen pengeluaran dalam PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 2.68
PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017 Menurut
Pengeluaran (dalam miliar rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2013		2014		2015		2016*		2017**	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Konsumsi Rumah Tangga	5.488,0	4.631,3	6.210,5	4.838,9	6.913,5	5.072,5	7.709,7	5.322,0	8.594,8	5.575,8
2	Konsumsi LNPRT	130,2	110,4	154,6	119,4	169,8	123,6	182,5	126,5	198,2	136,0
3	Konsumsi Pemerintah	1.079,4	931,9	1.171,8	960,0	1.367,5	1.080,1	1.409,1	1.012,1	1.485,7	1.018,5
4	PMTB	6.662,5	5.337,4	7.391,1	5.702,1	7.979,7	6.018,9	8.791,1	6.234,7	9.729,6	6.448,9
5	Perubahan Inventori	113,7	63,6	219,2	151,3	228,7	138,7	189,0	113,3	109,2	40,7
6	Ekspor	12.123,9	10.666,4	13.133,4	11.223,0	15.239,4	11.989,0	17.645,3	13.389,0	20.485,7	15.075,7
7	Impor	11.591,4	9.772,6	12.916,6	10.143,7	14.606,1	10.586,8	16.304,0	11.264,9	18.173,6	12.169,6
Total PDRB		14.006,2	11.968,4	15.364,0	12.851,0	17.292,5	13.836,0	19.622,8	14.932,7	22.429,6	16.126,1

Sumber: PDRB (BPS, 2018; diolah)



Keterangan:

- *) : angka sementara
- **) : angka sangat sementara
- Tahun dasar: tahun 2010

Tabel 2.67 memperlihatkan bahwa selama periode 2013-2017, peran ekspor relatif besar. Sekitar 83 sampai dengan 87 persen produk dari Kabupaten Kotawaringin Timur mampu dibawa keluar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya produk CPO (*Crude Palm Oil*) dan karet yang dihasilkan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Demikian halnya impor masih mempunyai peran yang relatif besar karena sebagian besar permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk impor.

Selama tahun 2013-2017 neraca perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor menunjukkan posisi “surplus” yang menggambarkan bahwa nilai ekspor cenderung lebih tinggi dibanding nilai impor. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 45 sampai dengan 48 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 6 sampai dengan 7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Begitu juga pengeluaran kegiatan lembaga LNPRT mempunyai peran relatif kecil hanya sekitar 1 persen. Lebih detail dapat dilihat pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69
Proporsi Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017 (dalam persen)

No	Komponen Pengeluaran	2013		2014		2015		2016*		2017**	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Konsumsi Rumah Tangga	39,18	38,70	40,42	37,65	39,98	36,66	39,29	35,64	38,32	34,58
2	Konsumsi LNPRT	0,93	0,92	1,01	0,93	0,98	0,89	0,93	0,85	0,88	0,84
3	Konsumsi Pemerintah	7,71	7,79	7,63	7,47	7,91	7,81	7,18	6,78	6,62	6,32
4	PMTB	47,57	44,60	48,11	44,37	46,15	43,50	44,80	41,75	43,38	39,99
5	Perubahan Inventori	0,81	0,53	1,43	1,18	1,32	1,00	0,96	0,76	0,49	0,25
6	Ekspor	86,56	89,12	85,48	87,33	88,13	86,65	89,92	89,66	91,33	93,49
7	Impor	82,76	81,65	84,07	78,93	84,46	76,52	83,09	75,44	81,03	75,47
Total PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB (BPS, 2018; diolah)

Keterangan:

- *) : angka sementara
- **) : angka sangat sementara
- Tahun dasar: tahun 2010

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2013-2017



secara rata-rata mencapai 7,17 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 7,79 persen (2013); 7,37 persen (2014); 7,66 persen (2015); 7,93 persen (2016); dan 7,99 persen (2017). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 7,99 persen, sebaliknya pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 (7,37 persen). Lebih detail dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017 (dalam persen)

No	Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Konsumsi Rumah Tangga	5,24	4,48	4,83	4,92	4,77
2	Konsumsi LNPR	2,89	8,15	3,52	2,35	7,51
3	Konsumsi Pemerintah	5,83	3,02	12,51	(6,30)	0,63
4	PMTB	2,33	6,83	5,56	3,59	3,44
5	Perubahan Inventori	(19,29)	137,89	(8,33)	(18,31)	(64,08)
6	Ekspor	12,73	5,22	6,83	11,68	12,60
7	Impor	8,08	3,80	4,37	6,41	8,03
Total PDRB		7,79	7,37	7,66	7,93	7,99

Sumber: PDRB (BPS, 2018; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

B. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga menempati posisi ketiga terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu 2013-2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Total Konsumsi Akhir Rumah Tangga					
a	ADHB (Miliar Rp)	5.488,0	6.210,5	6.913,5	7.709,7	8.594,8
b	ADHK 2010 (Miliar Rp)	4.631,3	4.838,9	5.072,5	5.322,0	5.575,8
2	Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	39,18	40,42	39,98	39,29	38,32
3	Rata-rata konsumsi per-Kapita penduduk/tahun					
a	ADHB (Ribu Rp)	13.525,9	14.923,6	16.222,2	17.671,7	19.266,8
b	ADHK 2010 (Ribu Rp)	11.414,5	11.627,8	11.902,4	12.198,6	12.499,3
4	Pertumbuhan (%)					
a	Total Konsumsi Akhir RumahTangga	5,24	4,48	4,83	4,92	4,77



b	Per Rumah Tangga	0,24	1,82	2,52	2,49	2,46
c	Perkapita penduduk	2,65	1,87	2,36	2,49	2,46
5	Jumlah penduduk (000 org)	405,70	416,20	426,20	436,30	446,10

Sumber: PDRB (BPS, 2018; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB selama tahun 2013-2017 cenderung menurun. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 40,42 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 38,32 persen. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik, termasuk yang berasal dari impor turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik pada ADHB maupun ADHK. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita secara riil berkisar antara 0,86 sampai dengan 2,64 persen.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK sebesar 5,24 persen pada tahun 2013. Kemudian, melambat pada tahun berikutnya yaitu 4,48 persen di tahun 2014 kemudian meningkat di tahun 2015 menjadi 4,83 persen kemudian kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 4,92 dan kembali menurun menjadi 4,77 persen pada tahun 2017.

Dari tahun 2013 hingga 2017 konsumsi makanan lebih kecil dari pada konsumsi non makanan. Dari Tahun ke tahun proporsi konsumsi non makanan pun kian meningkat. Proporsi konsumsi makanan masing-masing sebesar 46,24 persen (2013); 46,20 persen (2014); 43,52 persen (2015); 43,17 persen (2016); dan 43,43 persen (2017). Lebih detail dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72
Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017 (dalam persen, berdasarkan
PDRB ADHB)

No	Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Makanan, Minuman, dan Rokok	46,24	46,20	43,52	43,17	43,43
2	Pakaian dan Alas Kaki	4,31	4,13	4,03	3,88	3,63
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	16,52	16,61	16,88	16,49	16,36
4	Kesehatan & Pendidikan	4,99	4,84	4,84	4,76	4,65
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	20,70	21,17	23,49	24,66	25,22
6	Hotel & Restoran	2,27	2,26	2,47	2,43	2,42
7	Lainnya	4,97	4,78	4,77	4,60	4,30
Makanan		46,24	46,20	43,52	43,17	43,43



Non Makanan	53,76	53,79	56,48	56,82	56,58
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB (BPS, 2018; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Dilihat dari pertumbuhan riil nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 2,23 persen (2013); 2,52 persen (2014); 1,38 persen (2015); 2,92 persen (2016) dan 4,87 persen (2017). Pertumbuhan riil ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk volume dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Lebih detail dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73
Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017 (dalam persen,
berdasarkan PDRB ADHK)

No	Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Makanan, Minuman, dan Rokok	2,23	2,52	1,38	2,92	4,87
2	Pakaian dan Alas Kaki	4,35	5,96	3,23	1,96	1,62
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,54	7,40	4,44	4,56	3,99
4	Kesehatan & Pendidikan	4,96	4,87	2,64	3,21	3,68
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,30	5,00	12,52	10,21	6,20
6	Hotel & Restoran	9,30	7,39	9,12	3,12	6,93
7	Lainnya	9,28	6,94	3,20	2,65	1,96
Total Konsumsi		5,24	4,48	4,83	4,92	4,77

Sumber: PDRB (BPS, 2018; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

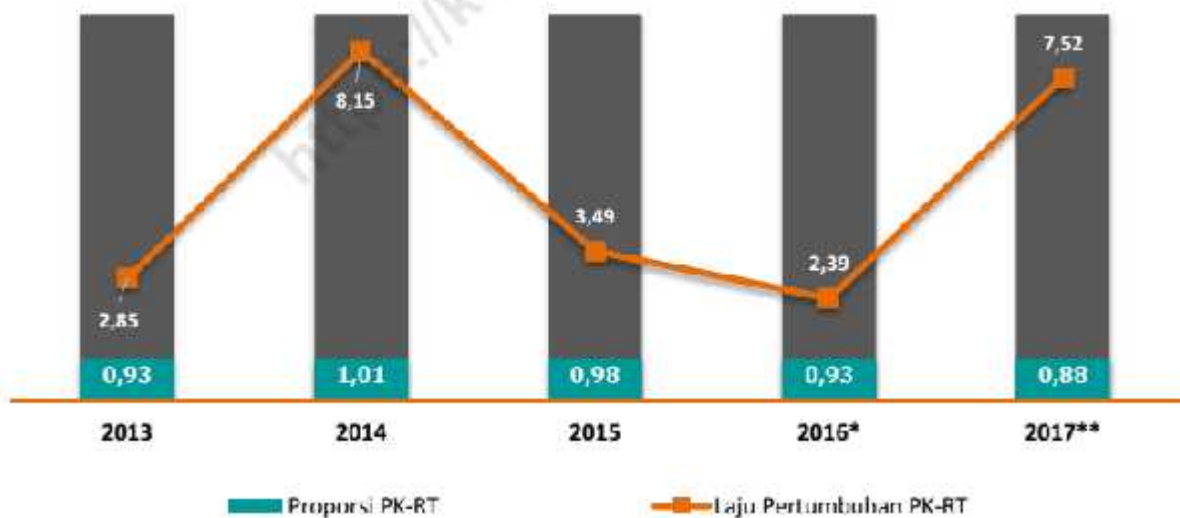
C. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPR

Peranan konsumsi akhir LNPR dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat

lebih ditingkatkan lagi.

Selama tahun 2013-2017 konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga terus mengalami peningkatan baik ADHB maupun ADHK. Meskipun peranan konsumsi LNPRT relatif kecil, yakni hanya sekitar 1 persen, tetapi perkembangan LNPRT cukup menggembirakan jika dilihat dari pertumbuhannya yang mampu tumbuh sekitar 2 sampai 8 persen. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya lembaga-lembaga non profit di Kabupaten Kotawaringin Timur, baik yang bersifat organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, maupun organisasi keagamaan. Lebih detail dapat dilihat pada Gambar 2.17.

Gambar 2.17
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2013-2017 (dalam persen, berdasarkan PDRB ADHB)



Sumber: PDRB (BPS, 2018)

Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

D. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian Tabel 2.74.

Tabel 2.74
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Total Konsumsi Akhir Pemerintah					
a	ADHB (Miliar Rp)	1.079,4	1.171,8	1.367,5	1.409,1	1.485,7
b	ADHK 2010 (Miliar Rp)	931,9	960,0	1.080,1	1.012,1	1.018,5
2	Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	7,71	7,63	7,91	7,18	6,62



No	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
3	Konsumsi Pemerintah per-Kapita penduduk					
a	ADHB (Ribu Rp)	2.660,2	2.815,7	3.208,8	3.229,9	3.330,6
b	ADHK 2010 (Ribu Rp)	2.296,7	2.306,9	2.534,5	2.319,8	2.283,1
4	Pertumbuhan (%)					
a	Total konsumsi pemerintah	5,83	3,02	12,51	-6,30	0,63
b	Konsumsi perkapita penduduk	3,22	0,44	9,87	-8,47	-1,58
5	Jumlah penduduk (000 org)	405,70	416,20	426,20	436,30	446,10

Sumber: PDRB (BPS, 2018; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 1.079,4 miliar rupiah, kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2017 nilainya mencapai 1.485,7 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Peranan konsumsi akhir pemerintah terhadap PDRB selama tahun 2013-2017 sekitar 6 sampai dengan 7 persen. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2017; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015 yang mencapai 7,91 persen. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per kapita ADHB sebesar 2.660,2 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

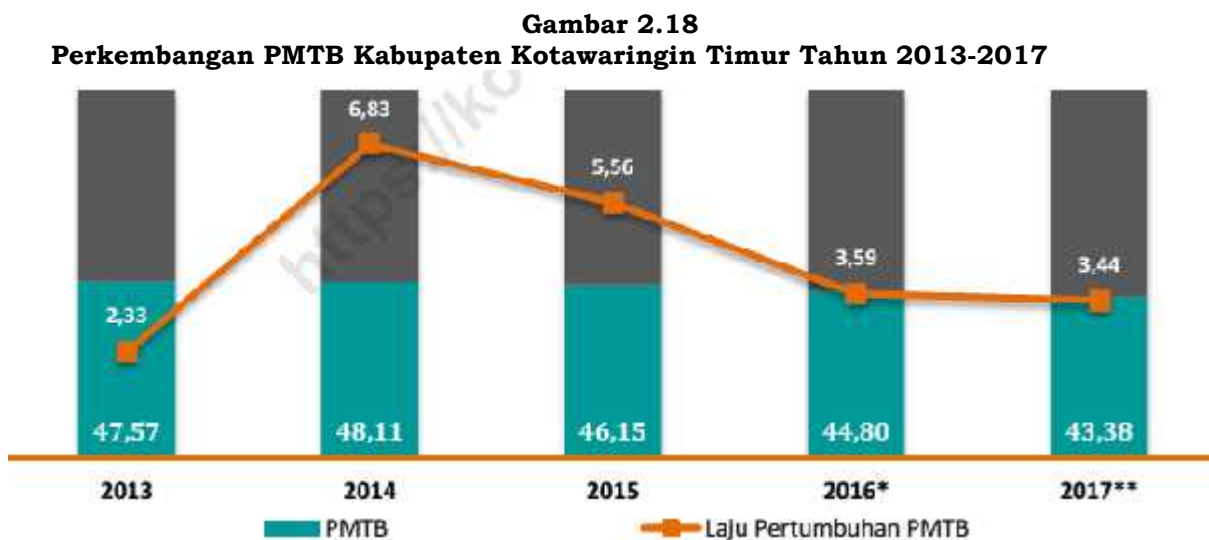
Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita ADHK 2010 cenderung meningkat setiap tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan sebesar 5,83 persen pada tahun 2013 selanjutnya menurun pada tahun 2014 sebesar 3,02 persen dan meningkat menjadi 12,51 persen pada tahun 2015 berikutnya kembali menurun -6,30 persen pada tahun 2016 dan kembali meningkat di tahun 2017 menjadi 0,63 persen.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara riil menunjukkan peningkatan secara keseluruhan dan rata-rata (per kapita penduduk). Pendekatan

parameter ini untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2015, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 5,83 persen dan 12,51 persen; sedangkan untuk konsumsi per kapita 3,22 persen dan 9,87 persen.

E. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Sedangkan pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital), selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.



Sumber: PDRB (BPS, 2018; diolah)

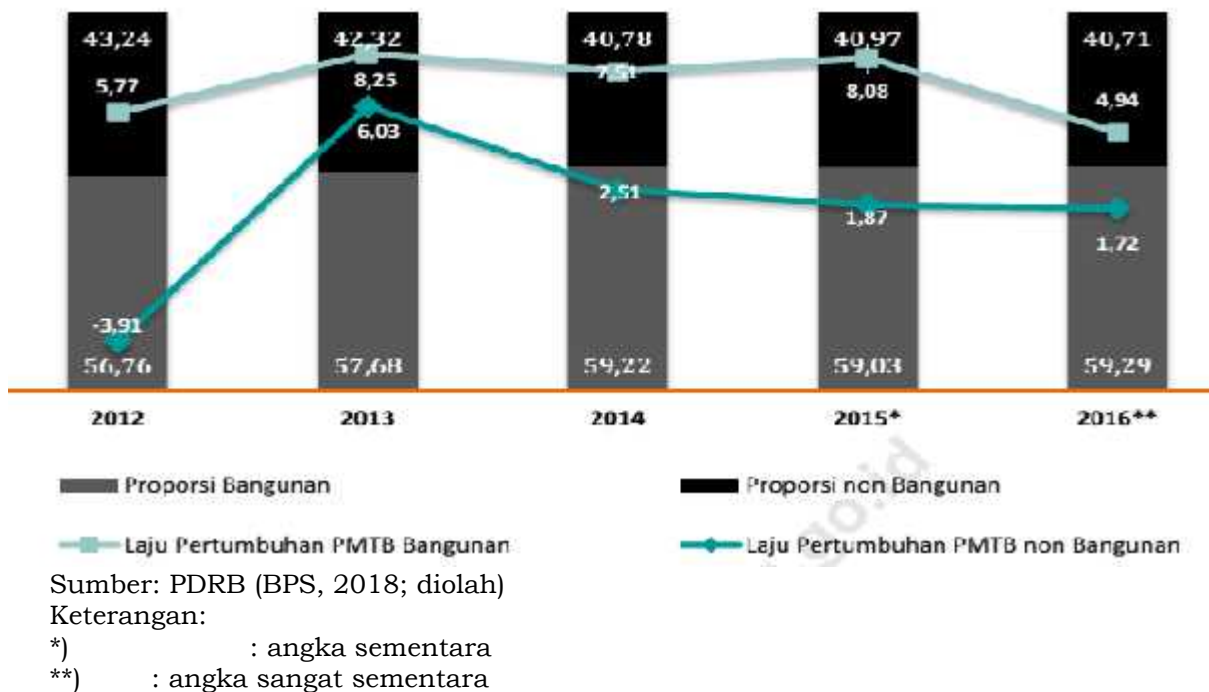
Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

Perkembangan komponen PMTB menurun di tahun 2017. Kontribusi komponen PMTB selama periode 2013 hingga 2017 rata-rata sebesar 46,00 persen. Pada tahun 2017 kontribusi komponen ini hanya mencapai 43,38 persen. Kontribusi tersebut turun dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan riil komponen ini juga mengalami perlambatan. Pada tahun 2017, komponen ini hanya tumbuh sebesar 3,44 persen. Perlambatan tersebut disebabkan melambatnya perkembangan realisasi investasi bangunan maupun non bangunan.

Gambar 2.19
Struktur dan Laju Pertumbuhan PMTB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017



Komponen PMTB terbentuk dari dua subkomponen yaitu PMTB bangunan dan PMTB non bangunan. Selama periode 2013 hingga 2017, PMTB Kabupaten Kotawaringin Timur ditopang oleh kontribusi PMTB bangunan dengan rata-rata sebesar 58,40 persen. Kontribusi tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2017 berkontribusi sebesar 59,29 persen atau tumbuh 4,94 persen dari tahun sebelumnya.

F. Perkembangan Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen ekspor netto). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).



Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah bahwa proporsi perubahan inventori dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Tahun 2013 perubahan inventori sebesar 113,70 miliar rupiah, kemudian pada tahun berikutnya meningkat menjadi 219,20 miliar rupiah pada tahun 2014 dan terus meningkat pada tahun 2015 menjadi 228,70 kemudian turun menjadi 189,00 miliar pada tahun 2016 dan menurun kembali pada tahun 2017 sebesar 109,20 miliar. Peranan perubahan inventori terhadap PDRB relatif kecil, yaitu hanya sekitar 1 persen. Lebih detail dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Total PMTB					
a	ADHB (Miliar Rp)	113,70	219,20	228,70	189,00	109,20
b	ADHK 2010 (Miliar Rp)	63,60	151,30	138,70	113,30	40,70
2	Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	0,81	1,43	1,32	0,96	0,49

Sumber: PDRB (BPS, 2018; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

**): angka sangat sementara

G. Perkembangan Ekspor Netto

Ekspor netto didefinisikan sebagai ekspor dikurangi impor. Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu ekspor dan impor. Sama halnya dengan perubahan inventori, ekspor netto juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor lebih besar daripada impor, demikian pula sebaliknya. Lebih detail dapat dilihat pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76
Perkembangan Ekspor Netto Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017 (dalam miliar rupiah)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Total Net Ekspor					
a	ADHB (Miliar Rp)	532,50	216,80	633,30	1341,3	2.312,10
b	ADHK 2010 (Miliar Rp)	893,80	1.079,30	1.402,20	2.124,10	2.906,10
2	Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	4,00	0,01	0,04	0,07	0,01
3	Pertumbuhan Riil (%ADHK 2010)	112,62	20,75	29,92	51,49	36,82

Sumber: PDRB (BPS, 2018; diolah)

Keterangan:



- *) : angka sementara
**) : angka sangat sementara

H. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio atau "ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output. Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Tabel 2.77
Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rp)	11.968,40	12.851,00	13.836,00	14.932,70	16.126,10
Perubahan PDRB ADHK 2010 (Miliar Rp)	864,70	882,70	985,00	1.096,70	1.193,40
PMTB ADHK 2010 (Miliar Rp)	5.337,40	5.702,10	6.018,90	6.234,70	6.448,90
ICOR	6,17	6,46	6,11	5,68	5,40

Sumber: PDRB (BPS, 2018; diolah)

Keterangan:

- *) : angka sementara
**) : angka sangat sementara

Perkembangan nilai atau koefisien ICOR Kabupaten Kotawaringin Timur dalam periode 2013 hingga 2017 menunjukkan tren yang semakin membaik. Pada awal periode tahun 2013, koefisien ICOR sebesar 6,17 yang berarti pada tahun tersebut untuk meningkatkan PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 100 ribu Rupiah diperlukan investasi sebesar 617 ribu Rupiah. Pada tahun 2017, koefisien ICOR lebih kecil dibanding tahun 2013 yaitu sebesar 5,40. Hal ini berarti produktivitas PMTB semakin baik karena semakin banyak outputnya yang berupa investasi fisik. Semakin kecil koefisien ICOR menunjukkan semakin efisien pembentukan modal yang terjadi. Walaupun secara riil, pertambahan output tidak hanya disebabkan oleh investasi modal, dapat juga disebabkan oleh faktor lain seperti kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi, dan lainnya.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim



investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada. Jumlah kasus Kabupaten Kotawaringin Timur relatif tinggi khusus kasus narkoba pada tahun 2013 mencapai 51 kasus, dan pada tahun 2017 mengalami jumlah kenaikan kasus narkoba mencapai 115 kasus.

B. Lama Proses Perijinan

Pengurusan proses perizinan yang cukup lama telah menjadi salah satu kendala utama dalam iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perizinan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengambil suatu kebijakan membentuk Unit Pelayanan Satu Atap melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) standar waktu pelayanan perizinan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.78
Standar Waktu Pelayanan Perizinan di Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Jenis Izin	Standar Waktu (dalam hari kerja)
1	Izin Gangguan (IG/HO)	Baru: 7 Perpanjangan: 3
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3
3	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3
4	Tanda Daftar Industri (TDI)	5
5	Izin Usaha Perdagangan (IUP/SIUP)	5
6	Izin Usaha Industri (IUI)	5
7	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5
8	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14
9	Izin Reklame	7
10	Izin Usaha Angkutan (IUA)	7

Sumber: DPMPTSP Kab. Kotim

C. Jumlah Dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah

Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi: (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Walet; (10) PBB Perdesaan dan Perkotaan; (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB); dan (12) Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2017 dapat direalisasikan sebesar Rp. 73.380.787.337,00. Rincian hasil pajak daerah



dapat dilihat pada bab III.

Tabel 2.79
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Realisasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Pendapatan Pajak Daerah	22.304.176.891	35.108.260.119	37.989.952.314	53.246.842.390	73.380.787.337
1	Pajak Hotel	613.327.895,00	808.184.264,00	988.915.033,00	1.320.681.119,00	2.009.351.039,00
2	Pajak Restoran	1.539.360.978,00	1.977.216.517,00	2.483.134.375,00	4.631.976.760,00	4.924.059.545,00
3	Pajak Hiburan	94.253.232,00	115.029.591,00	302.122.542,00	784.362.756,00	1.232.251.922,00
4	Pajak Reklame	1.173.053.029,00	1.223.547.600,00	1.703.508.032,00	1.684.296.993,00	1.926.486.208,00
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	9.743.153.453,00	12.128.959.432,00	15.029.092.966,00	14.852.436.692,00	19.468.519.234,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.409.142.084,00	1.583.534.048,00	1.996.836.962,00	1.558.552.895,00	1.410.094.255,00
7	Pajak Parkir	56.750.000,00	138.046.800,00	162.339.000,00	169.211.500,00	215.086.764,00
8	Pajak Air Tanah	43.420.800,00	14.899.320,00	19.943.400,00	29.153.000,00	53.182.600,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	-	163.320.000,00	171.750.000,00	172.486.270,00	379.044.016,00
10	Pajak Bumi & Bangunan	-	3.609.353.735,00	3.324.103.104,00	3.603.452.109,00	7.510.813.918,00
11	Bea Perolehan Hak atas tanah & Bangunan	6.631.715.420,00	13.346.168.812,00	11.808.206.900,00	24.440.232.296,00	34.251.897.836,00

Sumber: Bappenda Kab. Kotim

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. BPHTB yang semula merupakan Pajak Pusat, telah beralih menjadi pajak daerah sejak 1 Januari 2011 sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga menjadi salah satu komponen potensial pendapatan daerah. Pengalihan BPHTB ke dalam kas daerah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk membiayai pembangunan daerahnya. Begitu juga halnya dengan Pajak Air Tanah yang semula merupakan Pajak Provinsi telah beralih menjadi Pajak Daerah.

Jenis Retribusi Daerah yang menjadi tiga bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi: (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, (3) Retribusi perizinan tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2017 dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.333.307.851,00. Adapun perincian pendapatan dari Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.80
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Realisasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.942.223.980	1.822.822.900	1.970.782.036	2.061.679.900	2.482.471.972
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	514.999.000	600.439.500	607.729.386	254.158.000	243.350.000
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	1.167.740.000	189.545.000	201.349.884	-	-
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	718.999.115	1.312.183.250	1.351.738.793	530.584.000	2.353.858.600
5	Retribusi Pelayanan Pasar	1.594.551.794	1.569.048.648	1.707.160.669	2.266.714.508	2.127.126.792
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	502.146.000	620.734.000	629.611.781	630.151.000	639.163.464
7	Retribusi Biaya Cetak Peta	-	-	-	160.000	168.898
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	357.863.516	-	-	128.000.000	138.232.836
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	983.796.375	1.055.830.368	1.103.265.117	1.263.069.745	1.319.815.031
10	Retribusi Terminal	1.920.000	2.680.000	2.887.467	22.400.000	24.134.056
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.629.000	100.606.500	109.433.887	172.275.000	187.390.704
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.756.081.483	1.382.504.823	1.489.371.019	1.135.491.243	1.341.290.038
13	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	83.500.000	102.500.000	103.132.596	113.500.000	114.200.484
14	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	568.909.080	558.245.320	608.267.528	2.783.544.033	3.032.966.669
15	Retribusi Izin Trayek	3.225.000	3.000.000	3.235.000	1.810.000	1.951.783
16	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	5.000.000	2.100.000	2.118.092	1.200.000	1.210.338
17	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	468.236.100	481.058.697	413.007.900	424.318.078
18	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang			-	228.581.938	237.400.332
19	Pendapatan Denda Retribusi			-	117.540.659	121.634.936
20	Retribusi Tempat Pariwisata			-	59.134.000	60.046.805
21	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran			-	7.876.000	8.268.209



No.	Uraian	Realisasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
22	Retribusi Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya			-	5.617.450	6.144.196

Sumber: Bappenda Kab. Kotim

Tabel 2.81
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1)	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1.1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	7,79	7,37	7,66	7,93	7,99
1.1.1.2	PDRB per Kapita	29,50	30,89	32,46	34,24	36,15
1.1.1.3	Laju Inflasi	7,25	7,90	5,72	2,46	3,29
1.1.1.4	Pertumbuhan Penduduk	2,52	2,57	2,41	2,37	2,25
1.1.1.5	Tingkat Kemiskinan	6,85	6,67	6,42 %	6,32	6,24
1.2	Kesejahteraan Sosial					
1.2.1	Pendidikan					
1.2.1.1	Indeks Pembangunan Manusia	67,95	68,45	68,61	69,42	70,17
1.2.1.2	Harapan Lama Sekolah	11,82	12,04	12,05	12,21	12,59
1.2.1.3	Rata-Rata Lama Sekolah	7,59	7,69	7,70	7,88	7,89
1.2.1.4	Angka Harapan Hidup	69,05	69,41	69,51	69,60	69,70
1.2.1.5	Pengeluaran per Kapita	10,34	10,43	10,52	10,92	11,24
1.2.2	Ketenagakerjaan					
1.2.2.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	62,10	64,68	67,28	NA	63,21
1.2.2.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,45	4,11	3,53	NA	4,92
1.3	Seni Budaya dan Olahraga					
1.3.1	Kebudayaan					
1.3.1.1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	2	3	3	3	3
1.3.1.2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	3	3	3	3	3
1.3.2	Olah Raga					
1.3.2.1	Jumlah Organisasi Olahraga	20	24	30	30	30
1.3.2.2	Jumlah Kegiatan Olahraga	16	16	16	16	16
1.3.2.3	Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)	7	9	10	10	10
1.3.2.4	Lapangan Olahraga	198	200	205	205	205
1.3.2.5	Jumlah Gedung Olahraga (Selain Milik Swasta)	0	0	3	3	3
1.3.2.6	Jumlah Gedung Olahraga (Milik Swasta)	26	26	26	26	26
2)	PELAYANAN UMUM					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.1	Pelayanan Urusan Wajib					
2.1.1	Pendidikan					
2.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
2.1.1.1.1	Angka Partisipasi Murni (APM)	16.11	16.42	16.84	19.84	29.77
2.1.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	27.83	28.63	28.81	31.5	31.68
2.1.1.2	Pendidikan Dasar					
2.1.1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTS					
	Usia 7-12 Tahun	99.04	99.32	100	99.67	99.25
	Usia 13-15 Tahun	87.61	91.39	90.59	91.06	92.52
2.1.1.2.2	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	APM SD/MI/Paket A	81.91	97.72	97.54	96.2	96.66
	APM SMP/MTs/Paket B	54.98	78.29	78.28	75.45	72.14
2.1.1.2.3	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	APK SD/MI/Paket A	107.1	107.42	109.05	110.87	110.86
	APK SMP/MTs/Paket B	83.68	84.63	85.65	99.48	91.99
2.1.1.2.4	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah					
	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar	171	169	166	NA	369
2.1.1.2.5	Rasio Guru/Murid					
	Rasio guru/murid Pendidikan Dasar	17	16	16	NA	17
2.1.1.2.6	Rasio Guru/Murid Menurut Perkelas Rata-Rata					
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan Dasar	11.59	26.31	10.7	11.04	15.77
2.1.1.3	Pendidikan Menengah					
2.1.1.3.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA (Usia 16-18 Tahun)	67.04	74.16	40.36	60.28	63.68
2.1.1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	APM SMA/MA/SMK	58.86	59.26	57.05	69.18	46.91
2.1.1.3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	APK SMA/MA/SMK	53.26	63.38	67.95	50.28	63.68
2.1.1.3.4	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah					
	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah Pendidikan Menengah	297	296	295	296	297
2.1.1.3.5	Rasio Guru/Murid					
	Rasio guru/murid Pendidikan Menengah	14	13	13	NA	21
2.1.1.3.6	Rasio Guru/Murid menurut perkelas rata-rata					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan Menengah	47	46	45	44	44
2.1.1.4	Angka Melanjutkan (AM)					
2.1.1.4.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	108.44	109.64	111.77	100	100
2.1.1.4.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100.93	101.42	102.91	97.91	85.74
2.1.1.5	Fasilitas Pendidikan					
2.1.1.5.1	Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kondisi ruang kelas bangunan baik	83	85.1	86	86	85
2.1.1.5.2	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi ruang kelas bangunan baik	71	72	72	72	72
2.1.1.5.3	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi ruang kelas bangunan baik	62	63	63	63	63
2.1.1.5.4	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi ruang kelas bangunan baik	83	90.34	73	73	73
2.1.1.6	Kualifikasi Tenaga Pendidik					
2.1.1.6.1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV/S2/S3	69.72	72.38	76.94	76,94	77,94
2.1.2	Kesehatan					
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita	6.89	7.06	7.23	7.06	7.24
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0.46	0.51	0.49	0.44	0.43
2.1.2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004
2.1.2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	0.058	0.078	0.096	0.176	0.154
2.1.2.5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.073	0.098	0.121	0.277	0.27
2.1.2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	97.17	100	100	100	100
2.1.2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90.38%	87.78%	83.65%	0.736	0.7468
2.1.2.8	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	85.96%	76.22%	76.76%	0.6	0.551
2.1.2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	1	1	1	1	1
2.1.2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	28.64%	28.02%	0.3781	1	1
2.1.2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	1	1	1	1	1
2.1.2.12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0.15%	2.20%	0.0618	0.0313	0.024



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.1.2.13	Cakupan kunjungan bayi	93.44%	85.65%	84.46%	0.69	0.755
2.1.2.14	Cakupan puskesmas	117.6%	117.6%	117.6%	1.176	1.235
2.1.2.15	Cakupan pembantu puskesmas	69.7%	76.2%	76.2%	0.762	0.762
2.1.3	Pekerjaan Umum					
2.1.3.1	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi baik	146.43	176.21	202.53	242.64	259.13
2.1.3.2	Panjang Jalan dilalui roda 4	935.825	1589.96	1707.232	1792.59	1882.22
2.1.3.3	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	428.16	507.07	616.67	647.5	679.87
2.1.3.4	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	481.458	605.958	660.42	669.53	710.93
2.1.3.5	Rumah tinggal bersanitasi	48.360	48.500	48.700	48.700	54.514
2.1.3.6	Lingkungan Pemukiman	10.500	11.375	11.500	11.500	11.500
2.1.3.7	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	5.040	5.040	5.040	196.928	197.878
2.1.3.8	Jenis Jembatan (buah)					
	a. Jumlah Jembatan Kayu	152	154	154	153	153
	b. Jumlah Jembatan Beton	27	34	35	36	38
	c. Jumlah Jembatan Baja	6	8	10	10	12
2.1.3.9	Panjang Jembatan (meter)					
	a. Jembatan Kayu	3.536.5	3.561.5	3.561.5	3.566.5	3.566.5
	b. Jembatan Beton	314.5	331	348	358	365
	c. Jembatan Baja	460	630	750	750	870
2.1.3.10	Jembatan dalam kondisi baik (buah)					
	a. Jembatan Kayu	126	139	144	153	153
	b. Jembatan Beton	27	34	35	36	38
	c. Jembatan Baja	6	8	10	10	12
2.1.3.11	Jembatan dalam kondisi rusak (buah)					
	a. Jembatan Kayu	59	57	55	56	54
	b. Jembatan Beton	-	-	-	-	-
	c. Jembatan Baja	-	-	-	-	-
2.1.3.12	Rasio jaringan irigasi	2,73/km	2,88/km	2,96/km	2,96/km	2,96/km
2.1.3.13	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	0.5279	0.7259	0.5825	0.1791	0.1969
2.1.4	Perumahan					
2.1.4.1	Rumah tangga yang menggunakan air bersih	0.5354	0.6569	0.621	0.7264	0.7662
2.1.4.2	Cakupan pelayanan air minum/bersih	391.604	399.894	475.469	441.079	436.276
2.1.4.3	Penduduk berakses air minum	209.658	262.680	295.271	320.421	334.264
2.1.4.4	Jumlah KK yang tersambung dengan PDAM (KK)	24.074	25.014	25.597	26.029	26.930
2.1.4.5	Rumah Tidak Layak Huni (unit)	NA	5612	9542	456	212



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.1.4.6	Rumah Tangga pengguna air bersih	0.5354	0.6569	0.6569	0.7264	0.7662
2.1.4.7	Kawasan kumuh	49,44 Ha	49,44 Ha	49,44 Ha	NA	0,28 Ha
2.1.5	Penataan Ruang					
2.1.5.1	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	146	160	579	459	326
2.1.6.	Perencanaan Pembangunan					
2.1.6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.1.6.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.1.6.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.1.7	Perhubungan					
2.1.7.1	Jumlah Arus penumpang angkutan umum	20.509	16.26	444.93	245.693	275.937
2.1.7.2	Rasio ijin trayek	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10
2.1.7.3	Jumlah uji KIR angkutan umum	502	1.671	1.671	812	824
2.1.7.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1/1/3	1/1/3	1/1/3	1/1/4	1/1/4
2.1.7.5	Angkutan darat	-	4582	4431	9.765	10.956
2.1.7.6	Kepemilikan KIR angkutan umum	29	29	29	327	540
2.1.7.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam
2.1.7.8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
2.1.7.9	Pemasangan rambu-rambu lalu lintas (jumlah rambu)	-	271	271	190	190
2.1.8	Lingkungan Hidup					
2.1.8.1	Persentase Penanganan Sampah	68	70	70	58	58
2.1.8.2	Persentase penduduk berakses air minum	51.68	63.12	69.28	73.44	74.93
2.1.8.3	Pencemaran status mutu air	117	117	117	49	50
2.1.8.4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	70	67	57	100	100
2.1.8.5	Penegakan hukum lingkungan	100	100	100	100	100
2.1.9	Pertanahan					
2.1.9.1	Persentase luas lahan bersertifikat	166.2	7.76	330.2	655.2	200,3
2.1.9.2	Penyelesaian kasus tanah negara	100	100	100	88	53
2.1.9.3	Penyelesaian izin lokasi	100	100	100	100	91
2.1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil					
2.1.10.1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0.55	0.71	0.71	0.55	0.54
2.1.10.2	Rasio anak berakte kelahiran	0.19	0.23	0.64	0.29	0.38
2.1.10.3	Rasio pasangan berakte nikah	0.04	0.04	0.05	0.14	0.17
2.1.10.4	Kepemilikan KTP	54,86	70,63	70,75	78.31	79.1



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.1.10.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	25,40	24,94	33,73	37.8	40.53
2.1.10.6	Ketersediaan Database kependudukan skala Kabupaten Kotawaringin Timur	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.1.10.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
2.1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1.11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	7,16	6,55	6,84	6,9	7,13
2.1.11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	25,54	39,78	84,79	57,88	61,25
2.1.11.3	Rasio KDRT	0,31	0,63	0,31	0,27	0,19
2.1.11.4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0	0	0	0	0
2.1.11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	55,41	91,20	91,65	NA	27,45
2.1.11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	19	22	21	16	22
2.1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					
2.1.12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	218,11	267,86	316,42	291,12	295,21
2.1.12.2	Rasio akseptor KB	77,35	72,41	76,56	78,07	75,41
2.1.12.3	Cakupan peserta KB aktif	77,35	76,56	76,56	78,07	75,41
2.1.13	Sosial					
2.1.13.1	Sarana sosial : Panti Asuhan	8	8	8	8	8
2.1.14	Ketenagakerjaan					
2.1.14.1	Angkatan kerja	97.55	95.89	96,47	NA	95,08
2.1.14.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	62.1	64.68	67,28	NA	63,21
2.1.14.3	Pencari kerja yang ditempatkan	593	915	380	415	357
2.1.14.4	Tingkat pengangguran terbuka	2.45	4.11	3,53	NA	4,92
2.1.14.5	Keselamatan dan perlindungan	61.76	67.65	71.57	70,11	72,11
2.1.15	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
2.1.15.1	Koperasi,Usaha Mikro,Kecil dan Menengah					
	1. Jumlah Induk Koperasi/Koperasi Sekunder	-	-	-	-	-
	2. Jumlah Koperasi Primer	320	325	355	370	308
	3. Koperasi Aktif	234	239	269	268	239
	4. Koperasi Tidak Aktif	86	86	86	102	69
	5. Koperasi KUD	30	30	30	30	30
	6. Koperasi Non KUD	290	295	325	340	278
2.1.15.2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:	9.233	10.017	10.865	12.318	15.876
	Mikro	8.259	9.043	9.637	10.699	14.198



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Kecil	972	972	1.226	1.617	1.674
	Menengah	2	2	2	2	4
2.1.16	Penanaman Modal					
2.1.16.1	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional PMDN(dalam Rp.juta)	76.870	131.963	1.296.792	10.420,57	8.746,54
2.1.16.2	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional PMA (dalam US\$. Ribu dan dalam Rp.juta)	295.331	55.889	5.283,7	6.372,15	2.072,15
2.1.17	Kebudayaan					
2.1.17.1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	2	3	3	3	4
2.1.17.2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	3	3	3	3	3
2.1.17.3	Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0	0	0	1	1
2.1.18	Kepemudaan dan Olah Raga					
2.1.18.1	Jumlah organisasi pemuda	20	24	30	35	35
2.1.18.2	Jumlah organisasi olahraga	16	16	16	23	23
2.1.18.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	7	9	10	18	18
2.1.18.4	Jumlah kegiatan olahraga	16	16	16	18	18
2.1.18.5	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	0	0	3	3	3
2.1.18.6	Lapangan olahraga	26	26	26	37	42
2.1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
2.1.19.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	1	1	1
2.1.19.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	1	1	1
2.1.19.3	Jumlah LSM (aktif)	45	36	38	65	53
2.1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
2.1.20.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1.750	1.622	1.647	1.690	1.650
2.1.20.2	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	75.129	86.477	67.862	71.621	71.621
2.1.20.3	Pertumbuhan Ekonomi	7.79	7.37	7.62	7.93	7.99
2.1.20.4	Kemiskinan	6.85	6.67	6.42	6.32	6.24
2.1.20.5	Penegakan PERDA	0.83	0.83	NA	100	100
2.1.20.6	Cakupan patroli petugas Satpol PP	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
2.1.20.7	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten per 10.000 Penduduk	0.008	0.007	NA	0.109	0.109
2.1.21	Ketahanan Pangan					
2.1.21.1	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.1.21.2	Ketersediaan pangan utama	75.61	69.56	111.06	116.6	143.4



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
2.1.22.1	PKK aktif	192	192	192	192	192
2.1.22.2	Posyandu aktif	281	295	296	305	315
2.1.23.	Statistik					
2.1.23.1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.1.23.2	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.1.24	Komunikasi dan Informatika					
2.1.24.1	Jumlah jaringan komunikasi	4	4	4	4	4
2.1.24.2	Jumlah surat kabar nasional/lokal	6	6	6	6	6
2.1.24.3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	6	6	6	2	2
2.1.24.4	Website milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1
2.1.24.5	Pameran/expo	1	1	1	1	1
2.1.25	Perpustakaan					
2.1.25.1	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1
2.1.25.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	5.005	5.026	7.281	15.955	16.371
2.1.25.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	13.718 Judul	14.298 Judul	15.158 Judul	15.954 Judul	16.146 Judul
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan					
2.2.1	Pertanian					
2.2.1.1	Produksi Padi atau bahan utama lokal lainnya per Hektar					
	a. Padi	48.538 Ton	45.807 Ton	75.034 Ton	84.529 Ton	78.430 Ton
	b. Jagung	120 Ton	28 Ton	4 Ton	0 Ton	176 Ton
	c. Kedelai	6 Ton	6 Ton	20 Ton	20 Ton	12 Ton
	d. Kacang Tanah	42 Ton	42 Ton	58 Ton	66 Ton	60 Ton
	e. Ubi Kayu	3.530 Ton	2.716 Ton	2.689 Ton	5.225 Ton	24.653 Ton
	f. Ubi Jalar	532 Ton	388 Ton	409 Ton	456 Ton	570 Ton
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	19.61	20.11	19.95	20.26	20.19
2.2.1.3	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	0.86	0.87	1.17	1.26	1.13
2.2.1.4	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	18.1	18.5	18.07	18.3	18.43
2.2.2	Kehutanan					
2.2.2.1	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,65	0,59	0,54	0.49	0.42
2.2.3	Energi dan Sumber Daya Mineral					
2.2.3.1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	5.72	3,45	3,00	3.08	3.09
2.2.4	Pariwisata					
2.2.4.1	Kunjungan Wisata	30.000	57.465	61.070	91.312	12.6609
2.2.5	Kelautan dan Perikanan					
2.2.5.1	Produksi Perikanan Tangkap					
	a. Perairan laut (Ton)	7.702.6	7.834.3	7.867.2	8.941.4	8.942.7
	b. Nilai produksi peraian laut (Rp.000)	136.672.500	138.039.000	157.344.000	22.3535.000	223.567.500



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
	c. Perairan umum (ton)	2.746.5	2.806.2	2.814.6	2.973.8	2.980.3
	d. Nilai produksi PUD (Rp.000)	79.281.800	72.961.800	84.438.000	104.083.000	104.310.500
2.2.5.2	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/Kap/Tahun)	36.59	36.45	37.17	40	42.95
2.2.5.3	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	7.48	5.67	5.2	5.27	5.39
2.2.6	Perdagangan					
2.2.6.1	Kontribusi sektor perdagangan (sub sektor perdagangan besar dan eceran) terhadap PDRB	15.35	15.65	17.22	17.4	17.92
2.2.6.2	Ekspor bersih perdagangan	US\$ 32.227.951	US\$ 253.066.061,53	US\$ 258.960.000	US\$ 160.100.000	US\$ 274.400.000
2.2.7	Perindustrian					
2.2.7.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	20,24%	21,98%	22,00%	0.222	0.2356
2.2.7.2	Pertumbuhan industri	127%	2,50%	0.002	0.005	0.0136
2.2.8.	Ketransmigrasian					
2.2.8.1	Transmigran Swakarsa	1	1	1	0	0
3)	DAYA SAING DAERAH					
3.1	Kemampuan Ekonomi Daerah					
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
3.1.1.1	Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	5,24	4,48	4,83	4,92	4,77
3.1.1.2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga	2,89	8,15	3,52	2,35	7,51
3.1.1.3	Konsumsi Pemerintah	5,83	3,02	12,51	(6,30)	0,63
3.1.1.4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,33	6,83	5,56	3,59	3,44
3.1.1.5	Perubahan Inventori	(19,29)	137,89	(8,33)	(18,31)	(64,08)
3.1.1.6	Ekspor	12,73	5,22	6,83	11,68	12,60
3.1.1.7	Impor	8,08	3,80	4,37	6,41	8,03
3.1.2	Iklim Berinvestasi					
3.1.2.1	Angka Kriminalitas	96,12	91,60	92	91	115
3.1.2.2	Pendapatan Pajak Daerah	22.304.176.891	35.108.260.119	37.989.952.314	53.246.842.390	73.380.787.337
3.1.2.2.1	Pajak Hotel	613.327.895	808.184.264	988.915.033	1.320.681.119	2.009.351.039
3.1.2.2.2	Pajak Restoran	1.539.360.978	1.977.216.517	2.483.134.375	4.631.976.760	4.924.059.545
3.1.2.2.3	Pajak Hiburan	94.253.232	115.029.591	302.122.542	784.362.756	1.232.251.922
3.1.2.2.4	Pajak Reklame	1.173.053.029	1.223.547.600	1.703.508.032	1.684.296.993	1.926.486.208
3.1.2.2.5	Pajak Penerangan Jalan Umum	9.743.153.453	12.128.959.432	15.029.092.966	14.852.436.692	19.468.519.234
3.1.2.2.6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.409.142.084	1.583.534.048	1.996.836.962	1.558.552.895	1.410.094.255
3.1.2.2.7	Pajak Parkir	56.750.000	138.046.800	162.339.000	169.211.500	215.086.764
3.1.2.2.8	Pajak Air Tanah	43.420.800	14.899.320	19.943.400	29.153.000	53.182.600
3.1.2.2.9	Pajak Sarang Burung Walet	-	163.320.000	171.750.000	172.486.270	379.044.016
3.1.2.2.10	Pajak Bumi & Bangunan	-	3.609.353.735	3.324.103.104	3.603.452.109	7.510.813.918



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
3.1.2.2.11	Bea Prolehan Hak atas tanah & Bangunan	6.631.715.420	13.346.168.812	11.808.206.900	24.440.232.296	34.251.897.836
3.1.2.3	Retribusi Daerah					
3.1.2.3.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.942.223.980	1.822.822.900	1.970.782.036	2.061.679.900	2.482.471.972
3.1.2.3.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	514.999.000	600.439.500	607.729.386	254.158.000	243.350.000
3.1.2.3.3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	1.167.740.000	189.545.000	201.349.884	-	-
3.1.2.3.4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	718.999.115	1.312.183.250	1.351.738.793	530.584.000	2.353.858.600
3.1.2.3.5	Retribusi Pelayanan Pasar	1.594.551.794	1.569.048.648	1.707.160.669	2.266.714.508	2.127.126.792
3.1.2.3.6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	502.146.000	620.734.000	629.611.781	630.151.000	639.163.464
3.1.2.3.7	Retribusi Biaya Cetak Peta	-	-	-	160.000	168.898
3.1.2.3.8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	357.863.516	-	-	128.000.000	138.232.836
3.1.2.3.9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	983.796.375	1.055.830.368	1.103.265.117	1.263.069.745	1.319.815.031
3.1.2.3.10	Retribusi Terminal	1.920.000	2.680.000	2.887.467	22.400.000	24.134.056
3.1.2.3.11	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.629.000	100.606.500	109.433.887	172.275.000	187.390.704
3.1.2.3.12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.756.081.483	1.382.504.823	1.489.371.019	1.135.491.243	1.341.290.038
3.1.2.3.13	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	83.500.000	102.500.000	103.132.596	113.500.000	114.200.484
3.1.2.3.14	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	568.909.080	558.245.320	608.267.528	2.783.544.033	3.032.966.669
3.1.2.3.15	Retribusi Izin Trayek	3.225.000	3.000.000	3.235.000	1.810.000	1.951.783
3.1.2.3.16	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	5.000.000	2.100.000	2.118.092	1.200.000	1.210.338
3.1.2.3.17	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	468.236.100	481.058.697	413.007.900	424.318.078
3.1.2.3.18	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang			-	228.581.938	237.400.332
3.1.2.3.19	Pendapatan Denda Retribusi			-	117.540.659	121.634.936
3.1.2.3.20	Retribusi Tempat Pariwisata			-	59.134.000	60.046.805
3.1.2.3.21	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran			-	7.876.000	8.268.209
3.1.2.3.22	Retribusi Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya			-	5.617.450	6.144.196

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2010-2017

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Periode kinerja keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur disajikan untuk periode tahun 2011-2017, untuk penyajian datanya diuraikan mulai tahun 2010 sebagai data dasar atau kondisi eksisting periode tahun 2011-2017, serta untuk memenuhi teknis penghitungan rata-rata pertumbuhan. Data kinerja keuangan tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 diperoleh dari Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2017. Data kinerja keuangan tahun 2017 disajikan data yang belum diaudit, dan diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen APBD terdiri atas:

A. Komponen Pendapatan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.



B. Komponen Belanja:

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

C. Komponen Pembiayaan:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Ringkasan perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.1
APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

U R A I A N		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PENDAPATAN		671.397.469.600,00	828.734.509.480,00	927.039.481.418,50	1.174.156.171.006,29	1.271.049.106.072,36	1.417.508.897.992,25	1.612.919.456.649,57	1.613.878.776.709,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH		50.648.575.000,00	63.335.570.000,00	88.262.410.000,00	125.658.370.288,00	142.921.120.244,30	159.190.201.323,84	180.025.392.949,57	241.768.921.009,00
1	Pendapatan Pajak Daerah	6.716.977.000,00	17.363.596.000,00	7.847.440.000,00	21.579.670.288,00	36.510.240.126,59	36.510.240.126,59	39.512.434.000,00	43.099.211.024,00
2	Hasil Retribusi Daerah	25.157.668.000,00	8.054.196.000,00	91.810.119.947,00	9.848.177.500,00	12.701.331.000,00	12.813.831.709,00	14.248.193.800,00	11.617.214.804,00
3	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.830.000.000,00	2.750.000.000,00	2.500.000.000,00	4.410.332.000,00	5.747.690.957,16	5.747.690.957,16	5.698.978.749,57	4.238.380.644,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.943.930.000,00	35.167.778.000,00	67.253.845.000,00	89.820.190.500,00	116.070.366.000,00	102.623.510.178,68	120.565.786.400,00	182.814.114.537,00
DANA PERIMBANGAN		565.738.206.000,00	665.680.085.000,00	725.023.516.000,00	859.593.730.132,00	944.011.377.298,00	968.514.728.265,00	1.241.515.046.000,00	1.149.656.835.000,00
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak	73.667.544.000,00	88.065.422.000,00	76.176.635.000,00	93.916.473.132,00	135.464.302.000,00	127.086.625.265,00	145.723.581.000,00	110.194.165.000,00
2	Dana Alokasi Umum	459.745.862.000,00	531.968.763.000,00	618.026.440.000,00	708.665.917.000,00	788.804.313.000,00	788.804.313.000,00	832.526.925.000,00	820.559.562.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	32.324.800.000,00	45.645.900.000,00	30.820.440.000,00	57.011.340.000,00	53.011.650.000,00	52.625.790.000,00	263.264.540.000,00	218.903.108.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		55.010.688.600,00	99.718.854.480,00	41.317.673.265,00	188.904.070.286,29	184.116.608.530,06	289.801.968.403,41	191.379.017.700,00	222.453.020.700,00
1	Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	1.702.475.000,00	1.256.638.265,00	0,00	6.450.543.000,00	75.163.988.909,18	0,00	0,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	34.000.000.000,00	41.000.000.000,00	72,435.882.153,50	93.112.287.286,29	102.610.032.705,25	63.817.651.494,23	81.148.532.700,00	81.148.532.700,00
3	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	20.010.688.600,00	57.016.379.480,00	39.911.035.000,00	89.642.183.000,00	95.606.603.000,00	95.606.603.000,00	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	150.000.000,00	6.149.600.000,00	7.830.000.000,00	55.213.725,00	0	0,00



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

U R A I A N		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.230.485.000,00	133.804.488.000,00
BELANJA		705.106.666.100,00	864.416.958.000,00	968.736.121.500,50	1.313.501.419.830,00	1.410.032.040.729,26	1.466.904.089.587,80	1.512.626.847.318,51	1.751.422.707.767,78
BELANJA TIDAK LANGSUNG		356.481.459.798,15	413.406.329.400,00	480.343.013.600,00	578.968.375.567,00	594.818.997.347,26	749.026.115.978,50	716.639.615.383,51	863.790.828.424,76
BELANJA LANGSUNG		348.625.206.301,85	451.010.628.600,00	488.393.107.900,00	734.533.044.263,00	815.213.043.382,00	717.877.973.609,30	795.987.231.935,00	887.631.879.343,02
SURPLUS (DEFISIT)		(33.709.196.500,00)	(35.682.448.520,00)	(41.696.640.081,50)	(139.345.248.823,71)	(138.982.934.656,90)		(2.921.367.644.107,51)	(137.543.931.058,78)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		70.113.949.412,00	86.543.921.662.53,00	167.695.093.142,98	254.729.225.901,31	264.718.349.099,90	321.122.895.048,43	218.151.879.443,61	321.122.895.048,43
1	Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	62.088.949.412,00	78.518.921.662.53,00	159.670.093.142,98	254.729.225.901,31	264.171.866.099,90	321.122.895.048,43	159.319.785.279,84	321.122.895.048,43
2	Penerimaan kembali pinjaman	8.025.000.000,00	8.025.000.000,00	8.025.000.000,00	0,00	3.483.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan kembali investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		1.839.776.673,65	7.174.000.000,00	7.174.000.000,00	9.974.000.000,00	15.369.000.000,00	11.370.000.000,00	15.370.000.000,00	11.370.000.000,00
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.839.776.673,65	7.174.000.000,00	7.174.000.000,00	9.974.000.000,00	15.369.000.000,00	11.370.000.000,00	5.370.000.000,00	11.370.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto		68.274.172.738,35	79.369.921.662,53	160.521.093.142,98	244.755.225.901,31	249.349.349.099,90	309.752.895.048,43	202.781.879.443,61	309.752.895.048,43

Sumber : BPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur

Penjelasan selengkapnya mengenai setiap komponen Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dapat dilihat pada uraian berikut ini.

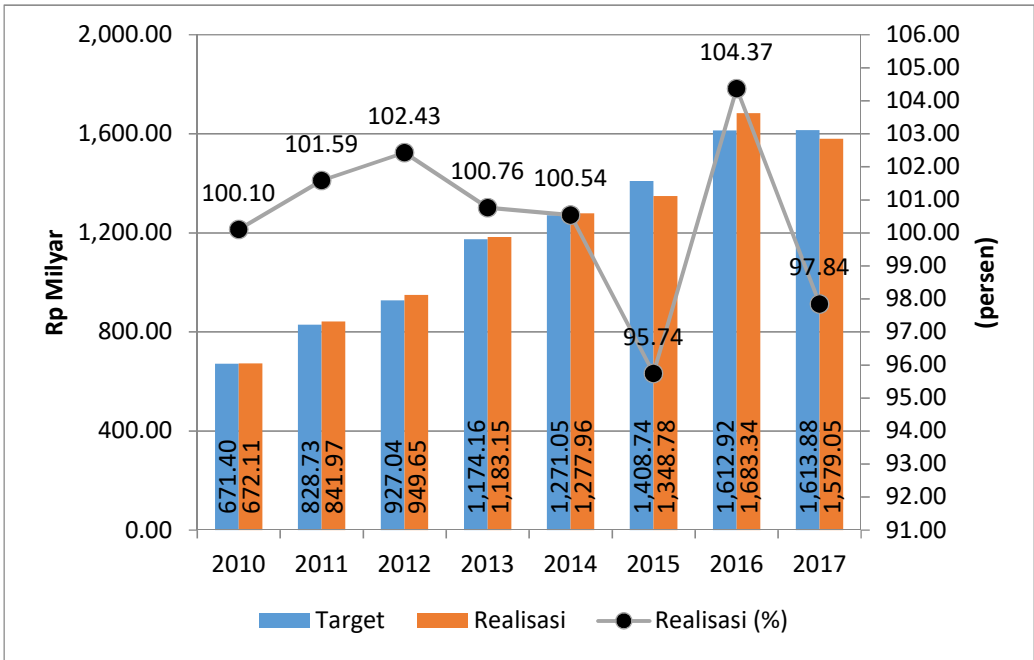
3.1.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2010 sampai dengan 2017 (Tabel 3.2).

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	671.397.469.600,00	672.110.541.949,69	100,10	713.072.349,69
2011	828.734.509.480,00	841.969.411.205,22	101,59	13.234.901.725,22
2012	927.039.481.418,50	949.653.397.938,75	102,43	22.613.916.520,25
2013	1.174.156.171.006,29	1.183.154.186.108,20	100,76	8.998.015.101,91
2014	1.271.049.106.072,36	1.277.963.486.669,73	100,54	6.914.380.597,37
2015	1.408.740.796.789,00	1.348.777.186.814,38	95,74	(59.963.609.974,62)
2016	1,612,919,456,649.57	1.683.342.255.828,07	104,37	70.422.799.179
2017	1.613.878.776.709,00	1.579.048.584.267,91	97,84	(34.830.192.442)
Rata-rata	1.188.489.470.965,37	1.192.002.381.347.25		

Sumber: Perda PertanggungjawabanPelaksanaan APBD TA. 2010-2017



Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2017, rata-rata target Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.188.489.470.965,37 dengan realisasi sebesar Rp. 1.192.002.381.347.25 Berdasarkan pencermatan terhadap realisasi pendapatan daerah, proporsi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah

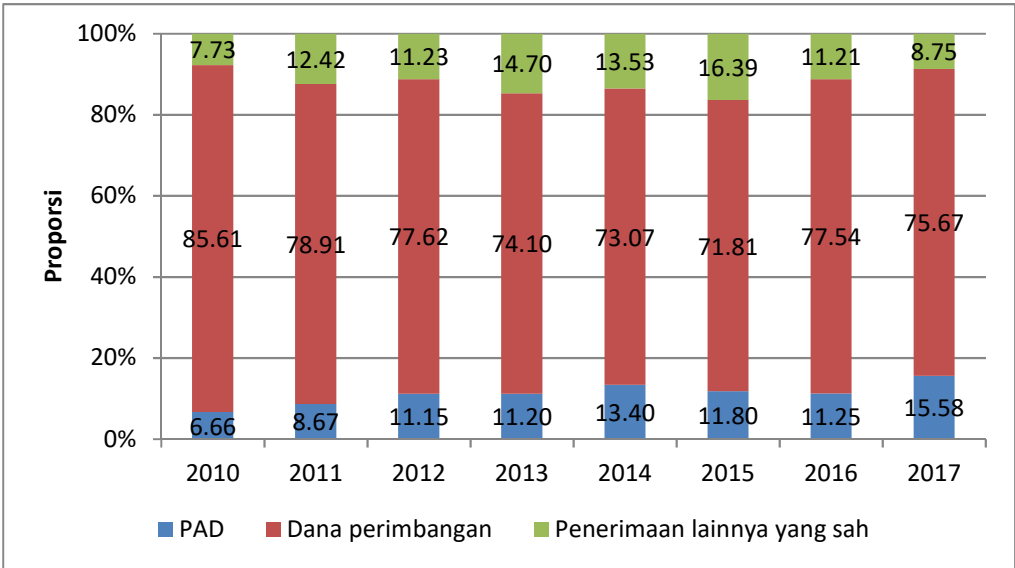
Kabupaten Kotawaringin Timur selama Tahun Anggaran 2010-2017 ditunjukkan pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

Tabel 3.3
Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap
Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun Anggaran 2010-2017

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah(%)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PAD	6.66	8.67	11.15	11.20	13.40	11.80	11.25	15.58
Dana perimbangan	85.61	78.91	77.62	74.10	73.07	71.81	77.54	75.67
Penerimaan lainnya yang sah	7.73	12.42	11.23	14.70	13.53	16.39	11.21	8.75
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi PAD pada tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan. Kontribusi PAD Kabupaten Kotawaringin Timur yang sebesar 11,25 persen tahun 2016 relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan kontribusi PAD tahun 2017 yang sebesar 15,58 persen.



Gambar 3.2 Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total
Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Hal ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan) pada tahun 2017 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2016. Karena dengan semakin besar kontribusi PAD atas pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar.



Tabel 3.4
Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Jenis Penerimaan	Realisasi (juta rupiah)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PAD	44,794.24	72,949.67	105,884.70	132,536.66	171,262.04	159,171.94	189,462.86	245,980.10
Dana Perimbangan	575,401.78	664,506.28	737,149.38	876,666.28	933,853.50	968,516.73	1,203,679.29	1,101,878.06
Penerimaan lainnya yang sah	51,914.52	104,513.46	106,619.31	173,951.24	172,847.95	212,808.52	290,274.96	231,190.42
Total	672,110.54	841,969.41	949,653.40	1,183,154.19	1,277,963.49	1,340,497.19	1,683,417.12	1,579,048.58

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Secara terinci, target dan realisasi pendapatan daerah periode Tahun Anggaran 2010-2017 tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2017, rata-rata target tahunan sebesar Rp.106.975.945.602,68 dan realisasinya melampaui target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebesar Rp.114.433.210.244,14; seperti terlihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	50,648,575,000.00	44,794,244,729.69	88.44	(5,854,330,270.31)
2011	63,335,570,000.00	72,949,668,894.22	115.17	9,614,098,894.22
2012	88,262,410,000.00	105,884,703,503.79	119.96	17,622,293,503.79
2013	125,658,370,288.00	132,536,664,627.77	105.47	6,878,294,339.77
2014	142,921,120,244.30	171,262,043,654.20	119.82	28,340,923,409.90
2015	171,029,628,083.75	159,171,936,055.15	93.07	(11,857,692,028.60)
2016	180,025,392,949.57	189,462,859,915.05	105.24	9,437,466,965.48
2017	241,768,921,009.00	245,980,100,883.59	101.74	4,211,179,874.59
Rata-rata	132,956,248,446.83	140,255,277,782.93		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Rata-rata realisasi pajak daerah selama periode Tahun Anggaran 2010-2017 melampaui dari target yang telah ditentukan, dimana dari rata-rata target pajak daerah sebesar Rp. 25.801.031.679,82, terealisasi sebesar Rp. 33.882.920.060,38; disajikan pada Tabel 3.6

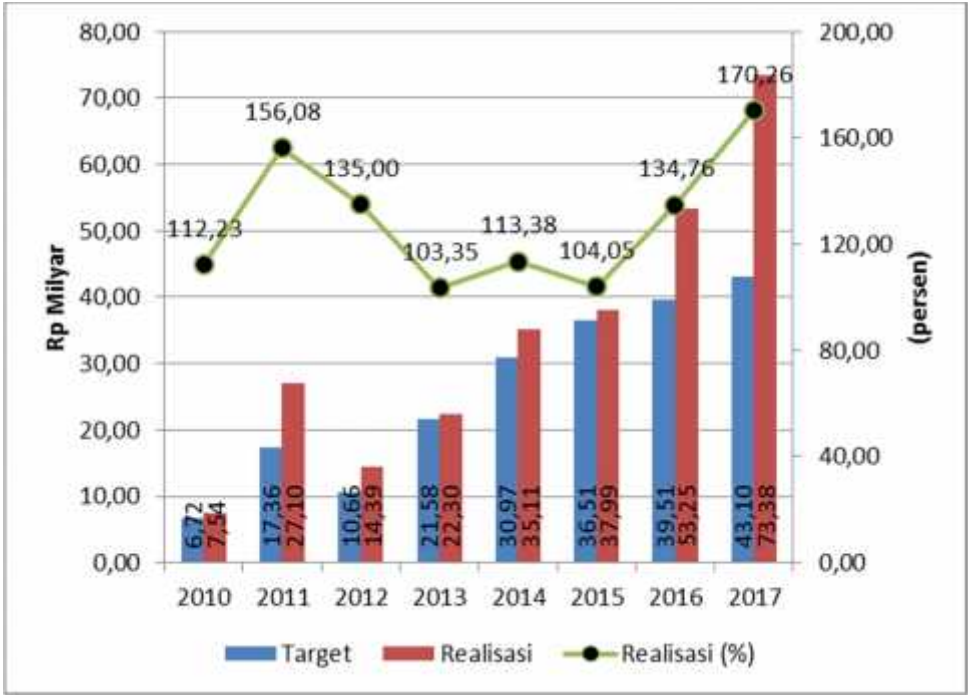
Tabel 3.6
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	6.716.977.000,00	7.538.581.275,00	112,23	821.604.275,00
2011	17.363.596.000,00	27.102.148.741,00	156,08	9.738.552.741,00
2012	10.661.125.000,00	14.392.611.416,00	135,00	3.731.486.416,00



Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2013	21.579.670.288,00	22.304.176.891,00	103,35	724.506.603,00
2014	30.965.000.000,00	35.108.260.119,00	113,38	4.143.260.119,00
2015	36.510.240.126,59	37.989.952.314,00	104,05	1.479.712.187,41
2016	39.512.434.000,00	53.246.842.390,00	134,76	13.734.408.390,00
2017	43.099.211.024,00	73.380.787.337,00	170,26	30.281.576.313,00
Rata-rata	25.801.031.679,82	33.882.920.060,38		

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017



Gambar 3.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2017, rata-rata target retribusi daerah sebesar Rp. 12.446.364.438,00 dan rata-rata realisasinya sebesar Rp. 12.560.160.767,50; disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	25.157.668.000,00	24.047.097.465,00	95,58	(1.110.570.535,00)
2011	8.054.196.000,00	9.400.067.400,00	116,71	1.345.871.400,00
2012	7.847.440.000,00	8.877.075.525,00	113,12	1.029.635.525,00
2013	9.848.177.500,00	11.231.584.343,00	114,04	1.383.406.843,00
2014	10.171.694.400,00	10.296.258.196,00	101,22	124.563.796,00
2015	12.626.331.000,00	12.737.809.733,00	100,88	111.478.733,00
2016	14.248.193.800,00	13.558.085.627,00	95,16	-690.108.173,00



Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2017	11.617.214.804,00	10.333.307.851,00	88,95	-1.283.906.953,00
Rata-rata	12.446.364.438,00	12.560.160.767,50		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari bagian laba perusahaan milik daerah. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2017, rata-rata target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 4.003.713.086,88 dan realisasinya sebesar Rp. 4.486.453.704,10; disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

boo	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	2.830.000.000,00	2.366.423.253,39	83,62	(463.576.746,61)
2011	2.750.000.000,00	3.385.127.292,92	123,10	635.127.292,92
2012	2.500.000.000,00	3.453.051.017,68	138,12	953.051.017,68
2013	4.410.332.000,00	4.092.453.073,65	92,79	(317.878.926,35)
2014	3.854.322.344,30	3.854.322.344,30	100,00	0,00
2015	5.747.690.957,16	5.747.690.957,16	100,00	0,00
2016	5.698.978.749,57	5.772.223.972,70	101,29	73.245.223,13
2017	4.238.380.644,00	7.220.337.721,00	170,36	2.981.957.077,00
Rata-rata	4.003.713.086,88	4.486.453.704,10		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah utamanya bersumber dari: (a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (b) Jasa Giro; (c) Pendapatan Bunga; (d) Tuntutan Ganti Rugi (TGR); (e) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (f) Pendapatan Denda Pajak; (g) Pendapatan Denda Retribusi; (h) Pendapatan dari Pengembalian; (i) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (j) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; dan (k) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selama periode Tahun Anggaran 2010-2017, rata-rata target Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp.84.530.164.242,16 sedangkan realisasinya mencapai Rp.83.143.150.641,61; disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	15.943.930.000,00	10.842.142.736,30	68,00	(5.101.787.263,70)
2011	35.167.778.000,00	33.062.325.460,30	94,01	(2.105.452.539,70)
2012	67.253.845.000,00	79.161.965.545,11	117,70	11.908.120.545,11
2013	89.820.190.500,00	94.908.450.320,12	105,66	5.088.259.820,12



Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2014	97.930.103.500,00	122.003.202.994,90	124,58	24.073.099..494,90
2015	116.070.366.000,00	102.622.903.609,99	88,41	(13.447.462.390,01)
2016	120.565.786.400,00	116.878.542.761,33	96,94	(3.687.243.638,67)
2017	133.489.314.537,27	105.665.671.704,85	79,16	(27.823.642.832,42)
Rata-rata	84.530.164.242,16	83.143.150.641,61		

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus. Secara keseluruhan, rata-rata target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan selama periode Tahun Anggaran 2010-2017 sebesar Rp.891.062.382.553,75 Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang setiap tahun diterbitkan, rata-rata Dana Perimbangan yang dapat direalisasikan sebesar Rp.882.706.412.595,13; disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	565.738.206.000,00	575.401.780.795,00	101,70	9.663.574.795,00
2011	665.680.085.000,00	664.506.278.946,00	99,82	(1.173.806.054,00)
2012	725.023.516.000,00	737.149.384.210,00	101,67	12.125.868.210,00)
2013	859.593.730.132,00	876.666.277.680,00	101,98	17.072.547.548,00)
2014	944.011.377.298,00	933.853.496.212,00	98,92	(10.157.881.086,00)
2015	977.280.265.000,00	968.516.728.265,00	99,10	(8.763.536.735,00)
2016	1.241.515.046.000,00	1.203.679.291.956,00	96,95	(37.835.754.044,00)
2017	1.149.656.835.000,00	1.101.878.062.697,00	95,84	(47.778.772.303,00)
Rata-rata	891.062.382.553,75	882.706.412.595,13		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Secara keseluruhan, rata-rata target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama periode Tahun Anggaran 2010-2017 adalah sebesar Rp.106.585.076.053,75 sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. 106.872.167.973,63; disajikan pada Tabel 3.11.

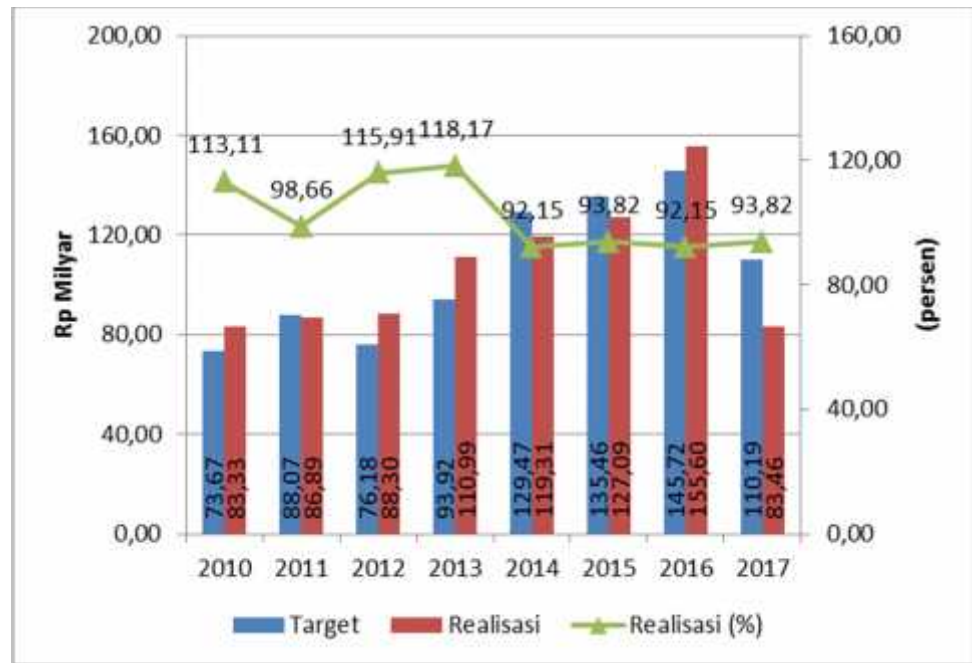
Tabel 3.11
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	73.667.544.000,00	83.331.118.795,00	113,11	9.663.574.795,00
2011	88.065.422.000,00	86.891.615.946,00	98,66	(1.173.806.054,00)
2012	76.176.636.000,00	88.302.504.210,00	115,91	12.125.868.210,00



Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2013	93.916.473.132,00	110.989.020.680,00	118,17	17.072.547.548,00
2014	129.472.485.298,00	119.314.604.212,00	92,15	(10.157.881.086,00)
2015	135.464.302.000,00	127.086.625.265,00	93,82	(8.377.676.735,00)
2016	145.723.581.000,00	155.603.036.556,00	106,78	9.879.455.556,00
2017	110.194.165.000,00	83.458.818.125,00	75,74	(26.735.346.875,00)
Rata-rata	106.585.076.053,75	106.872.167.973,63		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017



Gambar 3.4 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Rata-rata penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum selama periode Tahun Anggaran 2010-2017 adalah sebesar Rp.891.062.382.553,75 sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp.882.706.412.595,13; disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	565.738.206.000,00	575.401.780.795,00	101,70	9.663.574.795,00
2011	665.680.085.000,00	664.506.278.946,00	99,82	(1.173.806.054,00)
2012	725.023.516.000,00	737.149.384.210,00	101,67	12.125.868.210,00)
2013	859.593.730.132,00	876.666.277.680,00	101,98	17.072.547.548,00)
2014	944.011.377.298,00	933.853.496.212,00	98,92	(10.157.881.086,00)
2015	977.280.265.000,00	968.516.728.265,00	99,10	(8.763.536.735,00)
2016	1.241.515.046.000,00	1.203.679.291.956,00	96,95	(37.835.754.044,00)
2017	1.149.656.835.000,00	1.101.878.062.697,00	95,84	(47.778.772.303,00)
Rata-rata	891.062.382.553,75	882.706.412.595,13		

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017



Rata-rata Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, dengan rata-rata target dan realisasi penerimaan selama periode Tahun Anggaran 2010-2017 adalah sebesar Rp.92.084.734.750,00 dan Rp.83.441.672.871,50; disajikan pada Tabel 3.13

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	32.324.800.000,00	32.324.800.000,00	100,00	0,00
2011	45.645.900.000,00	45.645.900.000,00	100,00	0,00
2012	30.820.440.000,00	30.820.440.000,00	100,00	0,00
2013	57.011.340.000,00	57.011.340.000,00	100,00	0,00
2014	35.696.100.000,00	35.696.100.000,00	100,00	0,00
2015	53.011.650.000,00	52.625.790.000,00	99,27	(385.860.000,00)
2016	263.264.540.000,00	215.549.330.400,00	81,88	(47.715.209.600,00)
2017	218.903.108.000,00	197.859.682.572,00	90,39	(21.043.425.428,00)
Rata-rata	92.084.734.750,00	83.441.672.871,50		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya, (d) Dana Transfer Pusat, (e) Dana Insentif Daerah (DID), dan (f) Lain-lain Penerimaan. Rata-rata target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama periode Tahun Anggaran 2010-2017 sebesar Rp.142.621.206.540,01 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp.134.294.054.014,14 (Tabel 3.14).

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	55.010.688.600,00	51.914.516.425,00	94,37	(3.096.172.175,00)
2011	99.718.854.480,00	104.513.463.365,00	104,81	4.794.608.885,00
2012	113.753.555.418,50	106.619.310.224,96	93,73	(7.134.245.193,54)
2013	188.904.070.586,29	173.951.243.800,43	92,08	(14.952.826.785,86)
2014	184.116.606.530,06	172.847.946.803,53	93,88	(11.268.659.726,53)
2015	260.430.903.705,25	221.088.522.494,23	84,89	(39.342.381.211,02)
2016	105.230.485.000,00	105.230.485.000,00	100,00	0,00
2017	133.804.488.000,00	138.186.944.000,00	103,28	4.382.456.000,00
Rata-rata	142.621.206.540,01	134.294.054.014,14		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017



Selama periode Tahun Anggaran 2010-2017, target lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah diakumulasikan sebesar Rp.10.409.656.265,00 sedangkan realisasinya Rp.13.663.377.045,00. Penerimaan tersebut disajikan pada Tabel 3.15. Sumber pendapatan hibah tersebut berasal dari Pemerintah.

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	1.000.000.000,00	297.525.000,00	29,75	(702.475.000,00)
2011	1.702.475.000,00	962.701.735,00	76,60	(739.773.265,00)
2012	1.256.638.265,00	1.031.798.310,00	82,10	(224.839.955,00)
2013	0,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
2014	0,00	528.353.000,00	-	528.353.000,00
2015	6.450.543.000,00	6.450.543.000,00	100,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4.382.456.000,00	-	4.382.456.000,00
Jumlah	10.409.656.265,00	13.663.377.045,00		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2017, target lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari dana penyesuaian sebesar Rp.388.551.805.080,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp.391.736.960.280,00, disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Target dan Realisasi Dana Penyesuaian Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	20.010.688.600,00	19.209.763.600,00	96,00	-800.925.000,00
2011	57.016.379.480,00	56.721.831.680,00	99,48	-294.547.800,00
2012	39.911.035.000,00	41.395.584.000,00	103,72	1.484.549.000,00
2013	89.642.183.000,00	89.642.183.000,00	100,00	0,00
2014	73.864.916.000,00	73.864.916.000,00	100,00	0,00
2015	95.606.603.000,00	95.606.603.000,00	100,00	0,00
2016	5.000.000.000,00	7.796.079.000,00	155,92	2.796.079.000,00
2017	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	388.551.805.080,00	391.736.960.280,00		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Target lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari dana bagi hasil pajak provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya rata-rata periode Tahun Anggaran 2010-2017, dari target sebesar Rp.75.984.620.046,89 realisasinya mencapai Rp.69.401.259.765,80 (tabel 3.17).



Tabel 3.17
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	34.000.000.000,00	32.407.227.825,00	95,32	(1.592.772.175,00)
2011	41.000.000.000,00	46.828.929.950,00	114,22	5.828.929.950,00
2012	72.435.882.153,50	64.041.927.914,96	88,41	(8.393.954.238,54)
2013	93.112.287.586,29	78.149.460.800,43	83,93	(14.962.826.785,86)
2014	102.421.692.530,06	90.624.677.803,53	88,48	(11.797.014.726,53)
2015	102.610.032.705,25	63.817.651.494,23	62,19	(38.792.381.211,02)
2016	81.148.532.700,00	93.836.725.650,92	115,64	12.688.192.950,92
2017	81.148.532.700,00	85.503.476.687,32	105,37	4.354.943.987,32
Rata-rata	75.984.620.046,89	69.401.259.765,80		

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Target lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota/lainnya rata-rata periode Tahun Anggaran 2010-2015, dari target Rp.17.510.831.250,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp.17.335.831.250,00 (tabel 3.18).

Tabel 3.18
Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	-	-	-	-
2011	-	-	-	-
2012	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-
2013	6.149.600.000,00	6.149.600.000,00	100,00	-
2014	7.830.000.000,00	7.830.000.000,00	100,00	-
2015	55.913.725.000,00	55.213.725.000,00	98,75	(700.000.000,00)
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
Rata-rata	17.510.831.250,00	17.335.831.250,00		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Tabel 3.19
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata pertumbuhan
1	Pendapatan	24,59	51,78	5,54	26,34	(6,62)	20,33
1.1	Pendapatan Asli Daerah	25,17	134,77	(7,06)	42,95	3,77	39,92
1.1.1	Pajak Daerah	54,97	29,54	8,42	138,73	37,81	53,89
1.1.2	Retribusi Daerah	26,52	9,53	23,71	20,71	(23,78)	11,34
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	18,52	13,86	49,12	41,05	25,09	29,53
1.1.4	Lain-lain PAD	19,89	269,01	(15,89)	23,15	(9,59)	57,31



No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata pertumbuhan
	yang sah						
1.2	Dana Perimbangan	18,93	40,53	3,71	37,30	(8,46)	18,40
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	25,69	37,31	6,51	40,20	(46,36)	12,67
1.2.2	Dana Alokasi Umum	14,67	46,41	(0,00)	17,48	(1,44)	15,42
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	84,98	(21,80)	47,43	278,08	(8,21)	76,10
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	63,15	65,38	27,91	(41,57)	(4,18)	22,14
1.3.1	Hibah	(99,03)	(45,12)	1.120,88	(100,00)	-	219,18
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	22,03	93,52	(29,58)	20,07	(8,88)	19,43
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	116,55	30,22	29,43	(91,30)	(3,80)	16,22
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.999,73	-	605,16	(100,00)	-	1.501,63

Sumber : Data sudah diolah, BPKAD dan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2013-2017 sebesar 20,33 persen. Dana perimbangan, meskipun kontribusinya besar yakni 77,57 persen, tetapi rata-rata pertumbuhan pertahun adalah yang paling kecil, yaitu 18,40 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar 39,92 persen.

Kontribusi terbesar PAD Kabupaten Kotawaringin Timur bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu rata-rata 58,38 persen pada tahun 2013-2017. Kontribusi terbesar kedua dan ketiga PAD berturut-turut adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang masing-masing sebesar 24,28 persen dan 13,73 persen. Struktur pendapatan ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan sangat banyak yang berasal dari pemerintah (APBN), atau secara umum APBD Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum mandiri. Salah satu kelemahan dari struktur pendapatan seperti ini adalah relatif tingginya ketidakpastian pendapatan dalam rangka perencanaan anggaran. Selain itu aliran dana perimbangan juga tidak sepenuhnya dalam kendali Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga mungkin terjadi keterlambatan proses pencairan dan lain sebagainya. Sebaliknya bila sumber pendapatan terbesar berasal dari PAD, maka proyeksi pendapatan akan lebih dapat diprediksi dengan baik,

sehingga mempermudah perencanaan program dan kegiatan. Dengan memperhatikan pertumbuhan PAD yang dominan, ada kecenderungan potensi peningkatan kemandirian fiskal daerah.

3.1.1.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2010-2017, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2017, dari rata-rata target belanja daerah sebesar Rp.1.268.222.526.099,75 terealisasi sebesar Rp.1.149.491.165.903,94; secara lebih rinci disajikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	705.106.666.100,00	664.240.295.017,19	94,20	(40.866.371.082,81)
2011	864.416.958.000,00	762.076.799.865,77	88,16	(102.340.158.134,23)
2012	968.736.121.500,00	847.606.409.561,42	87,50	(121.129.711.938,58)
2013	1.313.501.419.830,00	1.177.022.175.993,95	89,61	(136.479.243.836,05)
2014	1.410.032.040.729,26	1.309.277.060.826,42	92,85	(100.754.979.902,84)
2015	1.501.156.061.789,21	1.382.697.264.622,12	92,11	(118.458.797.167,09)
2016	1.631.408.233.081,73	1.540.102.862.809,64	94,40	(91.305.370.272,09)
2017	1.751.422.707.767,78	1.512.906.458.534,97	86,38	(238.516.249.232,81)
Rata-rata	1.268.222.526.099,75	1.149.491.165.903,94		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017



Gambar 3.5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017



Belanja daerah terbagi ke dalam dua kelompok belanja yaitu: (a) Belanja Tidak Langsung (BTL) dan (b) Belanja Langsung (BL).

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, (g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten dan (h) Belanja Tidak Terduga. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2017 terealisasi rata-rata sebesar Rp.558.653.515.501,03 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.616.271.079.922,39 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	356.481.459.798,15	338.297.880.240,19	94,90	(18.183.579.557,96)
2011	413.406.329.400,00	380.497.101.840,00	92,04	(32.909.227.560,00)
2012	480.343.013.600,00	415.798.912.518,00	86,56	(64.544.101.082,00)
2013	578.968.375.567,00	513.810.046.129,75	88,75	(65.158.329.437,25)
2014	594.818.997.347,26	555.982.875.843,00	93,47	(38.836.121.504,26)
2015	783.278.088.179,91	731.350.658.794,50	93,37	(51.927.429.385,41)
2016	859.081.547.062,00	758.619.288.937,80	88,31	(100.462.258.124,20)
2017	863.790.828.424,76	774.871.359.705,00	89,71	(88.919.468.719,76)
Rata-rata	616.271.079.922,39	558.653.515.501,03		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Target Belanja Pegawai Kabupaten Kotawaringin Timur selama periode Tahun Anggaran 2010-2017 rata-rata sebesar Rp.464.742.269.593,77 dengan realisasi sebesar Rp.425.572.351.427,76; sebagaimana disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	309.418.783.998,15	293.712.060.383,00	94,92	(15.706.723.615,15)
2011	362.134.754.400,00	335.628.121.860,00	92,68	(26.506.632.540,00)
2012	419.155.153.950,00	373.659.031.968,00	89,15	(45.496.121.982,00)
2013	454.070.884.370,00	417.576.467.516,75	91,96	(36.494.416.853,25)
2014	457.263.417.311,00	443.890.067.463,00	97,08	(13.373.349.848,00)
2015	524.243.021.929,00	504.045.307.962,50	96,15	(20.197.713.966,50)
2016	604.864.587.317,00	517.257.055.373,80	85,52	(87.607.531.943,20)
2017	586.787.553.475,00	518.810.698.895,00	88,42	(67.976.854.580,00)
Rata-rata	464.742.269.593,77	425.572.351.427,76		

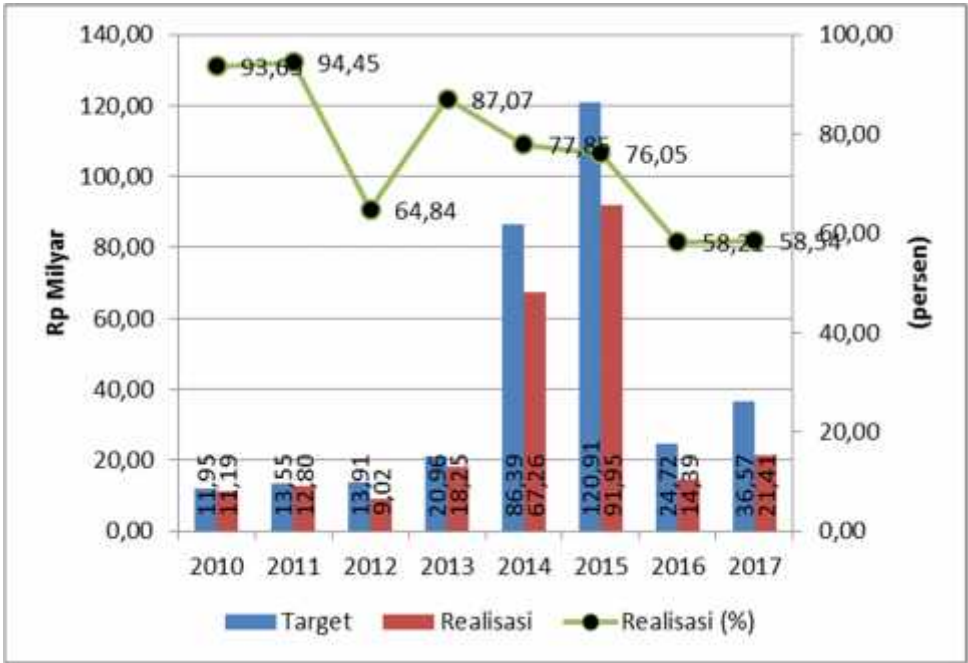
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Target Belanja Hibah, selama periode Tahun Anggaran 2010-2017 rata-rata terealisasi Rp.30.782.622.240,50 dari target sebesar Rp.41.120.505.080,50; seperti disajikan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23
Target dan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	11.950.000.000,00	11.191.357.426,00	93,65	(758.642.574,00)
2011	13.552.640.000,00	12.800.182.750,00	94,45	(752.457.250,00)
2012	13.912.277.000,00	9.020.977.000,00	64,84	(4.891.300.000,00)
2013	20.956.139.379,00	18.245.650.393,00	87,07	(2.710.488.986,00)
2014	86.391.917.140,00	67.258.157.641,00	77,85	(19.133.759.499,00)
2015	120.912.425.125,00	91.949.427.504,00	76,05	(28.962.997.621,00)
2016	24.718.810.000,00	14.388.368.865,00	58,21	(10.330.441.135,00)
2017	36.569.832.000,00	21.406.856.345,00	58,54	(15.162.975.655,00)
Rata-rata	41.120.505.080,50	30.782.622.240,50		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017



Gambar 3.6 Target dan Realisasi Belanja Belanja Hibah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Target Belanja Bantuan Sosial selama periode Tahun Anggaran 2010-2017 adalah sebesar Rp.119.626.554.617,02 dengan realisasi sebesar Rp.75.968.558.280,00. Target dan realisasinya mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini (tabel 3.24)



Tabel 3.24
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	10.635.435.800,00	9.446.895.000,00	88,82	(1.188.540.800,00)
2011	10.160.045.000,00	8.814.920.980,00	86,76	(1.345.124.020,00)
2012	14.862.407.650,00	6.972.852.550,00	46,92	(7.889.555.100,00)
2013	70.233.741.547,00	45.176.100.100,00	64,32	(25.057.641.447,00)
2014	4.663.938.866,26	1.232.850.000,00	26,43	(3.431.088.866,26)
2015	4.481.664.353,00	3.509.797.150,00	78,31	(971.867.203,00)
2016	1.416.030.326,00	343.362.500,00	24,25	(1.072.667.826,00)
2017	3.173.291.074,76	471.780.000,00	14,87	(2.701.511.074,76)
Jumlah	119.626.554.617,02	75.968.558.280,00		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa rata-rata terealisasi sebesar Rp.2.260.163.593,38 dari rata-rata target sebesar Rp.2.511.913.593,38. Sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.25
Target dan Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kota
dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	885.100.000,00	885.100.000,00	100,00	0,00
2011	938.100.000,00	0,00	0,00	(938.100.000,00)
2012	1.961.000.000,00	938.100.000,00	47,84	(1.022.900.000,00)
2013	938.100.000,00	938.100.000,00	100,00	0,00
2014	980.500.000,00	927.500.000,00	94,59	(53.000.000,00)
2015	3.451.758.982,00	3.451.758.982,00	100,00	0,00
2016	5.376.062.780,00	5.376.062.780,00	100,00	0,00
2017	5.564.686.985,00	5.564.686.985,00	100,00	0,00
Rata-rata	2.511.913.593,38	2.260.163.593,38		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Akumulasi target Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota selama periode Tahun Anggaran 2010-2017 sebesar Rp.733.794.578.620,91 dengan realisasi sebesar Rp. 719.526.164.055,00; sebagaimana disajikan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	22.342.140.000,00	22.105.450.000,00	98,94	(236.690.000,00)
2011	25.120.790.000,00	22.595.860.000,00	89,95	(2.524.930.000,00)
2012	28.452.175.000,00	25.102.683.000,00	88,23	(3.349.492.000,00)
2013	31.769.510.271,00	31.141.738.120,00	98,02	(627.772.151,00)
2014	44.519.224.030,00	42.065.817.030,00	94,49	(2.453.407.000,00)



Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2015	129.189.217.790,91	127.751.655.196,00	98,89	(1.437.562.594,91)
2016	221.706.056.639,00	221.049.008.419,00	99,70	(657.048.220,00)
2017	230.695.464.890,00	227.713.952.290,00	98,71	(2.981.512.600,00)
jumlah	733.794.578.620,91	719.526.164.055,00		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Target Belanja Tidak Terduga (BTT) selama periode Tahun Anggaran 2010-2017 sebesar Rp.9.750.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.811.673.571,19. Penganggaran belanja tidak terduga tidak dapat diprediksi dan diluar kendali pemerintah daerah. Belanja ini merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa, bersifat berjaga-jaga. Data selengkapnya disajikan Tabel 3.27 berikut.

Tabel 3.27
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	1.250.000.000,00	957.017.431,19	76,56	(292.982.568,81)
2011	1.500.000.000,00	658.016.250,00	43,87	(841.983.750,00)
2012	2.000.000.000,00	105.268.000,00	5,26	(1.894.732.000,00)
2013	1.000.000.000,00	731.990.000,00	73,20	(268.010.000,00)
2014	1.000.000.000,00	607.853.700,00	60,79	(392.146.300,00)
2015	1.000.000.000,00	642.712.000,00	64,27	(357.288.000,00)
2016	1.000.000.000,00	205.431.000,00	20,54	(794.569.000,00)
2017	1.000.000.000,00	903.385.190,00	90,34	(96.614.810,00)
jumlah	9.750.000.000,00	4.811.673.571,19		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

2) Belanja Langsung (BL)

Belanja Langsung terdiri dari: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, serta (c) Belanja Modal. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2017, rata-rata realisasi Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.590.837.650.404,03 dari target yang telah ditentukan sebesar Rp.651.951.446.177,36 (tabel 3.28).

Tabel 3.28
Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/Berkurang
2010	348.625.206.301,85	325.942.414.777,00	93,49	(22.682.791.524,85)
2011	451.010.628.600,00	381.579.698.025,77	84,61	(69.430.930.574,23)
2012	488.393.107.900,00	431.807.497.043,42	88,41	(56.585.610.856,58)
2013	734.533.044.263,00	663.212.129.864,20	90,29	(71.320.914.398,80)
2014	815.213.043.382,00	753.294.184.992,42	92,40	(61.918.858.389,58)
2015	717.877.973.609,30	651.346.605.827,62	90,73	(66.531.367.781,68)
2016	772.326.686.019,73	781.483.573.871,84	101,19	9.156.887.852,11



Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/Berkurang
2017	887.631.879.343,02	738.035.098.829,97	83,15	(149.596.780.513,05)
Rata-rata	651.951.446.177,36	590.837.650.404,03		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017



Gambar 3.7 Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Rata-rata target Belanja Pegawai pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2010-2017 sebesar Rp.32.094.389.542,61 dengan realisasi sebesar Rp.28.925.406.655,00 seperti disajikan dalam Tabel 3.29.

Tabel 3.29
Target dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	34.060.378.964,85	31.314.781.500,00	91,94	(2.745.597.464,85)
2011	40.188.125.580,00	36.153.886.276,00	89,96	(4.034.239.304,00)
2012	49.981.361.379,00	45.870.692.846,00	91,78	(4.110.668.533,00)
2013	54.803.337.423,00	50.321.179.107,00	91,82	(4.482.158.316,00)
2014	18.721.836.350,00	15.581.797.450,00	83,23	(3.140.038.900,00)
2015	16.545.452.000,00	14.899.168.700,00	90,05	(1.646.283.300,00)
2016	18.407.957.200,00	16.149.775.208,00	87,73	(2.258.181.992,00)
2017	24.046.667.444,00	21.111.972.153,00	87,80	(2.934.695.291,00)
Rata-rata	32.094.389.542,61	28.925.406.655,00		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Rata-rata target Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2010-2017 sebesar Rp.326.560.378.837,14 sedangkan realisasinya sebesar Rp.298.852.834.857,35disajikan Tabel 3.30.



Tabel 3.30
Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	158.345.121.938,00	147.783.868.465,00	93,33	(10.561.253.473,00)
2011	207.948.223.429,00	189.210.174.562,77	90,99	(18.738.048.866,23)
2012	236.992.994.701,00	212.977.106.532,00	89,87	(24.015.888.169,00)
2013	292.277.295.585,00	246.871.192.884,29	84,46	(45.406.102.700,71)
2014	354.318.543.873,00	310.581.887.911,92	87,66	(43.736.655.961,08)
2015	397.148.184.786,30	350.862.589.015,62	88,35	(46.285.595.770,68)
2016	444.480.312.068,80	471.698.329.114,46	106,12	27.218.017.045,66
2017	520.972.354.316,02	460.837.530.372,73	88,46	(60.134.823.943,29)
Rata-rata	326.560.378.837,14	298.852.834.857,35		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Rata-rata realisasi Belanja Modal pada Belanja Langsung, selama periode Tahun Anggaran 2010-2017 terealisasi Rp.263.059.408.891,68 dari target sebesar Rp.293.296.677.797,62 seperti disajikan dalam Tabel 3.31.

Tabel 3.31
Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	156.219.705.399,00	146.843.764.812,00	94,00	(9.375.940.587,00)
2011	202.874.279.591,00	156.215.637.187,00	77,00	(46.658.642.404,00)
2012	201.418.751.820,00	172.959.697.665,42	85,87	(28.459.054.154,58)
2013	387.452.411.255,00	366.019.757.872,91	94,47	(21.432.653.382,09)
2014	442.172.663.159,00	427.130.499.630,50	96,60	(15.042.163.528,50)
2015	304.184.336.823,00	285.584.848.112,00	93,89	(18.599.488.711,00)
2016	309.438.416.750,93	293.635.469.549,38	94,89	(15.802.947.201,55)
2017	342.612.857.583,00	256.085.596.304,24	74,74	(86.527.261.278,76)
Rata-rata	293.296.677.797,62	263.059.408.891,68		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017



Gambar 3.8 Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017



3.1.1.3 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) koreksi (*contra post*), (c) Pencairan Dana Cadangan, (d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (e) Penerimaan Pinjaman Daerah, (f) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, (g) penerimaan piutang daerah. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), Koreksi (*contra post*), dan Pencairan Dana Cadangan. Rata-rata target penerimaan Pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2010-2017 sebesar Rp.197.582.159.101,48 sedangkan rata-rata realisasinya mencapai Rp.198.519.019.464,43 seperti disajikan dalam Tabel 3.32 berikut ini.

Tabel 3.32
Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	70.113.949.412,00	71.488.451.403,68	101,96	1.374.501.991,68
2011	86.543.921.662,53	86.951.481.803,53	100,47	407.560.141,00
2012	167.695.093.142,98	159.856.237.523,98	95,33	(7.838.855.619,00)
2013	254.729.225.901,31	268.560.338.985,65	105,43	13.831.113.084,34
2014	264.718.349.099,90	264.833.253.599,90	100,04	114.904.500,00
2015	218.151.679.443,21	218.184.389.443,21	100,01	32.710.000,00
2017	321.122.895.048,43	319.758.983.491,04	99,58	(1.363.911.557,39)
Rata-rata	197.582.159.101,48	198.519.019.464,43		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

Rata-rata realisasi SiLPA, selama periode Tahun Anggaran 2010-2017 sebesar Rp.215.319.936.759,93 seperti disajikan pada Tabel 3.33.

Tabel 3.33
Rincian Estimasi dan Realisasi SiLPA Kabupaten Kotawaringin
Timur T.A. 2010-2017

Tahun Anggaran	Estimasi Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	-	78.518.921.662,53	-	78.518.921.662,53
2011	-	159.670.093.142,98	-	159.670.093.142,98
2012	-	268.556.855.985,65	-	268.556.855.985,65
2013	-	264.718.349.099,90	-	264.718.349.099,90
2014	-	213.201.964.494,21	-	213.201.964.494,21
2015	202.781.679.443,21	202.814.389.443,21	100,02	32.710.000,00
2017	321.122.895.048,43	319.758.983.491,04	99,58	(1.363.911.557,39)
Rata-rata		215.319.936.759,93		

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2017

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2017 sebesar Rp.11.370.000.000,00.

3.2 Analisis Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017

3.2.1 Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas jangka pendek didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Solvabilitas jangka pendek terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban dan utang jangka pendek. Berdasarkan PP 71 tahun 2010, periode jangka pendek adalah kurang dari 12 (dua belas) bulan.

3.2.1.1 Menentukan Komponen Pembilang

Berdasarkan definisi solvabilitas jangka pendek tersebut di atas, kata kunci untuk menentukan komponen pembilang rasio indikator adalah “kemampuan...” dan “...jangka pendek”. Artinya adalah kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun. Berbicara mengenai kemampuan dalam sudut pandang akuntansi, maka kemampuan yang dimaksud disini adalah sumberdaya ekonomi yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu dekat yaitu satu tahun anggaran. Sumberdaya ekonomi yang dimaksud adalah aset, yakni **aset lancar**. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam neraca, aset lancar terdiri atas beberapa bagian, dan **bagian dalam aset lancar** itulah yang dapat dipergunakan sebagai komponen pembilang dalam rasio solvabilitas jangka pendek.

3.2.1.2 Menentukan Komponen Penyebut

Berdasarkan definisi solvabilitas jangka pendek tersebut di atas, kata kunci untuk menentukan komponen penyebut rasio adalah “...kewajiban dan utang jangka pendek”. Agar berada dalam horison waktu yang sama dengan komponen pembilang, maka informasi yang digunakan sebagai komponen penyebut rasio solvabilitas jangka pendek juga harus memiliki periode kurang dari 12 bulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan definisi dari solvabilitas jangka pendek, maka informasi dalam LKPD yang menyatakan kewajiban sekaligus utang jangka pendek adalah **kewajiban jangka pendek**, karena kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Solvabilitas jangka pendek Kabupaten Kotawaringin Timur terus mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Tahun 2013 mencapai 87.009.742.217,68 dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah kabupaten tidak memiliki kewajiban jangka pendek. Sedangkan penurunan dimensi solvabilitas jangka pendek tahun 2017 disebabkan karena semakin menurunnya komponen aset lancar dan meningkatnya kewajiban jangka pendek pemerintah kabupaten.

3.2.2 Solvabilitas Jangka Panjang

Solvabilitas jangka panjang didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Solvabilitas jangka panjang terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban dan utang jangka panjang. Berdasarkan PP 71 tahun 2010, periode jangka panjang adalah lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3.2.2.1 Menentukan Komponen Pembilang

Koheren dengan solvabilitas jangka pendek, konsep yang dipergunakan untuk membangun rasio indikator dalam solvabilitas jangka panjang hanya berbeda dalam konteks *time frame*, dalam membangun rasio indikator solvabilitas jangka panjang harus menggunakan informasi yang terdapat dalam LKPD yang memiliki horison waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Selain itu, dalam menyelesaikan kewajiban jangka panjang, pemerintah daerah seharusnya tidak mempergunakan sumberdaya ekonomi yang telah dialokasikan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban jangka panjang ini tersimpan dalam bentuk kekayaan yang berupa aset dan investasi, tentunya aset dan investasi jangka panjang. Kedua hal tersebut terangkum dalam informasi yang terdapat dalam **ekuitas dana** yang didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas dana terdiri atas dua bagian yaitu ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi, dari dua bagian tersebut yang memiliki horison waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan adalah **ekuitas dana investasi**. Berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka informasi dalam LKPD yang digunakan sebagai komponen pembilang rasio indikator solvabilitas jangka panjang adalah **total aset** dan **ekuitas dana investasi**.

3.2.2.2 Menentukan Komponen Penyebut

Berdasarkan kata "...kewajiban dan utang jangka panjang" dan konsep bahwa pembilang dan penyebut harus berada dalam horison waktu yang sama, maka satu-satunya informasi dalam LKPD yang dapat dipergunakan untuk

merepresentasikan “...kewajiban dan utang jangka panjang” adalah **kewajiban jangka panjang**.

Solvabilitas jangka panjang Kabupaten Kotawaringin Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Hal ini disebabkan karena komponen ekuitas dana investasi terus mengalami kenaikan. Selain itu pemerintah kabupaten tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Tingginya dimensi keuangan ini juga dapat berarti bahwa terlalu banyak sumberdaya yang diinvestasikan yang seharusnya dapat dipergunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

3.2.3 Solvabilitas Anggaran

Solvabilitas anggaran didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban operasional. Dari definisi tersebut terdapat kata kunci yaitu “...kewajiban operasional”. Kata operasional dalam pemerintah daerah diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang menggunakan barang/jasa habis pakai dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Operasional ini didanai oleh anggaran belanja daerah dalam periode satu tahun anggaran. Kegiatan pemerintah daerah dirinci dalam rekening belanja, dan anggaran belanja didanai dari pendapatan daerah.

3.2.3.1 Menentukan Komponen Pembilang

Berdasarkan konsep di atas bahwa pendanaan anggaran belanja berasal dari pendapatan daerah, maka komponen pembilang rasio indikator solvabilitas anggaran berasal dari informasi pendapatan. Jika melihat informasi yang terdapat pada LRA, maka rekening pendapatan tersusun atas berbagai bagian dimana beberapa bagian sudah dialokasikan untuk program/kegiatan tertentu yang mutlak harus dilaksanakan. Dua komponen dalam rekening pendapatan daerah yang mutlak harus dilaksanakan adalah pendapatan dana alokasi khusus (DAK) dan belanja pegawai (gaji PNS).

Gaji tidak lain adalah jenis dari belanja operasional. Oleh karena itu pendapatan daerah yang dapat dipergunakan untuk anggaran belanja adalah pendapatan daerah selain pendapatan dana alokasi khusus (DAK). Berdasarkan penjelasan di atas, maka komponen yang mencerminkan pendapatan untuk anggaran belanja operasional daerah adalah **total pendapatan-pendapatan dana alokasi khusus**.

3.2.3.2 Menentukan Komponen Penyebut

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan pemerintah daerah dirinci dalam rekening belanja, yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, serta belanja tak terduga yang tidak dapat dipergunakan

kecuali untuk kondisi tertentu. Dari definisi belanja operasional, maka informasi yang dapat dipergunakan sebagai komponen penyebut dalam rasio indikator solvabilitas anggaran adalah belanja selain dari belanja modal, karena belanja modal tidak termasuk belanja barang/jasa yang habis pakai, serta belanja tak terduga. Dalam LKPD. Jadi komponen penyebut dalam rasio indikator solvabilitas anggaran adalah **total belanja, belanja operasional, dan belanja pegawai.**

Solvabilitas anggaran Kabupaten Kotawaringin Timur juga terus mengalami peningkatan dari 1,29 pada tahun 2013 menjadi 1,63 pada tahun 2017. Dari dimensi ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sangat mampu untuk melaksanakan kewajiban operasional dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3.2.4 Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan hak-hak keuangan secara efektif dan efisien. Definisi kata mandiri atau *self sustain* adalah mampu menopang segala kebutuhan dengan sumberdaya ekonomi yang dimiliki tanpa campur tangan pihak luar. Melaksanakan hak-hak keuangan berarti merealisasikan sumber-sumber pendapatan dan mengalokasikannya untuk program/kegiatan pembangunan dalam anggaran belanja.

3.2.4.1 Menentukan Komponen Pembilang

Yang perlu diperhatikan dalam mendefinisikan komponen pembilang rasio indikator kemandirian keuangan adalah bahwa anggaran belanja daerah dibiayai dari pendapatan daerah, bukan dari akumulasi sumberdaya/kekayaan/aset daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan konsep serta definisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka satu-satunya informasi yang terdapat dalam LKPD yang relevan digunakan sebagai komponen pembilang adalah **pendapatan asli daerah**, karena informasi ini juga menunjukkan seberapa efektif dan efisien pemerintah merealisasikan pendapatan asli daerahnya berdasarkan sumber-sumber pendapatan maupun potensi pendapatan yang ada di daerahnya.

3.2.4.2 Menentukan Komponen Penyebut

Pendapatan yang dimiliki oleh daerah harus dialokasikan untuk program/kegiatan pembangunan yang terangkum dalam anggaran belanja. Maka informasi pada LKPD yang dipergunakan sebagai komponen penyebut dalam rasio indikator kemandirian keuangan adalah **total belanja**, karena untuk mencapai definisi kata mandiri, pendapatan asli yang dimiliki suatu daerah harus mampu

menopang semua kebutuhan belanja daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun terjadi peningkatan dimensi kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dari 0,07 pada tahun 2013 menjadi 0,13 pada tahun 2017. Akan tetapi angka ini masih sangat kecil sekali. Dengan demikian hingga tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum memiliki kemampuan sendiri untuk menopang pembangunan di daerah.

3.2.5 Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk mengatasi hal-hal tak terduga di masa depan. Semakin besar nilai rasio dalam dimensi ini, haruslah merefleksikan fleksibilitas keuangan yang semakin tinggi. Jika dikaitkan antara definisi kata fleksibel dengan kaidah akuntansi, maka fleksibel disini bisa diartikan sesuai keadaan/kebutuhan, dalam kendali, likuiditasnya tinggi, serta tidak terikat dengan kondisi atau kewajiban lain.

3.2.5.1 Menentukan Komponen Pembilang

Berdasarkan pengertian dari fleksibilitas keuangan tersebut, maka konteks “kemampuan pemerintah daerah...” mengacu pada sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan dengan melihat definisi kata fleksibel di atas yaitu sesuai keadaan/kebutuhan, dalam kendali, dan likuiditasnya tinggi, maka satu-satunya informasi dalam LHP BPK atas LKPD kabupaten yang relevan adalah pendapatan. Jika melihat informasi yang terdapat pada LRA, maka rekening pendapatan tersusun atas berbagai bagian, dimana beberapa bagian sudah dialokasikan untuk program/kegiatan tertentu yang mutlak harus dilaksanakan. Dua komponen dalam rekening pendapatan daerah yang mutlak harus dilaksanakan adalah pendapatan dana alokasi khusus (DAK) dan belanja pegawai (gaji PNS).

Pendapatan dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa DAK harus direalisasikan menjadi program/kegiatan untuk mewujudkan tujuan nasional yang menjadi urusan daerah. Sedangkan belanja pegawai dalam hal ini gaji rutin PNS juga mutlak harus dilaksanakan karena tanpa adanya gaji rutin, maka pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat akan terhenti.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka komponen yang mencerminkan pendapatan yang tidak terikat (bebas) oleh program/kegiatan tertentu pastinya adalah **total pendapatan-pendapatan dana alokasi khusus-belanja pegawai**.

3.2.5.2 Menentukan Komponen Penyebut

Berdasarkan definisi fleksibel yaitu tidak terikat dengan kondisi atau kewajiban lain, maka informasi yang dipergunakan dalam LHP BPK atas LKPD kabupaten adalah komponen yang mengikat atau menjadi kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah atas pendapatan bebas yang dimilikinya. Jadi dalam hal ini informasi yang digunakan sebagai komponen penyebut dalam rasio indikator dimensi fleksibilitas keuangan adalah pembayaran **pokok pinjaman, belanja bunga, total kewajiban, dan kewajiban jangka panjang**, dimana pembayaran pokok pinjaman dan belanja bunga merupakan satu kesatuan.

Untuk dimensi fleksibilitas keuangan terjadi tren yang sama dengan dimensi solvabilitas jangka pendek. Hal ini dikarenakan terjadi jumlah kenaikan kewajiban yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Fleksibilitas terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 70,30. Secara nominal angka ini masih tergolong besar, karena masih lebih besar daripada solvabilitas anggaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masih mampu untuk menangani kejadian di luar skenario rutin yang ada.

3.2.6 Solvabilitas Layanan

Solvabilitas Layanan didefinisikan sebagai kapasitas atau kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan sekaligus mempertahankan layanan yang diperlukan oleh masyarakat. Solvabilitas layanan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dengan standar dan kualitas yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Elemen kunci yang menjadi perhatian dari definisi tersebut adalah “kemampuan pemerintah daerah...” dan “...masyarakat”. Dalam membentuk indikator untuk mengukur kemampuan tersebut, maka perlu konseptualisasi yang matang dalam menentukan komponen yang dilibatkan dalam perhitungan rasio dari indikator.

3.2.6.1 Menentukan Komponen Pembilang

Berdasarkan pengertian dari solvabilitas layanan tersebut, maka konteks “kemampuan pemerintah daerah...” mengacu pada sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik itu sumberdaya manusia, sumberdaya alam, fasilitas, maupun aset-aset yang dimiliki pemerintah daerah. Mengingat bahwa sumber data yang digunakan dalam pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah

berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan Neraca yang terdapat pada LHP BPK atas LKPD kabupaten, maka sumberdaya yang dimaksud di atas dapat didefinisikan sebagai ekuitas dana, total aset, dan total aset tetap.

Selain itu dalam LRA terdapat informasi perihal pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Apabila dikaitkan dengan tujuan bernegara yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka antara informasi pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang lebih merepresentasikan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat adalah informasi belanja daerah, yang tentu saja dalam hal ini adalah total belanja.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa aset-aset merupakan salah satu sumberdaya yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, misalnya adalah jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, maupun fasilitas-fasilitas lain yang dibangun pemerintah daerah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apabila keberadaan aset-aset tersebut dikaitkan dengan informasi pada rekening belanja, maka satu-satunya jenis belanja yang merepresentasikan penciptaan aset adalah belanja modal. Jadi adanya belanja modal akan menciptakan akumulasi sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka informasi yang relevan dijadikan komponen untuk mengukur kemampuan ataupun komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan adalah: **ekuitas dana, total aset, total aset tetap, total belanja, dan total belanja modal**. Seperti diketahui bersama bahwa belanja pemerintah daerah ditujukan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kapasitas layanan kepada masyarakat, dimana anggaran belanja ini dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar yaitu belanja rutin yang dipergunakan untuk operasional wajib pegawai, dan belanja pembangunan (publik) yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Jika menginginkan pengukuran solvabilitas layanan ini lebih akurat, maka dapat digunakan komponen **total belanja untuk publik** dan **total belanja modal untuk publik**. Namun informasi untuk kedua komponen tersebut tidak terdapat pada LHP BPK atas LKPD kabupaten.

3.2.6.2 Menentukan Komponen Penyebut

Dengan mengacu pada pengertian dari solvabilitas layanan tersebut, maka konteks “...masyarakat” mengacu pada **jumlah penduduk** yang ada di tiap daerah kabupaten.

Solvabilitas layanan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 2.873.732,53 menjadi 5.716.230,90 pada tahun 2017. Angka tersebut masih berada di atas upah minimum kabupaten tahun 2013 dan tahun 2017. Dari dimensi ini dapat dikatakan bahwa belum terjadi kelebihan permintaan barang/jasa publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Secara detail, tren tiap dimensi keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 3.34.

Tabel 3.34
Dimensi Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
T.A. 2013-2017

No	Dimensi	2013	2014	2015	2016	2017
1	Solvabilitas Jangka Pendek	87,009,742,217.68	53.43	54.58	46.47	17.86
2	Solvabilitas Jangka Panjang	1,520,885,136,584.73	1,736,957,870,371.11	2,033,294,270,556.33	2,838,133,470,412.64	3,257,430,790,855.62
3	Solvabilitas Anggaran	1.29	1.53	1.51	1.55	1.63
4	Kemandirian Keuangan	0.07	0.09	0.12	0.11	0.13
5	Fleksibilitas Keuangan	467,333,088,118.50	180.19	128.63	144.86	70.30
6	Solvabilitas Layanan	2,873,732.53	3,077,486.68	3,685,829.26	4,957,702.89	5,716,230.90

3.3 Proyeksi Keuangan Tahun 2016-2021

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang merupakan sumber pendanaan APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapat Daerah Yang Sah. Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 ini akan dibahas mengenai ke 3 sumber pendapatan tersebut.

3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang didapatkan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dasar pemungutan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Hingga tahun 2016 sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan yang masih menjadi target hingga tahun 2021 berdasarkan peraturan daerah yang ada adalah sebagai berikut:

A. Pajak Daerah:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;



4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan (Sumber lain : PLN);
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Pajak Sarang Burung Walet;
 10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan;
 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- B. Retribusi Daerah:
1. Retribusi Jasa Umum;
 2. Retribusi Jasa Usaha;
 3. Retribusi Perijinan Tertentu.
- C. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan:
- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Kalteng (Dividen).
- D. Lain-Lain PAD yang Sah:
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yg Tidak Dipisahkan :
 - a. Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 (Hasil Lelang);
 - b. Penjualan Hasil Pertanian;
 - c. Penjualan Hasil Peternakan;
 - d. Penjualan Hasil Perikanan;
 - e. Penjualan Bahan-Bahan Bekas bangunan;
 - f. Penjualan Barang Persediaan (Peralatan Pertanian).
 2. Jasa Giro;
 3. Bunga Deposito;
 4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 5. Denda Atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 6. Denda Pajak;
 7. Denda Retribusi;
 8. Pendapatan dari Pengembalian;
 9. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 10. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari RSUD dr. Murjani Sampit dan Akademi Keperawatan;
 11. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 12. Pendapatan Lainnya.



Secara realistis dan berdasarkan potensi yang ada, proyeksi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2021 tergambar pada Tabel 3.35. Sedangkan untuk dapat menaikkan dari pyoyeksi yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan strategi-strategi sebagai berikut:

Intensifikasi:

1. Dengan melakukan evaluasi Peraturan terkait dengan pendapatan daerah yang ada untuk dilakukan revisi bagi peraturan daerah maupun Peraturan Bupati yang sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini baik tarif yang ditetapkan maupun mekanisme yang dilakukan;
2. Peningkatan SDM PD pemungut baik kemampuan maupun jumlah personilnya;
3. Updating data base pendapatan secara berkala;
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana serta peningkatan Teknologi Informasi bagi Perangkat Daerah pemungut;
5. Melakukan koordinasi, sinergitas, dan kerjasama secara intensif dengan PD terkait dengan pendapatan daerah baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.

Ekstensifikasi:

1. Pembentukan BUMD;
2. Pembangunan pasar-pasar baru yang dikelola oleh pemerintah kabupaten di sejumlah kecamatan;
3. Menggali potensi baru sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan.

Tabel berikut adalah proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2021 untuk masing-masing Perangkat Daerah Pemungut.

Tabel 3.35
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2021

No.	PERANGKAT DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
			(dalam milyar rupiah)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan	0	-	0,08	0,08	0,1	0,12	0,14
2	Dinas Kesehatan	10,28	15	17,04	17,06	17,25	17,95	18,02
3	RSUD dr. Murjani	75	80	88,88	93,21	98,81	106,24	114,6
4	Akademi Keperawatan	2,5	2,75	2,45	2,45	1,41	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,35	0,5	0,55	0,58	0,65	2,49	0,95
6	Dinas Perhubungan	2,23	3,17	3,6	3,9	4,3	4,54	5,25
7	Dinas Lingkungan Hidup	0	0,02	0,39	0,43	1,47	1,5	1,57



No.	PERANGKAT DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
			(dalam milyar rupiah)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,35	0,51	0,57	0,61	0,64	0,39	0,85
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0	0,08	0,08	0,1	0,13	0,14	0,26
11	Sekretariat Daerah	0,2	0,28	0,31	0,33	0,45	0,45	0,55
12	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	14,05	14,28	14,45	27,5	27,44	31,7	40,38
13	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	36,9	31,8	64,58	57,91	70	75	85,69
14	Dinas Damkar	0	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,17
15	Dinas Pertanian	20	20	0,75	0,85	0,85	1,15	1,57
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,22	0,18	0,2	0,25	0,3	0,4	0,52
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2,35	2,32	2,63	2,82	3,1	4,8	5,35
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	6,6	5,12	3,88	4,01	0,6	0,7	0,8
PAD		171,03	176,07	200,51	212,16	227,57	247,64	276,73

3.3.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri atas, Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Untuk membuat proyeksi pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan tidak bisa dilakukan melalui pendekatan potensi akan tetapi dilihat dengan analisa trend pertumbuhan dana perimbangan 5 tahun yang lalu.

3.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. Dengan pertimbangan lima tahun yang lalu, pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah yang pasti ada alokasinya hanya bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan Desa Yang Bersumber Dari APBN saja, sedangkan dari



sumber lainnya sangat kasuistis. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2021 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
T.A. 2016-2021

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp.)			
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Jumlah
2016	176.173.157.725,00	1.243.748.628.680,00	191.379.017.700,00	1.611.300.804.105,00
2017	200.510.303.775,00	1.258.030.649.750,00	200.947.968.500,00	1.659.488.922.025,00
2018	212.164.453.086,00	1.299.015.143.695,00	210.995.367.000,00	1.722.174.963.781,00
2019	227.571.476.198,00	1.345.455.140.152,00	226.545.135.500,00	1.799.571.751.850,00
2020	247.636.652.909,54	1.394.019.536.574,00	243.837.843.700,00	1.885.494.033.183,54
2021	276.725.263.000,00	1.445.709.577.526,00	278.379.017.700,00	2.000.813.858.226,00

Dana Perimbangan terdiri atas, Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan Pendapatan Lainnya. Rincian proyeksi PAD pada tiap Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 3.36.

3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur secara umum terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang dirinci kedalam Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Idealnya, jumlah Belanja Tidak Langsung harus lebih kecil dari Belanja Langsung karena Belanja Langsung merupakan belanja APBD yang menyentuh langsung masyarakat serta dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat luas. Akan tetapi perlu diingat bahwa Alokasi Dana Desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diperuntukkan bagi pembangunan di desa dialokasikan dalam Belanja Tidak Langsung sebesar 10% dari dana perimbangan di luar DAK, sehingga Belanja Tidak Langsung akhirnya akan berimbang dengan Belanja Langsung atau bahkan melebihi apabila kurang cermat dalam merencanakan APBD. Kebijakan dalam Belanja Langsung direncanakan terutama didasarkan pada:



1. Untuk membiayai urusan pemerintah daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Urusan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, Urusan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, Urusan Pilihan, serta urusan Penunjang, yang disesuaikan dengan kewenangannya;
2. Membiayai program-program pembangunan pendukung 9 prioritas pembangunan daerah;
3. Kewajiban untuk memenuhi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana dana pendidikan minimal 20% dari total APBD;
4. Kewajiban untuk memenuhi Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana untuk dana kesehatan minimal 10 % dari total APBD;
5. Kewajiban untuk memenuhi Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana untuk Alokasi Dana Desa minimal 10 % dari Dana Perimbangan di luar DAK.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.37.



Tabel 3.37
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016-2021 (dalam juta rupiah)

Urusan/Perangkat Daerah	2016			2017			2018			2019			2020			2021		
	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml
URUSAN WAJIB																		
Pendidikan																		
Dinas Pendidikan	365.396,03	60.197,99	425.594,02	368.896,02	38.493,25	407.389,27	374.593,06	38.878,18	413.471,23	379.150,69	39.263,11	418.413,80	383.708,32	39.648,04	423.356,36	388.265,95	40.032,97	428.298,92
Kesehatan																		
Dinas Kesehatan	41.972,90	102.761,28	144.734,18	41.972,90	64.082,95	106.055,85	42.899,28	64.723,78	107.623,05	43.640,38	65.364,60	109.004,98	44.381,48	66.005,43	110.386,91	45.122,58	64.082,95	109.205,53
RSUD dr. Murjani	23.511,54	101.750,89	125.262,43	23.511,54	98.034,40	121.545,94	24.031,24	99.014,75	123.045,98	24.447,00	99.995,09	124.442,09	24.862,75	100.975,43	125.838,19	25.278,51	98.034,40	123.312,91
Akademi Keperawatan	1.701,31	4.950,00	6.651,31	1.701,31	4.475,10	6.176,41	1.739,18	4.519,85	6.259,03	1.108,69	2.052,39	3.161,08	1.108,69	2.052,39	3.161,08	1.108,69	2.052,39	3.161,08
Pekerjaan Umum																		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.114,76	203.459,29	209.574,05	6.114,76	104.134,77	110.249,53	6.248,44	105.176,12	111.424,55	8.124,85	110.782,07	118.906,91	8.262,08	111.868,17	120.130,25	8.399,31	112.775,26	121.174,57
Perumahan																		
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.954,79	27.708,86	31.663,65	3.954,79	4.735,18	8.689,97	4.038,96	4.800,18	8.839,14	4.106,29	4.865,19	8.971,48	4.173,63	4.930,20	9.103,82	4.240,96	4.995,20	9.236,16
Perencanaan Pembangunan																		
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.203,25	8.149,55	12.352,81	4.203,25	4.450,13	8.653,38	4.291,96	4.494,63	8.786,59	4.362,93	4.539,13	8.902,06	4.433,90	4.583,63	9.017,53	4.504,87	4.628,13	9.133,00



Urusan/Perangkat Daerah	2016			2017			2018			2019			2020			2021		
	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml
Perhubungan																		
Dinas Perhubungan	6.245,47	12.118,63	18.364,10	3.122,74	4.230,79	7.353,53	3.191,09	4.646,42	7.837,51	3.245,77	4.402,57	7.648,34	3.300,46	4.921,98	8.222,44	3.355,14	4.810,86	8.166,00
Komunikasi dan Informatika																		
Dinas Komunikasi dan Informatika				3.122,74	3.345,79	6.468,53	3.191,09	3.005,93	6.197,02	3.245,77	3.325,55	6.571,32	3.300,46	2.881,90	6.182,36	3.355,14	3.068,79	6.423,93
Lingkungan Hidup																		
Dinas Lingkungan Hidup	9.634,01	36.509,64	46.143,65	5.734,47	12.564,01	18.298,48	5.859,09	12.716,97	18.576,06	5.958,78	13.165,80	19.124,57	6.058,47	13.236,62	19.295,09	6.158,16	13.393,45	19.551,61
Kependudukan dan Catatan Sipil																		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.516,77	4.107,91	6.624,68	2.516,77	2.567,91	5.084,68	2.569,85	2.593,59	5.163,44	2.612,31	2.619,27	5.231,58	2.654,77	2.644,95	5.299,72	2.697,23	2.670,63	5.367,86
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	5.768,87	3.957,88	9.726,75	5.768,87	2.511,97	8.280,84	5.895,37	2.537,09	8.432,46	5.996,57	2.562,21	8.558,78	6.097,77	2.587,33	8.685,10	6.198,96	2.612,45	8.811,42
Sosial																		
Dinas Sosial	4.884,02	9.389,24	14.273,27	2.442,01	2.393,78	4.835,79	2.495,15	2.399,28	4.894,43	2.537,65	2.366,76	4.904,41	2.580,16	2.396,26	4.976,42	2.622,66	2.423,13	5.045,80
Tenaga Kerja																		
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				2.442,01	2.969,67	5.411,69	2.495,15	3.017,81	5.512,95	2.537,65	3.103,97	5.641,62	2.580,16	3.128,10	5.708,25	2.622,66	3.154,86	5.777,52
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																		



Urusan/Perangkat Daerah	2016			2017			2018			2019			2020			2021		
	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.426,55	2.225,40	4.651,94	2.426,55	2.459,40	4.885,94	2.478,85	2.483,99	4.962,84	2.520,69	2.508,59	5.029,28	2.562,53	2.533,18	5.095,71	2.604,38	2.557,77	5.162,15
Kebudayaan																		
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.219,18	7.442,71	10.661,89	3.219,18	4.002,71	7.221,89	3.289,48	4.042,74	7.332,21	3.345,71	4.082,76	7.428,48	3.401,95	4.122,79	7.524,74	3.458,19	4.162,82	7.621,00
Keperemajaan dan Olah Raga																		
Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.315,00	8.619,32	10.934,32	2.315,00	4.609,09	6.924,08	2.365,09	4.655,18	7.020,27	2.405,16	4.701,27	7.106,43	2.445,24	4.747,36	7.192,60	2.485,31	4.793,45	7.278,76
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																		
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.421,59	3.515,04	5.936,63	2.421,59	2.462,58	4.884,17	2.473,25	2.487,21	4.960,46	2.514,58	2.511,83	5.026,41	2.555,80	2.536,46	5.092,36	2.597,23	2.561,09	5.158,32
Satuan Polisi Pamong Praja	4.714,95	3.095,52	7.810,47	4.714,95	3.082,52	7.797,47	4.820,97	3.113,34	7.934,31	4.905,78	3.144,17	8.049,94	4.990,59	3.174,99	8.165,58	5.075,40	3.205,82	8.281,22
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kependidikan dan Persandian																		
DPRD	8.529,24	0,00	8.529,24	8.529,24	0,00	8.529,24	8.699,82	0,00	8.699,82	8.913,05	0,00	8.913,05	9.083,64	0,00	9.083,64	9.254,22	0,00	9.254,22
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	792,80	0,00	792,80	792,80	0,00	792,80	796,65	0,00	796,65	801,47	0,00	801,47	805,33	0,00	805,33	809,19	0,00	809,19
Sekretariat Daerah	10.565,01	54.734,63	65.299,64	10.565,01	41.944,07	52.509,08	10.746,55	42.363,51	53.110,06	10.973,47	42.782,95	53.756,43	11.155,02	43.202,39	54.357,41	11.336,56	43.621,84	54.958,39
Sekretariat DPRD	2.993,47	21.185,81	24.179,28	2.993,47	17.685,81	20.679,28	3.045,49	17.862,66	20.908,15	3.110,50	18.039,52	21.150,02	3.162,52	18.216,38	21.378,89	3.214,53	18.393,24	21.607,77
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.452,20	19.424,02	23.876,22	4.452,20	12.304,96	16.757,15	4.527,64	12.428,01	16.955,65	4.621,95	12.551,06	17.173,00	4.697,39	12.674,10	17.371,50	4.772,83	12.797,15	17.569,99



Urusan/Perangkat Daerah	2016			2017			2018			2019			2020			2021		
	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	255.366,96	0,00	255.366,96	279.108,78	0,00	279.108,78	283.849,74	0,00	283.849,74	281.700,16	0,00	281.700,16	286.162,77	0,00	286.162,77	296.729,75	0,00	296.729,75
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.201,64	9.969,27	18.170,90	8.201,64	9.569,27	17.770,90	8.272,02	9.664,96	17.936,98	8.360,00	9.760,65	18.120,65	8.430,38	9.856,34	18.286,72	8.500,76	9.952,04	18.452,80
Badan Kepegawaian Daerah	5.619,19	11.322,11	16.941,30	5.619,19	4.067,11	9.686,31	5.722,47	4.107,79	9.830,26	5.851,58	4.148,46	10.000,03	5.954,86	4.189,13	10.143,98	6.058,14	4.229,80	10.287,94
Inspektorat Daerah	2.240,13	2.913,69	5.153,83	2.240,13	2.789,39	5.029,53	2.277,71	2.817,29	5.095,00	2.324,69	2.845,18	5.169,87	2.362,27	2.873,08	5.235,34	2.399,85	2.900,97	5.300,81
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.663,38	3.629,98	5.293,36	1.663,38	2.129,98	3.793,36	1.692,32	2.151,28	3.843,60	1.728,48	2.172,58	3.901,07	1.757,42	2.193,88	3.951,30	1.786,35	2.215,18	4.001,54
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.089,52	17.865,03	19.954,55	1.044,76	3.488,60	4.533,36	1.062,46	3.496,15	4.558,62	1.084,60	3.405,50	4.490,09	1.102,30	3.471,41	4.573,71	1.120,01	3.507,58	4.627,59
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				1.044,76	3.111,55	4.156,31	1.062,46	3.170,00	4.232,46	1.084,60	3.326,66	4.411,26	1.102,30	3.326,75	4.429,05	1.120,01	3.356,58	4.476,59
Sekretariat KORPRI	623,63	1.171,74	1.795,37	623,63	853,24	1.476,87	634,16	861,77	1.495,93	647,31	870,30	1.517,62	657,84	878,84	1.536,68	668,37	887,37	1.555,73
Kecamatan																		
Mentawa Baru Ketapang	3.664,91	7.599,20	11.264,11	3.664,91	3.679,20	7.344,11	3.746,39	3.707,99	7.454,39	3.811,58	3.736,78	7.548,37	3.876,77	3.765,58	7.642,35	3.941,96	3.794,37	7.736,33
Baamang	4.028,08	4.293,28	8.321,36	4.028,08	4.093,28	8.121,36	4.118,20	4.127,71	8.245,92	4.190,30	4.162,15	8.352,45	4.262,40	4.196,58	8.458,98	4.334,50	4.231,01	8.565,51
Mentaya Hilir Selatan	1.619,07	2.243,36	3.862,43	1.619,07	1.643,36	3.262,43	1.654,80	1.657,79	3.312,59	1.683,38	1.672,23	3.355,61	1.711,96	1.686,66	3.398,63	1.740,55	1.701,10	3.441,64
Pulau Hanaut	902,44	1.126,97	2.029,41	902,44	1.026,97	1.929,41	921,06	1.037,24	1.958,30	935,95	1.047,51	1.983,46	950,85	1.057,78	2.008,63	965,74	1.068,05	2.033,79
Mentaya Hilir Utara	1.462,94	2.159,86	3.622,79		1.469,86	2.932,79		1.484,56	2.979,63		1.499,26	3.020,04		1.513,95	3.060,44		1.528,65	3.100,85



Urusan/Perangkat Daerah	2016			2017			2018			2019			2020			2021		
	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml
Kota Besi	1.934,33	1.680,83	3.615,16	1.934,33	1.946,83	3.881,16	1.977,15	1.964,30	3.941,45	2.011,42	1.981,77	3.993,18	2.045,68	1.999,24	4.044,91	2.079,94	2.016,70	4.096,65
Cempaga	1.484,11	999,61	2.483,73	1.484,11	1.499,61	2.983,73	1.516,42	1.514,61	3.031,03	1.542,27	1.529,61	3.071,87	1.568,11	1.544,60	3.112,72	1.593,96	1.559,60	3.153,56
Parenggean	1.387,70	1.754,27	3.141,97	1.387,70	1.554,27	2.941,97	1.417,66	1.568,82	2.986,48	1.441,63	1.583,36	3.024,99	1.465,61	1.597,90	3.063,51	1.489,58	1.612,44	3.102,02
Mentaya Hulu	1.325,11	1.381,94	2.707,05	1.325,11	1.425,94	2.751,05	1.353,01	1.439,20	2.792,21	1.375,34	1.452,46	2.827,79	1.397,66	1.465,72	2.863,38	1.419,98	1.478,98	2.898,96
Antang Kalang	1.339,76	1.059,85	2.399,62	1.339,76	1.459,85	2.799,62	1.367,79	1.474,45	2.842,24	1.390,20	1.489,05	2.879,25	1.412,62	1.503,65	2.916,27	1.435,04	1.518,25	2.953,29
Seranau	1.551,48	1.099,98	2.651,46	1.551,48	1.599,98	3.151,46	1.584,88	1.614,98	3.199,87	1.611,61	1.629,98	3.241,59	1.638,33	1.644,98	3.283,31	1.665,05	1.659,98	3.325,03
Teluk Sampit	1.004,12	1.799,22	2.803,34	1.004,12	1.199,22	2.203,34	1.025,27	1.211,21	2.236,48	1.042,18	1.223,20	2.265,38	1.059,10	1.235,20	2.294,29	1.076,01	1.247,19	2.323,20
Cempaga Hulu	897,28	998,31	1.895,59	897,28	1.026,23	1.923,51	916,73	1.036,49	1.953,21	932,28	1.046,75	1.979,03	947,84	1.057,01	2.004,85	963,39	1.067,27	2.030,67
Telawang	949,77	802,03	1.751,80	949,77	1.075,03	2.024,80	970,36	1.085,78	2.056,14	986,83	1.096,53	2.083,36	1.003,30	1.107,28	2.110,58	1.019,77	1.118,03	2.137,80
Bukit Santuai	1.010,71	912,62	1.923,33	1.010,71	1.112,62	2.123,33	1.031,92	1.123,75	2.155,67	1.048,89	1.134,87	2.183,76	1.065,86	1.146,00	2.211,86	1.082,83	1.157,13	2.239,95
Tualan Hulu	1.207,50	855,30	2.062,80	1.207,50	1.255,30	2.462,80	1.232,00	1.267,85	2.499,86	1.251,61	1.280,41	2.532,01	1.271,21	1.292,96	2.564,17	1.290,82	1.305,51	2.596,33
Telaga Antang	1.317,05	1.525,07	2.842,12	1.317,05	1.375,07	2.692,12	1.344,98	1.388,82	2.733,80	1.367,32	1.402,57	2.769,90	1.389,67	1.416,32	2.805,99	1.412,01	1.430,07	2.842,09
Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.542,36	11.464,61	14.006,98	2.542,36	4.856,74	7.399,10	2.596,63	4.905,31	7.501,93	2.640,04	4.953,87	7.593,91	2.683,45	5.002,44	7.685,89	2.726,86	5.051,01	7.777,87



Urusan/Perangkat Daerah	2016			2017			2018			2019			2020			2021		
	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml	BTL	BL	Jml
Perpustakaan																		
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.082,02	1.192,43	2.274,45	1.082,02	1.192,43	2.274,45	1.106,00	1.204,36	2.310,35	1.125,18	1.216,28	2.341,46	1.144,36	1.228,20	2.372,57	1.163,54	1.240,13	2.403,67
URUSAN PILIHAN																		
Pertanian																		
Dinas Pertanian	13.510,09	25.267,52	38.777,60	10.654,58	18.443,66	29.098,24	10.890,90	18.254,06	29.144,97	11.079,97	18.010,34	29.090,30	11.269,03	18.313,17	29.582,20	11.458,09	18.471,58	29.929,67
Pangan																		
Dinas Ketahanan Pangan				6.755,04	2.684,88	9.439,92	6.905,52	3.040,77	9.946,30	7.025,91	3.154,95	10.180,85	7.146,29	3.100,56	10.246,84	7.266,67	3.104,59	10.371,27
Kelautan dan Perikanan																		
Dinas Perikanan	2.978,39	8.625,81	11.604,20	2.978,39	3.124,38	6.102,77	3.042,68	3.155,62	6.198,30	3.094,11	3.186,87	6.280,97	3.145,53	3.218,11	6.363,64	3.196,96	3.249,35	6.446,32
Perdagangan																		
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4.908,96	7.446,59	12.355,55	4.908,96	5.308,19	10.217,15	5.014,62	5.361,27	10.375,90	5.099,16	5.414,36	10.513,51	5.183,69	5.467,44	10.651,13	5.268,23	5.520,52	10.788,75
Jumlah	846.246,35	828.464,10	1.674.710,45	873.488,16	527.602,87	1.401.091,03	888.586,07	532.857,40	1.421.443,47	895.068,35	538.111,93	1.433.180,28	907.970,44	543.366,46	1.451.336,89	926.976,90	541.957,29	1.468.934,18

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.1.1 Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah yang secara faktual dihadapi yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah yang cakupannya secara luas dan permasalahan yang cenderung meningkat dan berdampak negatif, serta permasalahan yang memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas antar Perangkat Daerah, serta memperhatikan permasalahan pembangunan ditingkat Provinsi maupun Nasional, oleh karena itu dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi permasalahan dengan kriteria sebagaimana urusan pemerintah daerah yang diatur dalam pasal 11, Undang-Undang 23 Tahun 2014.

4.1.2 Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan

4.1.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Permasalahan Pembangunan di bidang Pendidikan yang selalu dinamis yang perlu mendapatkan penanganan yang secara konsisten dan berkelanjutan yaitu:

1. Penyelenggaraan Pendidikan berkualitas dan merata belum terwujud sepenuhnya;
2. Sarana dan Prasarana Sekolah belum memenuhi standar Nasional Pendidikan (NSP);
3. Belum semua sekolah yang berada di Pedesaan dilengkapi dengan Rumah Dinas Guru;
4. Sekolah yang berada di pedesaan masih minim sarana dan prasarana;
5. Masih terdapat ruang kelas yang kondisinya rusak berat, sedang dan ringan;
6. Daya tampung peserta didik masih kurang;
7. Belum semua sekolah memiliki lapangan sekolah yang memberikan

- rasa nyaman bagi peserta didik;
8. Belum merata dan terpenuhinya kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan standar;
 9. Belum semua tenaga pendidik dan kependidikan memiliki kualifikasi sesuai standar;
 10. Belum meratanya penyebaran guru sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya;
 11. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan sebagai minat budaya baca belum semuanya terpenuhi;
 12. Fasilitas/sarana laboratorium sebagai penunjang pembelajaran siswa belum semuanya terpenuhi;
 13. Belum semua sekolah terlayani jaringan listrik dan internet sehingga masih rendah dalam pemanfaatan IT;
 14. Belum semua sekolah terakreditasi minimal B.

B. Kesehatan

1. Belum semua puskesmas terakreditasi;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat;
3. Belum terpenuhinya kebutuhan obat-obatan sesuai standar;
4. Sarana dan prasarana kesehatan khususnya di Rumah Sakit dr. Murjani Sampit belum memenuhi standar rumah sakit rujukan regional;
5. Masih kurangnya sumberdaya tenaga kesehatan;
6. Jangkauan pelayanan kesehatan masih terbatas khususnya dipedesaan.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Belum semua desa terhubung Akses Jalan darat;
2. Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik;
3. Belum Optimalnya sistem drainase dalam kota;
4. Belum semua masyarakat terlayani air bersih;
5. Belum tersedianya dokumen rencana.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan;
2. Masih kurangnya sarana prasarana sanitasi permukiman;
3. Belum terkelolanya Tempat Pemakaman Umum;

4. Masih kurangnya RTH perkotaan;
5. Masih tingginya angka *backlog*.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Belum terpenuhinya rasio Polisi PP dengan luas wilayah dan jumlah penduduk;
2. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada;
3. Belum optimalnya Ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara ;
4. Belum optimalnya pemahaman, pendewasaan tentang sikap dan perilaku yang demokratis dan saling menghargai dalam berpolitik dan berorganisasi kepada masyarakat yang dilandasi oleh mantapnya pemahaman dan pengamalan etika, moral dan Ideologi berbangsa dan bernegara;
5. Belum optimalnya Kewaspadaan masyarakat.

F. Sosial

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama;
3. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial belum optimal;
4. Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memperdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial belum efektif;
5. Masih adanya Komunitas Adat Terpencil (KAT);
6. Masyarakat kurang mampu belum seluruhnya mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial;
7. Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia belum didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas;
8. Kemandirian dan peran serta masyarakat dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan.

4.1.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

1. Masih belum optimalnya Pengembangan Loka Latihan Kerja (LLK) milik pemerintah sesuai pasar kerja;
2. Masih tingginya kasus perselisihan antara Perusahaan dengan tenaga kerja;
3. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten



Kotawaringin Timur.

B. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Peran Perempuan dalam Bidang Pembangunan terutama di struktur Pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
2. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
3. Pengarusutamaan gender dalam perumusan kebijakan pembangunan masih kurang;
4. Masih terdapatnya anak yang berhadapan hukum;
5. Masih belum tersedianya fasilitas umum yang layak untuk anak-anak.

C. Pangan

1. Tingginya konsumsi beras perkapita;
2. Konsumsi pangan non beras belum menjadi pilihan masyarakat;
3. Rendahnya konsumsi protein hewani, sayuran, dan buah-buahan.

D. Pertanian

1. Masih adanya konflik kepemilikan lahan yang belum tertangani;
2. Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong/lahan tidur;
3. Kurangnya penguasaan lahan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan.

E. Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

1. Masih tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan;
2. Kewaspadaan dalam menghadapi ancaman bencana masih rendah;
3. Intrusi air laut akibat kemarau panjang;
4. Belum optimalnya pengelolaan, pengendalian pencemaran, serta pengawasan lingkungan hidup;
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
6. Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan;
7. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.



F. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1. Belum optimalnya pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil karena terbatasnya SDM, sarana dan prasarana;
2. Masih banyak penduduk yang belum memiliki KTP;
3. Belum optimalnya penanganan penduduk rentan administrasi kependudukan.

G. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1. Partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan masih rendah;
2. Pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal belum terlembagakan secara baik;
3. Kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan yang bersumber dari ADD masih rendah;
4. Sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat masih terbatas;
5. Pengelolaan dana bergulir belum terlembagakan secara baik;
6. Kerjasama antar desa belum berkembang;
7. Belum optimalnya kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan;
8. Masih banyak desa yang belum membentuk Badan Usaha Milik Desa sebagai sumber pendapatan desa;
9. Teknologi tepat guna di perdesaan masih belum berkembang;
10. Belum dikembangkannya Pembangunan Perdesaan berbasis kawasan untuk memicu percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi sektor utama pertanian dan sektor pendukung lainnya.

H. Pengendalian Penduduk Dan KB

1. Masih rendah kualitas hidup keluarga;
2. Meningkatnya wanita usia subur sehingga berdampak pada meningkatnya perkawinan usia muda;
3. Masuknya penduduk usia subur dari luar Kabupaten Kotawaringin Timur.

I. Perhubungan

1. Belum tersedia angkutan dalam kota;

2. Belum terkelolanya angkutan umum ke Ibu Kota Kecamatan;
3. Masih terbatasnya pelayanan angkutan udara.

J. Komunikasi Dan Informatika

1. Masih adanya desa yang belum terakses jaringan telekomunikasi;
2. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan *e-government*.

K. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

1. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi;
2. Rendahnya peran serta Badan Pengawas Koperasi;
3. Kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha.

L. Kepemudaan Dan Olah Raga

1. Belum optimalnya pembinaan dan sinkronisasi kegiatan kepemudaan;
2. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi olah raga dan allit berprestasi;
3. Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana olah raga milik pemerintah.

M. Kebudayaan

1. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi dan bahasa daerah;
2. Belum optimalnya pembinaan kesenian daerah;
3. Belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat untuk menjaga situs-situs budaya yang menjadi identitas daerah;
4. Pengaruh budaya yang kurang sesuai dengan tatanan dan tuntunan budaya lokal harus dibentengidengan kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya;
5. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan;
6. Budaya daerah belum menjadi daya tarik wisata untuk menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara.

N. Perpustakaan

1. Masih kurangnya minat baca masyarakat;
2. Rendahnyakunjunganpadaperpustakaan;

3. Masih terbatasnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan;
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana Perpustakaan Daerah.

O. Kearsipan

1. Belum optimalnya pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah;
2. Belum terpenuhinya gudang arsip sesuai standar;
3. Belum adanya tenaga khusus dibidang kearsipan.

4.1.2.3 Urusan Pilihan

A. Kelautan Dan Perikanan

1. Rendahnya peran serta Kelompok Pengawas Masyarakat;
2. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha perikanan budidaya;
3. Kurangnya penyuluh perikanan;
4. Kurangnya budidaya jenis ikan lokal seperti Jelawat, Haruan, dan Papuyu.

B. Pariwisata

1. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata;
2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata;
3. Belum optimalnya promosi wisata;
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat lokal sekitar obyek wisata (sadar wisata);
5. Belum berkembangnya ekonomi kreatif berbasis pariwisata.

C. Pertanian

1. Pengembangan kawasan pertanian terkendala oleh status kawasan hutan;
2. Masih Rendahnya SDM Pengelola pertanian;
3. Masih rendahnya cakupan pelayanan irigasi;
4. Masih rendahnya Indeks Pertanaman (IP);
5. Masih sedikitnya peternak sapi.

D. Perdagangan

1. Masih belum optimalnya pengawasan distribusi barang;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan penataan pasar tradisional.

E. Perindustrian

1. Belum adanya dokumen rencana induk pembangunan industri kabupaten;
2. Belum berkembangnya industri kecil/industri rumah tangga;
3. Masih rendahnya daya saing produk industri kecil.

F. Transmigrasi

1. Tidak tersedianya lahan untuk pembangunan baru wilayah transmigrasi.

4.1.2.4 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Masih terbatasnya kualitas dan kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Pola pikir dan budaya kerja ASN yang belum sepenuhnya mengedepankan profesionalitas, transparansi dan kemandirian terutama dalam pengelolaan kebijakan dan pemberian pelayanan publik;
3. Updating data kepegawaian belum dilakukan secara rutin;
4. Penggalan pendapatan asli daerah belum didasarkan pada data potensi;
5. Pengelolaan pendapatan belum berbasis teknologi informasi;
6. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Pengelola keuangan daerah.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan pembangunan yang dijadikan prioritas Pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun mendatang, Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya:

1. Isu strategis dan Sasaran serta Kebijakan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019;
2. Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah terpilih;
3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah lain yang mempengaruhi Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :
 -) RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025;
 -) Isu Strategis yang diangkat dari situasi dan kondisi identifikasi permasalahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014.
5. Isu strategis yang dirumuskan dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup

strategis;

6. Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Isu strategis yang diangkat dalam RPJMD ini berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.2.1 Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke tiga (2015-2019), sebagai penjabaran dari Visi Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

Untuk mewujudkan visi ini melalui 7 misi pembangunan yaitu :

1. *Mewujudkan* keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber

- daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. *Mewujudkan* masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
 3. *Mewujudkan* politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
 4. *Mewujudkan* kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
 5. *Mewujudkan* bangsa yang berdaya saing;
 6. *Mewujudkan* Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
 7. *Mewujudkan* masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial.

Setiap Prioritas tersebut berkaitan dengan permasalahan di Kabupaten Kotawaringin Timur, oleh karenanya dalam penetapan prioritas yang dijadikan sebagai isu strategis daerah tidak terlepas dari 9 (sembilan) prioritas nasional tersebut sehingga pembangunan daerah sejalan dengan pembangunan nasional.

4.2.2 Penetapan Isu Strategis

Sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan pembangunan ditetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan, maka penentuan isu strategis mengambil dari prioritas tersebut hal ini juga sejalan dengan hasil analisis yang sangat signifikan terhadap permasalahan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk lima tahun kedepan, maka 9 (sembilan) isu strategis Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai berikut:

1. Infrastruktur;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya;
4. Ketahanan Pangan;
5. Penguatan Pemerintahan Desa;
6. Pemberdayaan Ekonomi;
7. Pelestarian Lingkungan Hidup;
8. Penanggulangan Bencana;
9. Pariwisata dan Pelestarian Budaya.

Isu strategis tersebut merupakan tantangan pembangunan yang menjadi perhatian sehingga dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan agar tepat sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan dalam upaya mewujudkan pembangunan sesuai dengan visi dan misi lima tahun kedepan. Adapun permasalahan yang ada di dalam isu strategis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.2.2.1 Infrastruktur

Infrastruktur merupakan Urusan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, yang merupakan roda penggerak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan merupakan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Penyediaan infrastruktur tersebut adalah; Jalan, Jembatan, Drainase, Penyediaan air bersih, Irigasi, Penataan Kota, Pengelolaan limbah/sampah, Perumahan serta pemakaman, Transportasi dan lain-lain.

Kondisi Infrastruktur khususnya jalan di dalam Kota Sampit dan dalam Ibu Kota Kecamatan belum semuanya dalam kondisi baik serta masih terdapat Desa yang belum terhubung jalan darat baik yang dapat dilalui roda dua maupun roda empat. Secara umum permasalahan kerusakan jalan

disebabkan oleh dua hal, yaitu; pertama repitisi atau pengulangan beban, kedua adanya air yang menggenang di permukaan jalan, kerusakan jalan yang disebabkan oleh genangan air hal ini juga disebabkan kurangnya daya dukung sistem drainase yang ada. Sedangkan kerusakan jalan yang disebabkan oleh pengulangan beban dan kelebihan beban yang tidak sesuai dengan kemampuan kapasitas jalan. Lingkungan Pemukiman yang termasuk dalam kawasan kumuh saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya di dalam Kota Sampit mengalami peningkatan, dengan semakin besarnya pertambahan penduduk dengan diikuti penambahan pemukiman yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan penataan perumahan dan kawasan pemukiman yang komprehensif.

Kawasan Kumuh yang terdapat diperkotaan khususnya berada di jaringan anak sungai menjadi penghabat kelancaran aliran sungai serta berkurangnya keindahan kota, dengan berkembangnya kawasan pemukiman saat ini juga tidak didukung dengan sarana dan prasarana sanitasi yang berada baik. Pertambahan kawasan pemukiman yang diikuti dengan pertumbuhan perumahan tentunya juga berkaitan dengan penyediaan air bersih, sehingga cakupan rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga penyediaan air bersih merupakan hal yang wajib disediakan oleh pemerintah karena menyangkut kebutuhan hidup. Sampai dengan saat ini baru sekitar 69,46 persen penduduk terakses air bersih.

Dalam upaya memberikan pelayanan publik dibidang transportasi khususnya transportasi darat, saat ini belum semua terminal yang berada di Kecamatan berfungsi secara baik serta armada angkutan yang belum memenuhi keinginan masyarakat, sehingga angkutan antar Kecamatan maupun dari Kota Sampit ke Kecamatan belum secara khusus terlayani dengan baik, demikian juga halnya angkutan dalam kota (Angkot) sampai dengan akhir tahun 2015 belum teredia. Dibidang Komunikasi sampai dengan akhir tahun 2015 masih terdapat beberapa desa yang belum bisa dijangkau komunikasi seluler atau masih terdapat area blank spot. Beberapa permasalahan yang dihadapi tersebut diatas menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk dapat diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sehingga diharapkan nantinya dibidang infrastruktur ini dapat menggerakkan roda perekonomian disemua sektor yang pada akhirnya meingkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2.2.2 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Meningkatkan kualitas Hidup masyarakat adalah merupakan Kewajiban pemerintah daerah, oleh sebab itu dalam upaya meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat tersebut yaitu dapat di lihat dari peningkatan pembangunan dibidang Pendidikan, Kesehatan, Penurunan Angka Kemiskinan dan pengangguran serta tertanganinya penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan, oleh sebab urusan pendidikan merupakan urusan wajib sebagaimana yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014, dengan demikian pemerintah daerah wajib memberikan perhatian khusus dibidang pendidikan ini, karena setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan.

Kemajuan Pembangunan dibidang pendidikan di kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat dari Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kotawaringin Timur yang setiap tahun mengalami peningkatan. Namun demikian Indikator yang masih rendah dalam komponen IPM tersebut adalah, Rata-Rata lama Sekolah, dimana sampai dengan tahun 2014, rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitusebesar 7,69 Tahun, artinya rata-rata penduduk hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 1 SMP, sedangkan angka melek huruf yang sebelumnya menjadi komponen perhitungan IPM dapat tercapai pada tahun 2014 Angka Buta Huruf tersisa 1,06 persen artinya hampir semua penduduk diatas 15 tahun bisa baca dan menulis.

Dalam upaya memberikan akses pelayanan pendidikan yang adil dan merata serta berkualitas kepada masyarakat, sampai dengan saat ini belum sepenuhnya terwujud karena masih terdaptnya beberapa permasalahan dibidang pendidikan ini yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan lima tahun kedepan yaitu; Sarana dan Prasarana Pendidikan yang belum memenuhi standart Nasional Pendidikan (NSP), Belum semua tenaga pendidik dan kependidikan memiliki kualifikasi sesuai standart, Belum meratanya penyebaran guru sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya.

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 bahwa pengelolaan Pendidikan menengah diserahkan ke pada Pemerintah Provinsi, sehingga

Pemerintah daerah Pengelolaan dari pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan dasar 9 tahun, oleh sebab itu dalam pencapaian target APK, APM pendidikan menengah menjadi kewenangan Provinsi. Namun Demikian karena Anak yang bersekolah pada tingkat pendidikan menengah tersebut berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, maka pemerintah daerah juga berkewajiban untuk membantu masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan menengah, karena sampai dengan saat ini masih ada Kecamatan yang belum memiliki pendidikan menengah setingkat SMA/SMK atau yang sederajat yaitu di Kecamatan Tualan Hulu, demikian juga dengan desa-desa yang jauh dari Ibu Kota Kecamatan yang tidak bisa menjangkau pendidikan menengah.

B. Kesehatan

Kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan mengingat kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana yang dimanatkan dalam undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kualitas Kesehatan yang baik akan memberikan sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga dapat melaksanakan pembangunan.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkungan merupakan salah satu variabel yang kerap mendapat perhatian khusus dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat dan faktor Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pelayanan kesehatan dan genetik. Lingkungan menentukan baik buruknya status derajat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit adapula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkit atau terserang penyakit. Berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan yang terkait dengan higienitas, sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga oleh sebab itu kesehatan lingkungan harus

dilaksanakan lintas sektor.

Dalam pengendalian dan pencegahan penyakit menular maupun tidak merupakan upaya yang harus terus dilakukan mengingat perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur yang cukup pesat khususnya penyakit Penyakit HIV/AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus). Penyakit HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit menular yang mendapat perhatian serius khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kasus HIV/AIDS masih dijumpai setiap tahunnya di Kabupaten Kotawaringin Timur, diantaranya terdapat kematian.

Demikian juga halnya dengan semakin meningkatnya kasus Narkoba, serta peredarannya merambah semua kalangan sampai ke pelosok desa, maka dengan mencanangkan moto hidup sehat tanpa Narkoba menjadi target promotif di bidang kesehatan, mengingat HIV/AIDS selalu berdampingan dengan para pengguna Narkoba, oleh sebab itu pencegahan ini sangatlah penting dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat tanpa Narkoba, Upaya pencegahan ini penyebaran HIV/AIDS serta Penyalahgunaan NARKOBA menjadi tanggung jawab semua pihak. Upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan, Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui, pelayanan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Klinik Kesehatan dan Rumah Sakit.

Ketersediaan Puskesmas yang saat ini sudah ada di setiap Kecamatan tetapi semua Puskesmas tersebut belum terakreditasi, karena masih keterbatasan peralatan dan tenaga. Jangkauan pelayanan kesehatan sampai pada tingkat desa belum semua tersedia tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan sehingga pelayanan kesehatan belum optimal terlayani. Sampai dengan tahun 2015 jumlah puskesmas yang melayani rawat inap 9 Puskesmas.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan RSUD. dr. Murjani Sampit yang telah ditunjuk sebagai Rumah Sakit Regional masih belum memenuhi standar rumah sakit rujukan regional. Sebagai rumah sakit rujukan regional sarana dan prasarana rumah sakit perlu ditingkatkan seperti ruang bedah sentral, serta fasilitas lainnya yang memberikan rasa

nyaman dan kemudahan bagi pasien dan keluarga pasien untuk mendapatkan pelayanan yang prima.

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat mengingat daerah jangkauan Rumah Sakit dr. Murjani sangat luas, maka untuk memberikan akses pelayanana kepada masyarakat padatahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah membangun 2 (dua) rumah sakit pratama di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Kecamatan Parenggean. RSUD Pratama yang dibangun tersebut baru di Kecamatan Parenggean yang sudah selesai dan dioperasikan sedangkan RSUD Pratama Kecamatan Mentaya Hilir Selatan belum selesai pembangunannya diharapkan pada tahun 2018 sudah bisa operasional. Dengan terbangunnya dua RSUD Pratama tersebut berdampak pada ketersediaan Tenaga yang akan melayani pasien dimana kendala saat ini adalah masih kurangnya sumberdaya tenaga kesehatan Paramedis dan Dokter.

C. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan PMKS

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Timur pada setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin yang berada dibawah Garis Kemiskinan pada tahun 2014 sebesar 6,67 persen atau 27.940 Jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 sebesar 6,85 persen atau 28.000 Jiwa, pada akhir tahun 2015 ditargetkan angka Kemiskinan turun menjadi 5 persen.

Penurunan Angka Kemiskinan kabupaten Kotawaringin Timur mengalami perlambatan hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan dengan akses yang sulit dijangkau, Tingkat pendidikan dan kesehatan masih rendah, dan setiap tahun gasis kemiskinan mengalami kenaikan tetapi penghasilan penduduk miskin tidak mengalami kenaikan yang mengakibatkan penduduk miskin yang rentan miskin akan mudah jatuh dalam jurang kemiskinan dan yang sudah dalam jurang kemiskinan sangat sulit untuk keluar dari garis kemiskinan. Keluarga Miskin umumnya sedikit memiliki aset ekonomi yang produktif.

Permasalahan kemiskinan yang menjadi prioritas nasional tentunya juga menjadi priroritas daerah, kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya adalah penambahan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur sangat besar

pengaruhnya terhadap penambahan jumlah penduduk miskin, hal ini disebabkan karena masuknya penduduk dari luar Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kondisi mencari pekerjaan yang bekerja pada sektor tenaga kerja kasar/buruh.

Sebagian masyarakat miskin masih mengandalkan sumber mata pencaharian dari hasil rotan dan keret serta kelapa dalam, dimana harga rotan dan karet sangat dipengaruhi oleh kebijakan secara Nasional, dengan kebijakan Nasional melarang penjualan rotan mentah berdampak pada turunnya harga rotan yang mana saat ini para petani rotan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat terbatas, demikian juga harga karet yang masih rendah tidak sesuai dengan harapan para petani karet. Untuk kelapa dalam yang menjadi topangan hidup masyarakat, khususnya di wilayah selatan kalah bersaing dengan kelapa sawit, dimana saat ini luasan kelapa dalam semakin mengecil serta usia pohon kelapa yang kurang produktif menurunkan hasil produksi kelapa dan harga jual yang sangat fluktuatif dan masih rendah sehingga masih menjadi kendala oleh para petani untuk meningkatkan penghasilan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kabupaten Kotawaringin Timur sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun provinsi dengan membagi kemiskinan menjadi 4 (empat) kategori yaitu Sangat miskin, Miskin, Rentan Miskin, Hampir Miskin. Dimana untuk mengeluarkan masyarakat sangat miskin dan miskin dari jurang kemiskinan, serta masyarakat yang hampir miskin maupun rentan miskin agar tidak jatuh dalam jurang kemiskinan, baik masyarakat ada diperkotaan maupun diperdesaan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang difokuskan pada peningkatan penyempurnaan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga;
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin yang difokuskan pada penyempurnaan dan peningkatan efektifitas program berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil yang difokuskan pada peningkatan akses usaha mikro dan kecil pada sumber produktif, serta program pro rakyat lainnya.

Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), sekitar dua pertiga penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk dalam angkatan kerja. Pada tahun 2014, tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dari tahun

sebelumnya yaitu dari 62,10 persen menjadi 64,86 persen. Dari total angkatan kerja di tahun 2014, 95,89 persen diantaranya bekerja dan 4,11 persen diantaranya adalah pengangguran. Nilai UMK di Kabupaten Kotawaringin Timur meningkat 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 2,45 pada tahun 2013 menjadi 4,11 pada tahun 2014. Peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2014 diperkirakan berkaitan dengan UU minerba yang melarang ekspor barang tambang mentah. UU minerba ini menyebabkan beberapa perusahaan pertambangan sementara berhenti beroperasi bahkan ada juga yang tutup. Hal ini tentu saja memberikan sumbangan pada peningkatan jumlah pengangguran. Berdasarkan data 5 tahun terakhir, sebaran pengangguran didominasi oleh pengangguran terdidik, yaitu pada tahun 2014, pengangguran terdidik (pendidikan menengah dan tinggi) sebesar 54,06 persen, pengangguran sedang (SMP) sebesar 24,80 persen dan kurang terdidik (SD dan tidak tamat SD) sebesar 21,14 persen. Penciptaan lapangan kerja baru dengan meningkatkan kemampuan kewirausahaan para pengangguran terdidik sangat efektif dilakukan karena semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan klasifikasi pendidikan.

Permasalahan sosial yang menjadi urusan wajib pemerintah, yang saat ini lebih menekankan pada permasalahan kemiskinan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terdiri dari 26 Jenis penyang masalah kesejahteraan sosial yaitu; anak terlantar, anak balita terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/Aids, korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang saat ini belum tertangani secara optimal.

D. Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berkualitas

Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga berkualitas tidak dapat

dipisahkan dan merupakan sebuah proses pembangunan sosial, budaya dan ekonomi agar tercipta masyarakat dan keluarga yang berinisiatif dan produktif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan memiliki potensi yang sangat strategis dalam pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Lembaga-lembaga masyarakat seperti RT, RW, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh Keluarga sebagai unit sosial terkecil, sehingga Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan keluarga yang tidak dapat dipisahkan dalam melakukan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya mereduksi permasalahan sosial.

Pemberdayaan Keluarga merupakan hal yang penting dalam membangun Ketahanan Keluarga, oleh karenanya pemberdayaan keluarga tidak hanya dari sisi ekonomi saja tetapi dari bidang sosial lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, artinya tidak ada anak tidak bersekolah, tidak ada anak yang kurang gizi (gizi buruk), sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat hidupnya.

Dalam upaya meningkatkan Keluarga Berkualitas saat ini pemerintah belum optimal dalam melakukan Bina Keluarga remaja yang akan menjadi Generasi Berencana, sehingga pernikahan dini perlu menjadi perhatian demikian juga Bina Keluarga balita, yang akan menghasilkan anak yang sehat dan cerdas sebagai generasi penerus pembangunan. Pembinaan keluarga lansia yang berkaitan dengan meningkatkan Usia harapan Hidup harus berhubungan erat dengan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu Negara dalam hal ini Pemerintah seharusnya bertanggung jawab dalam Penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Keluarga berkualitas tersebut.

4.2.2.3 Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya

Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, Demokratis dan Terpercaya merupakan isu strategis yang sangat penting dalam upaya Reformasi Birokrasi yang saat ini terus menerus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur, Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah

pada tahun 2014 dengan Opini Badan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Namun demikian masih banyak menyisakan pekerjaan yang harus diselesaikan terutama dalam penataan Aset serta pengelolaan keuangan daerah.

Dalam upaya penyelesaian pekerjaan yang masih menjadi perhatian dalam pemeriksaan BPK terus dilakukan oleh pemerintah dengan berbasis IT untuk pengelolaan Keuangan dan aset. Tapi saat ini masih belum dilakukan pengintegrasian Perencanaan dan penganggaran, oleh sebab itu kedepan pemerintah daerah akan berupaya untuk pemanfaatan teknologi dengan *electronic government*.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan beberapa hal diantaranya adalah melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan melalui Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik RKPD sehingga permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat segera mendapat perbaikan oleh pemerintah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Timur setiap tahun mengalami peningkatan, namun demikian alokasi anggaran belanja tidak langsung seperti belanja pegawai masih cukup tinggi, sehingga belanja langsung bagi masyarakat masih terbatas mengakibatkan tingkat kepuasan publik juga dirasakan belum optimal seperti penyediaan layanan publik yaitu jalan, sarana pendidikan, penyediaan air bersih dan masalah seperti ini masih banyak diindikasikan yang dikeluhkan oleh masyarakat tentang beberapa jenis pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah Kabupaten kotawaringin Timur.

Dalam upaya peningkatan belanja pemerintah daerah tentunya tidak terlepas dari sumber pendapatan daerah yang harus terus di gali objeknya sehingga potensi pendapatan meningkat dan diharapkan target dan relaisasi pendapatanpun meningkat, oleh karenanya diperlukan pengelolaan pendapatan yang berbasis Teknologi Informasi yang tepat sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kendala yang juga menjadi perhatian untuk segera diatasi adalah belum optimalnya peningkatan kualitas dan kompetensi dan integritas Aparatur Sipil Negera (ASN) sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta untuk mencapai pelayanan prima pada masyarakat.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ideal sebagaimana harapan masyarakat, dibutuhkan kerjasama yang terorganisasi dan efektif antar komponen jajaran Pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana semboyan daerah yaitu habaring hurung yang harus dimaknai bergotong royong dalam menyelesaikan persoalan daerah menuju sehingga cita-cita pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat dapat direalisasikan. Peningkatan kualitas tata kelola didukung dengan peningkatan fasilitas penunjang pelayanan berupa sarana dan prasarana pemerintahan yang dilakukan secara regular maupun tahun jamak.

4.2.2.4 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia. Selain itu, ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa, dan menunjukkan eksistensi kedaulatan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, ketahanan pangan tidak akan dapat terwujud dengan hanya melibatkan satu komponen bangsa, tapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangun ketahanan pangan secara sinergi.

Ketahanan Pangan dihasilkan oleh suatu sistem Ketahanan Pangan yang terdiri dari 3 subsistem, yaitu : (a) Sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) Sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta (c) Sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Ketiga subsistem tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan: (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat; (4) Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; serta (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

Tiga isu strategis yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Kab. Kotim

yaitu 1) rendahnya tingkat produktivitas tanaman pangan, 2) kurangnya tenaga kerja di bidang pertanian, dan 3) kurangnya lahan fungsional. Dampak ketiga isu tersebut diperkuat dengan permasalahan diantaranya: tingginya konsumsi beras per kapita, menurunnya tingkat konsumsi pangan non beras, dan rendahnya konsumsi protein hewani, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Konsumsi beras/kapita/tahun sebesar 123,79 kg tahun 2015 termasuk sangat tinggi. Angka-angka konsumsi tersebut mungkin belum menggambarkan angka konsumsi menyeluruh karena mengabaikan konsumsi beras di restoran, rumah makan, warung, acara-acara pesta, kongres, seminar, lokakarya, dan sebagainya yang secara kuantitas cukup signifikan. Angka konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata dunia 60 kg/kapita/tahun dan ASEAN 60-80 kg/kapita/tahun.

Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras memberikan resiko yang tinggi terhadap penyediaannya karena peningkatan konsumsi akibat pertambahan penduduk akan terus terjadi. Peningkatan konsumsi ini semakin sulit diimbangi oleh peningkatan produksi yang cenderung stagnan karena penurunan produktivitas usaha tani akibat kondisi tanah yang semakin marginal disebabkan kurangnya upaya konservasi dan konversi lahan sawah untuk keperluan lain. Disamping itu, proporsi asupan karbohidrat yang terlalu didominasi padi-padian (lebih dari 50 persen) membuat kualitas gizi kurang baik dan tidak kondusif terhadap kesehatan. Pada sisi lain, peningkatan konsumsi beras perkapita secara, telah memberi dampak terhadap penurunan permintaan/konsumsi jagung, ubi kayu, dan ubi jalar.

Peningkatan konsumsi beras perkapita secara sistematis, telah memberi dampak terhadap penurunan permintaan/konsumsi jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Konsumsi jagung pada tahun 2010 rata-rata mencapai 0,94 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2011 turun menjadi 0,37 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2012 konsumsi jagung meningkat tidak terlalu tinggi menjadi 0,57 kg/kapita/tahun. Kondisi serupa juga terjadi pada konsumsi ubi kayu dan ubi jalar. Pada tahun 2010 tingkat konsumsi ubi kayu rata-rata mencapai 5,06 kg/kapita/tahun dan turun menjadi 3,60 kg/kapita/tahun pada tahun 2012, dan tingkat konsumsi ubi jalar turun dari 2,50 kg/kapita/tahun pada tahun 2011 menjadi 2,35 kg/kapita/tahun pada tahun 2012. Konsumsi protein hewani di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu sekitar 25 persen dari total kebutuhan protein. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, tingkat konsumsi daging sapi, kambing dan ayam mengalami penurunan dari 4,90 kg/kapita/tahun pada tahun 2011 menjadi

4,33 kg/kapita/tahun pada tahun 2012. Konsumsi buah-buahan dan sayuran juga relatif stagnan pada tahun 2011 dan tahun 2012.

4.2.2.5 Penguatan Pemerintahan Desa

Pembangunan desa di suatu wilayah merupakan program pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penanggulangan keterbelakangan masyarakat dalam suatu daerah. Pembangunan di desa diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakatnya. Hal ini karena hambatan dalam bidang ekonomi akan berimplikasi pada kemiskinan dan bidang pendidikan berimplikasi pada keterbelakangan.

Dalam konteks Pembangunan Daerah, desa mempunyai kewenangan dalam mengurus dan mengatur warganya sendiri. Oleh karenanya, desa memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Dalam kaitannya dengan penguatan Pemerintahan desa, Pemerintah telah mengucurkan Anggaran Dana Desa, hal ini diharapkan agar desa dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan disamping agar desa dapat melaksanakan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penanggulangan keterbelakangan masyarakat di desanya.

Indikator yang ingin dicapai adalah peningkatan status desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, kelengkapan kelembagaan desa, dokumen perencanaan desa serta meningkatkan jumlah desa yang tertib administrasi dan meningkatnya perekonomian masyarakat melalui meningkatnya jumlah lembaga ekonomi di masyarakat yang dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

Kenyataan di lapangan bahwa permasalahan utama yang terjadi di desa

adalah masih belum terselesaikannya tapal batas antar desa dan antar kecamatan, belum efektif dan berkembangnya lembaga perekonomian di masyarakat dan lemahnya Sumber daya manusia (SDM) di desa disamping juga masih banyaknya desa yang sarana dan prasarana infrastruktur belum memadai.

A. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia yang ada di desa sangat terbatas, khususnya dari segi pendidikan. Banyak kepala desa dan perangkatnya berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keahlian teknologi apalagi pada level Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai UU nomor 6 tahun 2014 pasal 55 fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Masalah yang sama menyangkut SDM masyarakat desa. Peningkatan kapasitas aparatur, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di desa, pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik menjadi salah satu hal yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk lima tahun kedepan. Semuanya harus didukung dengan infrastruktur yang memadai.

Anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah, karena mengingat Prioritas Pemerintahan Jokowi-JK atau yang disebut Nawa Cita adalah Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam kaitannya dengan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah kepada desa, pemerintah berharap peran desa dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan optimal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan agar arah kebijakan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

B. Tapal Batas Desa

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap Tapal Batas Desa secara bertahap akan terselesaikan dalam periode tahun 2016-2021, ini harus didukung oleh seluruh Camat dan Kepala Desa dan seluruh lapisan masyarakat, mengingat sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tapal Batas tanpa adanya tapal batas desa yang jelas perencanaan pembangunan akan sulit terealisasi.

C. Lembaga Ekonomi Masyarakat yang berkualitas

Upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan adalah

dengan didirikannya lembaga-lembaga ekonomi masyarakat di desa, karena dengan didirikannya lembaga-lembaga ekonomi masyarakat dipedesaan diharapkan dapat:

-) Meningkatkan perekonomian desa;
-) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
-) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
-) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
-) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
-) Membuka lapangan kerja;
-) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
-) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Kenyataan bahwa desa masih terbatas pembentukan dan pengelolaan lembaga ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat sehingga di dalam target RPJMD tahun 2016-2021 pembentukan lembaga ekonomi Desa berupa antara lain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu isu utama yang menjadi indikator dalam penguatan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/596/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Penetapan Status Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal dan Desa Maju Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, bahwa di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 1 Desa Tertinggal dan 167 Desa Maju. Dari 167 Desa Maju masih terdapat 55 Desa yang skornya dibawah 40 yang mengindikasikan bahwa desa-desa tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, kelistrikan, telekomunikasi, infrastruktur jalan dan jembatan, dll.

Dalam upaya mempercepat pembangunan pada kawasan perdesaan terutama padadesa yang masih “rawan tertinggal “ pada 55 desa ditambah 1 desa tertinggal untuk menuju Desa Mandiri, Maju dan Sejahtera diperlukan suatu upaya pembangunan kawasan perdesaan berbasis produk unggulan. Pada wilayah Tengah pembangunan kawasan perdesaan berbasis Hortikultura dan sentra perikanan, pada Wilayah Selatan pembangunan kawasan perdesaan berbasis Pertanian Tanaman Pangan,

sedangkan pada wilayah Utara pembangunan kawasan berbasis pengembangan peternakan sapi.

4.2.2.6 Pemberdayaan Ekonomi

Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; b) penguatan kelembagaan; c) penguasaan teknologi; dan d) pemberdayaan sumberdaya manusia.

Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri kecil; e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spasial. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Dari pandangan tersebut, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik

dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja, maka dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM terutama Usaha Kecil Menengah (UKM), memiliki potensi yang strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh UKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok UKM dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu dipandang perlu untuk membangun pusat-pusat transaksi di daerah yang merupakan pusat aktivitas masyarakat yang tercipta karena aglomerasi tenaga kerja PBS, ataupun karena karakteristik wilayah.

Dalam rangka untuk mendorong potensi unggulan di Kabupaten Kotawaringin Timur maka berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 138 Tahun 2012, telah ditetapkan 3 (tiga) Zona yaitu pertama zona wilayah utara Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan Mentaya Hulu, Kecamatan Bukit Santuai, Kecamatan Parenggean dan Kecamatan Cempaga Hulu komoditas unggulannya adalah karet dan rotan; kedua wilayah selatan kecamatan Teluk Sampit, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, kecamatan Pulau Hanaut, Kecamatan Hilir Utara dengan komoditas unggulan kelapa dalam dan tanaman pangan; Ketiga wilayah tengah, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Baamang, Kecamatan Seranau, Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Telawang dan Kecamatan Cempaga yaitu Tanaman Hortikultura dan Peternakan. Untuk memperkuat kelembagaan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu untuk membentuk BUMD yang berfungsi menaungi pemanfaatan berbagai potensi daerah untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu upaya memperkuat kelembagaan perekonomian rakyat yakni dengan melaksanakan pembangunan pasar-pasar tradisional di ibukota kecamatan maupun lokasi-lokasi yang merupakan pusat kegiatan masyarakat. Kegiatan pembangunan tersebut dilakukan secara regular maupun tahun jamak.

4.2.2.7 Pelestarian Lingkungan Hidup

Sebagai wilayah yang berkembang, Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami dilema dalam mengambil kebijakan. Di satu sisi untuk mensejahterakan masyarakatnya harus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor yang dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi disisi lain pembangunan di berbagai sektor tersebut akan berakibat pada pemanfaatan sumberdaya alam secara besar-besaran serta akan menimbulkan pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan para pakar ekonomi lingkungan mulai mengembangkan ilmu tentang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan harus mempertimbangkan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana sehingga tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana juga akan memberikan kesempatan kepada alam untuk memperbaiki dirinya kembali sehingga akan menyisakan manfaat bagi generasi selanjutnya.

Isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup erat kaitannya dengan isu-isu kebencanaan pada suatu daerah. Tidak optimalnya kebijakan pelestarian lingkungan hidup akan juga akan mengakibatkan timbulnya bencana. Memperhatikan hal tersebut, dalam merencanakan pembangunan selama 5 tahun kedepan di Kabupaten Kotawaringin Timur ini kita sudah harus dapat mengidentifikasi isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana yang selama ini terjadi, dapat menjadi acuan antisipasi 5 tahun kedepan.

Isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana yang teridentifikasi di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk ditangani kedepan antara lain:

- Masih banyaknya kejadian kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan;
- Rendahnya kewaspadaan dalam menghadapi ancaman bencana sebagai akibat masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan kebencanaan;
- Intrusi air laut akibat kemarau panjang yang akan mengakibatkan krisis air bersih terutama di wilayah Selatan;
- Belum optimalnya pengelolaan, pengendalian pencemaran, serta pengawasan lingkungan hidup;
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
- Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan yang disebabkan oleh

minimnya sarana prasarana serta jumlah SDM yang belum memadai;

- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

Berangkat dari isu-isu strategis ini kemudian akan dijabarkan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait kedalam program-program aksi penanganan isu strategis tersebut.

4.2.2.8 Penanggulangan Bencana

Pembangunan bidang penanggulangan bencana merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan. Akibat bencana banyak menimbulkan kerusakan dalam jumlah besar bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Faktor demografi menjadi penyebab bencana seperti perusakan lingkungan, pembabatan hutan, perluasan industri dan pemukiman yang mendesak tata ruang yang seharusnya menjadi ruang hidup yang aman dan nyaman. Oleh karenanya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan.

Dalam penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana merupakan hasil penting dalam mengurangi bahaya kerentanan terhadap bencana. Dalam pengurangan Risiko Bencana terdapat 2 hal penting yang dilakukan pencegahan dan mitigasi bencana, pengurangan bahaya dan kerentanan serta kesiap siagaan. Dimana terdapat 3 fase bencana dalam penanggulangan bencana yaitu Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan pasca bencana.

Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas 16,496 km² dengan ancaman bencana Asap akibat Kebakaran Lahan dan Hutan, Banjir, Gelombang pasang Abrasi, Longsor, Kekeringan dan cuaca ekstrime dan bencana sosial dimana telah terjadi beberapa darurat bencana diantaranya adalah, pada tahun 2013 terjadi banjir setinggi 1,4-4 meter di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Santuai, Telaga Antang, Mentaya Hulu dan Antang Kalang dengan jumlah Kepala keluarga yang terdampak sebanyak 4490 KK, ditahun yang sama terjadi kebakaran pemukiman di Kecamatan Baamang dengan jumlah bangunan 83 bangunan dengan jumlah KK yang terdampak 105 KK, pada Tahun 2014 terjadi Abrasi Pantai Ujung Pandaran akibat gelombang yang merobohkan rumah penduduk sebanyak 12 KK, Pada tahun 2015 terjadi Kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan sehingga beberapa daerah kesulitan air bersih yaitu Kecamatan Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, dan Kecamatan Pulau Hanaut serta Bencana Asap Akibat

Kebakaran Lahan dan Hutan. Dalam upaya Penanggulangan Bencana tersebut diatas, pencegahan merupakan prioritas dalam perencanaan kedepan terutama terkait dengan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karena dampak kerugian yang ditimbulkan sangat besar.

4.2.2.9 Pariwisata Dan Pelestarian Budaya

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam mensukseskan agenda pembangunan nasional. Dalam konteks ini sangat dituntut kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Keberadaan investor untuk pembangunan daerah adalah suatu hal yang sangat mutlak saat ini, jika kita tidak ingin tertinggal dari daerah-daerah lainnya, apalagi jika dihubungkan dengan konsep tingkat pertumbuhan ekonomi yang hendak kita capai.

Di masa lalu tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi sangat di topang oleh *government expenditure*, tetapi untuk masa sekarang, seiring dengan semakin terbatasnya anggaran pemerintah, maka tingkat pertumbuhan ekonomi sangat diharapkan dari investasi. Apalagi setiap kegiatan investasi selalu membawa *multiplier effect* yang sangat besar terhadap penyediaan lapangan kerja baru, pencerahan terhadap perkembangan industri rumah tangga (meningkatnya produksi kerajinan, makanan, produksi spesifik/khas masyarakat lokal), serta berkembangnya sektor-sektor penunjang pariwisata dan perdagangan lainnya.

Kondisi ini tentunya akan menimbulkan persaingan positif dari setiap Pemerintah Daerah untuk menggaet investor sebanyak-banyaknya ke daerah masing-masing. Daerah yang lebih siaplah dan mempunyai *competitive advantage* yang akan memenangkan persaingan ini. Daerah yang masih mempersulit urusan dengan investor, serta memiliki birokrasi yang berbelit-belit dan mahal pasti akan ditinggalkan investor. Berkenaan dengan itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai kebijakan yang memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi, dan sekaligus juga memberikan berbagai informasi tentang potensi dan peluang berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan kata lain pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak dapat dipisahkan dari sektor lain. Kesuksesan pembangunan di satu sektor akan memberi implikasi positif terhadap pembangunan sektor yang lain, dan sebaliknya kegagalan pembangunan satu sektor akan menimbulkan beban pada pembangunan sektor yang lain. Untuk

membatasi ruang lingkup pembahasan, maka analisa hanya dilakukan pada sektor pariwisata, ceteris paribus sektor lain sudah berjalan sebagaimana mestinya, minimal tidak memberikan beban pada pembangunan sektor pariwisata.

Dalam pengembangan sektor pariwisata, beberapa isu strategis pembangunan sektor tersebut yaitu (1) penataan kawasan yang masih belum sesuai dengan tata ruang; (2) kurangnya sarana dan prasarana daya tarik wisata; (3) kurangnya jumlah SDM kepariwisataan yang terampil; (4) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konsep sapta pesona; (5) terbatasnya kemampuan melaksanakan promosi wisata, seni dan budaya; (6) kurangnya kelembagaan organisasi pariwisata, seni dan budaya; (7) tidak tersedianya data akurat tentang kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Selain itu masih terdapat potensi destinasi wisata yang belum dikelola dan dipasarkan secara optimal, diantaranya adalah wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan wisata religi yakni Manuyang Anak, Mandui Safar, Simah Laut, Upacara Adat dan Ritual, Tarian dan Musik Daerah, susur sungai, ikon Ikan Jelawat, Taman Kota Sampit, Ekowisata Sagonta Kota, Pantai Ujung Pandaran, kawasan sepeda santai, serta Desa Wisata yang berada di Desa Parit dan Desa Pemantang. Dalam rangka mendukung pengembangan destinasi pariwisata, diperlukan pembangunan infrastruktur penunjang yang dilakukan secara regular maupun tahun jamak. Secara keseluruhan, keterkaitan permasalahan, isu strategis, dan prioritas pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1
Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, dan Prioritas Pembangunan

No	Prioritas Pembangunan	Isu Strategis	Permasalahan
1	Infrastruktur	Disparitas infrastruktur yang masih harus di selesaikan	1 Tidak semua jalan dalam wilayah kota dalam kondisi baik
			2 Belum semua desa terhubung dengan akses jalan darat
			3 Meningkatnya luas kawasan kumuh karena peningkatan jumlah penduduk dan pemukiman baru
			4 Belum semua penduduk memiliki akses terhadap air bersih
			5 Tidak semua terminal di kecamatan berfungsi dengan baik
			6 Belum optimalnya angkutan umum dalam kota maupun antar kecamatan
			7 Masih terdapat desa yang berada dalam area blank spot



No	Prioritas Pembangunan	Isu Strategis	Permasalahan
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Belum optimalnya tingkat kesejahteraan masyarakat	1 Rata-rata lama sekolah masyarakat hanya sampai kelas 1 SMP (belum tercapainya target wajib belajar 9 tahun)
			2 Sarana dan Prasarana Pendidikan yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
			3 Belum semua tenaga pendidik dan kependidikan memiliki kualifikasi sesuai standar
			4 Belum meratanya penyebaran guru sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya
			5 Masih relatif rendahnya tingkat Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
			6 Relatif tingginya penyebaran penyakit menular HIV/AIDS
			7 Tingginya kasus penyalahgunaan NARKOBA
			8 Keterbatasan tenaga dan fasilitas kesehatan di Kecamatan dan Desa
			9 Masih kurangnya sumberdaya tenaga kesehatan Paramedis dan Dokter
			10 Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin absolut
			11 Rata-rata penduduk miskin tinggal di daerah yang terpencil dengan mata pencaharian utama adalah petani
			12 Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat pendatang yang rendah sehingga hanya terserap sebagai tenaga kerja kasar yang rentan dengan PHK
			13 Relatif tingginya angkatan kerja terdidik yang menjadi pengangguran
			14 Belum optimalnya penanganan terhadap korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
			15 Relatif rendahnya pemberdayaan keluarga dan lembaga sosial masyarakat dalam pembangunan
3	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya	Belum optimalnya implementasi <i>good governance</i>	1 Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam proses bisnis pelayanan publik
			2 Pengelolaan aset daerah belum berbasis teknologi informasi
			3 Masih relatif tingginya belanja pegawai



No	Prioritas Pembangunan	Isu Strategis	Permasalahan
			4 Belum optimalnya pendataan potensi dan sumber pendapatan asli daerah berbasis teknologi informasi
			5 Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kompetensi dan integritas Aparatur Sipil Negera (ASN)
4	Ketahanan Pangan	Belum tercapainya swasembada pangan	1 Tingginya konsumsi bahan pangan beras
			2 Masih relatif rendahnya konsumsi protein, buah, dan sayuran
			3 Rendahnya tingkat produktivitas tanaman pangan
			4 Kurangnya tenaga kerja di bidang pertanian
			5 Kurangnya lahan fungsional
5	Penguatan Pemerintahan Desa	Relatif belum berkembangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di perdesaan	1 Belum terselesaikannya tapal batas antar desa dan antar kecamatan
			2 Belum efektif dan berkembangnya lembaga perekonomian di masyarakat
			3 Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di desa
			4 Masih banyaknya desa yang sarana dan prasarana infrastruktur belum memadai
6	Pemberdayaan Ekonomi	Belum kuatnya <i>bargaining position</i> usaha ekonomi rakyat (UKM & IKM) dan sumberdaya wirausahawan	1 Belum optimalnya kualitas dan daya saing sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
			2 Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) angkatan kerja dan tenaga kerja
			3 Kurangnya kemampuan dan kapasitas pelaku usaha
			4 Belum terlihatnya peran usaha mikro dan kecil sebagai pelaku sektor riil
			5 Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru yang berkualitas
			6 Belum optimalnya pemasaran produksi pertanian
			7 Belum efektif dan efisiennya sarana dan prasarana pertanian dalam menunjang produktifitas
7	Pelestarian Lingkungan Hidup	Belum optimalnya upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan sumberdaya alam	1 Belum optimalnya pengelolaan, pengendalian pencemaran, serta pengawasan lingkungan hidup
			2 Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
			3 Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan yang disebabkan oleh minimnya sarana prasarana serta jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai



No	Prioritas Pembangunan	Isu Strategis	Permasalahan
			4 Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan
8	Penanggulangan Bencana	Belum terbangunnya sistem pencegahan dan penanggulangan bencana	1 Masih banyaknya kejadian kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan
			2 Rendahnya kewaspadaan dalam menghadapi ancaman bencana sebagai akibat masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan kebencanaan
			3 Intrusi air laut akibat kemarau panjang yang akan mengakibatkan krisis air bersih terutama di wilayah Selatan
9	Pariwisata Dan Pelestarian Budaya	Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	1 Penataan kawasan yang masih belum sesuai dengan tata ruang
			2 Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kepariwisataan yang terampil
			3 Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konsep sapta pesona
			4 Terbatasnya kemampuan melaksanakan promosi wisata, seni dan budaya
			5 Kurangnya kelembagaan organisasi pariwisata, seni dan budaya
			6 Tidak tersedianya data akurat tentang kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
			7 Kurangnya daya dukung infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal pariwisata

Pengidentifikasian isu strategis pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak hanya pada permasalahan yang terjadi di daerah, melainkan juga mengacu pada isu strategis pembangunan nasional. Keterkaitan antara isu strategis di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan isu strategis nasional dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut ini.



Tabel 4.2
Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Kotawaringin Timur
dengan Isu Strategis Nasional

			Isu Strategis dalam RPJMD Kabupaten								
			Isu 1	Isu 2	Isu 3	Isu 4	Isu 5	Isu 6	Isu 7	Isu 8	Isu 9
Isu Strategis dalam RPJMN	1	Perlindungan dan keamanan seluruh warga negara			√						
	2	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif dan Terpercaya			√						
	3	Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI					√				
	4	Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya			√						
	5	Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia		√							
	6	Peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	√		√			√			√
	7	Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik				√		√			√
	8	Revolusi Karakter Bangsa		√	√						
	9	Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial		√	√		√	√			√

Keterangan:

- Isu 1 : Infrastruktur
- Isu 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
- Isu 3 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya
- Isu 4 : Ketahanan Pangan
- Isu 5 : Penguatan Pemerintahan Desa
- Isu 6 : Pemberdayaan Ekonomi
- Isu 7 : Pelestarian Lingkungan Hidup
- Isu 8 : Penanggulangan Bencana
- Isu 9 : Pariwisata Dan Pelestarian Budaya

4.3 Tata Ruang Dan Pembangunan Kewilayahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten kotawaringin

Timur Tahun 2015-2035, secara umum dapat digambarkan rencana pembangunan daerah yang bersifat kewilayahan, dimana pusat-pusat kegiatan yang berupa ibukota kabupaten, dan ibukota kecamatan yang ditetapkan menjadi pusat kegiatan maupun desa-desa yang ditetapkan menjadi pusat pelayanan harus dilengkapi dengan sarana dan prasaranya. Begitu juga wilayah-wilayah sebagai pusat pengembangan produk unggulan.

4.3.1 Pusat-Pusat Kegiatan

Dalam RTRWN Sampit yang menjadi ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), karena disamping sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kota Sampit juga menjadi salah satu kota yang menjadi pusat pengembangan perekonomian Kalimantan Tengah dengan adanya Bandara H. Asan, maupun Pelabuhan Bagendang yang ditetapkan sebagai salah satu pengembangan Tol Laut dalam RPJMN. Dalam RTRWK ada 3 ibukota kecamatan yang ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Lingkungan Promosi (PKLp) yaitu Parenggean yang merupakan pusat kegiatan wilayah Utara, Samuda sebagai pusat kegiatan wilayah Selatan, dan Simpang Seabi sebagai pusat kegiatan wilayah Barat, seperti yang terlihat pada Gambar 4.1. Sedangkan 11 Ibu Kota kecamatan lainnya ditetapkan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditetapkan di:

-) Gunung Makmur di Kecamatan Antang Kalang;
-) Beringin Agung di Kecamatan Telaga Antang;
-) Lempuyang di Kecamatan Teluk Sampit;
-) Tangar di Kecamatan Mentaya Hulu;
-) Bagendang Tengah di Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
-) Pelantaran di Kecamatan Cempaga Hulu;
-) Tumbang Sangai di Kecamatan Telaga Antang; dan
-) Tumbang Batu di Kecamatan Bukit Santuai.

Pusat-pusat kegiatan

Sampit sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP)

Parenggean
Simpang Sebabi
Samuda



Gambar 4.1 Pusat-pusat Kegiatan

4.3.2 Wilayah Pengembangan Produk Unggulan

A. Wilayah Perkebunan

Wilayah utara secara umum dikembangkan sebagai wilayah pengembangan perkebunan yang pada umumnya adalah Kelapa Sawit, karet dan rotan, terutama di Kecamatan Antang Kalang, Tualan Hulu, Telaga Antang, Bukit Santuai, Mentaya Hulu, Parenggean, Cempaga Hulu, dan Kecamatan Telawang

B. Wilayah Pertanian Tanaman Pangan

Pertanian tanaman pangan pada umumnya dikembangkan di wilayah selatan sebagai lahan pasang surut, yaitu di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit, Pulau Hanaut, dan Kecamatan Seranau. Di beberapa kecamatan ini masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan produksinya melalui perluasan lahan maupun upaya intensifikasi. Wilayah ini juga merupakan wilayah perkebunan kelapa yang masih menjanjikan untuk dikembangkan dengan pembinaan yang lebih intensif.

C. Wilayah Pengembangan Holtikultura

Holtikultura sangat potensi untuk dikembangkan di wilayah Tengah mengingat kondisi wilayahnya dan jenis tanahnya yang cocok, yaitu di Kecamatan Cempaga, Kota Besi, Baamang, dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

D. Sentra Perikanan

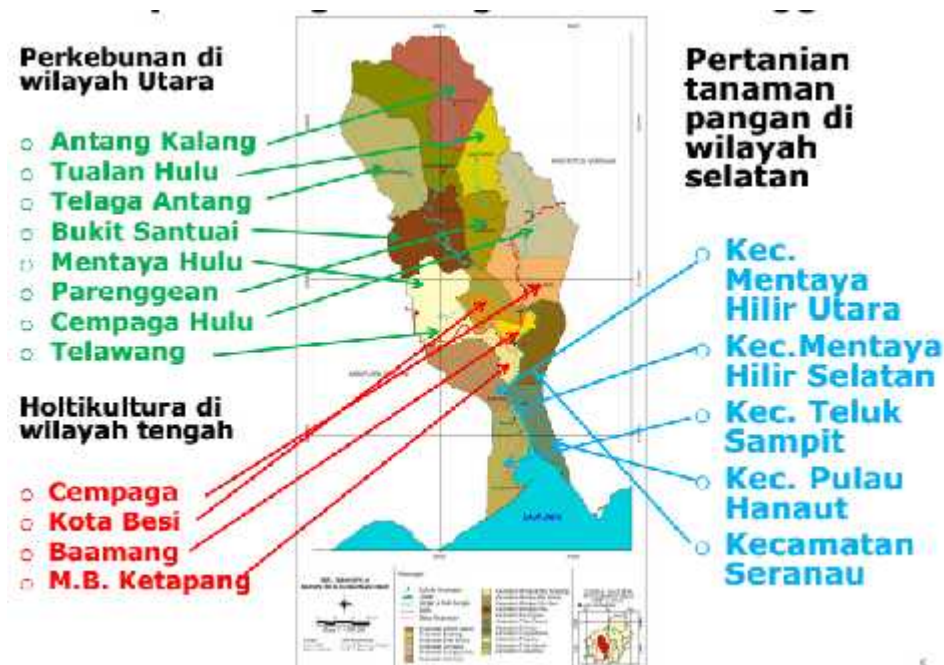
Potensi perikanan di Kabupaten Kotawaringin Timur terbagi menjadi 2

yaitu perikanan tangkap di Kecamatan Teluk Sampit dan Pulau Hanaut, dan perikanan budidaya di Kecamatan Kota Besi. Sedangkan di Desa Sungai Ijum Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dikembangkan menjadi Minapolitan.

E. Sentra Pengembangan Peternakan Sapi dan Desa unggulan Peternakan Sapi

Desa Sumber Makmur di Kecamatan Telawang, Desa Karang Sari di Kecamatan Parenggean, dan Desa Sumber Makmur di Kecamatan Mentaya Hilir Utara saat ini merupakan sentra pengembangan peternakan sapi yang mendukung kebutuhan daging di Kabupaten Kotawaringin Timur. Disamping itu juga Desa Gunung Makmur di Kecamatan Antang Kalang, Desa Waringin Agung di Kecamatan Telaga Antang, dan Desa Babaluh di Kecamatan Pulau Hanaut merupakan tiga desa yang salah satu produk unggulannya adalah peternakan sapi diharapkan dapat mendukung pasokan daging dari tiga desa yang telah menjadi sentra peternakan sapi.

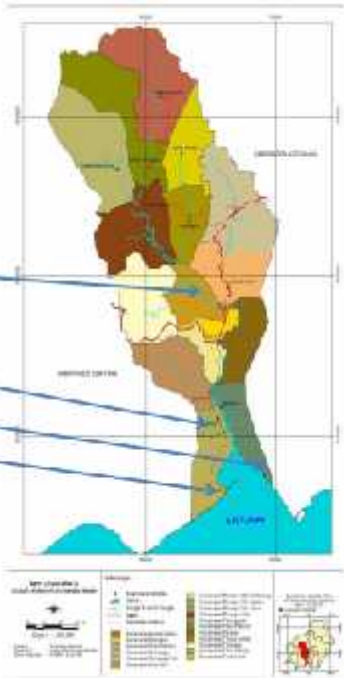
Kelima kawasan tersebut di atas disajikan pada Gambar 4.2a, 4.2b, dan 4.2c berikut ini:



Gambar 4.2a Wilayah Pengembangan Produk Unggulan

**Sentra
Perikanan**

- Desa Bajarum s/d**
- Desa Hanjalipan**
- Desa Sungai Ijum**
- Desa Satiruk**
- Desa Ujung Pandaran**



Gambar 4.2b Wilayah Pengembangan Produk Unggulan

**❖ Pengembangan Sentra
Peternakan Sapi**

- Kecamatan Telawang
 - **Desa Sumber Makmur**
- Kecamatan Parenggean
 - **Desa Karang Sari**
- Kecamatan Mentaya Hillir Utara
 - **Sumber Makmur**

**❖ Komoditi unggulan
peternakan sapi**

- Kecamatan Antang Kalang
 - **Desa Gunung Makmur**
- Telaga Antang
 - **Desa Waringin Agung**
- Kecamatan Pulau Hanaut
 - **Desa Babaluh**

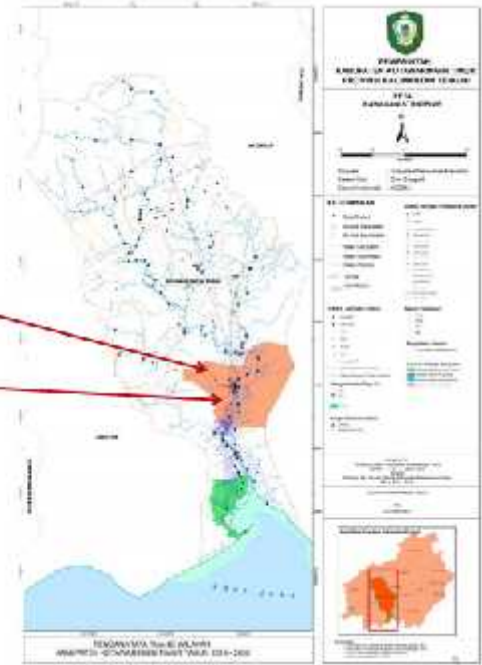


Gambar 4.2c Wilayah Pengembangan Produk Unggulan

4.3.3 Pusat Perdagangan Dan Jasa

Sebagai Ibu Kota Kabupaten, Kota Sampit otomatis akan menjadi wilayah perdagangan dan jasa yang terpusat di Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, seperti yang terlihat pada Gambar 4.3.

- **BAAMANG**
- **M.B. KETAPANG**

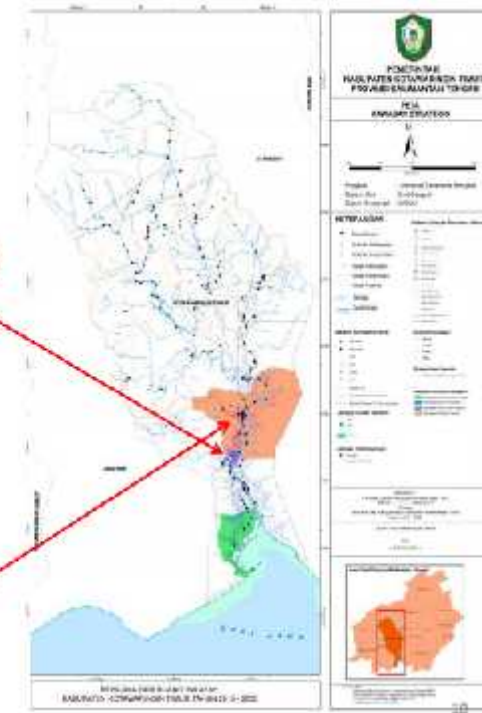


Gambar 4.3 Pusat Perdagangan dan Jasa

4.3.4 Kawasan Industri Dan Pergudangan

Kawasan Industri ditetapkan di Km 17 jalan H.M. Arsyad, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sampai dengan Desa Bagendang Hulu seluas 2.186,3 Ha yang didukung dengan Pelabuhan Multipurpose yang berada di wilayah tersebut. Untuk mendukung keberadaan Kawasan Industri tersebut juga ditetapkan Kawasan Pergudangan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (Dari Ring Road Selatan dan Desa Telaga Baru sampai Kawasan Industri), seperti yang terlihat pada Gambar 4.4.

- **Kawasan Industri**
(dari M.B. Ketapang Km 17 s/d M.H Utara Desa Bagendang Hulu)
- **Kawasan Pergudangan**
M.B. Ketapang (Dari Ring Road Selatan & Desa Telaga Baru s/d Kawasan Industri)



Gambar 4.4 Kawasan Industri dan Pergudangan

4.4 Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, salah satu dokumen perencanaan yang diwajibkan untuk disertai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Dengan demikian, seiring dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 ini dilakukan KLHS.

Beberapa hal yang penting untuk diintegrasikan dari KLHS ke dalam RPJMD ini adalah Isu-Isu Strategis, yang akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana program strategis.

Berikut adalah penelaahan isu-isu strategis yang dihasilkan dalam pembahasan KLHS dengan isu-isu strategis yang dicantumkan dalam RPJMD. Dalam hal ini ternyata keduanya masih dalam substansi yang sama. Integrasi isu strategis KLHS dengan isu strategis RPJMD dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Integrasi Isu Strategis KLHS dalam Isu Strategis RPJMD

No	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis RPJMD
1	Semakin meningkatnya alih fungsi lahan hutan menjadi non hutan	Pelestarian Lingkungan Hidup
2	Semakin maraknya alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya	Pelestarian Lingkungan Hidup
3	Semakin meningkatnya pencemaran air sungai, tanah, dan udara akibat pertumbuhan aktivitas perkebunan, pertambangan, pertanian, (industri dan permukiman) serta belum baiknya sistem pengelolaan limbah dan persampahan	Pelestarian Lingkungan Hidup
4	Semakin meningkatnya daerah rawan bencana	Penanggulangan Bencana
5	Masih tingginya potensi konflik/sengketa dalam kepemilikan dan pengelolaan lahan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya
		Penguatan Pemerintahan Desa
6	Masih lemahnya sistem pengendalian pemanfaatan ruang	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya



No	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis RPJMD
7	Adaptasi terhadap perubahan iklim dan lingkungan	Penanggulangan Bencana
8	Berkurangnya perhatian dan pemeliharaan pada situs-situs budaya dan bersejarah	Pariwisata Dan Pelestarian Budaya
9	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk mendukung kegiatan pertanian, pertambangan, dan perkebunan	Infrastruktur
		Ketahanan Pangan
10	Rendahnya daya saing untuk menghadapi tuntutan penerapan sistem Masyarakat Ekonomi Asean dan perdagangan bebas	Penguatan Pemerintahan Desa
		Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya
11	Adanya rencana pemekaran wilayah yang didukung oleh ketersediaan sumber daya yang merata	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya
		Pemberdayaan Ekonomi
12	Belum efektifnya fungsi Kotim sebagai induktor perkembangan regional kota/kabupaten sekitarnya	Pemberdayaan Ekonomi
13	Masih rendahnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
		Pemberdayaan Ekonomi
14	Pemantapan sektor industri	Infrastruktur

Isu strategis KLHS dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya alih fungsi lahan hutan menjadi non hutan, semakin maraknya alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya dan semakin meningkatnya pencemaran air sungai, tanah, dan udara akibat pertumbuhan aktivitas perkebunan, pertambangan, pertanian, (industri dan permukiman) serta belum baiknya sistem pengelolaan limbah dan persampahan mengakibatkan terganggunya kelestarian lingkungan hidup.
2. Semakin meningkatnya daerah rawan bencana maka harus ada program dan kegiatan yang dilakukan untuk Penanggulangan Bencana.
3. Masih tingginya potensi konflik/sengketa dalam kepemilikan, pengelolaan lahan dan Masih lemahnya sistem pengendalian pemanfaatan ruang maka perlu dilakukannya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya dan Penguatan Pemerintahan Desa .
4. Adaptasi terhadap perubahan iklim dan lingkungan perlu adanya

kesiapsiagaan yang terkait dengan Penanggulangan Bencana.

5. Berkurangnya perhatian dan pemeliharaan pada situs-situs budaya dan bersejarah maka perlu adanya program dan kegiatan yang mendukung Pariwisata dan Pelestarian Budaya.
6. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk mendukung kegiatan pertanian, pertambangan, dan perkebunan, hal ini terkait dengan infrastruktur dan Ketahanan Pangan.
7. Rendahnya daya saing untuk menghadapi tuntutan penerapan sistem Masyarakat Ekonomi Asean dan perdagangan bebas perlu adanya program dan kegiatan yang mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya dan Penguatan Pemerintahan Desa
8. Adanya rencana pemekaran wilayah yang didukung oleh ketersediaan sumber daya yang merata maka perlu adanya program dan kegiatan yang mendukung Pemberdayaan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya.
9. Belum efektifnya fungsi Kotim sebagai induktor perkembangan regional kota/kabupaten sekitarnya sehingga perlu program dan kegiatan yang berupaya dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi
10. Masih rendahnya kualitas hidup masyarakat sehingga perlu adanya program dan kegiatan yang mendukung dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi
11. Pemantapan sektor industri dipengaruhi oleh ketersediaan infrastuktur pendukung sektor industri

Rekomendasi yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas rumusan perencanaan pembangunan dalam RPJMD secara lebih spesifik yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pada isu-isu pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Penyusunan Masterplan kawasan industri Kabupaten Kotawaringin Timur bertujuan untuk memetakan dan merencanakan secara tepat potensi industri yang ada di Kotawaringin Timur untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sekaligus meminimalisir dampak lingkungan akibat pengembangan industri di Kabupaten Kotawaringin Timur. Masterplan ini meliputi:
 -) Analisis kesesuaian untuk mendapatkan daya dukung dan daya tampung;
 -) Pemetaan potensi industri dari hulu hingga hilir untuk menentukan sektor basis dan pendukung;

-) Touring system dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan koneksinya dengan wilayah sekitar secara regional;
 -) Sistem pengembangan industri secara berkelanjutan.
- Masterplan berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan destinasi pariwisata. Pemangku kepentingan yang terkait, antara lain:
-) Bappeda;
 -) Dinas Lingkungan Hidup;
 -) Dinas Pertanian;
 -) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 -) dll.
2. Pengembangan sistem pertanian tanaman pangan secara organik;
 3. Dukungan Pemerintah berupa bantuan, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan limbah pertanian dan perkebunan mandiri;
 4. Perlu peningkatan kerjasama antara pengelola hutan, perkebunan, dan petani. Kerjasama tersebut dapat berupa:
 -) Pengembangan sistem pertanian ramah lingkungan;
 -) Pembentukan kelompok siaga kebakaran dan penyelamat hutan;
 -) Program insentif bagi petani dan investor perkebunan yang terlibat secara aktif dalam penyelamatan hutan;
 -) Pelaksanaan dan pengawasan regulasi secara tegas untuk aktivitas penjarahan dan pembakaran hutan.
- Pemangku kepentingan yang terkait, antara lain:
-) Bappeda;
 -) Dinas Lingkungan Hidup;
 -) Dinas Pertanian;
 -) BPBD.
5. Setiap daerah seharusnya memiliki Rencana Strategis Pengembangan Pertanian sebagai acuan dalam pengembangan potensi pertanian di wilayahnya. Rencana Pengembangan Pertanian meliputi:
 -) analisis kesesuaian lahan untuk tiap komoditi yang potensial dikembangkan;
 -) analisis ekonomi dan usaha tani;
 -) analisis sosial budaya;
 -) analisis daya dukung dan daya tampung lahan pertanian;
 -) langkah-langkah strategis dalam pengembangan produksi tanaman

pangan/hortikultura/perkebunan;

-) sistem pertanian berkelanjutan termasuk di dalamnya upaya-upaya meminimalisir dampak lingkungan.

Pemangku kepentingan yang terkait, antara lain:

-) Bappeda;
-) Dinas Lingkungan Hidup;
-) Dinas Pertanian;
-) dll.

6. Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi pertanian/perkebunan yang aman/ramah lingkungan, efisien penggunaan saprodi, murah dan mudah untuk dilaksanakan oleh petani dan pelaku perkebunan secara umum.

Pemangku kepentingan yang terkait, antara lain:

-) Bappeda;
-) Dinas Lingkungan Hidup;
-) Dinas Pertanian;
-) Perguruan Tinggi;
-) Lembaga penelitian, dll

7. Penerapan sistem industri pengolahan ramah lingkungan dengan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, misalnya:

-) AMDAL untuk industri sesuai ketentuan;
-) Audit lingkungan secara berkala;
-) Pembinaan dan pendampingan;
-) Bantuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah hasil pertanian untuk industri kecil dan UMKM;
-) Penerapan sistem 3R untuk limbah pertanian.

Pemangku kepentingan yang terkait, antara lain:

-) Bappeda;
-) Dinas Lingkungan Hidup;
-) Dinas Pertanian;
-) Perguruan Tinggi;
-) Lembaga penelitian, dll.

8. Peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan perekonomian serta penyerapan tenaga kerja diprioritaskan pada intensifikasi pertanian dan perkebunan, bukan ekstensifikasi dengan pembukaan lahan baru khususnya hutan;

9. Optimalisasi lahan pekarangan untuk menunjang ketahanan pangan keluarga. Pemangku kepentingan yang terkait, antara lain:
 -) Bappeda;
 -) Dinas Lingkungan Hidup;
 -) Dinas Pertanian;
 -) Perguruan Tinggi;
 -) Lembaga penelitian, dll.
10. Program peningkatan produksi perkebunan dengan pemanfaatan teknologi yang memperhatikan keberlanjutan sumberdaya tanah, air dan udara dan pemberdayaan masyarakat;
11. Program peningkatan produksi hasil peternakan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, serta pengembangan konversi energi dari pengelolaan limbah;
12. Program pembinaan Industri Kecil dan Menengah yang disertai dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah;
13. Program peningkatan iklim Investasi dan Realisasi investasi dengan memperkuat perlindungan terhadap pengembangan industri lokal dan keberlanjutan lingkungan;
14. Program pembangunan jalan dan jembatan untuk memperbaiki aksesibilitas wilayah, meningkatkan dinamisasi perekonomian wilayah dengan memperhatikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan hidup;
15. Program rehabilitasi jalan dan jembatan untuk memperbaiki aksesibilitas wilayah, meningkatkan dinamisasi perekonomian wilayah dengan memperhatikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan hidup.

4.5 Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya terutama Kabupaten yang berbatasan langsung, yaitu melalui penelaahan terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan.



Tabel 4.4
Identifikasi RPJMD Daerah Lain
(Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan)

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Kabupaten Seruyan	2013-2018	Optimalisasi kualitas sumber daya manusia dengan menyiapkan tenaga kerjayang sesuai dengan peluang investasi dan pontesial ekonomi lokal.	
			Peningkatan promosi dan kerjasama pengembangan ekonomi potensial	
			Meningkatkan kemampuan lembaga dan aparaturn pemerintah yang berwenang dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum.	
			Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan semua jenjang	
			Meningkatkan kualitas mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan	
			Meningkatkan pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan Desa	
			Mengembangkan pendidikan lanjutan pendukung keahlian khusus	
			Meningkatkann jangkauan pelayanan ibu hamil dan bersalin oleh tenaga kesehatan	
			Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan	
			Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenga medis dan paramedis.	
			Mengembangkan promosi kesehatan kepada seluruh masyarakat, terutama di pedesaan dan pedalaman	
			Meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga berencana	
			Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menghubungkan antardaerah dalam dan luar seruyan.	
			Menyediakan listrik pedesaan berupa PLT Satau pembangkit listrik tenaga air yang lebih sesuai dengan kondisi wilayah.	
			Mengembangkan interkoneksi sistem jaringan tenaga listrik dalam rangka penyediaan sumber daya listrik yang aman terutama pada kondisi jam puncak.	
			Mengembangkan teknologi pengolahan, kewirausahaan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan dan peternakan.	
			Mengembangkan dan restocking bibit ikan unggulan Seruyan seperti jelawat, pipih dan ikan lain.	



No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
			Melibatkan para tokoh dan lembaga adat, organisasi kemasyarakatan dan seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan kelestarian lingkungan.	
			Meningkatkan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya.	
			Melakukan rehabilitasi daerah kritis, pemulihan kawasan/lahan bekas tambang dan perkebunan, reboisasi, dan pengendalian pemanfaatan pantai dan laut.	
			Mengembangkan dan menata wisata alam, wisata sejarah dan budaya sebagai destinasi/objek wisata.	
			Membangun infrastruktur penunjang kepariwisataan.	
			Meningkatkan pemasaran pariwisata.	
			Mengembangkan seni budaya dan atraksi wisata.	
			Meningkatkan mutudam keterampilan tenaga angkatan kerja.	
			Mengembangkan lapangan usaha/kerja yang menampung angkatan kerja lokal.	
			Memperluas jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial terutama terhadap penduduk miskin, PMKS dan masyarakat adat terpencil.	
2	Kabupaten Katingan	2013-2018	Melakukan revitalisasi terkait kelembagaan kerjasama antar daerah yang ada	RPJMD dalam proses perubahan
			Melaksanakan wajib belajar 12 tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat	
			Menerapkan sistem jaminan pembiayaan menyeluruh (total coverage) bagi masyarakat antara lain melalui penerapan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga miskin	
			Mengembangkan puskesmas rawat inap	
			Mengembangkan potensi unggulan daerah	
			Mengembangan jaringan pemasaran bagi produk lokal	
			Melakukan pengendalian yang terukur dalam menjamin stabilitas harga bahan pokok, menjaga daya beli masyarakat dan mengontrol inflasi dalam batas yang aman	
			Meningkatkan keberdayaan dan penanganan PMKS	
			Meningkatkan peran PSKS dalam mengurangi masalah kesejahteraan sosial	
			Meningkatkan penanganan korban bencana secara terpadu	



No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
			Membina masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan	
			Mengelola air limbah dan limbah B3 secara aman dan terpadu	
			Mencegah dan mengendalikan kerusakan Hutan dan Lahan	
			Mengelola potensi titik api secara terpadu	
			Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan	
			Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jembatan	
			Mengembangkan sistem angkutan umum terpadu darat dan sungai	
			Pengembangan pelayanan angkutan umum	
			Mengelola suplai listrik yang menjangkau seluruh desa/wilayah	
			Menyediakan fasilitas jaringan telekomunikasi yang mencakup seluruh wilayah.	

4.6 Telaah Atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*)

Konsep *Sustainable Development* memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam di masa depan, generasi yang akan datang “pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Demikian pula perkembangan penduduk perlu diperhatikan dalam mencapai keberlanjutan pembangunan, dan karenanya jumlah dan perkembangan penduduk haruslah dalam keseimbangan dengan perubahan potensi produk ekosistem.

Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab-akibat. Hubungan ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*). Hubungan antara ekonomi dan

lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (*viable*). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan (*bearable*). Ketiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan akan menciptakan kondisi berkelanjutan (*sustainable*).

Sustainable akan tercapai bila ketiga pilar: ekonomi, lingkungan dan sosial dilaksanakan secara bersamaan karena memang ketiganya saling bersinergi. Kalau hanya dua pilar yang jadi fokus kita, maka hasil yang dicapai hanya *viable* (hasil pelaksanaan antara lingkungan dan ekonomi), atau *equitable* saja (bila yang dilaksanakan hanya sosial dan ekonomi), bahkan mungkin hanya dapat nilai *bearable* bila pembangunan lingkungan dan sosial saja yang dilaksanakan. Salah satu tantangan terbesar konsep tersebut saat ini adalah menciptakan keberlanjutan, termasuk didalamnya keberlanjutan sistem politik dan kelembagaan sampai pada strategi, program, dan kebijakan sehingga pembangunan kota yang berkelanjutan dapat terwujud.

Pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif jangka panjang. Lebih lanjut secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pencapaian keberlanjutan dalam hal (1) ekologis, (2) ekonomi, (3) sosial budaya, (4) politik, dan (5) keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan ekologis merupakan prasyarat pembangunan demi keberlanjutan kehidupan karena akan menjamin keberlanjutan eksistensi bumi. Dikaitkan dengan kearifan budaya, masing-masing suku di Indonesia memiliki konsep yang secara tradisional dapat menjamin keberlangsungan ekologis. Keberlanjutan ekonomi yang terdiri atas keberlanjutan ekonomi makro dan keberlanjutan ekonomi sektoral merupakan salah satu aspek keberlanjutan ekonomi dalam perspektif pembangunan.

Dalam keberlanjutan ekonomi makro tiga elemen yang diperlukan adalah efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan dan peningkatan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal ini akan dapat tercapai melalui kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat guna dalam proses struktural yang menyertakan disiplin fiskal dan moneter. Sementara itu keberlanjutan ekonomi sektoral yang merupakan keberlanjutan ekonomi makro akan diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan sektoral yang spesifik. Kegiatan ekonomi sektoral ini dalam bentuknya yang spesifik akan mendasarkan pada perhatian terhadap sumber daya alam yang bernilai ekonomis sebagai kapital. Selain itu koreksi terhadap harga barang dan jasa, dan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang merupakan biosfer keseluruhan sumber daya.

Dalam hal keberlanjutan sosial dan budaya, secara menyeluruh keberlanjutan sosial dinyatakan dalam keadilan sosial. Hal-hal yang merupakan perhatian utama adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perhatian terhadap HAM, kebebasan individu, hak-hak sosial, politik dan ekonomi, demokratisasi serta kepastian ekologis merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dalam melakukan kajian pada aspek sosial.

Pelaksanaan pembangunan di daerah bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat daerah yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memuat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berbagai indikator kinerjanya masing-masing. Secara fundamental, Peraturan Presiden tersebut menjadi acuan dalam penyusunan instrumen pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah maupun nasional.

Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 baik secara prosedur, struktur, maupun secara substansial. Dengan demikian dokumen Perubahan RPJMD ini telah juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 karena instrumen pengukuran pencapaian kinerja pada kedua peraturan perundangan tersebut memiliki filosofi yang sama yakni pembangunan berkelanjutan. Secara detail perihal indikator kinerja dapat dilihat pada Bab VI dan Bab VIII.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.1 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur

Visi merupakan arah pembangunan atau masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang daerah. Perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 merupakan Tahapan pembangunan ke-3 dalam RPJPD 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dengan visi “Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional”. Disingkat menjadi Motto Damai dan Mantap, Implementasi dari visi tersebut dijabarkan sebagai:

1. Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang demokratis dalam bidang politik, sosial budaya, supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia;
2. Terwujudnya rasa aman bagi masyarakat;
3. Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang maju, adil, dan makmur melalui pembangunan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia yang berkualitas, dan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh. Tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat sehingga mencapai kesejahteraan yang diinginkan;
4. Sumberdaya alam yang terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai tambah dan meningkatkan daya saing;
5. Jaringan transportasi yang mampu menjangkau ke perdesaan.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 12 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Asri dan Lestari adalah mewujudkan keasrian kabupaten Kotawaringin Timur yang hijau dengan alam lingkungan yang lestari. Kelestarian lingkungan hidup ini untuk memberikan ruang yang layak bagi generasi mendatang. Lestari juga berarti mempertahankan tradisi dan situs-situs sejarah yang bermanfaat bagi pendidikan dan pariwisata. Tradisi dan situs sejarah dilestarikan agar masyarakat Kotawaringin Timur memiliki identitas budaya dan tidak melupakan masa lalunya;
2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia. Artinya bahwa untuk mencapai Kotawaringin Timur yang maju diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdedikasi kepada daerahnya. Sumberdaya manusia

- merupakan modal penting dalam memajukan suatu daerah;
3. Mengembangkan Industri Pengolahan adalah mewujudkan agro industri di Kabupaten Kotawaringin Timur baik industri hilir maupun industri hulu. Dengan pengembangan industri ini maka perekonomian Kotawaringin Timur tidak akan bergantung lagi pada sektor primer tetapi tercipta diversifikasi kegiatan ekonomi yang lain. Dengan pengembangan sektor industri diharapkan akan terjadi Peningkatan pendapatan perkapita dan peningkatan kesempatan kerja, dan nilai tambah produk pertanian;
 4. Mengembangkan sektor pertanian yang sesuai dengan lahan di Kotawaringin Timur. Ini berarti bahwa pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas di Kabupaten Kotawaringin Timur disesuaikan dengan kondisi lahan dan iklim setempat. Dengan pendekatan agro ekosistem yang sesuai, produk pertanian akan memiliki daya saing yang tinggi;
 5. Mengembangkan Kondisi Sosial Politik yang Demokratis, Saling Tenggang Rasa, Persatuan, dan Aman adalah sebuah kondisi yang mewujudkan rasa aman di masyarakat. Saling Tenggang rasa akan adanya perbedaan baik perbedaan agama ataupun suku. Rasa aman ini akan terwujud jika warga Kabupaten Kotawaringin Timur bersatu dan menjalankan kehidupannya secara demokratis;
 6. Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Sosial. Artinya untuk mewujudkan Kotawaringin Timur yang maju diperlukan peningkatan pelayanan fasilitas sosial terutama pendidikan dan kesehatan. Sehingga warga dapat mencapai fasilitas ini dengan biaya murah dan bermutu tinggi. Dengan demikian pelayanan fasilitas sosial ini dapat melayani seluruh masyarakat, termasuk yang berada di pelosok;
 7. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa. Berarti bahwa dalam setiap tindakan didasari oleh prinsip-prinsip keagamaan yang berfungsi untuk menjaga akhlak dan moralitas baik pegawai maupun penduduk Kotawaringin Timur pada umumnya;
 8. Pemerataan Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi adalah pemerataan pembangunan jalan yang tidak hanya terkonsentrasi pada ibukota kabupaten tetapi juga sampai ke desa-desa sehingga ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kota besar. Selain itu juga mengembangkan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai daerah yang ideal untuk meningkatkan investasi dengan sarana dan prasarana yang memadai;
 9. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Permukiman adalah meningkatkan pelayanan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air

- limbah, dan listrik yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan peningkatan pelayanan ini akan meningkatkan pula produktifitas masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan;
10. Melakukan Pencegahan dan Penanganan Bencana. Mitigasi bencana perlu dilakukan agar jumlah korban dan kerugian dapat diminimalkan. Bencana alam yang potensial terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah banjir dan kebakaran, baik kebakaran di permukiman maupun kebakaran hutan dan lahan;
 11. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Menanamkan etos kerja, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta penempatan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian dapat melayani masyarakat secara profesional;
 12. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah meningkatkan efisiensi anggaran pembangunan, meningkatkan koordinasi pembangunan dengan kabupaten lain dan Provinsi Kalimantan Tengah, meningkatkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka dilakukan pentahapan pembangunan per lima Tahunan, pada Tahun 2016-2020 yang merupakan tahapan ke III dalam RPJPD 2005-2025 dengan setrategi yaitu “Memantapkan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Secara Menyeluruh”.

RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Sejalan dengan tahapan pembangunan ke III tersebut, maka Visi Pembangunan tahun 2016-2021, yang merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur terpilih adalah lanjutan visi misi periode 2010-2015 (Tahapan ke dua RPJPD), serta dengan mempertimbangkan kondisi daerah, Permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu setrategis yang dihadapi, sedangkan tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini dan kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang, maka visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah:

Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”

Disingkat menjadi Motto : **Manis Manasai.**

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat serta cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tetap mengacu pada



pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Visi yang ingin dicapai yaitu terwujudnya masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Relegius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera merupakan kelanjutan dari visi pada periode sebelumnya, hanya ada penambahan pada kata “ Kebersamaan” yang merupakan keinginan Bupati dan Wakil Bupati dalam mengimplementasikan dari Semboyan Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Habaring-Hurung. Penjabaran Visi tersebut diatas sebagai berikut:

Madani: Masyarakat Madani adalah masyarakat yang maju, tercermin dari masyarakat yang beradab dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Dinamis: Masyarakat yang Dinamis adalah masyarakat yang mampu untuk mengimbangi dan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman secara cepat dan bijaksana dengan cara bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya.

Mandiri dan Berdaya Saing: Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing memiliki arti bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur akan berkembang dengan baik dimasa depan dengan kekuatan yang dimiliki dan tidak sepenuhnya tergantung pada daerah lain dan masyarakat yang profesional, kreatif dan inovatif dalam berbagai sektor, adanya kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman investasi berskala kecil, menengah dan besar sehingga mampu bersaing.

Tabel 5.1
Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi	Misi
Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.
	Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
	Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan bagian integral dari Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perumusan Visi tersebut memperhatikan Visi Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 yaitu “Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis (Berkah) untuk mewujudkan kesejahteraan segenap masyarakat Kalimantan Tengah”.

Dalam penyelarasan visi terbut juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dengan visi Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkeadilan Berlandaskan Gotong Royong.

5.2 Misi Pembangunan

Misi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat, dan berakhlak;
2. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
4. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.

4 (empat) Misi tersebut di atas merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan umum tersebut dijabarkan dalam tujuan yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang secara detail dijelaskan pada sub bab berikutnya.

5.3 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan urusan sesuai dengan kewenangan daerah serta penjabaran dari Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan



ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 5.2. sebagai berikut.



Tabel 5.2

Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016 (Capaian)	Tahun 2017 (Capaian)	Tahun 2018 (Target)	Tahun 2019 (Target)	Tahun 2020 (Target)	Tahun 2021 (Target)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 1:									
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak									
(1) Tujuan 1.1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	68,61	69,42	70,17	69,34	69,56	69,76	69,94	69,94
1. Sasaran 1.1.1: Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	69,51 tahun	69,60 tahun	69,70 tahun	69,83 tahun	69,91 tahun	70,02 tahun	70,17 tahun	70,17 tahun
2. Sasaran 1.1.2: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	7,70 tahun	7,88 tahun	7,89 tahun	8,49 tahun	8,55 tahun	8,72 tahun	9,00 tahun	9,00 tahun
	Harapan lama sekolah	12,05 tahun	12,21 tahun	12,59 tahun	12,41 tahun	12,52 tahun	12,62 tahun	12,71 tahun	12,71 tahun
3. Sasaran 1.1.3: Meningkatnya kualitas SDM angkatan kerja	Persentase angkatan kerja terampil/terdidik dan jumlah angkatan kerja	NA	NA	32,03 %	33,70 %	34,16 %	34,58 %	34,96 %	34,96 %
4. Sasaran 1.1.4: Meningkatnya kualitas pembangunan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,79	NA	87,73	87,28	87,62	87,93	88,20	88,20
	Prevalensi kekerasan terhadap anak-anak	NA	NA	0,012 %	0,011 %	0,010 %	0,009 %	0,008 %	0,008 %
Misi 2:									
Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan									
(2) Tujuan 2.1: Peningkatan konektivitas jalan darat	Rasio konektivitas jalan darat antar pusat kegiatan	NA	NA	92,00 %	92,00 %	96 %	96 %	100 %	100 %
5. Sasaran 2.1.1:	Persentase jalan	NA	NA	48,88 %	48,90 %	49,00 %	50,00 %	61,00 %	61,00 %



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016 (Capaian)	Tahun 2017 (Capaian)	Tahun 2018 (Target)	Tahun 2019 (Target)	Tahun 2020 (Target)	Tahun 2021 (Target)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan	dalam kondisi baik								
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	NA	NA	46,07 %	46,07 %	46,00 %	47,00 %	49,00 %	49,00 %
	Konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan	NA	NA	90,27 %	92,00 %	93,00 %	94,00 %	95,00 %	95,00 %
	Jumlah kecelakaan lalu lintas	NA	NA	149 kali	141 kali	134 kali	127 kali	120 kali	120 kali
(3) Tujuan 2.2: Peningkatan kesejahteraan dan stabilitas daya beli masyarakat	Inflasi	5,72 %	2,46 %	3,29 %	5 - 7 %	5 - 7 %	5 - 7 %	5 - 7 %	5 - 7 %
	PDRB per Kapita	32,45 juta rupiah	34,24 juta rupiah	36,15 juta rupiah	37,57 juta rupiah	39,12 juta rupiah	41,07 juta rupiah	42 - 44 juta rupiah	42 - 44 juta rupiah
	Tingkat Kemiskinan	6,42 %	6,32 %	6,24 %	5,91 %	5,51 %	5,32 %	4 - 5 %	4 - 5 %
	Tingkat Pengangguran	3,53 %	NA	4,92 %	2 - 4 %	2 - 4 %	2 - 4 %	2 - 4 %	2 - 4 %
	Indeks Gini	0,28	0,32	0,35	≤0,35	≤0,35	≤0,35	≤0,35	≤0,35
6. Sasaran 2.2.1: Meningkatnya rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	NA	NA	87,30 %	93,50 %	95,99 %	97,65 %	98,70 %	98,70 %
	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	NA	NA	85,90 %	90,20 %	91,60 %	93,00 %	94,40 %	94,40 %
7. Sasaran 2.2.2: Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas	Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar	NA	NA	51,07 %	62,00 %	63,00 %	64,00 %	65,00 %	65,00 %
	Persentase masyarakat yang terlayani air	NA	NA	76,62 %	83,00 %	89,00 %	95,00 %	100,00 %	100,00 %



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016 (Capaian)	Tahun 2017 (Capaian)	Tahun 2018 (Target)	Tahun 2019 (Target)	Tahun 2020 (Target)	Tahun 2021 (Target)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	bersih								
8. Sasaran 2.2.3: Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	NA	NA	78,26	78,75	79,24	79,72	80,21	80,21
9. Sasaran 2.2.4: Menguatnya perekonomian rakyat	Persentase pertumbuhan kredit usaha masyarakat (IKM dan UMKM)	NA	NA	13,21 %	16,00 %	17,00 %	18,00 %	20,00 %	20,00 %
(4) Tujuan 2.3: Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	NA	NA	NA	71,47	72,15	73,14	73,75	73,75
10. Sasaran 2.3.1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase tingkat pencemaran air	NA	NA	NA	5,22 %	5,01 %	4,80 %	4,35 %	4,35 %
	Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	NA	NA	60,50 %	58,00 %	57,00 %	56,00 %	55,00 %	55,00 %
	Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU)	NA	NA	50,00 %	50,00 %	60,00 %	66,70 %	75,00 %	75,00 %
11. Sasaran 2.3.2: Meningkatnya kualitas ruang publik	Persentase RTH kota dengan kondisi baik	NA	NA	NA	70,52 %	80,43 %	80,62 %	80,72 %	80,72 %
	Luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati	NA	NA	49,42 ha	47,42 ha	45,42 ha	43,42 ha	41,42 ha	41,42 ha
12. Sasaran 2.3.3: Menurunnya tingkat resiko bencana alam, kebakaran lahan,	Penurunan titik api (Hot Spot)	NA	NA	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016 (Capaian)	Tahun 2017 (Capaian)	Tahun 2018 (Target)	Tahun 2019 (Target)	Tahun 2020 (Target)	Tahun 2021 (Target)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
hutan, dan permukiman									
	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	NA	NA	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	Partisipasi masyarakat dalam pencegahan bencana	NA	NA	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Misi 3:									
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien									
(5) Tujuan 3.1: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	NA	NA	NA	C	CC	B	A	A
13. Sasaran 3.1.1: Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan	Kemandirian Fiskal Daerah	11,79 %	11,16 %	14,98 %	12,32 %	12,65 %	13,13 %	13,83 %	13,83 %
14. Sasaran 3.1.2: Meningkatnya aspek partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	NA	NA	76,18 %	75,00 %	80,00 %	80,00 %	85,00 %	85,00 %
15. Sasaran 3.1.3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Capaian implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
	Nilai akuntabilitas	CC	CC	B	B	B	BB	A	A



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016 (Capaian)	Tahun 2017 (Capaian)	Tahun 2018 (Target)	Tahun 2019 (Target)	Tahun 2020 (Target)	Tahun 2021 (Target)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kinerja								
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai LPPD	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
16. Sasaran 3.1.4: Meningkatnya status perkembangan desa	Jumlah desa berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun)	NA	NA	Sangat tertinggal: 72 Tertinggal: 83 Berkembang: 12 Maju: 1 Mandiri: 0	Sangat tertinggal: 55 Tertinggal: 68 Berkembang: 37 Maju: 7 Mandiri: 1	Sangat tertinggal: 51 Tertinggal: 64 Berkembang: 41 Maju: 10 Mandiri: 2	Sangat tertinggal: 47 Tertinggal: 60 Berkembang: 45 Maju: 13 Mandiri: 3	Sangat tertinggal: 43 Tertinggal: 56 Berkembang: 49 Maju: 16 Mandiri: 4	Sangat tertinggal: 43 Tertinggal: 56 Berkembang: 49 Maju: 16 Mandiri: 4
17. Sasaran 3.1.5: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Persentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang terlayani jaringan kabel dan nirkabel	NA	NA	61,54 %	61,54 %	61,54 %	65,38 %	71,15 %	71,15 %
Misi 4:									
Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya									
(6) Tujuan 4.1: Peningkatan perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	7,62 %	7,93 %	7,99 %	7,82 %	7,88 %	7,95 %	8,11 %	8,11 %
18. Sasaran 4.1.1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Persentase pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,06 %	8,64 %	6,90 %	6,06 %	6,41 %	6,98 %	7,31 %	7,31 %
	Persentase pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	9,28 %	8,80 %	11,19 %	8,80 %	9,12 %	9,40 %	9,78 %	9,78 %
	Persentase pertumbuhan	9,35 %	8,07 %	8,70 %	8,07 %	8,33 %	8,61 %	8,90 %	8,90 %



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016 (Capaian)	Tahun 2017 (Capaian)	Tahun 2018 (Target)	Tahun 2019 (Target)	Tahun 2020 (Target)	Tahun 2021 (Target)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor								
19. Sasaran 4.1.2: Meningkatnya investasi di daerah	Rasio nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	NA	NA	68,96 %	23,78 %	23,78 %	24,97 %	24,97 %	24,97 %
20. Sasaran 4.1.3: Meningkatnya kualitas sektor pariwisata dan jasa	Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	1,41 %	1,40 %	1,34 %	1,31 %	1,34 %	1,39 %	1,41 %	1,41 %



5.4 Janji Bupati dan Wakil Bupati

Program Aksi yang akan dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, dalam mewujudkan Trisakti yang terdiri dari 3 Pilar yaitu Berdaulat Dalam Bidang Politik, Berdikari Dalam Bidang Ekonomi dan Berkepribadian Dalam Bidang Kebudayaan. Janji Bupati dan Wakil Bupati dalam penjabaran Trisakti dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3
Janji Bupati dan Wakil Bupati

Berdaulat Dalam Bidang Politik	Berdikari Dalam Bidang Ekonomi	Berkepribadian Dalam Bidang Kebudayaan
Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan desa	Membangun infrastruktur	Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa
Menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat	Perkebunan Rakyat SAHATI MANDIRI	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Menuntaskan jalan penghubung desa	Pelestarian seni dan budaya sebagai identitas daerah
Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa	Pengembangan transportasi umum yang aman, nyaman dan murah	Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga
Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat	Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi	Peningkatan lembaga sosial, agama dan keluarga
Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Peningkatan produksi padi menuju swasembada beras	
	Menjadikan Kotawaringin Timur sebagai tempat tujuan wisata	
	Peningkatan kualitas tenaga kerja produktif	
	Pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga dan pemberdayaan pedagang kaki lima	
	Pembangunan kualitas SDM	
	Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan	
	Mendorong pengembangan Industri Hilir	

Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut di jabarkan kembali dalam Bidang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tergambarkan dalam program yang ada pada Perangkat daerah yang didanai baik dari APBD, APBD Provinsi serta APBN seperti yang terlihat dalam Tabel 5.3.



Tabel 5.4
Keterkaitan Urusan, Prioritas dan Penjabaran Program Aksi Sahati dalam Trisakti yang dilaksanakan oleh PD

Prioritas	Penjabaran Program aksi Sahati dalam Trisakti	Nama Program	PD Penanggung Jawab
Infrastruktur	Membangun infrastruktur	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	
		Program Penataan Kota	
		Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	
		Program Penataan Kawasan Kumuh	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	
		Program pengembangan sarana dan prasarana pertamanan kota	
		Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
		Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan	
		Program Pengembangan Perumahan	
		Program lingkungan sehat perumahan	
		Program pemberdayaan komunitas perumahan	
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	



Prioritas	Penjabaran Program aksi Sahati dalam Trisakti	Nama Program	PD Penanggung Jawab
	Pengembangan transportasi umum yang aman, nyaman dan murah	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas perhubungan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Pembangunan kualitas SDM	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan dan Perpustakaan
	Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa	Program Pendidikan Nonformal	
	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	
		Program Pendidikan Menengah	
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
		Program Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	
	Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga	Program pengembangan keserasian kebijakan pemuda	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	
		Program Upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan	



Prioritas	Penjabaran Program aksi Sahati dalam Trisakti	Nama Program	PD Penanggung Jawab
		Narkoba	
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	
		Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda	
		Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga	
		Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	
		Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	
	Peningkatan lembaga sosial, agama dan keluarga	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Sosial
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	
		Program Pembinaan Anak Terlantar	
		Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks trauma	
		Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	
		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
		Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan	



Prioritas	Penjabaran Program aksi Sahati dalam Trisakti	Nama Program	PD Penanggung Jawab
		Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	
		Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	
		Program Pembinaan Pemberdayaan remaja, pemuda, perempuan dan Olah raga	
Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya	Menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	
		Program Pemberdayaan Masyarakat	
		Program Pemeliharaan Kantratribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	
	Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika
		Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	
		Program kerjasama informasi dengan media massa	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Telematika	
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika	
		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	



Prioritas	Penjabaran Program aksi Sahati dalam Trisakti	Nama Program	PD Penanggung Jawab
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
		Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika	
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
		Program Pengembangan Informasi Publik melalui media elektronik dan telematika	
	Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat	Program Pengembangan Nilai Budaya	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
	Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Program Pengayoman Dan Perlindungan Hukum	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal, dan urusan Pemerintahan Umum
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
		Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
Ketahanan Pangan	Peningkatan produksi padi menuju swasembada beras	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan dan Jaringan Pengairan Lainnya	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanian



Prioritas	Penjabaran Program aksi Sahati dalam Trisakti	Nama Program	PD Penanggung Jawab
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	
		Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Program Pengembangan Usaha Tani	
		Program Peningkatan SDA dan SDM Pertanian Berwawasan Lingkungan	
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian dan Peternakan	
Penguatan Pemerintahan Desa	Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan urusan Keuangan
	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
		Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	
		Program Penyelenggaraan Pemilihan Kelembagaan Desa	
		Program Sistem Informasi/Administrasi Desa	
		Program Kewilayahan Desa/Kelurahan	
		Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	



Prioritas	Penjabaran Program aksi Sahati dalam Trisakti	Nama Program	PD Penanggung Jawab
		Desa	
Pemberdayaan Ekonomi	Perkebunan Rakyat SAHATI MANDIRI	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perkebunan
		Program Peningkatan Produksi Perkebunan	
		Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan dan Kehutanan	
		Program Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan	
	Pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga dan pemberdayaan	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan urusan Perikanan
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	
		Program Pengembangan Sistem Pendukung UMKM	
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	
		Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	



Prioritas	Penjabaran Program aksi Sahati dalam Trisakti	Nama Program	PD Penanggung Jawab
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	
	Peningkatan kualitas tenaga kerja produktif	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	
	Mendorong pengembangan Industri Hilir	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perikanan, dan urusan Perdagangan
		Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	
Pariwisata Dan Pelestarian Budaya	Menjadikan Kotawaringin Timur sebagai tempat tujuan wisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
		Program Pengembangan Kemitraan	
	Pelestarian seni dan budaya sebagai identitas daerah	Program Pengembangan Nilai Budaya	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan. Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

6.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu



sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats). Bahan utama yangdigunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam gambar dibawah ini:

	Strength (Kekuatan)		Weakness (Kelemahan)	
	Internal		Eksternal	
Internal	/ Peningkatan penegakan peraturan daerah dan kepala daerah / Peningkatan rumah tangga yang terjangkau air bersih, sanitasi, layak huni dan tidak kumuh / Penguatan penataan ruang eksisting Kabupaten Kotawaringin Timur / Peningkatan peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan / Meningkatnya penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan / Adanya sistem informasi daerah yang cukup baik dalam pelaksanaan pemerintahan / Pola kepemimpinan yang visioner / Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun membaik		/ Belum tercapainya akses pendidikan wajib belajar 9 tahun / Belum optimalnya layanan pendidikan inklusif / Belum optimalnya layanan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar / Belum optimalnya ketersediaan dan mutu sediaan farmasi, pembekalan dan alat kesehatan / Belum optimalnya akses dan kualitas lingkungan sehat / Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan di rumah sakit / Terlambatnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS / Belum optimalnya kualitas dan daya saing sektor UMKM / Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM / Belum efektif dan efisienya proses bisnis birokrasi pelayanan publik / Meningkatnya pencemaran lingkungan dan sumberdaya alam	
	/ Belum optimalnya kemampuan dan kapasitas pelaku usaha / Belum terlihatnya peran usaha mikro dan kecil sebagai pelaku sektor riil / Belum optimalnya pertumbuhan wirausaha baru yang berkualitas / Belum optimalnya pemasaran produksi pertanian / Belum efektif dan efisienya sarana dan prasarana pertanian dalam menunjang produktifitas / Belum optimalnya pemasaran pariwisata berbasis IT / Belum optimalnya daya dukung infrastruktur dan SDM lokal pariwisata / Belum optimalnya kualitas dan kuantitas fasilitas publik / Belum optimalnya kualitas infrastruktur perhubungan / Belum optimalnya kualitas sarana lalu lintas / Belum optimalnya cakupan fasilitas teknologi, informasi dan komunikasi / Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan / Belum kuatnya karakter dan pondasi perekonomian perdesaan		/ Belum optimalnya ketersediaan sanitasi dan air bersih / Belum optimalnya manajemen pelayanan korban bencana alam dan bencana sosial / Belum optimalnya kesiagaan bahaya kebakaran / Belum tercukupinya RTH Publik 20% dari total 30% RTH Wilayah / Belum optimalnya kualitas infrastruktur perdesaan / Belum terbangunnya optimalisasi peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan / Belum optimalnya keberpihakan pembangunan terhadap anak / Belum optimalnya koordinasi lintas sektor aparat / Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparat pemerintah daerah / Terbatasnya kapasitas pemerintahan pemerintah desa / Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi / Belum optimalnya perluasan jaringan kemitraan pariwisata	
Eksternal	Opportunity (Peluang)		Threat (Ancaman)	
	/ Momentum pertumbuhan ekonomi / Besarnya afirmasi dan tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi / Momentum peningkatan jumlah angkatan kerja terdidik / Kekayaan dan potensi sumber daya alam yang beragam		/ Peningkatan potensi ancaman budaya asing terhadap budaya lokal / Besarnya tekanan dan tuntutan untuk pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) / Struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro yang informal dengan produktivitas terbatas / Belum terciptanya kondusifitas dan dominasi afirmasi terhadap usaha mikro dan kecil / Konsistensi peningkatan investasi belum mampu menjawab tingginya permintaan / Tren peningkatan indeks gini / Besarnya tuntutan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	

Gambar 6.1 Identifikasi faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT

Penggunaan metode SWOT dalam penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:

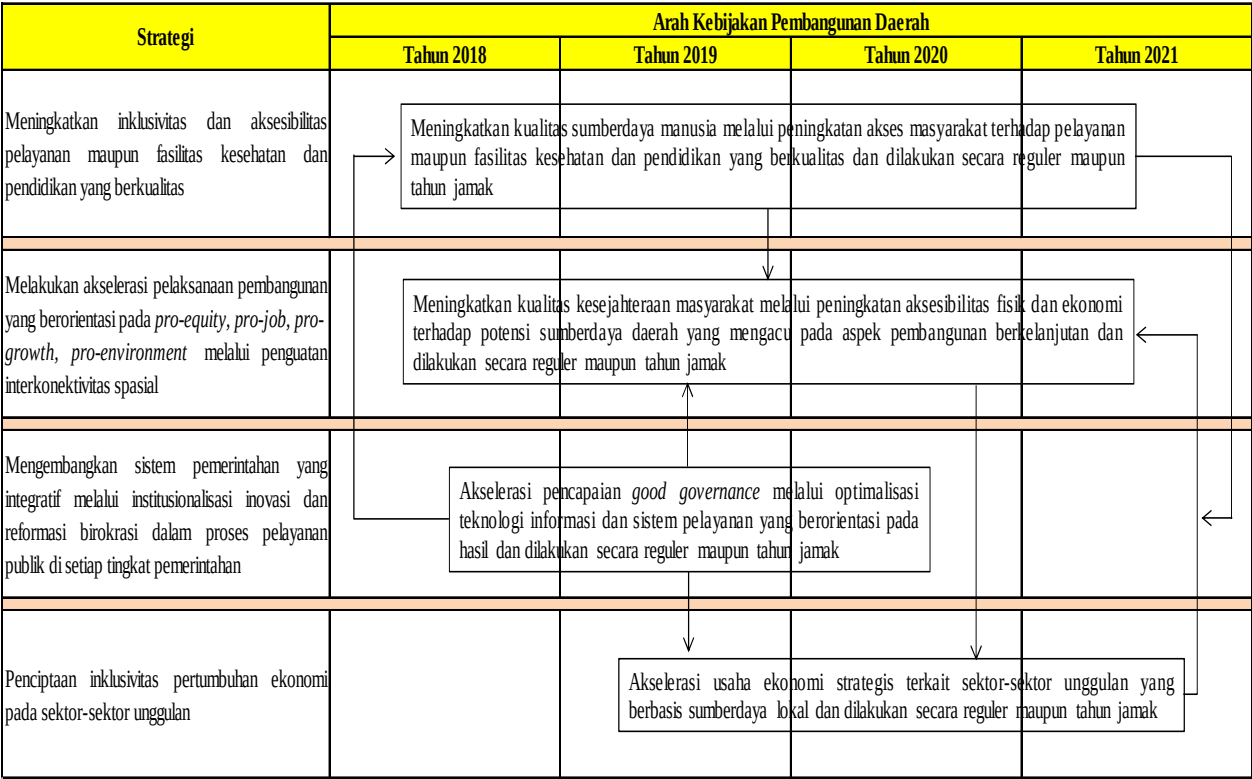
Strategi S-O	Strategi W-O
Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui institusionalisasi inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses pelayanan publik di setiap tingkat pemerintahan	Meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas pelayanan maupun fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas
Strategi S-T	Strategi W-T
Penciptaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor unggulan	Melakukan akselerasi pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada <i>pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment</i> melalui penguatan interkoneksi spasial

Gambar 6.2 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

6.2Arah Kebijakan

Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi, yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan untuk tiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada Bab 5, dapat dijabarkan arah kebijakan pada Gambar 6.3 sebagai berikut:



Gambar 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur

Gambar 6.3 memperlihatkan bahwa strategi dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

6.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya.

Penjabaran kebijakan umum harus memenuhi 4 perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

) Perspektif masyarakat/layanan bagaimana strategi dapat menjadikan

pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;

-) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*);
-) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang;
-) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disusun kebijakan umum dan program pembangunan seperti pada Tabel 6.1 sebagai berikut:



Tabel 6.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

No	Perspektif	Strategi 1: Meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas pelayanan maupun fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif masyarakat/layanan	Jaminan akan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat	Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Koordinasi Pengembangan Kepustakaan
		Jaminan akan akses dan kualitas Kesehatan bagi seluruh masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pelayanan Kesehatan Penduduk / Keluarga Miskin Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Kalimantan Tengah Barigas Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular Program Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Program Pelayanan Kesehatan yang Mengalami Gangguan Kesehatan Jiwa
2	Perspektif proses internal	Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan kesehatan	Program Pengembangan Regulasi Pelayanan Kesehatan Program Manajemen dan Kebijakan Kesehatan
3	Perspektif kelembagaan	Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Program Kesenjangan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak



			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
		Penguatan kelembagaan pemuda dan olahraga	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
			Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
			Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
			Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda
			Program Pembinaan Pemberdayaan Remaja, Pemuda, Perempuan dan Olahraga
		Penguatan kelembagaan pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Penguatan kelembagaan kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
			Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
			Program Peningkatan Sumber Daya kesehatan
			Program Peningkatan Kinerja Aparatur
4	Perspektif keuangan		
No	Perspektif	Strategi 2: Melakukan akselerasi pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada <i>pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment</i> melalui penguatan interkoneksi spasial	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif masyarakat/layanan	Memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial untuk wilayah-wilayah strategis dan penghubung antar kawasan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
			Program Penataan Kota
			Program Pengembangan Bidang Pengendalian dan Peralatan
			Program Pendataan Bangunan dan Permukiman
			Program Pengembangan Bidang Jasa Kontruksi dan Pengendalian



			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Drainase
			Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Fisik Kota
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
			Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
			Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
			Program Pengembangan dan Penunjang Bidang Cipta Karya
			Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
		Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang hidup bersih dan sehat	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
			Program Pembangunan Sanitasi
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah
			Program Lingkungan Sehat Perumahan
			Program Pengelolaan TPA
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi
			Program Lingkungan Sehat Perumahan
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Program Pengelolaan Areal Pemakaman
		Menjamin pemerataan pembangunan infrastruktur	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
			Program Penataan Kawasan Kumuh
			Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
			Program Pengembangan Perumahan
			Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
			Program Pengembangan Bidang Kawasan Permukiman
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman



			Program Sistem Informasi Kawasan Permukiman Kumuh (SIKAPKU)
	Menjamin pelaksanaan pembangunan untuk kalangan marginal		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
			Program Pembinaan Anak Terlantar
			Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
			Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
			Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	Jaminan atas 3 aspek ketahanan pangan		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
			Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program Pengamanan Perdagangan dan Pengawasan Barang Beredar
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Program Peningkatan Produksi Perkebunan
			Program Agribisnis Pertanian dan Keamanan Pangan
			Program Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan
	Peningkatan kemudahan usaha melalui stimulasi penguatan sektor unggulan		Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
			Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
			Program Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan
			Program Pendataan dan Perijinan Perikanan
			Program Peningkatan Potensi dan Pengelolaan Perikanan
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan



			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pengembangan Usaha Tani Program Peningkatan Kualitas SDM dan SDA Pertanian Berwawasan Lingkungan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Teknologi Pertanian/Peternakan Program Pengembangan Manajemen dan Pemberdayaan Organisasi Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan dan Kehutanan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Kehutanan Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi Program Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Program Peningkatan Ketahanan Perkebunan Program Konservasi Tanah dan Air Program Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan
2	Perspektif proses internal		
3	Perspektif kelembagaan	Menegakkan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertamanan Kota Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Pembinaan Perlindungan Tanaman, Gangguan Usaha dan Konservasi Lahan dan Air Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) Program Pengukuhan Kawasan Hutan Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air Program Penanaman Bambu pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Program Pengadaan Tanah
		Meningkatkan kapasitas pengendalian dan pengawasan	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana



		sosial dan kesiapsiagaan bencana	Program Mitigasi Bencana
			Program Tanggap Darurat
			Program Logistik dan Peralatan
			Program Pasca Bencana
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
			Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
			Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
			Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam Sosial
			Program Relokasi Permukiman Akibat Bencana Alam Sosial
		Pengembangan kawasan strategis khusus	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
			Program Penyuluhan dan Penataan Hukum/Perundangan Lingkungan Hidup
			Program Pengembangan Ekosistem dan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan
			Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
			Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Sentra Perikanan Terpadu
4	Perspektif keuangan		
No	Perspektif	Strategi 3: Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui institusionalisasi inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses pelayanan publik di setiap tingkat pemerintahan	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif masyarakat/layanan	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan melalui penguatan keterbukaan informasi publik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
			Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
			Program Pengembangan Informasi Publik Melalui Media Elektronik dan Telematika
			Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
			Program Pengajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
			Program Pengembangan Data/Informasi
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi



			Program Perencanaan Sosial dan Budaya
			Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
		Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh-tokoh agama	Program Wawasan Kebangsaan dan Pembauran
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
			Program Pendidikan Politik Masyarakat
			Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa
			Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Kerja sama Intelkam
			Program Peningkatan Pembinaan dan Peran Serta Ormas dan Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
			Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
			Program Pembinaan, Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
			Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
			Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan
		Penguatan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur
			Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
2	Perspektif proses internal	Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat melalui percepatan implementasi <i>open-government</i>	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
			Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi



			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
		Mengembangkan sistem monitoring berbasis IT terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pembangunan daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Telematika Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Telematika Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
		Penegakan hukum dan pencegahan konflik sosial	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Peningkatan Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing Program Peningkatan Pembinaan dan Peran Serta Partai Politik dalam Berdemokrasi Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Program Pengayoman dan Perlindungan Hukum Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3	Perspektif kelembagaan	Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi dan penegakan peraturan daerah Fasilitasi dan pendampingan aparatur Pemerintah Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa



4	Perspektif keuangan	Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan efisien	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No	Perspektif	Strategi 4: Penciptaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor unggulan	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif masyarakat/layanan	Penguatan ekonomi kerakyatan dan menjamin kemudahan usaha melalui regulasi yang afirmatif	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
			Program Pengembangan Wilayah dan Akses Industri
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2	Perspektif proses internal	Pengembangan perencanaan terintegratif terhadap potensi sektor prima	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
			Program Pengembangan Kemitraan
			Program Pengembangan Nilai Budaya
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya
3	Perspektif kelembagaan	Penguatan jaminan terhadap barang beredar	Program Peningkatan Pelayanan Metrologi Legal
			Program Peningkatan Pemahaman Metrologi Legal
4	Perspektif keuangan	Penguatan investasi dalam dan luar negeri	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
			Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Adapun keterkaitan program pembangunan dengan misi dapat dilihat secara detail pada Tabel 6.2 sebagai berikut:



Tabel 6.2
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak																	
				Tujuan 1.1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	68,61	69,42		70,17		69,34		69,56		69,76		69,94		69,94		
				Sasaran 1.1.1: Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	69,51 tahun	69,60 tahun		69,70 tahun		69,83 tahun		69,91 tahun		70,02 tahun		70,17 tahun		70,17 tahun		
1,02	1.02.02.02	1	26	Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata	1. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	65 %	70 %	51.860.337.792,64	75 %	36.286.975.722	77,74 %	78.118.141.400	80 %	104.172.061.000	85 %	50.450.000.000	90 %	50.400.000.000	90 %	50.400.000.000	RSUD dr. Murjani Sampit
					2. Tercapainya Akreditasi Rumah Sakit	-	-		-		-		Terakreditasi 100 %		Terakreditasi 100 %		Terakreditasi 100 %		Terakreditasi 100 %		
1,02	1.02.02.02	2	46	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	1. Persentase Dukungan Manajemen dan Administrasi Terhadap Operasional Kantor	100 %	93,31 %	69.985.855.896	91 %	81.222.006.336	100 %	72.811.811.072	100 %	61.480.671.012	100 %	103.207.650.000	100 %	105.150.000.000	100 %	105.150.000.000	RSUD dr. Murjani Sampit
					2. Tercapainya SPM Rumah Sakit	77,71 %	78,26 %		82 %				100 %		100 %		100 %		100 %		
1,02	1.02.02.02	2	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Kurang Mampu / Masyarakat Miskin	Persentase pasien kurang mampu yg dilayani di rumah sakit		%	-	-	%		%		100 %	5.100.000.000	100 %	5.300.000.000	100 %	5.300.000.000	RSUD dr. Murjani Sampit	
1,02	1.02.02.	2	50	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk yang	Persentase kunjungan penduduk		%	-	-	%		%		100 %	1.100.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	RSUD dr. Murjani Sampit	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	02			Mengalami Gangguan Kesehatan Jiwa	yang mengalami gangguan jiwa yang dilayani																
1,02	1.02.02	2	52	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Luas Tanah terhadap Total Kebutuhan Tanah	38 %	38 %		38,00 %	-	38 %		38 %		78 %		100 %		100 %		RSUD dr. Murjani Sampit
02	01	01	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	45 %	60 %	3.345.778.620	60 %	4.420.763.880	80 %	7.113.250.000	80 %	8.150.000.000	80 %	8.715.000.000	80 %	9.250.000.000	80 %	40.994.792.500	Dinas Kesehatan
02	01	01	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penyediaan Sarana Kesehatan yang Standar	27 %	32 %	3.698.308.820	25 %	5.001.137.224	14 %	6.200.000.000	18 %	6.325.000.000	23 %	7.000.000.000	27 %	7.550.000.000	27 %	35.774.446.044	Dinas Kesehatan
02	01	01	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif		92,43 %	472.244.700	100 %	563.777.750	97 %	1.485.000.000	98 %	1.615.000.000	99 %	1.620.000.000	100 %	1.690.000.000	100 %	7.446.022.450	Dinas Kesehatan
02	01	01	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan	75 %	100 %	163.567.996	100 %	68.095.000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	2.631.662.996	Dinas Kesehatan
02	01	01	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Upaya Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat dan Kesehatan Kerja	25 %	28 %	250.553.200	22 %	237.069.250	30 %	560.250.000	35 %	650.000.000	40 %	750.000.000	45 %	750.000.000	45 %	3.197.872.450	Dinas Kesehatan
02	01	01	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penderita Penyakit Menular yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 %	100 %	460.564.950	100 %	989.797.400	100 %	1.973.124.935	100 %	2.007.620.000	100 %	2.042.696.500	100 %	2.008.575.000	100 %	9.482.378.785	Dinas Kesehatan



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Sesuai Standar																
02	01	01	25	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	persentase sarana kesehatan yg memenuhi standar		2 Pusk 3.215.375.668	7 Pusk 5.376.569.359		48 % 12.120.000.000	76 % 11.675.000.000	86 % 10.890.000.000	100 % 11.100.000.000	100 % 54.376.945.027	Dinas Kesehatan						
02	01	01	30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Lansia yang mendapat Pelayanan Kesehatan yang Standar	100 %	100 % 2.000.000	100 % -	100 % 675.000.000	100 % 700.000.000	100 % 750.000.000	100 % 800.000.000	100 % 2.927.000.000	Dinas Kesehatan							
02	01	01	31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat	25 %	40 % 117.666.000	15 % 123.743.000	55 % 285.500.000	60 % 280.000.000	65 % 280.000.000	70 % 280.000.000	70 % 1.366.909.000	Dinas Kesehatan							
02	01	01	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Ibu dan Anak yang mendapataka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		75 % 187.421.270	100 % 244.434.300	100 % 500.000.000	100 % 750.000.000	100 % 750.000.000	100 % 750.000.000	100 % 3.181.855.570	Dinas Kesehatan							
02	01	01	39	Program Pengembangan Regulasi Pelayanan Kesehatan	persentase tenaga dan sarana kesehatan yg berijin		100 % 131.260.000	100 % -	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	1.011.260.000	Dinas Kesehatan							
02	01	01	40	Program Manajemen dan Kebijakan Kesehatan	Persentase pelaporan yang lengkap dan tepat waktu		75 % 276.663.421	75 % 350.649.654	81 % 520.000.000	90 % 550.000.000	95 % 600.000.000	100 % 580.000.000	100 % 2.877.313.075	Dinas Kesehatan							
02	01	01	41	Program Peningkatan Sumber Daya	Persentase tenaga kesehatan	34 %	35 % 8.951.242.294	40 % 12.171.012.986	37 % 23.772.700.000	38 % 25.616.300.000	40 % 27.459.900.000	42 % 29.303.500.000	42 % 127.274.655.280	Dinas Kesehatan							



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Manusia Kesehatan	dipelayanan kesehatan sesuai standar																
02	01	01	45	Program Kalimantan Tengah Berkah	Persentase jumlah ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Masyarakat sesuai standar	20 Fas kes	20 Faskes	8.892.939.101	22 Faskes	14.460.064.282	23 Faskes		23 Faskes		23 Faskes		23 Faskes		23 Faskes	23.353.003.383	Dinas Kesehatan	
02	01	01	47	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Cakupan Penderita Penyakit Tidak Menular Mendapatkan yang Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	88.246.800	100 %	139.715.300	100 %	533.125.000	100 %	542.460.000	100 %	551.960.000	100 %	577.000.000	100 %	2.432.507.100	Dinas Kesehatan	
02	01	01	48	Program Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kepesertaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	65 %	21.421.028.736	85 %	16.582.383.905	95 %		95 %		95 %		95 %		95 %	38.003.412.641	Dinas Kesehatan	
02	01	01	49	Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	persentase puskesmas yg memenuhi standar pelayanan kesehatan	20 Faskes	20 Faskes	15.158.418.010	22 Faskes	17.756.999.758	23 Faskes	33.155.163.510	23 Faskes	35.518.132.111	23 Faskes	39.227.144.287	23 Faskes	43.149.858.716	23 Faskes	183.965.716.392	Dinas Kesehatan	
				Sasaran1.1.2: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	7,70 tahun	7,88 tahun		7,89 tahun		8,49 tahun		8,55 tahun		8,72 tahun		9,00 tahun		9,00 tahun			
					Harapan lama sekolah	12,05 tahun	12,21 tahun		12,59 tahun		12,41 tahun		12,52 tahun		12,62 tahun		12,71 tahun		12,71 tahun			
1	26	01	21	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah anggota perpustakaan	100%	100%	113.604.900	100%	193.810.000	100%	97.285.000	100%	78.775.000	100%	68.844.900	100%	68.844.900	100%	621.164.700	Dispustakasip	
1	24	01	16	Penyelamatan dan pelestarian Dokumen /Arsip	Persentase SOPD yg menerapkan	100%	100%	586.000	100%	28.675.000	100%	62.605.000	100%	143.730.000	100%	20.586.000	100%	20.586.000	100%	276.768.000	Dispustakasip	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Daerah	standar pengelolaan kearsipan																
1.01.03	4.01.18	01			Program Pendidikan Non Formal	Persentase lembaga pendidikan non formal yang dibina	NA	100 %	822.026.300	100 %	129.780.000	100 %	2.324.457.800	100 %	369.184.600	100 %	852.000.000	100 %	852.000.000	100 %	5.349.448.700	Sekretariat Daerah
					Program Peningkatan PAUD	Presentase berdirinya lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	28,81%	31,50%	770.000.000	31,68%	440.615.420	31,81%	6.615.821.220	31,90%	6.880.454.069	31,95%	6.980.454.069	31,97%	7.259.672.231	31,99%	7.659.672.231	Dinas Pendidikan
					Program Wajib Belajar pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Presentase sekolah SD , SMP yang terakreditasi dan rasio jumlah jumlah siswa dan ruang kelas pendidikan dasara 9 tahun	100%	100%	16.274.843.530	100%	25.650.325.080	100%	41.232.624.120	100%	42.881.929.085	100%	43.881.929.085	100%	45.637.206.248	100%	46.637.206.248	Dinas Pendidikan
					Program Pendidikan Non Formal	Prosentase lembaga Pendidikan Non Formal yang bersertifikat	82,22%	82,25%	165.943.300		280.156.520		265.090.520		275.694.141		280.694.141		291.921.906		295.921.906	Dinas Pendidikan
					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik	Presentase trenaga pendidik yang terakreditasi	99,80%	100%	10.515.532.600	99,85%	14.417.242.480	100%	14.468.449.980	100%	15.047.187.479	100%	15.147.187.479	100%	15.753.074.978	100%	15.953.074.978	Dinas Pendidikan
					Program Manajemen Pelayan Pendidikan	Presentase anggota dewan pendidik yang melaksanakan tupoksinya sesuai perundang-undangan pendidikan	96,95%	97,91%	119.845.000	85,24%	162.220.750	98,91%	70.000.000	98,93%	72.800.000	98,94%	73.800.000	98,96%	76.752.000	98,98%	79.752.000	Dinas Pendidikan



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Sasaran1.1.3: Meningkatnya kualitas SDM angkatan kerja	Persentase angkatan kerja terampil/terdidik dan jumlah angkatan kerja	NA	NA	32,03 %		33,70 %		34,16 %		34,58 %		34,96 %		34,96 %			
2	1	3	1	15	Program Pengembangan dan Kereserasian Kebijakan Pemuda	Prosentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	100 %	96,45 %	54.115.000	92,05 %	12.575.000	100%	205.337.500	100%	75.000.000	100%	35.000.000	100%	95.000.000	100%	477.027.500	Dispora
2	1	3	1	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Prosentase Pemuda yang aktif dalam Kegiatan Kepemudaan	100 %	95,07 %	1.586.873.000	96,30 %	2.105.212.500	100%	1.114.017.900	100%	195.000.000	100%	1.085.000.000	100%	1.035.000.000	100%	7.121.103.400	Dispora
2	1	3	1	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Prosentase para Pemuda yang aktif Berwirausaha	100 %	100 %	47.061.000	98,50 %	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	297.061.000	Dispora
2	1	3	1	18	Program Upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba	Prosentase Pemuda yang menyadari bahaya Penyalahgunaan Narkoba	100 %	99,96 %	47.450.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	206.415.250	100%	45.000.000	100%	123.272.600	100%	672.137.850	Dispora
2	1	3	1	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Prosentase Peningkatan Prestase Olahraga	100 %	99,72 %	54.140.500	98,64 %	110.000.000	100%	195.000.000	100%	185.000.000	100%	202.181.750	100%	160.000.000	100%	906.322.250	Dispora
2	1	3	1	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Terbentuknya Budaya Berolahraga	100 %	93,64 %	677.781.600	98,71 %	651.700.000	100%	510.000.000	100%	281.044.000	100%	789.000.000	100%	789.000.000	100%	3.698.525.600	Dispora



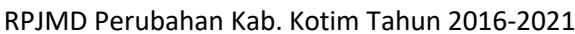
RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	1	3	1	21	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Olahraga	Prosentase Sarana Prasarana Olahraga yang memenuhi Standar	100 %	99,16 %	2.923.468.400	99,45 %	878.163.000	100%	5.951.181.400	100%	10.044.413.400	100%	728.140.980	100%	728.140.980	100%	21.253.508.160	Dispora	
2	1	3	1	22	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Pemuda	Prosentase Sarana Prasarana Pemuda yang memenuhi Standar	0%	0%	-	0%	-	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	100.000.000	Dispora	
1	1.	4.	.0.	1.	1.5.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang lulus dengan kategori baik	90 %	90 %	2.087.205.271,00	90 %	701.352.646,00	90 %	701.852.646,00	90 %	702.357.646,00	90 %	701.852.646,00	90 %	702.357.646,00	90 %	5.596.978.501,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	.1	.4	0.	1.	.1.5		Persentase pelatih yang memiliki sertifikasi keahlian															Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	1	4	0.	1.	1.6.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase lowongan kerja yang terisi pencari kerja	NA	43 %	331.581.882,00	47 %	273.988.000,00	85 %	288.243.560,00	47 %	303.793.243,60	90 %	320.765.148,84	90 %	339.300.170,40	90 %	1.857.672.004,84	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Persentase pencari kerja yang memahami konsep wirausaha	NA	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	1	4	0.	1.	.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian kasus perselisihan antara perusahaan dengan tenaga kerja	NA	75,71 %	820.989.528,00	80 %	814.691.402,46	85 %	865.758.718,48	85 %	921.228.179,87	85,75 %	942.183.105,77	85 %	989.407.022,38	85,7 %	5.354.257.956,96	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Persentase penurunan pelanggaran	NA														Dinas Tenaga Kerja dan	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						terhadap hak-hak tenaga kerja															Transmigrasi	
2.13	4.01.03	01	22		Program Pembinaan/Pemberdayaan Remaja, Pemuda, Perempuan dan Olah Raga	Persentase laporan terkait remaja, pemuda, perempuan, dan olahraga yang ditangani	NA	100 %	116.262.000	100 %	228.879.100	100 %	995.634.200	100 %	818.557.000	100 %	277.000.000	100 %	277.000.000	100 %	2.713.332.300	Sekretariat Daerah
					Program Pembinaan Pemberdayaan Remaja, Pemuda, Perempuan dan Olahraga	Persentase pelajar yang memahami kesehatan di lingkungan sekolah	NA	0%	0	100,00%	4.410.000,00	95%	6.600.000,00	97%	4.500.000,00	0%	-	0%	-	97%	15.510.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
					Sasaran1.1.4: Meningkatkan kualitas pembangunan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	NA	NA		87,73		87,28		87,62		87,93		88,20		88,20		
						Prevalensi kekerasan terhadap anak-anak	NA	NA		0,012 %		0,011 %		0,010 %		0,009 %		0,008 %		0,008 %		
					Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	100 %	99,61 %	64.588.800,00	99,76 %	275.120.000,00	100 %	248.643.000,00	100 %	235.772.000,00	100 %	43.686.000,00	100 %	43.686.000,00	100 %	911.495.800,00	DP3AP2KB
					Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Tingkat penguatan kelembagaan	100 %		0,00	77,69 %	141.977.700,00	100 %	201.746.900,00	100 %	148.946.900,00	100 %	48.897.720,00	100 %	48.897.720,00	100 %	590.466.940,00	DP3AP2KB
					Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan	90,75 %	100 %	7.954.000,00	100 %	26.340.000,00	100 %	26.340.000,00	100 %	26.340.000,00	100 %	15.858.000,00	100 %	15.858.000,00	100 %	118.690.000,00	DP3AP2KB





RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	0 %	0 %	-	80 %	30.000.000	80 %	28.400.000	80 %	21.000.000	80 %	30.000.000	80 %	32.000.000	67 %	141.400.000	Kecamatan Kota Besi
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	100 %	-	-	-	-	-	-	100 %	38.000.000	100 %	57.177.414	100 %	60.036.285	100 %	155.213.699	Kecamatan Baamang
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	NA	-	-	20.8 %	30.000.000	21.5 %	19.500.000	56 %	9.500.000	65.5 %	25.000.000	75 %	37.500.000	100 %	121.500.000	Kecamatan Parenggean
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	NA	-	-	-	-	75 %	12.700.000	-	-	75 %	1.000.000	75 %	1.000.000	100 %	14.700.000	Kecamatan Mentaya Hulu
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	NA	-	-	30 %	2.750.000	30 %	15.250.000	50 %	20.010.000	50 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	68.010.000	Kecamatan Bukit Santuai
4	01	22	19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	NA	-	-	30 %	30.000.000	60 %	19.000.000	100 %	2.000.000	100 %	25.000.000	100 %	37.500.000	100 %	113.500.000	Kecamatan Telaga Antang
4	01	22	19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	NA	-	-	30 %	30.000.000	50 %	32.000.000	50 %	32.000.000	50 %	34.000.000	100 %	34.000.000	100 %	162.000.000	Kecamatan Antang Kalang
				Program Peningkatan Peran Perempuan di	Persentase keterlibatan perempuan		-	-	50 %	12.000.000	50 %	15.000.000	50 %	17.000.000	50 %	17.000.000	50 %	17.000.000	50 %	78.000.000	Kecamatan Cempaga



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Perdesaan	dalam kegiatan produktif															Hulu	
					Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	NA		-	100 %	25.000.000	100 %	26.250.000	100 %	28.000.000	100 %	30.000.000	100 %	35.000.000	100 %	144.250.000	Kecamatan Cempaga
					Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	NA	100 %	15.000.000	61 %	7.650.000	85 %	16.360.000	85 %	25.000.000	85 %	25.000.000	85 %	25.000.000	85 %	114.010.000	Kecamatan Seranau
					Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	NA			75 %	30.000.000	75 %	33.000.000	75 %	35.000.000	75 %	19.500.000	75 %	21.000.000	100 %	138.500.000	Kecamatan Telawang
					Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	NA	85 %	52.200.000	85 %	20.000.000	85 %	22.000.000	85 %	25.000.000	85 %	25.000.000	85 %	25.000.000	85 %	169.200.000	Kecamatan Tualan Hulu
					Misi 2: Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan																	
					Tujuan 2.1: Peningkatan konektivitas jalan darat	Rasio konektivitas jalan darat antar pusat kegiatan	NA	NA		92,00 %												
					Sasaran 2.1.1: Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik	NA	NA		48,88 %		48,90 %		49,00 %		50,00 %		61,00 %		61,00 %		
						Persentase jembatan dalam kondisi baik	NA	NA		46,07 %		46,07 %		46,00 %		47,00 %		49,00 %		49,00 %		



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						Konektivitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan	NA	NA		90,27 %		92,00 %		93,00 %		94,00 %		95,00 %		95,00 %		
						Jumlah kecelakaan lalu lintas	NA	NA		149 kali		141 kali		134 kali		127 kali		120 kali		120 kali		
1	03	01	15	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten yang dikelola dengan baik	45,24 %	45,69 %	125.088.105.500	48,75 %	74.357.539.000	49,24 %	97.327.446.900	49,73 %	100.979.001.000	50,22 %	100.000.000.000	50,71 %	100.000.000.000	50,71 %	472.663.986.900	Dinas PUPR	
					Persentase Jembatan kabupaten yang dikelola dengan baik	41,83 %	45,104 %	10.363.287.500	46,49 %	18.769.500.000	48,89 %	8.175.050.000	52,31 %	7.575.000.000	56,75 %	8.000.000.000	62,20 %	9.000.000.000	62,20 %	51.519.550.000	Dinas PUPR	
					Persentase Jalan Darat dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan yang terhubung	- %	72,05 %	-	90,27 %	-	90,27 %	-	90,76 %	27.500.000.000	91,25 %	27.500.000.000	91,74 %	27.500.000.000	91,74 %	82.500.000.000	Dinas PUPR	
1	03	01	18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan dan jembatan kabupaten yang terpelihara dengan baik	45 %	16,67 %	3.906.396.671,75	17,33 %	1.688.029.023,00	15,83 %	1.541.844.665,00	20,89 %	2.034.490.247,00	21,88 %	2.130.905.311,00	24,07 %	2.343.995.842,00	100 %	9.739.265.088,00	Dinas PUPR	
	03	01	30	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Dan Perdesaan	Persentase penurunan titik lokasi banjir	7,68 %	7,62 %	195.169.000,00	7,59 %	3.365.620.000,00	7,53 %	4.676.850.000,00	0,54 %	1.675.000.000	0,61 %	3.245.000.000,00	2,91 %	3.746.000.000,00	2,91 %	16.903.639.000,00	Dinas PUPR	
					Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	72,95 %	- -	-	76,62 %	8.275.000.000,00	80,11 %	2.605.475.000,00	86,74 %	4.234.183.000,00	93,37 %	9.000.000.000,00	100,00 %	12.000.000.000,00	100,00 %	36.114.658.000,00	Dinas PUPR	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Persentase taman lingkup Setda yang dikelola dengan baik	NA	100 %	1.137.356.000	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	3.537.356.000	Sekretariat Daerah
	03	01	16	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Persentase penurunan titik lokasi banjir	7,68 %	7,62 %	3.673.754.419,00	- %	-	7,53 %	20.449.600.000,00	6,31 %	19.426.708.520,00	5,27 %	28.176.413.332,00	2,39 %	3.077.354.665,00	2,39 %	74.803.830.936,00	Dinas PUPR
					Persentase Panjang saluran Drainase / gorong-gorong yang terbangun dalam kondisi baik.	48 %	- -	-	20,00 %	1.968.212.875,00	20,00 %	2.411.737.605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
			36	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Ekonomi	Persentase sarana dan prasarana ekonomi yang dikelola	%	-	-	-	- -	-	-	- -	-	-	- -	-	0 %	-	Dinas PUPR	
				Program Pendataan Bangunan Dan Permukiman	Tersedianya data bangunan gedung dan permukiman	unit	-	-	-	- -	-	-	- -	-	-	- -	-	0 %	-	Dinas PUPR	
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Presentase pengembangan kawasan pariwisata	- %	- %	-	66,67 %	547.264.000,00	33,33 %	100.000.000,00	- -	-	-	- -	-	100 %	647.264.000,00	Dinas PUPR	
				Program Penataan Kota	Jumlah fasilitas perkotaan yang tertangani	unit	-	-	-	-	-	-	- -	-	-	- -	-	0 %	-	Dinas PUPR	
				Program Pembinaan Pembangunan Dan Kegiatan Keagamaan	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kegiatan keagamaan.	- %	100 %	336.070.000,00	-	-	-	-	- -	-	-	- -	-	100 %	336.070.000,00	Dinas PUPR	
	03	01	32	Program Pengembangan	Jumlah kegiatan	1 Dok	- Dok	-	- Dok	-	1 Dok	305.750.	1 Dok	200.000.	-	-	-	100 %	505.750.	Dinas PUPR	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Dan Penunjang Bidang Cipta Karya	penunjang Bidang Cipta Karya yang dilaksanakan						000,00		000,00						000,00		
	03	01	24	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	30 %	18,00 %	3.526.235.000,00	20,00 %	7.123.416.609,00	49,00 %	14.103.600.000,00	27,71 %	6.976.895.000,00	31,72 %	6.069.025.000,00	35,73 %	6.158.675.000,00	35,73 %	43.957.846.609,00	Dinas PUPR
				Program Pengembangan Bidang Jasa Konstruksi Dan Pengendalian	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan alat, uji Laboratorium dan informasi data penyedia jasa konstruksi.		- -	-	- -	-	- -	-							-	Dinas PUPR	
	03	01	34	Program Pengembangan Bidang Pengendalian Dan Peralatan	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan alat, uji Laboratorium dan informasi data penyedia jasa konstruksi.		23,08 %	516.371.104,00	10,39 %	352.035.000,00	53,00 %	1.795.475.000,00	10,04 %	340.000.000,00	13,28 %	450.000.000,00	13,28 %	450.000.000,00	100 %	3.387.510.000,00	Dinas PUPR
	03	01	39	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kesesuaian Rencana Tata Ruang	NA	5,56 %	423.150.000,00	33,87 %	203.588.616,00	33,89 %	41.700.000,00	34,13 %	472.400.000,00	34,69 %	1.100.000.000,00	35,13 %	850.000.000,00	35,13 %	2.667.688.616,00	Dinas PUPR
	03	01	40	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang.	NA	- -	-	29,35 %	176.421.180,00	29,57 %	427.950.000,00	30,02 %	868.155.000,00	30,61 %	1.150.000.000,00	31,17 %	1.100.000.000,00	31,17 %	3.722.526.180,00	Dinas PUPR
			42	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian Rencana Tata Ruang	NA	- -	-	8,32 %	50.000.000,00	8,36 %	77.078.000	- -	-	8,44 %	150.000.000,00	8,57 %	250.000.000,00	8,57 %	527.078.000,00	Dinas PUPR



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Luas areal RTH yang terpelihara dan tertata	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Dinas PUPR	
					Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Drainase	Persentase jalan dan drainase yang terpelihara dengan baik															Dinas PUPR	
			16	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase fasilitas perlengkapan keselamatan jalan dalam kondisi baik	65 %	75 %	150.00 0.000	79 %	250.000 .000	82 %	90 %	600.000. 000	95 %	600.000. 000	95 %	600.000. 000	98 %	600.000. 000	600.000. 000	Dinas Perhubung an	
					Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan	45 %	55 %	500.00 0.000	67 %	650.000 .000	72 %	75 %	100.000. 000	80 %	750.000. 000	85 %	750.000. 000	85 %	750.000. 000	750.000. 000	Dinas Perhubung an	
			20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	45 %	55 %	2.000.0 00.000	60 %	100.000 .000	65 %	68 %	160.000. 000	70 %	2.000.00 0.000	85 %	500.000. 000	85 %	500.000. 000	500.000. 000	Dinas Perhubung an	
					Tujuan 2.2: Peningkatan kesejahteraan dan stabilitas daya beli masyarakat	Inflasi	5,72 %	2,4 6 %		3,29 %		5 - 7 %		5 - 7 %		5 - 7 %		5 - 7 %		5 - 7 %		
					PDRB per Kapita	32,4 5 juta rupi ah	34, 24 juta rupia h		36,15 juta rupia h		37,57 juta rupi ah		39,12 juta rupi ah		41,07 juta rupi ah		42 - 44 juta rupi ah		42 - 44 juta rupi ah			
					Tingkat Kemiskinan	6,42 %	6,3 2 %		6,24 %		5,91 %		5,51 %		5,32 %		4 - 5 %		4 - 5 %			
					Tingkat Penganggura n	3,53 %	NA		4,92 %		2 - 4 %		2 - 4 %		2 - 4 %		2 - 4 %		2 - 4 %			
					Indeks Gini	NA	NA		0,35		≤0,35		≤0,3 5		≤0,35		≤0,35		≤0,35			

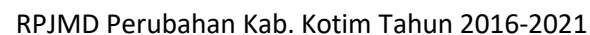


Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung ng Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Sasaran 2.2.1: Meningkatnya rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	NA	NA		87,30 %		93,50 %		95,99 %		97,65 %		98,70 %		98,70 %		
					Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	NA	NA		85,90 %		90,20 %		91,60 %		93,00 %		94,40 %		94,40 %		
3	06	01	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan pasar desa/Kelurahan	N/A	93 %	659.814.000	87,46 %	4.451.200.000	78%	2.975.722.000	80%	3.634.356.000	-	80%	-	80%	11.721.092.000	Disperdagi n	
3	06	01		Program Peningkatan dan Perkembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih	N/A	0,0 %		0,0%		0,0%		60%	-	60%	-	60%	-	60%	Disperdagi n	
3	06	01	21	Program Peningkatan Kualitas Kebersihan dan Keamanan Lingkungan Pasar	Cakupan Pelayanan pasar Penyeimbang	N/A	68 %	137.200.000	94,88 %	50.000.000	80%	98.770.000	80%	85.000.000	-	85%	-	95%	370.970.000	Disperdagi n	
3	06	01	26	Program Pembinaan Pedagang	Cakupan Pelayanan pasar Penyeimbang	N/A							80%		85%		90%		-	Disperdagi n	
3	06	01	22	Program Pengamanan Perdagangan dan Pengawasan Barang Beredar	Persentase Terwujudnya Keamanan Komoditas Perdagangan dan Peredaran Barang dalam Pengawasan	N/A	0%		92,23 %	197.146.000	85%	201.270.125	85%	-	85%	-	85%	-	398.416.125	Disperdagi n	
03	01	01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	Persentase meningkatnya produksi tanaman perkebunan	85 %	0 %	-	97,04 %	613.938.200	100 %	616.361.000	100 %	126.155.000	100 %	2.242.335.000	100 %	2.242.335.000	100 %	5.841.124.200	Dinas Pertanian
03	01	01	24	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	90 %	99,57 %	3.426.649.700	95,81	2.605.140.607	100 %	1.591.366.800	100 %	721.896.400	100 %	3.135.555.911	100 %	2.139.215.361	100 %	13.619.824.779	Dinas Pertanian



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
03	01	01	26	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	95 %	99,55 %	3.943.207.912	97,86 %	5.888.849.798	100 %	5.386.332.050	100 %	1.173.293.050	100 %	600.982.160	100 %	502.187.664	100 %	17.494.852.634	Dinas Pertanian
3	01	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	100 %	100 %	0	100 %	1.717.049.900	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	3.717.049.900	Dinas Perikanan
3	01	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	100 %	100 %	0	100 %	19.600.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	99.600.000	Dinas Perikanan
2	03	01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi (kkalori/kapita/hari)		3.453	144.251.550	2.662	359.809.000	2.672	398.659.000	2.727	879.574.000	2.781	731.803.482	2.863	735.840.691	2.863	3.249.937.723	Dinas Ketahanan Pangan
					Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)		127,22		72		74		75		77		79		79		Dinas Ketahanan Pangan
				Program Agribisnis Pertanian dan Keamanan Pangan	Tercapainya konsumsi energi (kkalori/kapita/hari)			227.144.550	2.169	903.322.800	2.081	438.915.000	2.091	356.540.000	2.100	612.073.660	2.110	612.073.660	2.110	3.150.069.670	Dinas Ketahanan Pangan
					Tercapainya konsumsi protein (gram/kapita/hari)				59		62		63		64		65		65		Dinas Ketahanan Pangan
				Program Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan	Tertanganinya daerah rawan pangan (desa)						2		2		2	476.100.000	2	476.100.000	8	952.200.000	Dinas Ketahanan Pangan
				Sasaran 2.2.2: Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas	Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar	NA	NA		51,07 %		62,00 %		63,00 %		64,00 %		65,00 %		65,00 %		

BAB VI



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD															
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.														
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)
						akibat bencana alam/ sosial																														
					Program Relokasi Permukiman Akibat Bencana Alam/Sosial	Persentase Rumah yang direlokasi		0,0 % 0	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	100 %	-													Disperkim		
					Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Permukiman Yang Sehat		0,0 % 0	-	0,00 %	-	100,0 % 0	2.450.000	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	100 %	-													2.450.000	Disperkim	
					Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Luasan Kumuh yang ditangani	59.8 Ha 7	0,0 Ha 0	-	10,45 Ha	869.370.000	12,45 %	1.370.638.400	14,45 Ha	2.000.000.000	16,45 Ha	2.000.000.000	18,45 Ha	2.000.000.000	41,42 Ha	41.420.000.000													Disperkim		
					Program Sistem Informatika Kawasan Permukiman Kumuh (SIKAPKU)	Persentase basic data kawasan kumuh		0,0 % 0	-	0,00 %	-	0,00 %	-	33,33 %	400.000.000	33,33 %	400.000.000	33,33 %	400.000.000	100 %	1.200.000.000													Disperkim		
					Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase jumlah PMKS yang ditangani	18 %	93,48 %	929.233.368	91,46 %	289.488.000	95 %	1.037.867.100	95 %	1.043.264.442	95 %	1.048.997.731	95 %	1.055.094.685	100 %	5.594.621.722													DINSOS		
					Program pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat yang diberikan bantuan (alat bantu)	17 Orang	88 %	133.157.000	61,65 %	81.743.900	85 %	115.000.000	89 %	145.000.000	90 %	157.000.000	90 %	157.420.000	90 %	818.835.000													DINSOS		
					Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang diberikan pendidikan dan keterampilan	15 Orang	100 %	900,000	100 %	600.000	100 %	27.936.600	100 %	30.730.260	100 %	33.803.286	100 %	37.183.615	100 %	190.553.761													DINSOS		



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Panti Asuhan /Panti Jompo	Persentase Anak Panti Yang diberikan bantuan	3 Pa nti	100 %	134.31 1.100	64,47 %	83.420. 500	70 %	96.047.2 00	75 %	101.562. 944	75 %	107.548. 483	80 %	114.049. 161	85 %	604.292. 787	DINSOS
				Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberi pelatihan/kete rampilan.	250 Ora ng	88 %	85.300. 000	52,01 %	427.181 .200	85 %	2.967.00 0.000	85 %	42.000.0 00	86 %	42.000.0 00	88 %	42.000.0 00	95 %	3.442.43 2.500	DINSOS
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Promosi yang diikuti	100 KK	98, 57 %	228.49 2.288	76,39 %	239.449 .000	80 %	448.224. 940	85 %	756.491. 276	90 %	664.915. 958	95 %	673.502. 081	100 %	3.374.15 7.019	DINSOS
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Karang Taruna yang diberdayakan Sosial	2 Ke giat an	93, 57 %	287.23 8.328	87,07 %	239.449 .000	85 %	361.138. 600	96 %	365.911. 372	90 %	370.779. 599	90 %	375.745. 191	95 %	2.332.22 2.713	DINSOS
				Sasaran 2.2.3: Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	NA	NA		79,51		78,75		79,24		79,72		80,21		80,21		
03	0 1	01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase meningkatnya jumlah kelompok tani dan Petani yang mampu bersaing.	80 %	99, 38 %	180.77 6.554	91,95 %	285.753 .000	100 %	305.167. 000	100 %	179.070. 000	100 %	421.923. 950	100 %	421.923. 950	100 %	1.794.61 4.454	Dinas Pertanian
03	0 1	01	18	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebun an	Persentase Peningkatan pengetahuan para petani	80 %	94, 77 %	461.50 1.728	99,89 %	515.153 .000			100 %	201.070. 000					100 %	1.177.72 4.728	Dinas Pertanian
03	0 1	01	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebun	Persentase jumlah penyuluh yang melakukan	90 %	94, 77 %	461.50 1.728	91,08	162.401 .500	100 %	255.519. 200	100 %	242.786. 000	100 %	1.148.45 6.277	100 %	1.161.36 2.858	100 %	3.432.02 7.563	Dinas Pertanian



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				an lapangan	pendampinga n kepada petani/peterna k																
03	01	01	28	Program Peningkatan Kualitas SDM dan SDA Pertanian Berwawasan Lingkungan	Persentase lahan baku pertanian yang terpetakan	80 %	0 %	-	88,83 %	90.904.250	100 %	70.565.000	100 %	43.120.000	100 %	132.130.974	100 %	132.130.974	100 %	468.851.198	Dinas Pertanian
03	01	01	28	Program Pembinaan Perlindungan Tanaman,Gangguan Usaha dan Konservasi Lahan dan Air	Persentase meningkatnya pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan	90 %	0 %	-	97,76 %	87.100.000	100 %	110.000.000	100 %	30.000.000	100 %	2.242.335.000	100 %	2.242.335.000	100 %	4.711.770.000	Dinas Pertanian
03	01	01	29	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Persentase meningkatnya jalan produksi perkebunan	80 %	0 %	0	0 %	-	100 %	449.400.100	0 0	-	100 %	1.470.000.000	100 %	1.470.000.000	100 %	3.389.400.100	Dinas Pertanian
03	01	01	29	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian dan Peternakan	Persentase jumlah infrastruktur lahan dan mekanisasi pertanian	90 %	99,61 %	4.280.692.686	96,47 %	2.026.645.950	100 %	1.591.825.000	100 %	358.160.000	100 %	3.923.382.272	100 %	4.595.834.661	100 %	16.776.540.569	Dinas Pertanian
03	01	01	30	Program Pengembangan Manajemen Administrasi dan Pemberdayaan Organisasi	Persentase pengembanga n manajemen administrasi yang terpenuhi	80 %	99,49 %	162.641.000	81,16 %	155.256.000	100 %	195.260.000	100 %	214.010.200	100 %	422.940.609	100 %	427.188.676	100 %	1.577.296.485	Dinas Pertanian
03	01	01	33	Program Peningkatan Ketahanan Perkebunan	Persentase perusahaan yang melaksanakan csr sesuai dengan perda	80 %	0 %	0	77,42 %	16.611.900	100 %	52.025.000	100 %	45.000.100	100 %	952.000.000	100 %	952.000.000	100 %	2.017.637.000	Dinas Pertanian
3	01	30		Program Peningkatan Potensi dan Pengelolaan Perikanan	Persentase potensi dan usaha perikanan yang dikelola	100 %	100 %	-	100 %	551.850.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	2.551.850.000	Dinas Perikanan



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	0	24		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Persentase jumlah usaha perikanan berbasis kawasan dan produk unggulan	100 %	100 %	0	100 %	96.860.000	100 %	510.000.000	100 %	510.000.000	100 %	510.000.000	100 %	510.000.000	100 %	2.136.860.000	Dinas Perikanan
3	0	26		Program Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang berdaya saing	100 %	100 %	0	100 %	226.228.300	100 %	305.000.000	100 %	305.000.000	100 %	305.000.000	100 %	305.000.000	100 %	1.446.228.300	Dinas Perikanan
3	0	27		Program Pendataan dan Perijinan Perikanan	Persentase jumlah rekomendasi SIUP, Tanda Pencatatan dan Pendaftaran Usaha Perikanan yang diterbitkan	100 %	100 %	0	100 %	7.678.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	207.678.000	Dinas Perikanan
				Sasaran 2.2.4: Menguatnya perekonomian rakyat	Persentase pertumbuhan kredit usaha masyarakat (IKM dan UMKM)	NA	NA		13,21 %		16,00 %		17,00 %		18,00 %		20,00 %		20,00 %		
2.11	2.1.1.1	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Cakupan UMKM Binaan	2,74 %	3,11 %	147.141.660	3,47 %	57.535.000	3,83 %	115.009.870	4,19 %	254.573.425	4,54 %	256.000.000	4,89 %	256.000.000	4,89 %	256.000.000	Dinas Koperasi - UKM
2.11	2.1.1.1	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase Pelaku UMK dan Koperasi yang terampil berwirausaha	2,74 %	3,14 %	51.439.500	3,51 %	135.014.200	3,89 %	101.653.300	4,27 %	56.800.000	4,65 %	65.000.000	5,02 %	65.000.000	5,02 %	65.000.000	Dinas Koperasi - UKM
2.11	2.1.1.1	17		Program Pengembangan Sistem pendukung	Persentase Pertumbuhan UMKM Baru	NA	0,61 %	253.175.900	0,61 %	303.016.012	0,61 %	463.223.380	0,62 %	384.880.000	0,62 %	475.580.000	0,63 %	476.161.850	0,63 %	476.161.850	Dinas Koperasi - UKM



Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	1			UMKM																	
2. 11	2. 1 1. 1	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan koperasi yang memenuhi standar perkoperasian	76 %	80 %	263.60 5.900	80 %	166.897 .600	80 %	371.323. 400	80 %	466.600. 000	80 %	483.587. 900	80 %	482.600. 000	80 %	482.600. 000	Dinas Koperasi - UKM
				Tujuan 2.3: Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	NA	NA		NA		71,47		72,15		73,14		73,75		73,75		
				Sasaran 2.3.1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase tingkat pencemaran air	NA	NA		NA		5,22 %		5,01 %		4,80 %		4,35 %		4,35 %		
					Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	NA	NA		60,50 %		58,00 %		57,00 %		56,00 %		55,00 %		55,00 %		
					Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU)	NA	NA		50,00 %		50,00 %		60,00 %		66,70 %		75,00 %		75,00 %		
2.0 5	4. 0 1. 0 3	01	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan pemantauan pemanfaatan SDA pada titik-titik strategis yang telah ditentukan	NA	100 %	163.96 2.800	100 %	238.872 .800	100 %	319.650. 800	100 %	231.032. 800	100 %	150.000. 000	100 %	150.000. 000	100 %	1.253.51 9.200	Sekretariat Daerah
					Jumlah peningkatan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup.	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	150.000. 000	-	-	-	-	1 Unit	150.000. 000	Sekretariat Daerah
2.0 5.2 .05	0 1	01	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan	Persentase timbulan sampah di	36.9 3 %	58. 85 %	8.801.7 32.600	58.85 %	11.994. 717.558	58 %	11.160.7 65.740	57 %	5.075.07 2.180	56 %	1.062.50 2.857	55 %	1.124.78 6.567	55 %	39.219.5 77.502	DLH



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persampahan	perkotaan yang terkelola																
2.0 5.2 .05	0 1	01	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase upaya pengendalian perusakan lingkungan hidup	-	45.62 %	560.000.000	50 %	660.302.500	55 %	525.351.000	60 %	663.532.500	65 %	140.000.000	70 %	140.000.000	57.60 %	2.689.186.000	DLH
2.0 5.2 .05	0 1	01	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah	-	-	-	5 %	238.895.000	5 %	670.508.220	7 %	131.480.000	14 %	110.073.760	14 %	120.000.000	14 %	4.069.364.762	DLH
2.0 5.2 .05	0 1	01	20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase Jumlah Parameter yang Terakreditasi	5 %	10 %	210.000.000	20 %	317.824.550	5 %	292.327.000	40 %	204.856.500	50 %	100.000.000	60 %	190.000.000	60 %	1.050.000.000	DLH
2.0 5.2 .05	0 1	01	25	Program Penyuluhan dan Penaatan Hukum/Perundang Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perlindungan dan pengelolaan lingkungan	-	-	-	100 %	35.494.000	100 %	814.000.000	100 %	176.900.000	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	100 %	1.150.900.000	DLH
2.0 5.2 .05	0 1	01	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Upaya Perlindungan dan konservasi Terhadap Sumber daya Alam	-	50 %	85.000.000	50 %	30.350.000	60 %	45.700.000	65 %	2.750.000	70 %	80.000.000	75 %	80.000.000	45 %	238.800.000	DLH
2.0 5.2 .05	0 1	01	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	-	1 Keg.	133.000.000	1 Keg.	78.700.000	1 Keg.	55.000.000	-	-	1 Keg.	107.500.000	1 Keg.	92.500.000	4 Keg.	466.700.000	DLH
2.0 5.2 .05	0 1	01	23	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi	Persentase pengelolaan Rehabilitasi	-	50 %	40.000.000	50 %	25.350.000	55 %	25.489.000	60 %	43.577.000	65 %	50.000.000	70 %	55.000.000	50 %	199.416.000	DLH



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Ekosistem Pesisir dan Laut	Ekosistem Pesisir dan Laut															
2.0 5.2 .05	0 1	01	21	Program Pengembangan Ekosiwasata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Jumlah Luasan pelaksanaan KHDTK Kebun Raya dan Hutan Kota	- -	-	-	1 Ha	17.162.344.000	2 Ha	1.500.000.000	5 Ha	914.800.000	10 Ha	520.364.950	10 Ha	562.790.000	28 Ha	20.660.298.950	DLH
3.0 4.2 .05	0 1	01	36	Program Pengukuhan Kawasan Hutan	Jumlah Kecamatan Pengukuhan Kawasan Hutan	-	-	-	4 Kec.	2.947.394.000	13 Kec.	3.495.275.000	-	-	3 Kec.	1.138.000.000	-	-	17 Kec.	6.442.669.000	DLH
2.0 5.2 .05	0 1	01	21	Program Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)	Jumlah Luasan Pelaksanaan Taman Hutan Raya (TAHURA)	-	-	-	-	-	-	-	6.400 Ha	50.000.000	400 Ha	100.000.000	400 Ha	100.000.000	800 Ha	250.000.000	DLH
2.0 5.2 .05	0 1	01	22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kelompok /Masyarakat Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	-	15 Titik hot spot	25.000.000	15 Titik hot spot	51.800.000	-	-	-	-	15 Titik hot spot	50.000.000	15 Titik hot spot	50.000.000	90 Titik Hot spot	151.800.000	DLH
3.0 4.2 .05	0 1	01	37	Program Penghijauan	Jumlah Luasan Penanaman Kawasan Konservasi	-	-	-	1 Ha	295.308.000	2 Ha	583.982.800	5 Ha	45.000.000	10 Ha	100.000.000	20 Ha	100.000.000	38 Ha	879.290.800	DLH
5.0 2	5	02	02	Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Persentase Pelaksanaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	-	-	-	-	0	-	-	100 %	68.195.000	100 %	68.000.000	100 %	68.195.000	100 %	204.390.000	DLH
2.0 5.2 .05	0 1	01	17	Program Penanaman Bambu pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air	Jumlah Luasan Penanaman Bambu Pada kanan Kiri Sungai	-	-	-	-	0	-	-	50 Ha	200.000.000	50 Ha	200.000.000	50 Ha	200.000.000	150 Ha	600.000.000	DLH



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				(DTA) Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah																	
3.0 4.2 .05	0 1	01	22	Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	-	-	-	100 %	74.560.000	100 %	64.400.000	100 %	64.400.000	100 %	74.000.000	100 %	74.000.000	83,33 %	351.360.000	DLH
				Sasaran 2.3.2: Meningkatnya kualitas ruang publik	Persentase RTH kota dengan kondisi baik	NA	NA	NA	70,52 %		80,43 %		80,62 %		80,72 %		80,72 %				
					Luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati	NA	NA	49,42 %	47,42 %		45,42 %		43,42 %		43,42 %		41,42 %				
				Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase Jaringan Instalasi Listrik PJU dalam kondisi baik		0,0 % 0	-	22,04 %	9.211.519.130	19,87 %	8.304.817.000	18,85 %	7.876.568.462	19,62 %	8.200.000.000	19,62 %	8.200.000.000	100 %	41.792.904.592	Disperkim
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Taman median/ trotoar dan RTH yang terkelola		37,36 %	6.863.139.840	16,41 %	3.014.250.000	11,15 %	2.048.552.822	11,42 %	2.098.552.822	11,69 %	2.148.552.822	11,97 %	2.198.552.822	100 %	18.371.601.128	Disperkim
				Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Jumlah Pemakaman Yang Terkelola		16,00 Loka si	2.885.463.160	13,00 Loka si	2.500.000.000	22,00 Lok asi	4.121.188.410	19,00 Lok asi	3.562.962.700	14,00 Lok asi	2.700.000.000	15,00 Lok asi	2.800.000.000	99,00 Lok asi	18.569.614.270	Disperkim
2.0 5.2 .05	0 1	01	24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH kota dengan kondisi baik	-	-	-	-	-	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	150.000.000	50 %	350.000.000	DLH
				Sasaran 2.3.3: Menurunnya tingkat resiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan, dan permukiman	Penurunan titik api (Hot Spot)	NA	NA	100,00 %		100,00	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00		
					Tingkat waktu tanggap	NA	NA	100,00 %		100,00	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00		



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					(response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)																	
					Partisipasi masyarakat dalam pencegahan bencana	NA	NA			100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani		- %	-	99 %	6.867.273	80 %	18.750.000	85 %	5.470.000	85 %	12.513.650	85 %	14.000.000	85 %	57.600.923	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	
				Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	75 %	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	75%	20.000.000	75%	22.500.000	75%	42.500.000	Kecamatan Teluk Sampit	
				Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA	- -	0	92,02 %	25.306.000	- -	0	100 %	8.000.000	100 %	7.000.000	100 %	7.000.000	100 %	47.306.000	Kecamatan Pulau Hanaut	
				Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	0 %	95,34 %	31.289.500	100 %	12.000.000	85,00 %	13.322.500	85,00 %	8.322.500	85,00 %	23.000.000	85,00 %	23.000.000	85,00 %		Kecamatan M. B. Ketapang	
1	20	17	44	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani		0%	0	98,81%	6.900.000,00	100%	8.200.000,00	100%	8.700.000,00	100%	66.000.000,00	100%	43.000.000,00	100%	132.800.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara	
				Program Pendoendalian	Persentase kasus	0 %	0 %	-	80 %	7.980.0	80 %	7.470.00	- %	-	80 %	9.000.00	80 %	10.000.0	53 %	34.450.0	Kecamatan Kota	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Kebakaran Hutan	kebakaran lahan dan hutan yang ditangani				00		0				0		00		00	Besi	
					Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA %	-	-	37,79 %	20.656.600	75 %	15.042.500	75 %	17.242.500	75 %	48.000.000	75 %	48.000.000	75 %	148.941.600	Kecamatan Baamang
					Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA		-	57.1 %	11.250.000	66.7 %	12.500.000		-	75 %	25.000.000	100 %	27.500.000	100 %	76.250.000	Kecamatan Parenggean
					Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA	-	-	-	-	%	-	%	-	75 %	3.000.000	75 %	3.000.000	100 %	6.000.000	Kecamatan Mentaya Hulu
					Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA	50 %	-	60 %	-	70 %	2.255.000	80 %	10.800.000	80 %	3.000.000	80 %	3.000.000	80 %	19.055.000	Kecamatan Bukit Santuai
4	01	22	22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA	0 %	-	60 %	23.000.000	36 %	5.400.000	100 %	4.000.000	100 %	25.000.000	100 %	1.000.000	80 %	58.400.000	Kecamatan Telaga Antang
4	01	22	22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA	0 %	-	60 %	23.000.000	70 %	28.000.000	80 %	28.000.000	80 %	28.000.000	80 %	28.000.000	80 %	135.000.000	Kecamatan Antang Kalang
					Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA	-	-	-	-	90 %	2.100.000	100 %	850.000	100 %	6.000.000	-	-	100 %	8.950.000	Kecamatan Cempaga Hulu



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						ditangani																
					Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA		-			85 %	30.000.000	100 %	10.000.000	100 %	14.000.000	100 %	14.000.000	96,25 %	68.000.000	Kecamatan Cempaga
					Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA		-	100 %	8.950.000	80 %	10.550.000	80 %	10.550.000	80 %	10.550.000	80 %	10.550.000	80% %	51.150.000	Kecamatan Seranau
					Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA			75 %	5.000.000	75 %	6.500.000	75 %	7.500.000	75 %	12.500.000	75 %	14.000.000	100 %	45.500.000	Kecamatan Telawang
					Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA		-		-	100 %	22.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	97.000.000	Kecamatan Tualan Hulu
1	5	3	22		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	Persentase Desa yang Mampu dan Tanggap dalam Penanggulang an Bencana	100%	100%	202.824.530	100%	213.142.880	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	300.000.000	100%	260.624.530	100%	1.296.591.940	BPBD
1	5	3	27		Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase peserta sosialisasi yang memahami pencegahan dan penanganan kebakaran	100%	100%	199.155.000	100%	112.690.000	0	-	100%	80.875.000	100%	200.000.000	100%	261.832.905	100%	854.552.905	BPBD
1	5	3	30		Program Mitigasi Bencana	Persentase Kecamatan dan Desa	100%	100%	165.000.000	100%	150.000.000	100%	127.820.000	100%	151.951.100	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.094.771.100	BPBD



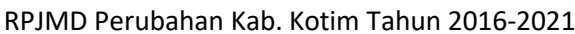
RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						yang Terpetakan Potensi Bencananya																
1	5	3	31	Program Tanggap Darurat	Persentase kejadian tanggap darurat yang ditangani	100 %	89 %	545.63 2.500	95%	134.227 .000	75%	974.502. 000	75%	70.210.4 00	75%	815.000. 000	75%	183.975. 850	75%	2.723.54 7.750	BPBD	
1	5	3	32	Program Logistik dan Peralatan	Persentase korban yang mendapat suplay logistik	100 %	100 %	37.208. 560	100%	50.320. 000	0	-	75%	125.000. 000	75%	200.000. 000	75%	100.000. 000	75%	512.528. 560	BPBD	
1	5	3	33	Program Pasca Bencana	Persentase kerusakan bencana yang tervaluasikan	100 %	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	150.000. 000	100%	75.000.0 00	100%	225.000. 000	BPBD	
1	5	3	34	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase sarana prasarana yang dipulihkan akibat bencana	100 %	100 %	6.668.8 40.700	100%	732.000 .000	75%	823.000. 000	75%	423.000. 000	75%	1.400.00 0.000	75%	1.600.00 0.000	75%	11.646.8 40.700	BPBD	
1	5	3	35	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Persentase Penurunan kasus Kebakaran Hutan	-	-	-	-	-	75%	16.877.3 37.700	75%	10.188.2 80.000	75%	8.300.00 0.000	75%	6.956.31 8.078	75%	42.321.9 35.778	BPBD	
1	0 5	04	22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase desa / kecamatan tanggap bencana yang terbentuk	80%	NA	NA	NA	NA	60%	23.198.0 00,00	65%	870.000. 000,00	70%	870.000. 000,00	75%	870.000. 000,00	80%	870.000. 000,00	DPKP	
1	0 5	04	27	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran pemukiman yang ditangani	75%	NA	NA	94,22 %	2.403.8 24.279, 92	100%	3.160.42 1.400,00	75%	3.326.66 2.500,00	75%	3.326.74 5.625,00	75%	3.356.57 9.575,00	75%	3.356.57 9.575,00	DPKP	
1	0 5	04	35	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Persentase desa / kecamatan tanggap bencana yang	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80%	8.711.36 0.000,00	85%	10.453.6 32.000,0 0	95%	14.635.0 85.000,0 0	100%	14.635.0 85.000,0 0	DPKP	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
					terbentuk																	
				Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien																		
				Tujuan 3.1: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	NA	NA		NA		C		CC		B		A		A			
				Sasaran 3.1.1: Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan	Kemandirian Fiskal Daerah	11,7 % 9	11, % 16		14,98 %		12,32 %		12,65 %		13,13 %		13,83 %		13,83 %			
3	06	01	19	Program Pendataan dan Pemungutan Retribusi Pasar	Persentase Peningkan PAD dan akurasi Data Pasar	N/A	100 %	11.250.000	0,0%		75%	-	75%	-	75%	-	75%	-	75%	11.250.000	Disperdagi n	
3	06	01	23	Program Peningkatan Pelayanan Metrologi Legal	Persentase Terwujudnya Pelayanan Kemetrolagian di Kab. Kotim	N/A	0%		83,96 %	1.726.250.000	90%	3.095.512.600	90%	300.607.500	90%		90%		95%	5.122.370.100	Disperdagi n	
3	06	01	24	Program Peningkatan pemahaman Metrologi Legal	Persentase Aparatur yang memahami metrologi legal dan pengguna alat UTTP yang taat aturan kemetrolagian	N/A	0%		79,58 %	124.920.000	85%	222.830.000	85%	38.100.000	85%		90%		95%	385.850.000	Disperdagi n	
3	06	01	25	Program Pengawasan Kemetrolagian	Persentase Terwujudnya kesadaran pengguna alat UTTP untuk tertip ukur	N/A	0%		0%		0%		85%		85%		85%		85%	-	Disperdagi n	
4	04	05	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	Waktu penetapan Perda APBD Kabupaten	Tepat Waktu	Tepat Waktu	2.732.680.000,00		Tepat Waktu		2.871.640.000,00	Tepat Waktu	2.995.449.000,00	Tepat Waktu	1.924.571.600,00	Tepat Waktu	1.801.522.950,00	Tepat Waktu	1.678.473.350,00	1.678.473.350,00	BPKAD

BAB VI



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Persentase kesesuaian program Renja PD dengan RKPD	80 %	85 %	780.81 8.850	85 %	442.677 .200	100 %	1.089.48 1.250	100 %	416.000. 000	100 %	397.024. 000	100 %	354.140. 875	100 %	3.480.14 2.175	Bappeda
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase rekomendasi policy brief aspek ekonomi yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	N/A	N/A	N/A	100 %	116.652 .600	N/A N/A	N/A	75 %	50.000.0 00	75 %	40.000.0 00	75 %	39.827.4 00	75 %	246.480. 000	Bappeda
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase rekomendasi policy brief aspek sosial dan budaya yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	79,8 8 %	52 %	21.289. 000	83,27 %	98.694. 500	80 %	75.435.0 00	80 %	95.000.0 00	80 %	95.000.0 00	80 %	98.156.5 00	80 %	483.575. 000	Bappeda
				Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi policy brief aspek aspek prasarana wilayah dan SDA yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	98 %	84 %	16.830. 000	50 %	325.000 .000	50 %	500.000. 000	50 %	500.000. 000	50 %	500.000. 000	50 %	633.570. 000	50 %	2.475.40 0.000	
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat		%	-	98 %	5.851.8 18	85 %	7.300.00 0	%	-	80 %	8.500.00 0	%	10.500.0 00	%	32.151.8 18	Kecamata n Mentaya Hilir Selatan



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						kabupaten																
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	75 %	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	75%	14.000.000	75%	16.000.000	75%	30.000.000	Kecamatan Teluk Sampit
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	Kecamatan Pulau Hanaut
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	0 %	99,83 %	28.630.000	98,22 %	14.100.000	85,00 %	13.900.000	85,00 %	31.690.000	85,00 %	31.690.000	85,00 %	31.690.000	85,00 %	31.690.000	Kecamatan M. B. Ketapang
1	20	17	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten		0%	0	100%	5.290.000,00	95%	8.700.000,00	95%	9.600.000,00	97%	18.000.000,00	98%	18.500.000,00	100%	60.090.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara



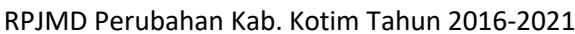
RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					kabupaten																
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	0 %	0 %	-	80 %	15.000.000	80 %	18.250.000	80 %	18.250.000	80 %	19.000.000	80 %	21.000.000	80 %	91.500.000	Kecamatan Kota Besi
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	25 %	99,36 %	23.430.000	79,63 %	13.826.700	75 %	16.088.700	75 %	16.088.700	50 %	33.189.398	55 %	34.848.868	55 %	137.472.366	Kecamatan Baamang
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA	-	-	76.7 %	10.200.000	95.2 %	10.400.000	80.8 %	8.150.000	92 %	12.500.000	94.1 %	12.500.000	100 %	53.750.000	Kecamatan Paringgean
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	75 %	16.000.000	75 %	16.000.000	100 %	32.000.000	Kecamatan Mentaya Hulu



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						kabupaten																
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA	90 %	-	90 %	11.750.000	90 %	12.375.000	90 %	13.750.000	90 %	12.500.000	95 %	12.500.000	95 %	62.875.000	Kecamatan Bukit Santuai
4	01	22	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA	-	-	90 %	10.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	12.000.000	100 %	12.000.000	95 %	52.000.000	Kecamatan Telaga Antang
4	01	22	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA	-	-	90 %	10.000.000	90 %	11.000.000	90 %	14.000.000	90 %	15.000.000	95 %	16.000.000	95 %	66.000.000	Kecamatan Antang Kalang
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA	-	-	100 %	8.460.000	90 %	11.750.000	90 %	11.750.000	55 %	55.000.000	55 %	60.000.000	60 %	146.960.000	Kecamatan Cempaga Hulu





Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					kabupaten																
				Sasaran 3.1.3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Capaian implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	NA	NA		Memuaskan		Memuaskan		Memuaskan		Memuaskan		Memuaskan		Memuaskan		
					Nilai akuntabilitas kinerja	NA	NA		B		B		B		BB		A		A		
					Opini BPK terhadap LKPD	NA	NA		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
					Nilai LPPD	NA	NA		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		
4	04	05	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Daerah yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90%	90%	1.017.514.000,00	90%	934.594.000,00	90%	928.677.000,00	95%	828.677.000,00	98%	828.677.000,00	100%	828.677.000,00	100%	828.677.000,00	BPKAD
					Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah Dengan Nilai Aset di Neraca	90%	90%	2.738.566.000,00	90%	2.377.223.000,00	92%	2.392.967.500,00	95%	992.967.500,00	97%	992.967.500,00	98%	992.967.500,00	98%	992.967.500,00	BPKAD
4	04	05	19	Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang diberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa	30 Desa	30 Desa	980.247.000,00	50 Desa	569.747.000,00	75 Desa	347.040.000,00	100 Desa	789.000.000,00	130 Desa	789.000.000,00	168 Desa	789.000.000,00	168 Desa	789.000.000,00	BPKAD
				Program Pengembangan	Persentase informasi dan	N/A N/A	100 %	58.407.	80 %	28.649.	80 %	40.640.0	80 %	100.640.	80 %	100.640.	80 %	158.523.	80 %	487.500.	Bappeda



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
					Data/Informasi	data tentang rencana pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat			000		454		00		000		000		546		000		
					Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi policy brief dalam penelitian sumberdaya dan potensi daerah yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	N/A	N/A	50 %	258.387.000	50 %	164.300.500	50 %	196.175.000	50 %	300.000.000	50 %	410.000.000	50 %	493.712.500	50 %	1.822.575.000	Bappeda
4.01	4.01.03	01	16		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penyelesaian tapal batas administrasi antar kecamatan	NA	100 %	1.309.077.800	100 %	2.366.762.000	100 %	1.862.606.800	100 %	1.245.924.300	100 %	1.595.000.000	100 %	1.520.000.000	100 %	9.899.370.900	Sekretariat Daerah	
						Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	NA	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Sekretariat Daerah	
4.02	4.02.03	01	15		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pelaksanaan kebijakan KDH sesuai peraturan perundangan yang berlaku	NA	100 %	1.465.367.400	100 %	1.664.199.300	100 %	1.284.423.800	100 %	1.163.517.600	100 %	1.628.000.000	100 %	1.648.000.000	100 %	8.853.508.100	Sekretariat Daerah	
4.01	4.01.03	01	40		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran peraturan perundang-	NA	100 %	575.657.100	100 %	595.114.800	100 %	682.110.900	100 %	600.540.700	100 %	590.000.000	100 %	590.000.000	100 %	3.633.423.500	Sekretariat Daerah	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					undangan oleh PNSD																
4.01	4.01.03	01	41	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase SOPD yang menyelesaikan dokumen kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai standar	NA	100 %	701.819.500	100 %	1.043.121.800	100 %	1.343.433.455	100 %	1.215.488.100	100 %	752.000.000	100 %	852.000.000	100 %	5.907.862.855	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase aspirasi masyarakat yang terwakili melalui institusi DPRD	100 %	100 %	9.162.280.000,00	100 %	7.664.000.000,00	100 %	7.764.000.000,00	100 %	7.764.000.000,00	100 %	7.764.000.000,00	100 %	7.770.000.000,00	100 %	47.888.280.000,00	Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Cakupan (%) sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH yang dapat berjalan dengan baik	70 %	70 %	165.920.000,00	70 %	318.279.768,00	75 %	493.040.000,00	80 %	486.845.000,00	85 %	486.845.000,00	90 %	486.845.000,00	90 %	2.437.774.768,00	Inspektorat Daerah
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) /Pejabat Fungsional yang Bersertifikasi dan mengikuti Diklat dan/atau Bimtek serta seminar	80 %	85 %	446.290.000,00	85 %	481.748.500,00	87 %	422.945.000,00	90 %	374.842.915,00	92 %	374.842.915,00	95 %	374.842.915,00	95 %	374.842.915,00	Inspektorat Daerah
				Program Pembinaan dan Fasilitasi	Persentase dokumen pengelolaan	N A	0 %	-	40 %	55.650.000	100 %	74.674.922	100 %	160.000.000	100 %	160.000.000	100 %	160.000.000	100 %	610.324.922	DPMD



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Pengelolaan Keuangan Desa	keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018																
					Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018		-	-	-	-	-	-	-	75	4.000.000	80	6.000.000	80	10.000.000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	
					Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	75 %	0%	-	0%	-	100%	12.800.000	100%	12.800.000	75%	15.000.000	75%	16.000.000	85%	56.600.000	Kecamatan Teluk Sampit
					Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA	-	-	0	100 %	11.650.000	85,00 %	56.740.000	85,00 %	70.000.000	85,00 %	70.000.000	85,00 %	70.000.000	Kecamatan Pulau Hanaut	
					Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	0 %	0 %	-	93,01 %	20.400.000	85,00 %	56.740.000	85,00 %	70.000.000	85,00 %	70.000.000	85,00 %	70.000.000	85,00 %	70.000.000	Kecamatan M. B. Ketapang
1	20	17	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018		0%	0	100%	4.200.000,00	95%	42.400.000,00	95%	50.600.000,00	0%	0	100%	20.000.000,00	100%	117.200.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	0 %	%	-	80 %	21.450.000	80 %	40.500.000	80 %	50.100.000	80 %	60.000.000	80 %	70.000.000	80 %	242.050.000	Kecamatan Kota Besi
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	75 %	4.000.000	80 %	6.000.000	80 %	10.000.000	Kecamatan Baamang
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA		-	100 %	10.850.000	100 %	9.650.000	100 %	9.350.000	100 %	26.250.000	100 %	27.250.000	100 %	83.350.000	Kecamatan Parenggean
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA	-	-	71 %	11.640.000	-	-	-	-	75 %	2.000.000	75 %	2.000.000	100 %	15.640.000	Kecamatan Mentaya Hulu
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA	100 %	-	100 %	13.200.000	100 %	12.375.000	100 %	13.750.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	99.325.000	Kecamatan Bukit Santuai
4	01	22	22	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang	NA	-	-	100 %	6.000.000	100 %	10.800.000	-	-	100 %	26.250.000	100 %	27.250.000	100 %	70.300.000	Kecamatan Telaga Antang



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						sesuai Permendagri 20/2018																
4	01	22	22		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA	-	-	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	7.188.756	100 %	8.192.878	100 %	10.791.428	100 %	38.173.062	Kecamatan Antang Kalang
					Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA	-	-	-	56.190.000	85 %	56.190.000	90 %	51.990.000	100 %	14.000.000	100 %	14.000.000	100 %	136.180.000	Kecamatan Cempaga Hulu
					Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA	-	-	100 %	24.000.000	100 %	25.000.000	100 %	26.000.000	100 %	27.000.000	100 %	28.000.000	100 %	130.000.000	Kecamatan Cempaga
					Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA	-	-	57 %	28.350.000	-	-	80 %	28.350.000	80 %	28.350.000	80 %	28.350.000	80 %	113.400.000	Kecamatan Seranau
					Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA	-	-	75 %	10.000.000	-	-	100 %	14.000.000	100 %	16.000.000	100 %	20.000.000	100 %	60.000.000	Kecamatan Telawang
					Program Pembinaan dan	Persentase dokumen	NA	-	-	50 %	50.000.	60 %	30.000.0	70 %	35.000.0	90 %	35.000.0	100 %	35.000.0	100 %	185.000.	Kecamatan Tualan



Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018				000			00			00			00			Hulu
					Sasaran 3.1.4: Meningkatnya status perkembangan desa	Jumlah desa berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun)	NA	NA		Sangat tertinggal: 72 Tertinggal: 83 Berkembang: 12 Maju: 1 Mandiri: 0		Sangat tertinggal: 55 Tertinggal: 68 Berkembang: 37 Maju: 7 Mandiri: 1		Sangat tertinggal: 51 Tertinggal: 64 Berkembang: 41 Maju: 10 Mandiri: 2		Sangat tertinggal: 47 Tertinggal: 60 Berkembang: 45 Maju: 13 Mandiri: 3		Sangat tertinggal: 43 Tertinggal: 56 Berkembang: 49 Maju: 16 Mandiri: 4		Sangat tertinggal: 43 Tertinggal: 56 Berkembang: 49 Maju: 16 Mandiri: 4		
					Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase BUMDes yang mandiri	N A	N A	-	10 %	92.300.000	20 %	63.075.000	35 %	115.000.000	50 %	115.000.000	75 %	115.000.000	100 %	500.375.000	DPMD
						Persentase pasar desa yang aktif																
					Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Presentase aparatur pemerintahan desa yang lulus dengan ketegori baik	N A			47 %	45.774.750	75 %	101.850.750	75 %	101.850.750	100 %	37.000.000	-	100 %	184.625.500	DPMD	
					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase peserta pembinaan kelembagaan yang lulus dengan kategori baik	N A	26 %	442.065.000	24 %	825.572.441	12 %	166.982.600	33 %	1.179.900.000	38 %	1.221.900.000	40 %	1.221.900.000	50 %	5.058.320.041	DPMD
						Persentase desa dengan profil desa yang up to date																
					Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa yang memanfaatkan teknologi dalam pembangunan	N A	40 %	2.364.358.300	42 %	354.531.500	45 %	175.382.250	47 %	1.003.461.061	53 %	1.108.461.061	60 %	1.108.461.061	60 %	6.114.655.233	DPMD



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						Persentase temuan dengan indikasi penyimpangan penggunaan APBDesa																
					Program Penunangan Kegiatan PKK	Persentase peningkatan kualitas PKK	N A	100 %	471.432.862	100 %	251.500.000	100 %	330.000.700	100 %	365.500.000	100 %	365.500.000	100 %	349.756.550	100 %	2.133.690.112	DPMD
					Program Penyelenggaraan Pemilihan Pemerintah dan Kelembagaan Desa	Persentase pelaksanaan pilkades sesuai Permendagri 65/2017 dalam pilkades serentak	N A	100 %	603.116.000	100 %	5.213.906.300	100 %	3.425.753.500	100 %	348.925.000			-	100 %	9.591.700.800	DPMD	
						Persentase Kepala Desa terpilih yang lulus dengan kategori baik																
					Program Sistem Informasi/Administrasi Desa	Persentase produk hukum yang dihasilkan terhadap kebutuhan	N A			100 %	210.000.000	100 %	7.080.000	100 %	160.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	477.080.000	DPMD
					Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status		- %	-	- %	-	- %	-	- %	-	75 %	4.500.000	80 %	6.500.000	80 %	11.000.000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
					Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	75 %	0%	-	96.77%	9.000.000	100%	2.995.000	0%	2.995.000	75%	13.000.000	75%	14.000.000	75%	41.990.000	Kecamatan Teluk Sampit
					Program Peningkatan partisipasi	Persentase desa/kelurahan yang	NA	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	-	- -	-	- -	0	Kecamatan Pulau Hanaut



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					masyarakat dalam membangun desa	mengalami peningkatan status																
					Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	0 %	0 %	-	0 %	-	85,00 %	66.956.000	85,00 %	90.000.000	85,00 %	90.000.000	85,00 %	90.000.000	85,00 %	90.000.000	Kecamatan M. B. Ketapang
1	20	17	17		Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status		0%	0	99,30%	2.870.000,00	95%	3.850.000,00	95%	5.110.000,00	98%	25.000.000,00	99%	26.000.000,00	100%	62.830.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
					Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	0 %	%	-	70 %	12.240.000	70 %	15.900.000	50 %	11.525.000	70 %	16.000.000	70 %	16.000.000	66 %	71.665.000	Kecamatan Kota Besi
					Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	100 %	-	-	100 %	11.580.000	100 %	9.900.000	100 %	11.600.000	100 %	33.256.251	100 %	34.919.064	100 %	101.255.315	Kecamatan Baamang
					Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	NA		-		-		-		35 %	10.500.000	50 %	14.500.000	100 %	25.000.000	Kecamatan Paringgean	
					Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	NA	-	-	-	-	-	-	-	75 %	1.000.000	75 %	1.000.000	100 %	2.000.000	Kecamatan Mentaya Hulu	
					Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	NA	-	-	70 %	-	80 %	-	90 %	11.000.000	95 %	-	100 %	-	100 %	11.000.000	Kecamatan Bukit Santuai



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	0	22	17	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/keluraha n yang mengalami peningkatan status	NA	-	-	-	-	-	-	-	100 %	1.050.000	100 %	14.000.000	100 %	15.050.000	Kecamata n Telaga Antang	
4	0	22	17	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/keluraha n yang mengalami peningkatan status		-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	Kecamata n Antang Kalang	
				Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/keluraha n yang mengalami peningkatan status	NA	-	-	80 %	5.500.000	80 %	7.000.000	80 %	8.000.000	8.000.000	80 %	8.000.000	80 %	36.500.000	Kecamata n Cempaga Hulu	
				Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/keluraha n yang mengalami peningkatan status	NA		-	50 %	10.000.000	55 %	10.000.000	60 %	10.000.000	65 %	12.000.000	70 %	15.000.000	70 %	57.000.000	Kecamata n Cempaga
				Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/keluraha n yang mengalami peningkatan status															Kecamata n Seranau	
				Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/keluraha n yang mengalami peningkatan status	NA							60 %	10.000.000	65 %	12.000.000	70 %	15.000.000	70 %	37.000.000	Kecamata n Telawang
				Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/keluraha n yang mengalami peningkatan status	NA		-		-	54 %	22.000.000	54 %	22.000.000	72 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	88.000.000	Kecamata n Tualan Hulu



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Sasaran 3.1.5: Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	NA		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		
					Persentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang terlayani jaringan kabel dan nirkabel	NA	NA		61,54 %		61,54 %		61,54 %		65,38 %		71,15 %		71,15 %		
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		70 %	580.53 9.915	70%	189.726 .915	70%	5.993.18 5.952	70%	897.163. 845	70%	467.738. 422	70%	1.045.89 9.185	70%	9.174.25 4.234	DPMPTSP
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai		70 %	580.53 9.915	70%	189.726 .915	70%	5.993.18 5.952	70%	897.163. 845	70%	200.000. 000	70%	500.000. 000	70%	8.360.61 6.627	DPMPTSP
			3	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur		70 %	133.35 0.000	70%	-	70%	-	70%	-	70%	67.738.4 22	70%	45.899.1 85	70%	246.987. 607	DPMPTSP
			5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya		70 %	103.12 0.000	70%	85.000. 000	70%	97.750.0 00	70%	112.412. 500	70%	129.274. 375	70%	148.665. 531	70%	676.222. 406	DPMPTSP
			6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah (cakupan) laporan yang valid/sesuai standar		70 %		70%		70%	40.000.0 00	70%	46.000.0 00	70%	52.900.0 00	70%	60.835.0 00	70%	199.735. 000	DPMPTSP
			21	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah (cakupan) Informasi		1 Paket Apil	50.000. 000	1 Paket Aplikasi	50.000. 000	1 Paket Aplikasi	100.000. 000	1 Paket Aplikasi	100.000. 000	1 Paket Aplikasi	100.000. 000	1 Paket Aplikasi	100.000. 000	1 Paket Aplikasi	500.000. 000	DPMPTSP



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							kasi														
			22	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Presentase Peningkatan Pelayanan Perizinan		70 %	-	70%	-	70%	60.000.000	70%	60.000.000	70%	65.000.000	70%	70.000.000	70%	255.000.000	DPMPTSP
			xx	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	Presentase Pencapaian Pelayanan Perizinan		-		-		-		70%		70%	100.000.000	75%	250.000.000	80%	350.000.000	DPMPTSP
			xx	Program Optimalisasi Pelayanan Jasa Usaha	Jumlah Perizinan Usaha yang di keluarkan/terbitkan		-		-		-		70%		70%	100.000.000	75%	250.000.000	80%	350.000.000	DPMPTSP
3	06	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	N/A	97 %	4.166.294.876	94%	4.297.200.695	78%	5.093.450.905	78%	4.648.785.640	78%	4.169.553.000	78%	5.520.518.975	78%	27.895.804.091	Disperdagi n
3	06	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	N/A	100 %	867.120.449	95%	2.289.315.630	70%	598.335.245	70%	394.135.560	78%	-	78%	-	78%	4.148.906.884	Disperdagi n
3	06	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	N/A	100 %	70.840.000	0%		80%	112.947.250	80%	97.905.000	80%	-	80%	-	80%	281.692.250	Disperdagi n
3	06	01	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pasilitas Pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi	N/A	98 %	126.250.000	92,50 %	255.760.000	65%	284.850.000	70%	200.180.000	70%	-	70%	-	70%	867.040.000	Disperdagi n
3	06	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase Peningkatan kapasitas sumberdaya	N/A	0%		0%		0%		100%	-	100%		100%		100%	-	Disperdagi n



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Capaian Kinerja dan Keuangan	aparatur yang terpenuhi																
03	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	90 %	98,79 %	2.250.664.866	95,98 %	3.167.035.936	100 %	3.934.959.950	100 %	3.920.802.450	100 %	2.992.982.716	100 %	3.080.475.216	100 %	19.346.921.134	Dinas Pertanian
03	01	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	90 %	97,88 %	752.037.957	89,29 %	703.349.600	100 %	831.188.500	100 %	333.898.400	100 %	222.266.888	100 %	222.266.888	100 %	3.065.008.233	Dinas Pertanian
03	01	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana penunjang kedisiplinan aparatur	90 %	100 %	102.720.000	84,80 %	100.700.000	100 %	134.400.000	100 %	105.000.000	100 %	130.673.734	100 %	130.673.734	100 %	704.167.468	Dinas Pertanian
03	01	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	80 %	45,12 %	29.756.828	99,40 %	99.901.911	100 %	101.340.000	100 %	107.550.000	100 %	355.181.172	100 %	355.181.172	100 %	1.048.911.083	Dinas Pertanian
03	01	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	80 %	95,26 %	2.510.000	85,68 %	16.279.000	100 %	18.499.000	100 %	20.000.000	100 %	203.241.275	100 %	203.241.275	100 %	463.770.550	Dinas Pertanian
03	01	01	52	Program Pengadaan Tanah	Persentase luas tanah yang diadakan sesuai ketentuan perundangan	80 %	0 %	-	92,10 %	1.091.580.000	100 %	50.260.000	0 0	-	100 %	-	100 %	-	100 %	1141840000	Dinas Pertanian
3	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi	100 %	100 %	1.744.507.648	100 %	1.713.781.991	100 %	1.756.000.000	100 %	1.765.000.000	100 %	1.772.500.000	100 %	1.775.000.000	100 %	10.526.789.639	Dinas Perikanan



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan																
3	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	100 %	1.192.892.050	100 %	939.082.400	100 %	532.500.000	100 %	532.500.000	100 %	532.500.000	100 %	532.500.000	100 %	4.261.974.450	Dinas Perikanan
3	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpras penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	38.600.000	100 %	21.900.000	100 %	28.000.000	100 %	28.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	176.500.000	Dinas Perikanan
3	01	05		Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	100 %	100 %	65.453.550	100 %	35.400.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	600 pegawai	340.853.550	Dinas Perikanan
3	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	100 %	100 %	29.650.000	100 %	32.910.000	100 %	29.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	181.560.000	Dinas Perikanan
2	16	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang tersedia kebutuhan	98,28%	98,52%	1.586.765.486	93,24%	2.006.337.385	95,00%	1.895.689.005	95,00%	1.244.829.236	95,00%	1.244.829.236	95,00%	1.244.829.236	95,00%	9.223.279.584	Disbudpar
2	16	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur	Presentase aparatur yang diyani sarana dan prasarana memadai	97,62%	97,62%	919.831.607	96,99%	1.329.867.710	95,00%	406.758.085	95,00%	364.761.957	95,00%	384.789.057	95,00%	404.816.157	95,00%	3.810.824.573	Disbudpar



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	1	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase pelanggaran disiplin apratur	99,00%	99,00%	70.400.000	94,78%	101.400.000	95,00%	38.400.000	95,00%	38.400.000	95,00%	38.400.000	95,00%	38.400.000	95,00%	325.400.000	Disbudpar
2	1	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya	87,96%	87,96%	71.880.000	95,30%	192.782.000	95,00%	164.030.000	95,00%	100.000.000	95,00%	100.000.000	95,00%	100.000.000	95,00%	728.692.000	Disbudpar
2	1	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase laporan yang valid / sesuai standar	95,94%	95,94%	16.200.000	99,68%	17.700.000	95,00%	21.800.000	95,00%	16.200.000	95,00%	16.200.000	95,00%	16.200.000	95,00%	104.300.000	Disbudpar
2	1	01	52	Program Pengadaan Tanah	Presentase Luas Tanah yang diadakan sesuai dengan perundang - undangan	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1,25%	1.000.000	1,25%	1.000.000	Disbudpar
2.0	0	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1.178.625.000	100 %	4.304.123.204	100 %	9.008.893.168	100 %	8.535.367.740	100 %	939.773.250	100 %	1.939.773.250	100 %	25.906.555.612	DLH
2.0	0	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	404.000.000	100 %	3.206.716.188	100 %	2.659.352.072	100 %	1.927.916.580	100 %	469.925.183	100 %	469.925.183	100 %	9.137.835.206	DLH
2.0	0	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Jumlah pegawai yang diadakan pakaian khusus hari-hari tertentu	100 %	100 %	60.000.000	100 %	128.220.000	100 %	66.800.000	-	-	100 %	81.000.000	100 %	81.000.000	100 %	417.020.000	DLH
2.0	0	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti Diklat formal	100 %	100 %	80.000.000	100 %	429.936.000	100 %	64.584.000	100 %	72.816.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	847.336.000	DLH
3.0	0	01	22	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase Dokumen Pelaporan Capaian	100 %	-	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	33 %	20.000.000	DLH



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja dan Keuangan																
2.11	2.11.1.1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	90 %	90 %	632.115.825	75 %	801.356.160	75 %	826.571.300	75 %	866.161.250	75 %	866.161.250	75 %	876.161.250	75 %	876.161.250	Dinas Koperasi - UKM
2.11	2.11.1.1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	90 %	90 %	179.667.026	90 %	615.620.234	90 %	397.556.550	90 %	208.400.500	90 %	266.850.000	90 %	281.850.000	90 %	281.850.000	Dinas Koperasi - UKM
2.11	2.11.1.1	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	31.707.000	100 %	19.831.750	100 %	17.300.000	100 %	37.350.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	Dinas Koperasi - UKM
2.11	2.11.1.1	05		Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi	56 %	70 %	50.401.375	70 %	159.857.006	70 %	60.000.000	70 %	199.700.000	70 %	60.000.000	70 %	60.000.000	70 %	60.000.000	Dinas Koperasi - UKM
2.11	2.11.1.1	06		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA	NA	NA	75 %	1.750.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Koperasi - UKM
203		01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		99,45 %	3.247.109.410	95,64 %	1.773.736.700	100 %	1.693.363.000	100 %	1.355.279.290	100 %	2.453.130.872	100 %	2.501.842.644	100 %	13.024.461.916	Dinas Ketahanan Pangan



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	0	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		100 %	518.594.100	85,25 %	376.781.000	100 %	713.713.000	100 %	314.994.310	100 %	980.801.947	100 %	918.018.175	100 %	3.822.902.532	Dinas Ketahanan Pangan
2	0	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		100 %	164.750.000	95,21 %	23.800.000	100 %	49.750.000	100 %	31.500.000	100 %	37.800.000	100 %	45.360.000	100 %	352.960.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	0	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang terpenuhi		100 %	240.800.000	93,5 %	181.500.000	100 %	124.000.000	100 %	118.400.000	100 %	130.240.000	100 %	136.752.000	100 %	931.692.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	0	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi		100 %	14.135.000	98,74 %	15.800.000	100 %	16.600.000	100 %	16.600.000	100 %	17.017.551	100 %	17.017.551	100 %	97.170.102	Dinas Ketahanan Pangan
4	0	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	80%	80 %	6.390.911.525,00	83%	6.498.821.600,00	84%	5.182.631.570,00	85%	4.839.661.000,00	87%	4.839.661.000,00	90%	4.839.661.000,00	90%	4.839.661.000,00	BPKAD
4	0	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	90%	90 %	3.160.971.195,09	93%	5.559.980.900,00	95%	1.449.039.680,00	96%	1.252.570.000,00	97%	1.375.618.650,00	98%	1.498.668.250,00	98%	1.498.668.250,00	BPKAD
4	0	05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase ketersedian sapra penunjang kedisiplinan aparatur	85%	85 %	126.900.000,00	85%	72.900.000,00	86%	146.700.000,00	87%	155.400.000,00	88%	155.400.000,00	90%	155.400.000,00	90%	155.400.000,00	BPKAD



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	04	05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	90%	90 %	707.575.000,00	90%	679.075.000,00	90%	431.125.000,00	90%	480.000.000,00	90%	480.000.000,00	90%	480.000.000,00	90%	480.000.000,00	BPKAD
4	04	05	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	85%	85 %	459.403.000,00	86%	635.140.000,00	87%	525.724.500,00	88%	286.158.000,00	89%	286.158.000,00	90%	286.158.000,00	90%	286.158.000,00	BPKAD
04	07	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	95,8 % 7	85, % 52	3.071.011.319,00	85,09 %	3.009.567.264,00	95,00 %	3.409.193.720,00	95,00 %	3.632.431.040,00	95,00 %	3.791.750.000,00	95,00 %	3.902.000.000,00	95,00 %	3.902.000.000,00	Bappenda
04	07	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	84,6 % 5	56, % 59	266.835.297,00	84,62 %	1.086.001.930,00	90,00 %	832.052.280,00	90,00 %	731.045.360,00	90,00 %	660.000.000,00	90,00 %	750.000.000,00	90,00 %	750.000.000,00	Bappenda
04	07	01	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur	100, % 00	90, % 34	108.410.000,00	83,82 %	62.700.000,00	90,00 %	163.685.000,00	100,0 % 0	148.750.000,00	100,00 %	128.000.000,00	100,00 %	128.000.000,00	100,0 % 0	128.000.000,00	Bappenda
04	07	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	75,8 % 3	59, % 04	188.587.780,00	60,40 %	460.884.778,00	85,00 %	383.400.000,00	85,00 %	495.903.600,00	90,00 %	225.000.000,00	90,00 %	250.000.000,00	90,00 %	250.000.000,00	Bappenda
1	26	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia	100%	100%	598.072.810	100%	791.206.660	100%	741.109.985	100%	492.654.550	100%	591.037.810	100%	591.037.810	100%	3.805.119.625	Dispusataskip



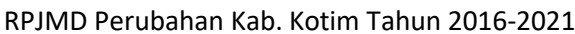
RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015) (4)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan																
1	2	01	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	77.412.852	100%	740.239.040	100%	292.929.365	100%	198.225.000	100%	204.503.490	100%	204.503.490	100%	1.717.813.237	Dispustaka sip
1	2	01	03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100%	100%	7.200.000	100%	22.600.000	100%	38.960.200	100%	27.300.000	100%	7.200.000	100%	7.200.000	100%	110.460.200	Dispustaka sip
1	2	01	05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	100%	100%	85.160.000	100%	116.460.000	100%	147.970.000	100%	109.100.000	100%	139.860.000	100%	139.860.000	100%	738.410.000	Dispustaka sip
1,02	1.02.02.02	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	11.622.913.474	84 %	11.726.419.242	100 %	12.961.040.628	100 %	14.350.151.488	100 %	20.223.104.600	100 %	22.649.878.100	100 %	22.649.878.100	RSUD dr. Murjani Sampit
1,02	1.02.02.02	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	46 %	66 %	3.297.524.415	68 %	-	82 %	199.558.000	88 %	680.762.500	94 %	2.245.000.000	100 %	2.266.000.000	100 %	2.266.000.000	RSUD dr. Murjani Sampit
1,02	1.02.02.02	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	100 %	100 %	459.245.000	42 %	360.000.000	100 %	1.129.550.000	100 %	1.061.650.000	100 %	1.194.188.800	100 %	1.337.492.000	100 %	1.337.492.000	RSUD dr. Murjani Sampit
1,02	1.02.02.02	1	43	Program Peningkatan Kinerja Aparatur	Persentase karyawan yang diberikan jasa pelayanan untuk meningkatkan kinerja	100 %	100 %	5.978.000.000	105 %	7.192.000.000	100 %	11.478.000.000	100 %	14.202.000.000	100 %	11.733.420.000	100 %	13.141.430.400	100 %	13.141.430.400	RSUD dr. Murjani Sampit



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
2	1	3	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100 %	98,66 %	1.169.979.520	98,01 %	1.177.054.112	100%	1.343.325.776	100%	1.224.092.860	100%	1.396.336.170	100%	1.396.336.170	100%	7.707.124.608	Dispora	
2	1	3	02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Prosentase Aparatur yang dilayani Sarana dan prasarana yang memadai	100 %	92,83 %	127.142.575	91,73 %	211.167.492	100%	129.756.424	100%	97.303.490	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	845.369.981	Dispora	
2	1	3	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Pelanggaran Disiplin Aparatur	100 %	99,57 %	93.125.000	84,10 %	5.000.000	100%	49.825.000	0%	-	100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	337.950.000	Dispora	
2	1	3	05	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Prosentase Sumber Daya Aparatur yang meningkat Kompetensinya	100 %	96,55 %	732.000.000	96,72 %	107.700.196	100%	161.000.000	100%	98.000.000	100%	78.000.000	100%	78.000.000	100%	1.254.700.196	Dispora	
2	1	3	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD	100 %	71,86 %	27.290.000	97,44 %	7.814.000	100%	35.625.000	100%	41.000.000	100%	48.700.000	100%	48.700.000	100%	209.129.000	Dispora	
1	0	3	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		100 %	3.414.968.634	100 %	4.676.821.021	100 %	5.181.741.900	100 %	6.043.571.490	100 %	6.647.928.639	100 %	7.312.721.503	100 %	7.312.721.503	Dinas PUPR	
1	0	3	01	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang		100 %	707.511.900	100 %	712.477.258	100 %	1.349.139.630.000	100 %	1.674.334.576	100 %	1.841.768.034	100 %	2.025.944.837	100 %	2.025.944.837	Dinas PUPR

BAB VI



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung ng Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				aparatur	aparatur yang memadai																
			5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi	25 %	25 %	172.400.000	25 %	172.400.000	25 %	110.600.000	25 %	125.000.000	25 %	125.000.000	25 %	125.000.000	25 %	125.000.000	Dinas Perhubungan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		100 %	2.585.017.828	100 %	1.941.910.240	100 %	2.331.747.813	100 %	2.334.334.388	100 %	2.339.340.963	100 %	2.344.347.538	100 %	13.876.698.770	Disperkim
				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		100 %	519.936.322	100 %	395.212.330	100 %	219.300.000	100 %	219.300.000	100 %	219.300.000	100 %	219.300.000	100 %	1.792.348.652	Disperkim
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Ketersediaan Sapra Penunjang Kedisiplinan Aparatur		100 %	91.000.000	100 %	52.150.000	100 %	105.000.000	100 %	115.000.000	100 %	125.000.000	100 %	135.000.000	100 %	623.150.000	Disperkim
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terpenuhi		100 %	47.580.000	100 %	75.075.000	100 %	47.580.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	320.235.000	Disperkim
				Program Pengadaan Tanah	Persentase Pengadaan Tanah Yang Terlaksana		44,74	425.000.000	0,00 %	-	55,26 %	525.000.000	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	100 %	950.000.000	Disperkim
				Program Fasilitas Pindah/Purna	Persenase Fasilitas							45.95 %		17.000.0	13,51 %	5.000.00	40,54 %	15.000.0	100 %	37.000.0	Disperkim



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Tugas PNS	Pindah/Purna Tugas PNS yang terpenuhi									00		0		00		00	
				Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media masa	Jumlah desa blankspot		NA	-	97,27 %	217.627.500	73,17 %	225.022.500	17,33 %	291.374.500	73,17 %	225.022.500	73,17 %	225.022.500	100 %	1.184.069.500	Diskominfo
				Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase SDM yang mengikuti pelatihan di bidang komunikasi dan informasi		NA	-	81,60 %	182.590.000	87,29 %	140.970.000	18,23 %	36.315.000	87,29 %	140.970.000	87,29 %	140.970.000	100 %	641.815.000	Diskominfo
				Program peningkatan sarana dan prasarana Telematika	Persentase Sarana dan prasarana telematika yang tersedia		NA	-	NA	-	66,95 %	340.500.000	18,67 %	396.000.000	66,95 %	340.500.000	66,95 %	340.500.000	100 %	1.417.500.000	Diskominfo
				Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Persentase berita yang di Upload di website resmi Pemerintah Kab. Kotim		NA	-	0,00%	5.000.000	50,00 %	5.000.000	0,00 %	-	50,00 %	5.000.000	50,00 %	5.000.000	100 %	20.000.000	Diskominfo
				Program Kerjasama informasi dengan Mass Media	Persentase Media massa sebagai mitra kerja		NA	-	0,00%	-	18,65 %	12.850.000	0,00 %	-	18,65 %	12.850.000	18,65 %	12.850.000	100 %	38.550.000	Diskominfo
				Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan Telekomunikasi	Persentase rekomendasi yang diakomodir dalam kebijakan		NA	-	96,60 %	215.650.000	17,66 %	52.920.000	0,00 %	-	17,66 %	52.920.000	17,66 %	52.920.000	100 %	374.410.000	Diskominfo
				Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan informatika	Persentase jaringan kabel dan nirkabel yang terbangun		NA	-	90,84 %	1.442.000.000	42,02 %	455.775.000	0%	50.062.435	42,02 %	455.775.000	42,02 %	455.775.000	100 %	961.612.435	Diskominfo
				Program Pengembangan data/informasi/statistis	Persentase data/informasi/statistis		NA	-	0,00%	-	0,00 %	-	0,00 %	8.400.000	0,00 %	25.000.000	0,00 %	25.000.000	100 %	58.400.000	Diskominfo



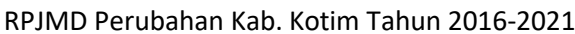
RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				stik Daerah	daerah yang terpublikasi																
				Program Optimalisasi Keamanan informasi	Persentase portal informasi Pemerintah Kab. Kotim yang terproteksi		NA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	23.400.000	0,00%	23.400.000	100%	46.800.000	Diskominfo
				Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien																Diskominfo	
				Tujuan 3.1: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik																Diskominfo	
				Sasaran 3.1.5: Meningkatnya kualitas pelayanan publik																Diskominfo	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan				80%	1.077.123.750	86,05%	1.533.400.380	50%	1.160.757.505	86,05%	1.533.400.380	86,05%	1.533.400.380	100%	6.838.082.395	Diskominfo
				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai				89%	1.338.468.207	89%	1.546.342.120	50%	682.440.900	89,33%	1.546.342.120	89,33%	1.546.342.120	100%	6.659.935.467	Diskominfo
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur		NA	-	95,90%	24.000.000	43,21%	30.200.000	15,53%	13.750.000	43,21%	30.200.000	43,21%	30.200.000	100%	128.350.000	Diskominfo
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Persentase peningkatan kapasitas		NA	-	40,47%	39.531.025	44,60%	40.020.400	15,72%	89.600.000	44,60%	40.020.400	44,60%	40.020.400	100%	249.192.225	Diskominfo



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Daya Aparatur	sumberdaya aparatur yang terpenuhi																
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	92,4 % 0	93, % 57	2.142.5 97.464	100 %	1.797.8 37.345	85 %	1.918.03 4.718	85 %	2.182.12 9.850	85 %	2.652.90 1.633	85 %	2.652.83 3.583	85 %	13.346.3 34.593	Bappeda
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	93,7 % 0	91, % 7	2.320.5 37.343	93,62 %	828.922 .416	85 %	602.895. 882	85 %	348.058. 747	85 %	333.758. 747	85 %	335.268. 747	90 %	4.769.44 1.882	Bappeda
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	96,1 % 9	94, % 27	126.70 0.000	85 %	23.760. 000	85 %	48.000.0 00	85 %	63.000.0 00	85 %	70.995.0 00	85 %	70.995.0 00	85 %	403.450. 000	Bappeda
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bappeda
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi	94,7 % 9	85 %	235.25 5.000	78 %	251.530 .102	85 %	296.380. 000	85 %	256.000. 000	85 %	334.452. 449	85 %	335.522. 449	85 %	1.709.14 0.000	Bappeda
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90 %	N/A	90 %	50.000.0 00	90 %	50.000.0 00	100 %	100.000. 000	Bappeda	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi	100 %	28, % 08	1.344.9 94.325, 00	84,35 %	2.509.4 63.884, 00	100 %	2.276.17 2.525,00	100 %	1.887.23 3.540,00	100 %	1.908.29 3.153,00	100 %	1.933.38 5.685,00	100 %	11.859.5 43.112,0 0	Dinas Kependud ukan dan

BAB VI



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Persentase Penerbitan Akta Kematian yang tepat waktu	0 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100 %	96,49 %	1.721.032.851,00	98,58 %	1.906.647.735,00	100 %	2.022.079.970,00	100 %	1.788.004.350,00	100 %	1.198.506.326,00	100 %	1.223.626.076,00	100 %	9.859.897.308,00	DP3AP2KB
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	96,16 %	302.979.270,00	86,48 %	1.132.547.938,00	100 %	992.747.630,00	100 %	1.376.237.250,00	100 %	139.989.524,00	100 %	139.989.524,00	100 %	4.084.491.136,00	DP3AP2KB
				Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	35.760.000,00	99,28 %	55.992.000,00	100 %	59.700.000,00	100 %	45.900.000,00	100 %	51.050.000,00	100 %	51.050.000,00	100 %	299.452.000,00	DP3AP2KB
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi	100 %	69,66 %	25.510.000,00	100 %	7.750.000,00	100 %	33.420.000,00	100 %	86.510.000,00	100 %	46.660.000,00	100 %	46.660.000,00	100 %	246.510.000,00	DP3AP2KB
				Program Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB metode kontrasepsi MKJP	99,65 %	77,33 %	258.552.750,00	99 %	490.763.000,00	100 %	293.306.000,00	100 %	297.436.000,00	100 %	318.728.000,00	100 %	318.728.000,00	100 %	1.977.513.750,00	DP3AP2KB
				Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase KB aktif	100 %	99,24 %	222.151.750,00	94,55 %	42.965.750,00	100 %	3.060.935.000,00	100 %	4.163.215.000,00	100 %	201.547.900,00	100 %	201.547.900,00	100 %	7.892.363.300,00	DP3AP2KB
				Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase PIK Aktif	92,84 %	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	18.000.000,00	DP3AP2KB



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri	Persentase KB aktif	94,1 % 6	98,27 %	217.981.400,00	83,12 %	93.440.000,00	100 %	65.684.000,00	100 %	37.984.000,00	100 %	16.600.000,00	100 %	16.600.000,00	100 %	448.289.400,00	DP3AP2KB
				Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase Tribina Aktif (BKB,BKR,BKL)	100 %	100 %	40.814.000,00	100 %	40.814.000,00	100 %	40.814.000,00	100 %	40.814.000,00	100 %	40.814.000,00	100 %	40.814.000,00	100 %	244.884.000,00	DP3AP2KB
4	1	2	03.02.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100 %	100 %	2.701.759.924,00	100 %	1.955.236.902,00	100 %	1.930.588.325,00	100 %	1.940.741.395,00	100 %	1.934.505.048,00	100 %	1.926.168.463,00	100 %	12.389.000.057,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	13	.0.1	0.2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	80 %	80 %	764.872.067,00	80 %	106.865.000,00	80 %	107.933.650,00	80 %	109.012.986,50	80 %	110.103.116,37	80 %	111.583.967,99	80 %	1.310.370.787,86	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpras penunjang kedisiplinan aparatur	80 %	80 %	68.850.000,00	80 %	68.850.000,00	80 %	31.212.000,00	80 %	31.836.240,00	80 %	38.250.000,00	80 %	38.250.000,00	80 %	277.248.240,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	1.3.	0.1.	0.5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	80 %	80 %	129.290.000,00	80 %	40.000.000,00	80 %	40.000.000,00	80 %	40.000.000,00	80 %	40.000.000,00	80 %	40.000.000,00	80 %	329.290.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA			100 %	30.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	190.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	0.8.	0.1.	1.5	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase kesiapan Calon Lokasi Transmigrasi	NA	30 %	71.970.000,00	30 %	79.167.000,00	30 %	87.083.700,00	30 %	95.792.070,00	30 %	40.236.554,00		0,00	30 %	374.249.324,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	0.8.	0.1.	1.8	Program Pembinaan Wilayah Transmigrasi	Persentase warga transmigrasi yang mendapatkan pembinaan	NA	100 %	65.126.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100 %	65.126.400,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	90 %	92,16 %	815.630.314	95,26 %	1.686.580.918	100 %	1.392.188.898	100 %	930.812.153	100 %	930.812.153	100 %	955.437.953	100 %	5.731.346.228	Badan Kesbangpol
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	97,13 %	833.094.621	97,9 %	705.392.440	100 %	302.822.903	100 %	282.495.172	100 %	282.495.172	100 %	282.495.172	100 %	2.688.795.480	Badan Kesbangpol
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	48.895.000	100 %	21.180.000	100 %	36.050.000	100 %	50.750.000	100 %	50.750.000	100 %	50.750.000	100 %	258.375.000	Badan Kesbangpol
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi	100 %	100 %	113.837.568	100 %	64.500.000	100 %	18.000.000	100 %	152.880.000	100 %	152.880.000	100 %	152.880.000	100 %	654.977.568	Badan Kesbangpol
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA			100 %	15.000.000	100 %	8.100.000								23.100.000	Badan Kesbangpol



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peserta pengembanga n wawasan kebangsaan yang lulus dengan kategori baik	100 %	23,52 %	143.823.500	5,8 %	250.000.000	5,8 %	346.747.825	5,8 %	355.056.825	5,8 %	363.456.825	5,8 %	363.056.325	100 %	1.822.141.300	Badan Kesbangpol
				Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa	Persentase peserta sosialisasi yang paham dengan konsep bel anegara dan ketahanan ideologi	NA	92,21 %	267.774.400										92,21 %	267.774.400	Badan Kesbangpol	
				Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam	Persentase rekomendasi hasil forum yang digunakan sebagai dasar kebijakan	NA	95,87 %	274.541.350										95,87 %	274.541.350	Badan Kesbangpol	
				Program Peningkatan Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing	Persentase kecamatan dengan data orang asing yang lengkap	NA	100 %	59.745.500										100 %	59.745.500	Badan Kesbangpol	
				Program Peningkatan Pembinaan dan Peran Serta Ormas dan Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Persentase organisasi yang memahami konsep berbangsa dan bernegara	NA	99,96 %	147.253.704										99,96 %	147.253.704	Badan Kesbangpol	
				Program Peningkatan Pembinaan dan Peran Serta Parpol dalam Berdemokrasi	Persentase peserta sosialisasi yang paham tentang peran Parpol	NA	95,6 %	116.124.608										95,6 %	116.124.608	Badan Kesbangpol	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan wilayah pengembangan wawasan kebangsaan	NA			97,8 %	923.004.648	24 %	597.890.825	22 %	354.782.675	20,1 %	363.708.475	18,1 %	363.258.475	99,7 %	2.602.645.098	Badan Kesbangpol
				Program Pendidikan Politik	Persentase parpol/ormas yang mendapatkan pendidikan politik	NA			42,63 %	167.166.500	100 %	641.513.324	100 %	355.056.825	100 %	362.356.825	100 %	363.207.825	100 %	1.889.301.299	Badan Kesbangpol
1.05	1.05	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dlm mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	90,78 %	96,20 %	747.754.004	91,67 %	847.289.727	90,78 %	1.007.065.840	90,78 %	941.817.785	90,78 %	914.774.950	90,78 %	914.774.950	90,78 %	5.373.477.256	Satpol PP
1.05	1.05	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	85 %	95,83 %	293.867.870	92,10 %	486.941.152	85 %	787.812.630	85 %	407.677.385	85 %	442.253.000	85 %	471.753.000	85 %	2.890.305.037	Satpol PP
1.05	1.05	02	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kedisiplin Aparatur	80 %	100 %	127.972.000	94,30 %	206.282.000	80 %	160.250.000	80 %	144.855.000	80 %	160.291.000	80 %	227.491.000	80 %	1.027.141.000	Satpol PP
1.05	1.05	02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	80 %	100 %	54.881.600	64,37 %	174.726.099	80 %	125.940.000	80 %	160.900.000	80 %	256.282.000	80 %	256.282.000	80 %	1.029.011.699	Satpol PP
1.05	1.05	02	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran serta aparat Satpol PP dan anggota Satlinmas dalam meningkatkan	90 %	90 %	630.160.326	90,64 %	1.061.110.066	90 %	2.763.504.235	90 %	1.882.648.630	90 %	908.551.650	90 %	908.551.650	90 %	8.154.526.557	Satpol PP



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						keamanan dan kenyamanan lingkungan																
1.05	1.05	02	16	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Kantramtibmas dan tindak kriminal yang ditangani	80 %		80 %	141.610.000	68,26 %	187.299.000	80 %	319.318.800	80 %	574.168.600	80 %	355.863.000	80 %	351.638.475	80 %	1.929.897.875	Satpol PP
1.05	1.05	02	19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase peran serta masyarakat dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan										80 %	61.650.300	80 %	30.825.150	80 %	92.475.450	Satpol PP	
1.05	1.05	02	20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase pelaku usaha, masyarakat, dan lingkungan pendidikan yang paham tentang penyakit masyarakat	85 %		85 %	21.500.000	86,71 %	16.475.000	85 %	23.300.000	85 %	23.060.000	85 %	19.000.000	85 %	19.000.000	85 %	122.335.000	Satpol PP
1.05	1.05	02	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase keikutsertaan anggota Satlinmas dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi	100 %				95,29 %	24.286.895	100 %	25.486.895	100 %	30.885.000	100 %	56.325.100	100 %	25.500.000	100 %	162.483.890	Satpol PP
4.01	4.01.003	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	NA		100 %	14.339.817.238	100 %	13.856.007.720	100 %	14.543.036.015	100 %	13.340.821.115	100 %	13.015.000.000	100 %	13.111.590.750	100 %	82.206.272.838	Sekretariat Daerah
4.01	4.01	01	02	Program Peningkatan	Persentase sarana dan	NA		100 %	16.073.	100 %	34.105.	100 %	28.706.2	100 %	22.790.1	100 %	11.437.2	100 %	11.522.2	100 %	124.635.	Sekretariat Daerah



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	1.03			Sarana dan Prasarana Aparatur	prasarana aparatur yang memadai			041.662		958.286		52.952		74.092		90.700		90.700		008.392	
4.01	4.01.03	01	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpras penunjang kedisiplinan aparatur	NA	100 %	382.200.000	100 %	407.030.000	100 %	311.250.000	100 %	376.000.000	100 %	434.200.000	100 %	434.200.000	100 %	2.344.880.000	Sekretariat Daerah
4.01	4.01.03	01	04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi	NA	100 %	6.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	-		-		-	100 %	16.000.000	Sekretariat Daerah
4.01	4.01.03	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	NA	100 %	407.538.000	100 %	753.354.000	100 %	870.019.000	100 %	997.374.000	100 %	852.253.600	100 %	852.253.600	100 %	4.732.792.200	Sekretariat Daerah
	4.01.03			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA	100 %	63.480.000	100 %	-	100 %	-	100 %	-		-		-	100 %	63.480.000	Sekretariat Daerah
4.01	4.01.03	01	37	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai standar dan peraturan perundangan	NA	100 %	3.335.865.374	100 %	2.438.859.400	100 %	3.959.438.500	100 %	4.437.407.900	100 %	2.885.000.000	100 %	2.990.000.000	100 %	20.046.571.174	Sekretariat Daerah
2.04	4.01.03	01	16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase tanah aset pemerintah daerah yang tersertifikasi	NA	20 %	3.122.415.250	40 %	2.096.348.000	40 %	21.093.000.000	40 %	59.625.773.632	40 %	2.550.000.000	40 %	2.550.000.000	100 %	91.037.536.882	Sekretariat Daerah
2.04	4.01.03	01	17	Program penyelesaian konflik	Persentase konflik	NA	100 %	190.35	100 %	122.050	100 %	181.502.	100 %	121.450.	100 %	260.000.	100 %	260.000.	100 %	1.135.35	Sekretariat Daerah



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	1.03			konflik pertanahan	pertanahan yang diselesaikan			3.900		.000		000		000		000		000		5.900	
2.10	4.01.03	01	20	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan publikasi atas pelayanan tugas komunikasi, informasi dan media massa	NA	100 %	1.859.671.500	100 %	1.780.625.000	100 %	2.545.644.784	100 %	2.557.490.000	100 %	1.862.150.000	100 %	1.890.000.000	100 %	12.495.581.284	Sekretariat Daerah
4.01	4.01.03	01	17	Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik (sesuai perencanaan)	NA	100 %	6.885.374.300	100 %	4.876.316.544	100 %	7.723.865.694	100 %	6.215.273.500	100 %	3.512.500.000	100 %	3.297.500.000	100 %	32.510.830.038	Sekretariat Daerah
	4.01.03			Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan	Persentase taman lingkup Setda yang dikelola dengan baik	NA	100 %	1.137.356.000	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	3.537.356.000	Sekretariat Daerah
4.01	4.01.03	01	39	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan pembentukan kerjasama antar pemerintah daerah	NA	100 %	155.700.800	100 %	145.552.000	100 %	179.118.000	100 %	131.935.000	100 %	240.000.000	100 %	240.000.000	100 %	1.092.305.800	Sekretariat Daerah
4.01	4.01.03	01	42	Program Promosi Pembangunan Daerah	Cakupan pelaksanaan koordinasi pengembangan sarana dan prasarana ekonomi	NA	100 %	268.951.000	100 %	177.543.700	100 %	242.128.000	100 %	232.226.000	100 %	310.000.000	100 %	310.000.000	100 %	1.540.848.700	Sekretariat Daerah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai	100 %	100 %	8.030.765.400,00	100 %	7.453.835.100,00	100 %	7.765.801.800,00	100 %	7.772.550.400,00	100 %	7.967.506.600,00	100 %	8.021.340.600,00	100 %	47.011.799.900,00	Sekretariat DPRD



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						kebutuhan																
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	100 %	3.147.964.675,00	100 %	1.850.000.000,00	100 %	1.850.000.000,00	100 %	1.850.000.000,00	100 %	1.855.000.000,00	100 %	1.855.000.000,00	100 %	12.402.964.675,00	Sekretariat DPRD
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	476.895.000,00	100 %	400.000.000,00	100 %	400.000.000,00	100 %	440.000.000,00	100 %	440.000.000,00	100 %	440.000.000,00	100 %	2.596.895.000,00	Sekretariat DPRD
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi	100 %	100 %	452.900.000,00	100 %	452.900.000,00	100 %	452.900.000,00	100 %	452.900.000,00	100 %	452.900.000,00	100 %	452.900.000,00	100 %	2.717.400.000,00	Sekretariat DPRD
					Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	100 %	100 %	16.000.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	96.000.000,00	Sekretariat DPRD
05	0	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	90 %	91,27 %	2.138.946.510	91,89 %	2.385.898.495	100 %	3.005.901.310	100 %	1.835.805.900	100 %	2.159.481.000	100 %	2.199.152.200	100 %	13.725.185.415	BKD
05	0	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	90 %	58,57 %	196.998.355	100 %	975.655.105	100 %	2.378.290.815	100 %	174.276.000	100 %	87.500.000	100 %	70.500.000	100 %	3.883.220.275	BKD
05	0	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	102.100.000	100 %	27.250.000	100 %	102.100.000	100 %	70.000.000	100 %	105.000.000	100 %	70.000.000	100 %	70.000.000	BKD



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
05 0 01 05 8				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	90 %	68,39 %	259.227.500	100 %	321.105.000	30,27 %	259.227.500	30,27 %	381.152.000	30,27 %	265.000.000	37,58 %	315.000.000	57 %	315.000.000	BKD
05 0 01 16 8				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat pengembanga n sumberdaya	50 %	62,14 %	1.374.657.000	45,56 %	1.146.167.000	54,8 %	1.547.426.000	55,32 %	3.487.950.000	57,08 %	265.000.000	58,25 %	-	58,25 %	7.821.200.000	BKD
05 0 01 17 8				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pembinaan dan pengembanga n aparatur	90 %	86,23 %	2.843.262.700	72,41 %	2.732.246.000	90 %	3.094.824.200	90 %	3.405.839.900	90 %	1.422.147.000	90 %	1.425.147.000	90	14.923.466.800	BKD
05 0 01 18 8				Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Persentase pengembanga n sistem informasi manajemen	-	-	-	100 %	561.700.000	100 %	179.400.000	100 %	179.400.000	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	1.150.500.000	BKD
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100 %	100 %	1.118.057.595,00	100 %	994.295.050,00	100 %	955.458.770,00	100 %	825.743.060,00	100 %	825.743.060,00	100 %	825.743.060,00	100 %	5.545.040.595,00	Inspektorat Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	100 %	136.689.455,00	100 %	241.991.000,00	100 %	839.053.355,00	100 %	448.632.925,00	100 %	448.632.925,00	100 %	448.632.925,00	100 %	2.563.632.585,00	Inspektorat Daerah
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur															Inspektorat Daerah	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	91,38 %	100 %	357.821.302	100 %	350.169.302	100 %	320.169.302	100 %	320.169.302	100 %	320.169.302	100 %	320.169.302	100 %	1.988.667.812	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	92,81 %	100 %	39.706.738	100 %	43.706.738	100 %	24.706.738	100 %	24.706.738	100 %	24.706.738	100 %	24.706.738	100 %	182.240.428	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	13.200.000	100 %	13.200.000	100 %	13.200.000	100 %	13.200.000	100 %	13.200.000	100 %	13.200.000	100 %	79.200.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	98,65 %	100 %	72.559.960	100 %	72.559.960	100 %	72.559.960	100 %	72.559.960	100 %	72.559.960	100 %	72.559.960	100 %	435.359.760	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	63,63 %	100 %	6.640.000	100 %	6.640.000	100 %	6.640.000	100 %	6.640.000	100 %	6.640.000	100 %	6.640.000	100 %	39.840.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				Program Penunjang Dewan Pengurus Korpri	Persentase anggota KORPRI yang ikut serta dalam kegiatan KORPRI	NA	0,95	661.369.000		-		-		-		-		-	0,0581	661.369.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				Program Pembinaan Jiwa KORP (KORSA)	Persentase anggota KORPRI yang ikut serta dalam	NA			4,96 %	241.996.000	5,58 %	279.653.350	5,03 %	288.185.750	5,63 %	326.718.150	5,01 %	295.250.550	26,21 %	1.431.803.800	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					kegiatan KORPRI																
				Program Usaha Dan Kesejahteraan	Persentase anggota KORPRI peserta pelatihan yang menerapkan konsep wirausaha	NA			0,4 %	50.000.000	0,4 %	50.000.000	0,4 %	50.000.000	0,4 %	60.000.000	2,00 %	260.000.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI		
				Program Pengayoman Dan Perlindungan Hukum	Persentase anggota KORPRI yang terlibat permasalahan hukum	NA			9,62 %	45.125.000	9,62 %	65.000.000	9,62 %	65.000.000	9,62 %	65.000.000	9,62 %	275.125.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100 %	100 %	1.644.810.978	100 %	3.301.235.389	100 %	2.184.296.478	100 %	813.881.783	100 %	889.524.439	100 %	952.134.439	100 %	9.785.883.506	DPMD
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	100 %	588.500.000	100 %	249.812.070	100 %	122.247.400	100 %	434.200.000	100 %	434.200.000	100 %	504.000.000	100 %	2.332.959.470	DPMD
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	49.824.992	100 %	28.000.000	100 %	45.628.000	100 %	115.250.000	100 %	100.250.000	100 %	100.250.000	100 %	439.202.992	DPMD
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	100 %	100 %	3.300.000			100 %	1.610.000	100 %	1.610.000	100 %	1.610.000	100 %	1.610.000	100 %	9.740.000	DPMD
				Program Peningkatan	Persentase peningkatan	58 %	65 %	175.00	65 %	166.000	65 %	71.600.0	65 %	131.570.	65 %	105.195.	65 %	121.005.	65 %	770.371.	DPMD



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Kapasitas Sumber Daya Aparatur	kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi			0.000				00		256		000		875		131	
				Program Pengadaan Tanah	Persentase aset pemerintah daerah yang disertifikasikan	N A				100 %		10.620.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	55.620.000	DPMD
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase desa dengan batas administratif yang definitif	2 %				6 %		-	100 %	200.000.000	100 %	100.000.000	100 %	200.000.000	100 %	500.000.000	DPMD
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		97 %	445.914.596	99 %	505.702.609	85 %	648.367.255	85 %	565.909.755	85 %	640.476.175	85 %	640.476.175	85 %	3.446.846.565	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		99 %	451.360.271	98 %	1.000.312.462	80 %	614.409.305	80 %	124.220.000	85 %	628.984.780	85 %	645.900.000	85 %	3.465.186.818	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur		99 %	18.871.272	98 %	14.700.000	80 %	136.434.000	- %	-	85 %	20.900.000	85 %	30.900.000	85 %	221.805.272	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi		- %	-	- %	-	- %	-	- %	-	75 %	50.000.000	75 %	50.000.000	75 %	100.000.000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya		99 %	16.400.000	100 %	25.000.000	80 %	10.000.000	80 %	5.000.000	80 %	26.250.000	80 %	26.250.000	80 %	108.900.000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan



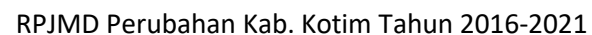
RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						aparatur yang terpenuhi																
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi		- %	-	- %	-	- %	-	-	75 %	35.000.000	75 %	35.000.000	75 %	70.000.000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	
					Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP		- %	-	99 %	26.830.350	80 %	26.890.605	80 %	26.890.695	85 %	45.000.000	85 %	55.000.000	85 %	180.611.650	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
					Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kegiatan pemerintahan dan masyarakat an yang dilaksanakan		99 %	50.776.846	97 %	498.413.464	80 %	518.961.000	80 %	540.934.250	85 %	287.820.000	85 %	387.820.000	85 %	2.284.725.560	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
					Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani		- %	-	- %	-	- %	-	-	75 %	3.600.000	75 %	3.600.000	75 %	7.200.000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	
					Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur		100 %	414.000.000	- %	-	- %	-	-	75 %	25.000.000	75 %	25.000.000	75 %	464.000.000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	
					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani		- %	-	99 %	3.075.000	80 %	3.100.000	- %	-	80 %	6.533.550	80 %	6.533.550	80 %	19.242.100	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui		- %	-	98 %	3.490.000	75 %	3.530.000	- %	-	80 %	5.453.600	80 %	5.453.600	80 %	17.927.200	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					RT/RW																	
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik			%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	Kecamata n Mentaya Hilir Selatan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	75 %		97,84%	437.05 6.188	95.11%	496.785 .405	100%		100%	589.152. 070	75%	547.826. 421	75%	571.312. 063	90%	3.228.38 4.217	Kecamata n Teluk Sampit
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	75 %		99%	603.58 1.677	95.35%	478.150 .503	100% %		100%	900.832. 800	75%	398.100. 000	75%	403.100. 000	85%	2.949.62 5.260	Kecamata n Teluk Sampit
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	75 %		0%	-	99.71%	8.475.0 00	100% %		100%	12.750.0 00	75%	25.000.0 00	75%	28.000.0 00	75%	86.975.0 00	Kecamata n Teluk Sampit
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi			0%	-	0%	-	0%		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamata n Teluk Sampit
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	75 %		95.59%	13.000. 000	92.86 %	32.500. 000	100% %		100%	82.500.0 00	75%	41.000.0 00	75%	35.000.0 00	75%	286.500. 000	Kecamata n Teluk Sampit
				Program peningkatan pengembangan	Persentase pelaporan capaian	75 %		0%	-	0%	-	0%		0%	-	75%	8.769.35 4	75%	14.775.8 86	75%	23.545.2 40	Kecamata n Teluk Sampit

BAB VI



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Keagamaan	keagamaan yang terlaksana dengan baik																
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	NA	98,69 %	409.188.345	99,58 %	569.545.725	100 %	680.109.500	100 %	786.605.760	100 %	418.941.950	100 %	419.211.650	100 %	3.283.602.930	Kecamatan Pulau Hanaut
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	NA	99,43 %	308.244.280	98,08 %	452.984.555	100 %	892.158.700	100 %	1.014.991.240	100 %	431.040.000	100 %	441.040.000	100 %	3.540.458.775	Kecamatan Pulau Hanaut
					Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	NA	100 %	7.700.000	- -	0	100 %	7.600.000	- -	-	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	45.300.000	Kecamatan Pulau Hanaut
					Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi	NA	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	Kecamatan Pulau Hanaut
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	NA	94,57 %	37.448.000	100 %	32.000.000	100 %	40.000.000	100 %	44.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	273.448.000	Kecamatan Pulau Hanaut
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA	- -	0	99,8 %	1.996.000	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	99,8 %	1.996.000	Kecamatan Pulau Hanaut
					Program Penataan Administrasi dan	Persentase jumlah	NA	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	Kecamatan Pulau



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Kependudukan	penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP																Hanaut
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	NA	100 %	56.050.000	97,67 %	432.150.000	100 %	442.614.000	100 %	594.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	1.644.814.000	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	NA	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA	- -	0	- -	0	100 %	86.731.400	100 %	4.730.000	- -	0	- -	0	100 %	91.461.400	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik	NA	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Pelayanan Administrasi	Persentase pelayanan	95,29 %	98,19 %	1.449.9	99,54 %	1.462.8	85,00 %	1.455.94	85,00 %	990.743.	85,00 %	130.539.	85,00 %	130.539.	85,00 %	130.539.	Kecamatan M. B.



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Perkantoran	administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan			87.470		27.850		0.490		340		070		070		070	Ketapang
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	88,9 % 7	99,35 %	31.874.400.343	96,26 %	2.368.430.480	85,00 %	3.877.548.210	85,00 %	78.956.000	85,00 %	616.380.280	85,00 %	645.172.280	85,00 %	645.172.280	Kecamatan M. B. Ketapang
					Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	99,9 % 9	100 %	76.472.000	99,01 %	83.950.000	85,00 %	307.456.500	85,00 %	36.000.000	85,00 %	170.000.000	85,00 %	170.000.000	85,00 %	170.000.000	Kecamatan M. B. Ketapang
					Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	Kecamatan M. B. Ketapang
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	90,1 % 0	96,57 %	132.007.285	91,43 %	70.000.000	85,00 %	45.000.000	85,00 %	126.000.000	85,00 %	129.840.000	85,00 %	129.840.000	85,00 %	129.840.000	Kecamatan M. B. Ketapang
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	Kecamatan M. B. Ketapang
					Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	99,1 % 3	100 %	134.151.390	100 %	134.151.750	85,00 %	149.151.750	85,00 %	134.151.750	85,00 %	135.121.400	85,00 %	135.121.400	85,00 %	135.121.400	Kecamatan M. B. Ketapang



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	97,70 %	99,60 %	725.841.081	97,48 %	1.862.563.420	85,00 %	2.315.290.150	85,00 %	1.095.730.054	85,00 %	1.059.860.000	85,00 %	1.059.860.000	85,00 %	1.059.860.000	Kecamatan M. B. Ketapang
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	Kecamatan M. B. Ketapang
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	0 ha	0 ha	-	0 ha	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	Kecamatan M. B. Ketapang
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	0 %	0 %	-	95,34 %	1.972.500	85,00 %	1.972.500	85,00 %	1.972.500	85,00 %	30.000.000	85,00 %	30.000.000	85,00 %	30.000.000	Kecamatan M. B. Ketapang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	Kecamatan M. B. Ketapang
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	Kecamatan M. B. Ketapang
1	20	17	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu		99,36%	417.166.320,00	98,32%	519.565.420,00	100%	681.021.160,00	100%	685.367.200,00	100%	507.753.950,00	100%	509.652.500,00	100%	3.320.526.550,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						yang sesuai kebutuhan																
1	20	17	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai			97,97%	847.492.695,00	95,58%	812.230.695,00	90%	581.474.695,00	90%	991.115.075,00	98%	408.000.000,00	99%	525.500.000,00	100%	4.165.813.160,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
1	20	17	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpras penunjang kedisiplinan aparatur			0%	0	0%	0	0%	72.778.000,00	0%	0	0%	44.000.000,00	0%	0	100%	116.778.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
1	20	17	04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi			0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	-	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
1	20	17	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi			97,37%	31.450.000,00	100%	33.735.000,00	100%	51.035.000,00	100%	44.110.000,00	100%	97.000.000,00	100%	94.000.000,00	100%	351.330.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
1	20	17	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi			0%	0	91,95%	1.245.000,00	100%	1.245.000,00	100%	2.240.000,00	100%	16.500.000,00	100%	17.000.000,00	100%	38.230.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
1	20	17	15	Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	51%		99,78%	80.672.085,00	99,78%	80.672.085,00	70%	26.890.695,00	70%	28.545.075,00	70%	75.000.000,00	75%	66.000.000,00	100%	357.779.940,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
1	20	17	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang	100%		99,54%	115.080.000,00	91,71%	198.480.000,00	95%	159.280.000,00	95%	180.260.000,00	98%	70.000.000,00	99%	105.000.000,00	100%	828.100.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						dilaksanakan																
1	20	17	17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani			0%	0	91,33%	3.000.000,00	95%	3.000.000,00	95%	4.200.000,00	100%	5.000.000,00	0%	0	100%	15.200.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
1	20	17	52	Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	ha		0 ha	0	0 ha	0	0 ha	0	0 ha	0	1 ha	92.000.000,00	1 ha	8.000.000,00	4 ha	100.000.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
1	20	17	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani			0%	0	98,11%	6.360.000,00	100%	3.510.000,00	95%	67.388.000,00	100%	5.700.000,00	100%	6.000.000,00	100%	88.958.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
1	20	17	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW			0%	0	99,09%	3.300.000,00	100%	1.560.000,00	100%	6.450.000,00	100%	20.000.000,00	100%	21.000.000,00	100%	52.310.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
1	20	17	33	Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik			0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	97%	8.000.000,00	98%	9.000.000,00	100%	17.000.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	0 %		80 %	714.324.135	80 %	794.914.400	80 %	818.665.400	80 %	779.478.800	80 %	867.000.000	80 %	888.000.000	80 %	4.862.382.735	Kecamatan Kota Besi
				Program peningkatan sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana	0 %		80 %	323.295.345	80 %	582.184.600	80 %	323.261.400	20 %	54.826.000	80 %	214.235.950	40 %	133.704.250	63 %	1.631.507.545	Kecamatan Kota Besi



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					aparatur	aparatur yang memadai																
					Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	0 %	80 %	21.945.000	80 %	21.000.000	80 %	28.600.000	40 %	7.600.000	80 %	30.000.000	80 %	32.000.000	73 %	141.145.000	Kecamatan Kota Besi
					Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi													-	-	Kecamatan Kota Besi	
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	0 %	60 %	98.335.000	90 %	183.040.000	80 %	135.390.000	30 %	51.100.000	60 %	130.000.000	85 %	145.000.000	68 %	742.865.000	Kecamatan Kota Besi
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	0 %	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	Kecamatan Kota Besi
					Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	0 %	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	Kecamatan Kota Besi
					Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	0 %	70 %	199.504.520	70 %	552.522.000	80 %	807.118.000	30 %	437.245.000	50 %	570.000.000	55 %	610.000.000	59 %	3.176.389.520	Kecamatan Kota Besi
					Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	0 %	%	-	%	-	%	-	70 %	1.800.000	80 %	5.000.000	90 %	8.000.000	80 %	14.800.000	Kecamatan Kota Besi



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab				
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	0 Ha	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Kecamata n Kota Besi		
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	0 %	%	-	70 %	1.280.000	90 %	77.924.000	%	-	%	-	%	-	80 %	79.204.000	Kecamata n Kota Besi		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	0 %	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	Kecamata n Kota Besi		
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik	0 %	%		%		%	-	%	-	%		%		%	-	Kecamata n Kota Besi		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	NA %	%	99	%	568.752.192	89 %	660.846.021	75 %	698.429.364	75 %	638.222.464	75 %	1.081.987.109	75 %	1.135.861.464	81 %	4.784.098.614	Kecamata n Baamang
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	NA %	%	98	%	1.332.930.443	97 %	2.225.655.974	75 %	2.067.153.561	75 %	198.334.786	75 %	1.419.544.825	75 %	1.315.469.196	75 %	8.559.088.784	Kecamata n Baamang
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang	NA %	%	100	%	58.005.250	100 %	33.332.500	75 %	41.100.000	75 %	33.500.000	75 %	144.146.886	100 %	189.642.677	87 %	499.727.314	Kecamata n Baamang



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/ Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						kedisiplinan aparatur																
					Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi	NA %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamata n Baamang	
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	NA %	100 %	168.66 8.540	92 %	115.500 .000	75 %	100.000. 000	75 %	100.000. 000	75 %	282.660. 190	75 %	296.793. 200	75 %	1.063.62 1.930	Kecamata n Baamang
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA %	-	-	73 %	16.413. 691	100 %	21.407.6 00	100 %	22.150.0 00	100 %	7.500.00 0	100 %	7.500.00 0	95 %	74.971.2 91	Kecamata n Baamang
					Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e- KTP	70 %	99 %	115.26 4.104	100 %	107.321 .400	90 %	107.321. 400	-	-	95 %	140.885. 372	96 %	147.929. 640	96 %	618.721. 916	Kecamata n Baamang
					Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	75 %	97 %	600.37 9.566	84 %	1.110.6 43.914	75 %	1.196.83 9.800	75 %	1.241.91 4.800	75 %	808.305. 219	75 %	816.220. 480	75 %	5.774.30 3.778	Kecamata n Baamang
					Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA %	-	-	-	-	75 %	2.750.00 0	75 %	5.500.00 0	75 %	8.000.00 0	75 %	8.000.00 0	75 %	24.250.0 00	Kecamata n Baamang
					Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	100 %	-	-	17 %	3.877.1 70	-	-	-	-	-	-	-	-	17 %	3.877.17 0	Kecamata n Baamang



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA	-	-	99 %	3.075.000	80 %	3.100.000	NA %	NA	80 %	6.533.550	80 %	6.533.550	80 %	19.242.100	Kecamatan Baamang
					Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA	-	-	98 %	3.490.000	75 %	3.530.000	NA %	NA	80 %	5.453.600	80 %	5.453.600	80 %	17.927.200	Kecamatan Baamang
					Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik	NA %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Baamang
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	78 %	80 %	740.979.019	82 %	792.095.485	85 %	795.106.128	88 %	685.294.128	90 %	738.110.860	98 %	716.409.760	100 %	4.467.995.380	Kecamatan Parenggean
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	60 %	68 %	169.806.500	78 %	346.780.000	80 %	472.690.000	86 %	71.502.000	89 %	293.175.000	98 %	247.303.900	100 %	1.601.257.400	Kecamatan Parenggean
					Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	75 %	78 %	34.800.000	80 %	24.272.730	85 %	45.000.000		-	90 %	24.650.000	95 %	37.500.000	100 %	166.222.730	Kecamatan Parenggean
					Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS														-	Kecamatan Parenggean	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						yang terpenuhi																
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	88 %	99.86 %	52.284.113	87 %	67.334.800	83 %	70.000.000	90 %	42.900.000	85 %	75.000.000	90 %	117.650.000	100 %	425.168.913	Kecamatan Parenggean
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA		-		-		-		-	100 %	14.425.000	100 %	16.750.000	100 %	31.175.000	Kecamatan Parenggean
					Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	63 %	63 %	53.660.676	74.95 %	53.660.700	78.5 %	53.781.222	83 %	53.781.222	87 %	53.580.240	90 %	53.580.240	100 %	322.044.300	Kecamatan Parenggean
					Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	85 %	80 %	354.606.014	88 %	367.441.050	90 %	317.041.050	95 %	297.991.050	95 %	210.000.000	98 %	208.000.000	100 %	1.755.079.164	Kecamatan Parenggean
					Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA								-	80 %	17.500.000	95 %	15.000.000	100 %	32.500.000	Kecamatan Parenggean
					Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	79.505 ha		-		-		-		-				-	0 %	-	Kecamatan Parenggean
					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA		-		-		-		-	85 %	11.575.000	90 %	17.500.000	100 %	29.075.000	Kecamatan Parenggean



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA					75 %	107.805.000	80 %	-	85 %	17.850.000	95 %	21.500.000	100 %	147.155.000	Kecamatan Parenggean
					Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik									-						-	Kecamatan Parenggean
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	75 %	98,03	707.888.150	97,26 %	706.321.128	75 %	615.016.355	75 %	570.449.305	75 %	555.118.200	75 %	560.377.600	100 %	3.715.170.738	Kecamatan Mentaya Hulu
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	75 %	99,66	311.377.900	90,21 %	409.361.000	75 %	462.367.200	75 %	426.350.000	75 %	521.500.000	75 %	526.000.000	100	2.656.956.100	Kecamatan Mentaya Hulu
					Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpras penunjang kedisiplinan aparatur	NA	100 %	17.400.000	100 %	8.500.000	75 %	7.600.000	75	11.000.000	75 %	28.400.000	75 %	28.400.000	100	101.300.000	Kecamatan Mentaya Hulu
					Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mentaya Hulu
					Program peningkatan kapasitas sumber	Persentase peningkatan kapasitas	75 %	99,9	80.631.000	93	93.892.900	75	92.650.000	75	50.000.000	75	129.500.000	75	129.500.000	100	576.173.900	Kecamatan Mentaya Hulu



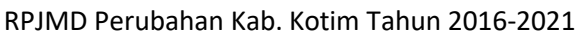
RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				daya aparatur	sumberdaya aparatur yang terpenuhi																
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA	-	-	-	-	-	-	-	75 %	19.500.000	75 %	19.500.000	75 %	39.000.000	Kecamatan Mentaya Hulu	
				Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	75 %	-	-	-	-	-	-	-	75 %	8.000.000	75 %	9.000.000	100 %	17.000.000	Kecamatan Mentaya Hulu	
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	75 %	100 %	39.750.000	79 %	279.201.350	75 %	348.028.445	75 %	347.932.695	75 %	160.000.000	75 %	162.500.000	100 %	1.337.412.490	Kecamatan Mentaya Hulu
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mentaya Hulu	
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mentaya Hulu	
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA	-	-	-	-	75 %	132.979.000	-	-	-	-	-	75 %	132.979.000	Kecamatan Mentaya Hulu	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mentaya Hulu	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					melalui RT/RW																
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamata n Mentaya Hulu	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	93 %	99 %	557.67 9.445	100 %	794.367 .475	100 %	769.913. 725	100 %	782.027. 600	100 %	535.136. 500	100 %	540.962. 850	100 %	3.980.08 7.595	Kecamata n Bukit Santuai
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	95 %	100 %	149.18 6.063	98 %	190.490 .000	100 %	114.994. 875	100 %	576.300. 000	100 %	323.664. 000	100 %	332.164. 000	100 %	1.686.79 8.938	Kecamata n Bukit Santuai
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	25.200. 000	100 %	7.700.0 00	100 %	17.400.0 00	100 %	22.450.0 00	100 %	26.200.0 00	100 %	23.000.0 00	100 %	121.950. 000	Kecamata n Bukit Santuai
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi	%						-		-					-	Kecamata n Bukit Santuai	
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	29 %	90 %	35.350. 000	76 %	39.500. 000	80 %	33.000.0 00	100 %	50.000.0 00	100 %	72.000.0 00	100 %	72.000.0 00	100 %	301.850. 000	Kecamata n Bukit Santuai
				Program peningkatan pengembangan	Persentase pelaporan capaian	100 %	100 %	1.000.0 00	100 %	-	100 %	-	100 %	1.080.00 0	100 %	6.000.00 0	100 %	6.000.00 0	100 %	14.080.0 00	Kecamata n Bukit Santuai

BAB VI



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Keagamaan	keagamaan yang terlaksana dengan baik																
4	01	22	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	93 %	94 %	484.140.677	99 %	735.088.308	70 %	520.249.683	100 %	546.502.400	100 %	6.557.712.600	100 %	665.748.300	100 %	9.509.441.968	Kecamatan Telaga Antang
4	01	22	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	95 %	89 %	64.282.324	87 %	479.571.912	99 %	1.047.065.000	100 %	1.225.194.000	100 %	287.225.000	100 %	235.420.000	100 %	3.338.758.236	Kecamatan Telaga Antang
4	01	22	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpras penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	9.702.000	-	-	99 %	91.545.455	-	-	100 %	41.500.000	100 %	32.400.000	100 %	175.147.455	Kecamatan Telaga Antang
4	01	22		Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi			-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	Kecamatan Telaga Antang	
4	01	22	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	29 %	93 %	42.713.396	87 %	61.000.000	77 %	46.000.000	100 %	15.000.000	100 %	65.500.000	100 %	115.150.000	100 %	345.363.396	Kecamatan Telaga Antang
4	01	22	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	100 %	-	-	100 %	5.238.200	0 %	-	-	-	100 %	14.425.000	100 %	16.750.000	100 %	36.413.200	Kecamatan Telaga Antang
4	01	22		Program Penataan Administrasi dan	Persentase jumlah		-	-	-	-	50 %	5.400.00	100 %	53.700.0	-	-	-	-	100 %	59.100.0	Kecamatan Telaga



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Kependudukan	penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP						0			00						00	Antang
4	0	1	22	16	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	100 %	98 %		92 %	153.500.000	17 %	91.975.000	100 %	216.740.000	100 %	163.000.000	100 %	168.500.000	100 %	800.264.000	Kecamatan Telaga Antang
4	0	1	22	17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	17.500.000	100 %	15.000.000	100 %	32.500.000	Kecamatan Telaga Antang
4	0	1	22		Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	NA	-	-	8.892 M2	113.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.892 M2	113.000.000	Kecamatan Telaga Antang
4	0	1	22	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA	-	-	20 %	2.250.000	-	-	-	-	100 %	11.375.000	100 %	17.500.000	100 %	31.125.000	Kecamatan Telaga Antang
4	0	1	22	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA	-	-	98 %	11.000.000	100 %	5.000.000	-	-	100 %	17.850.000	100 %	15.000.000	100 %	48.850.000	Kecamatan Telaga Antang
4	0	1	22		Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik	NA	99 %	763.479.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 %	763.479.100	Kecamatan Telaga Antang
4	0	1	22	01	Program Pelayanan Administrasi	Persentase pelayanan	93 %	99 %		100 %	548.440	100 %	603.284.	100 %	603.284.	100 %	603.284.	100 %	603.284.	100 %	3.510.02	Kecamatan Antang



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Perkantoran	administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan			0.838		.838		922		922		922		922		1.364	Kalang
4	0	1	22	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	95 %	100 %	479.571.912	96 %	479.571.912	100 %	418.826.328	100 %	427.330.500	100 %	427.330.500	100 %	427.330.500	100 %	2.659.961.652	Kecamata n Antang Kalang
4	0	1	22	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	7.500.000	100 %	22.500.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	90.000.000	Kecamata n Antang Kalang
4	0	1	22		Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi							-		-					-	Kecamata n Antang Kalang	
4	0	1	22	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	29 %	90 %	35.350.000	86 %	145.000.000	80 %	145.000.000	100 %	145.000.000	100 %	145.000.000	100 %	145.000.000	100 %	760.350.000	Kecamata n Antang Kalang
4	0	1	22	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	100 %	0 %	-	100 %	9.500.000	100 %	9.500.000	100 %	9.500.000	100 %	12.500.000	100 %	15.500.000	100 %	56.500.000	Kecamata n Antang Kalang
4	0	1	22		Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	NA	100 %	53.660.676	100 %	53.700.000	100 %	53.700.000	100 %	53.700.000	100 %	53.700.000	100 %	53.700.000	100 %	322.160.676	Kecamata n Antang Kalang



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	01	22	16	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	100 %	100 %	43.640.000	100 %	56.140.000	100 %	56.640.000	100 %	56.640.000	100 %	58.640.000	100 %	60.640.000	100 %	332.340.000	Kecamatan Antang Kalang
4	01	22	17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA	-	-	100 %	20.000.000	100 %	22.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	117.000.000	Kecamatan Antang Kalang
4	01	22		Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	NA			8.892 M2	57.474.525		-		-				8.892 M2	57.474.525	Kecamatan Antang Kalang	
4	01	22	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA	-	-	-	-		-		-		-		-	-	Kecamatan Antang Kalang	
4	01	22	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA	-	-	-	-		-		-		-		-	-	Kecamatan Antang Kalang	
4	01	22		Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik	NA	-	-	-	-		-		-					-	Kecamatan Antang Kalang	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu	89,2 %	97,87 %	541.785.586	99,41 %	705.883.781	90 %	648.782.824	95 %	718.271.156	100 %	683.133.000	100 %	700.135.000	100 %	3.997.991.347	Kecamatan Cempaga Hulu



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						yang sesuai kebutuhan																
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	NA	99,89 %	53.397.403	99,59 %	165.150.114	90 %	133.372.000	95 %	101.577.668	100 %	121.000.000	100 %	154.000.000	100 %	728.497.185	Kecamatan Cempaga Hulu
					Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpras penunjang kedisiplinan aparatur	97,71 %	- -		- -		95 %	7.600.000	100 %	7.600.000	100 %	20.000.000	- -		100 %	35.200.000	Kecamatan Cempaga Hulu
					Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi	NA	- -		- -		- -		- -		- -		- -		- -	-	Kecamatan Cempaga Hulu
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	55,63 %	79,42 %	43.673.000	88,28 %	104.586.400	90 %	84.100.000	95 %	105.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	437.359.400	Kecamatan Cempaga Hulu
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA	- -		100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100 %	8.500.000	100 %	8.500.000	100 %	8.500.000	100 %	41.500.000	Kecamatan Cempaga Hulu
					Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	100 %	- -		99,78 %	26.830.350	85 %	28.262.624	90 %	27.000.000	80 %	25.924.100	80 %	27.000.000	80 %	135.017.074	Kecamatan Cempaga Hulu
					Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang	85,34 %	- -		100 %	131.720.000	85 %	166.450.000	90 %	100.000.000	75 %	80.000.000	75 %	80.000.000	75 %	558.170.000	Kecamatan Cempaga Hulu



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						dilaksanakan																
					Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	Kecamatan Cempaga Hulu
					Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Cempaga Hulu
					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA	-	-	-	-	95 %	103.334.000	100 %	85.400.000	-	-	85 %	10.000.000	85 %	198.734.000	Kecamatan Cempaga Hulu
					Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA	-	-	-	-	-	-	85 %	3.479.950	85 %	10.000.000	85 %	5.184.300	85 %	18.664.250	Kecamatan Cempaga Hulu
					Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Cempaga Hulu
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	NA	85 %	500.636.200	85 %	558.115.200	85 %	584.922.875	85 %	608.300.000	85 %	643.246.788	85 %	670.600.000	85 %	3.565.821.063	Kecamatan Cempaga
					Program peningkatan sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana	95,54	85 %	259.959.800	85 %	632.180.800	85 %	560.637.275	85 %	457.770.920	85 %	415.520.332	85 %	451.363.270	85 %	2.777.432.397	Kecamatan Cempaga



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					aparatur	aparatur yang memadai																
					Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	NA	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	60.000.000	100 %	64.000.000	100 %	68.000.000	100 %	342.000.000	Kecamatan Cempaga
					Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi															Kecamatan Cempaga	
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	NA	100 %	132.500.000	100 %	130.000.000	100 %	120.000.000	100 %	130.000.000	100 %	130.000.000	100 %	140.000.000	100 %	782.500.000	Kecamatan Cempaga
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi															Kecamatan Cempaga	
					Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP															Kecamatan Cempaga	
					Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	NA	80 %	42.200.000	80 %	46.000.000	80 %	77.300.000	80 %	104.900.000	80 %	111.200.000	80 %	35.000.000	80 %	416.600.000	Kecamatan Cempaga
					Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA		-		-		-	75 %	8.000.000	75 %	8.000.000	75 %	8.000.000	75 %	24.000.000	Kecamatan Cempaga



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur															Kecamatan Cempaga	
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA		-		-		-	75 %	8.000.000	75 %	8.000.000	75 %	8.000.000	75 %	24.000.000	Kecamatan Cempaga
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA		-		-		-	75 %	46.635.280	75 %	46.635.280	75 %	46.635.280	75 %	139.905.840	Kecamatan Cempaga
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik															Kecamatan Cempaga	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	82,3 % 5	90, % 52	519.243.799	82,3 %	524.810.406	88,81 %	590.482.916	88,8 %	616.945.866	88,8 %	617.445.866	88,8 %	612.352.193	88,8 %	3.481.281.046	Kecamatan Seranau
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	95,8 % 2	38, % 26	162.857.798	88,4 %	667.855.000	74 %	329.283.564	71,5 %	506.834.454	71,5 %	448.833.909	71,5 %	402.890.350	71,5 %	2.518.555.075	Kecamatan Seranau
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang	100 %	%	-	100 %	25.000.000	100 %	102.024.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	217.024.000	Kecamatan Seranau



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						kedisiplinan aparatur																
					Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi															Kecamata n Seranau	
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	99,5 % 9	99,99 %	96.991.900	82,7 %	66.150.000	90 %	101.000.000	85 %	110.000.000	85 %	110.000.000	85 %	110.000.000	87,95 %	594.141.800	Kecamata n Seranau
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi			-		-		-		-		-		-		Kecamata n Seranau	
					Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP															Kecamata n Seranau	
					Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	99,5 % 9		-	88,2 %	281.360.773	90 %	390.038.320	90 %	160.500.000	90 %	160.500.000	90 %	170.000.000	90,67 %	1.162.399.093	Kecamata n Seranau
					Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani															Kecamata n Seranau	
					Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur															Kecamata n Seranau	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani															Kecamata n Seranau	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW			-		-	%		%		%		%		%	Kecamata n Seranau	
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik															Kecamata n Seranau	
				Program Kerjasama dengan Mas Media	Persentase kegiatan yang dipublikasikan melalui media masa	100 %			100 %	10.000.000								100 %	10.000.000	Kecamata n Seranau	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	91,05 %	91,30 %	413.557.840	99,2940303 %	527.030.580	75 %	518.599.001	75 %	573.706.210	75 %	594.672.935	75 %	626.191.536	100 %	3.253.758.102	Kecamata n Telawang
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	91,56 %	80,52 %	59.865.000	98,12 %	442.251.866	75 %	572.310.300	75 %	261.424.000	75 %	313.092.915	75 %	282.324.514	100 %	1.931.268.595	Kecamata n Telawang
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan	89,78 %	99,50 %	5.920.000			75 %	90.606.000	75 %	15.000.000	75 %	20.771.875	75 %	20.771.875	100 %	153.069.750	Kecamata n Telawang



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					aparatur																	
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi														-	Kecamata n Telawang		
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	52,5 % 7			100 %	13.500.000	75 %	36.000.000	75 %	40.000.000	75 %	40.200.000	75 %	41.700.000	100 %	171.400.000	Kecamata n Telawang	
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi														-	Kecamata n Telawang		
				Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	100 %	99,78 %	49.644.048	100 %	53.660.700	75 %	53.781.390	75 %	53.781.390	75 %	58.644.360	75 %	61.644.360	100 %	331.156.248	Kecamata n Telawang	
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	NA			75 %	22.000.000	75 %	23.500.000	75 %	25.000.000	75 %	30.000.000	75 %	35.000.000	75 %	135.500.000	Kecamata n Telawang	
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA							100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	30.000.000	Kecamata n Telawang	
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur																Kecamata n Telawang	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA							100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	30.000.000	Kecamatan Telawang
					Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA							75 %	20.000.000	75 %	20.000.000	75 %	20.000.000	75 %	60.000.000	Kecamatan Telawang
					Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik	90,49 %	100 %	22.000.000	79,39 %	76.250.000	75 %	165.800.000	75 %	76.250.000	75 %	26.500.000	75 %	28.000.000	100 %	394.800.000	Kecamatan Telawang
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	NA	75 %	554.625.000	85 %	457.800.000	85 %	534.703.000	100 %	554.256.000	100 %	570.809.000	100 %	590.362.000	100 %	3.262.555.000	Kecamatan Tualan Hulu
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	NA	85 %	112.725.000	85 %	495.000.000	85 %	378.500.000	0,85	312.000.000	0,85	248.000.000	0,85	248.000.000	100 %	1.794.225.000	Kecamatan Tualan Hulu
					Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	NA	100 %	12.000.000	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	98.000.000	Kecamatan Tualan Hulu
					Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS															Kecamatan Tualan Hulu	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						yang terpenuhi																
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	NA	100 %	81.800.000	100 %	70.000.000	100 %	77.000.000	100 %	140.000.000	100 %	150.000.000	100 %	143.000.000	100 %	661.800.000	Kecamatan Tualan Hulu
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA		-		-		-	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	15.000.000	Kecamatan Tualan Hulu	
					Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP															Kecamatan Tualan Hulu	
					Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	NA	70 %	40.000.000	70 %	101.500.000	80 %	56.650.000	90 %	76.650.000	100 %	76.650.000	100 %	76.650.000	100 %	428.100.000	Kecamatan Tualan Hulu
					Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA		-		-	70 %	25.000.000	80 %	25.000.000	90 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	100.000.000	Kecamatan Tualan Hulu
					Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur															Kecamatan Tualan Hulu	
					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani															Kecamatan Tualan Hulu	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA		-		-	100 %	22.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	97.000.000	Kecamatan Tualan Hulu
					Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik															Kecamatan Tualan Hulu	
02	01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	75 %	78,55	2.219.313.770	82,4 %	2.694.936.842	85 %	4.104.025.000	85 %	4.329.500.000	85 %	4.969.505.000	85 %	5.213.560.000	85 %	23.530.840.612	Dinas Kesehatan
02	01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan jumlah tenaga kesehatan	65 %	42,86	447.015.650	70 %	1.082.021.325	75 %	3.953.000.000	75 %	3.447.000.000	80 %	3.705.000.000	85 %	2.172.000.000	85 %	14.806.036.975	Dinas Kesehatan
02	01	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpras penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	53.218.000	100 %	24.937.000	100 %	190.000.000	100 %	196.250.000	100 %	196.250.000	100 %	199.375.000	100 %	860.030.000	Dinas Kesehatan
02	01	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi		-	-		-	100 %	400.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	1.300.000.000	Dinas Kesehatan
1	5	3	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi	100 %	100 %	1.881.135.748	100%	1.887.671.620	100%	1.850.138.508	100%	1.532.618.420	100%	1.828.936.080	100%	1.730.895.748	100%	10.711.396.124	BPBD



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan																
1	5	3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	33 %	3.272.749.541	85%	1.045.175.200	419.181.972	100%	1.256.738.160	100%	872.220.670	100%	437.082.572	100%	7.303.148.115	BPBD		
1	5	3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasaranan penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	155.200.000	100%	28.175.000	63.900.000	100%	69.750.000	100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	507.025.000	BPBD		
1	5	3	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	100 %	100 %	340.390.000	75%	150.000.000	67.500.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	1.057.890.000	BPBD		
1	5	3	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	0%	0%	-	0%	-	-	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	65.000.000	BPBD		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100 %			94 %	1.239.990.083	1.543.132.113	100 %	1.697.445.324	100 %	1.867.189.856	100 %	2.053.908.842	100 %	1.926.168.463	DINSOS		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang	89 %			85 %	317.847.234	445.185.300	86 %	550.089.006	92 %	513.090.786	95 %	517.252.175	98 %	2.755.245.334	DINSOS		



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung ng Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					memadai																	
				Program Peningkatan Disiplin Apratur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	89 %		82 %	17.100.000	86 %	27.387.500	89 %	27.935.250	92 %	28.493.955	95 %	28.785.267	98 %	194.576.972	DINSOS		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	100 %		96 %	63.956.448	100 %	59.690.400	100 %	60.884.208	100 %	62.101.892	100 %	63343930	100 %	433.830.430	DINSOS		
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	100 %	-	-	-	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.400.000	5 Dokumen	20.808.000	5 Dokumen	21.224.160	5 Dokumen	82.432.160	DINSOS		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	108.580.000	100%	56.250.000	100%	63.300.000	100%	65.832.000		68.832.000		71.585.280		70.585.280	Dinas Pendidikan	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	100 %	100 %	5.000.000	84,94 %	50.000.000	100%	112.320.000	100%	112.320.000	100%	115.320.000	100%	119.812.800	100%	120.812.800	Dinas Pendidikan	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	99,75%	99,77 %	53.289.150	99,20 %	53.282.150	100%	53.289.150	100%	55.420.716	100%	60.420.716	100%	62.837.544	100%	64.837.544	Dinas Pendidikan	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia	88,25%	88,28 %	5.291.970.630	90,81 %	5.341.190.570	100%	5.281.696.170	100%	5.492.964.017	100%	5.592.964.017	100%	5.816.682.577	100%	5.916.682.577	Dinas Pendidikan	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan																
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	98,6 9%	98, 71 %	2.258.8 62.030	84,49 %	1.554.5 06.230	100%	2.418.20 0.840	100%	2.514.92 8.874	100%	2.614.92 8.874	100%	2.719.52 6.028	100%	2.919.52 6.028	Dinas Pendidikan
1	0 5	04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100%	NA	NA	NA	539.309 .282,00	100%	623.632. 606,00	100%	817.992. 374,00	100%	849.201. 587,00	100%	865.447. 874,00	100%	865.447. 874,00	DPKP
1	0 5	04	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	NA	NA	93,27 %	414.366 .938,08	100%	1.379.92 3.444,00	70%	218.541. 286,00	70%	218.541. 286,00	70%	218.541. 286,00	70%	218.541. 286,00	DPKP
1	0 5	04	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpras penunjang kedisiplinan aparatur	80%	NA	NA	99,31 %	84.000. 000,00	100%	159.994. 200,00	100%	295.000. 000,00	100%	295.000. 000,00	100%	295.000. 000,00	100%	295.000. 000,00	DPKP
1	0 5	04	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	100%	NA	NA	92,25 %	63.100. 000,00	100%	113.468. 300,00	100%	125.000. 000,00	100%	125.000. 000,00	100%	125.000. 000,00	100%	125.000. 000,00	DPKP
				Misi 4: Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya																	
				Tujuan 4.1: Peningkatan perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	7,62 %	7,9 3 %		7,99 %		7,82 %		7,88 %		7,95 %		8,11 %		8,11 %		
				Sasaran 4.1.1: Meningkatnya	Persentase pertumbuhan	NA	NA		6,90 %		6,06 %		6,41 %		6,98 %		7,31 %		7,31 %		



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan																
						Persentase pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	NA	NA		11,19 %		8,80 %		9,12 %		9,40 %		9,78 %		9,78 %		
						Persentase pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	NA	NA		8,70 %		8,07 %		8,33 %		8,61 %		8,90 %		8,90 %		
3	06	01	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase Peningkatan Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kab. Kotim	N/A	100 %	490.760.000	99,94	473.005.000	80%	642.735.000	80%	607.100.000	80%	-	80%	-	80%	2.213.600.000	Disperdagi n	
3	06	01	17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	N/A	100 %	31.855.000	100%	35.800.000	80%	55.400.000	80%	129.080.000	80%	-	80%	-	80%	252.135.000	Disperdagi n	
3	06	01	20	Program Pengembangan Wilayah dan Akses Industri	Persentase Peningkatan Wilayah dan Akses Industri yang berkembang di Kab. Kotim	N/A	0%		0%		95%	18.810.300.000	95%	16.100.000.000	100%	-	100%	-	100%	34.910.300.000	Disperdagi n	
03	01	01	27	Program Pengembangan Usaha Tani	Persentase meningkatnya usaha produktif dan pendapatan petani/peternak	95 %	99,65 %	1.592.386.684	92,97 %	617.533.300	100 %	603.337.800	100 %	418.594.800	100 %	477.555.088	100 %	477.555.088	100 %	4.186.962.760	Dinas Pertanian	
3	01	29		Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Persentase peningkatan daya saing produk	100 %	100 %	-	100 %	228.175.000	100 %	240.000.000	100 %	240.000.000	100 %	240.000.000	100 %	240.000.000	100 %	1.188.175.000	Dinas Perikanan	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					perikanan																
3	01	25		Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Sentra Perikanan Terpadu	Persentase sarana prasarana kawasan Minapolitan dan Sentra Perikanan Terpadu yang dikelola	100 %	100 %	0	100 %	672.305.000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	3.072.305.000	Dinas Perikanan
3	01	31		Program Pengembangan dan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	Persentase peningkatan produksi komoditas ikan unggul	100 %	100 %	402.796.000	100 %	276.979.500	100 %	300.000.000	100 %	350.000.000	100 %	400.000.000	100 %	450.000.000	100 %	2.179.775.500	Dinas Perikanan
				Sasaran 4.1.2: Meningkatnya investasi di daerah	Rasio nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	NA	NA		68,96 %		23,78 %		23,78 %		24,97 %		24,97 %		24,97 %		
			15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMDN/PMA		5 PMDN / PMA	120.500.000	5 PMDN / PMA	254.500.000	5 PMDN / PMA	303.000.000	5 PMDN / PMA	352.000.000	5 PMDN / PMA	382.000.000	5 PMDN / PMA	382.000.000	30 PMDN / PMA	1.794.000.000	DPMPTSP
			16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi PMDN / PMA		Rp. 4,5 M	78.875.000	Rp. 4,5 M	78.875.000	Rp. 4,5 M	315.000.000	Rp. 4,5 M	130.000.000	Rp. 4,5 M	33.000.000	Rp. 4,5 M	500.000.000	Rp. 4,5 M	1.432.750.000	DPMPTSP
			17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Terlaksananya penyiapan potensi sarana dan prasaran		1 Kegiatan dan Perda	200.000.000	1 Kegiatan dan Perda	100.000.000	1 Kegiatan dan Perda	100.000.000	1 Kegiatan dan Perda	100.000.000	1 Kegiatan dan Perda	100.000.000	1 Kegiatan dan Perda	100.000.000	1 Kegiatan dan Perda	700.000.000	DPMPTSP
3	06	01	20	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase produk dan potensi yang dipromosikan (Disperdagin)	N/A	0%		0%		95%		95%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Disperdagi n
03	01	01	15	Program Peninokatan	Persentase Produk dan		0 %	-	0 0	-	100 %	30.000.0	100 %	30.000.0	100 %	40.000.0	100 %	40.000.0	100 %	140.000.	Dinas Pertanian



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Promosi dan Kerjasama Investasi	Potensi Pertanian yang di promosikan						00		00		00		00		000		
3	01	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase produk dan potensi perikanan yang dipromosikan	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	100 %	220.000.000	Dinas Perikanan
2.1 2.2 .05	01		15	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentasi Informasi Edukasi Tentang Lingkungan yang di Publikasikan	100 %	100 %	40.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	210.000.000	DLH
2.12	2.11.1	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Presentase Produk UMKM yang dipromosikan	NA	NA	NA	NA	NA	77,7 %	34.080.000	79 %	34.120.000	81 %	45.000.000	82 %	45.000.000	82 %	45.000.000	Dinas Koperasi - UKM
2	03	01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase informasi terkait pangan yang dipromosikan		-	-	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	170.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	16	01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Presentase sarana promosi	100,00%	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100 %	30.000.000	100,00%	30.000.000	100 %	30.000.000	100,00%	30.000.000	100 %	180.000.000	Disbudpar
4	04	05	14	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Prosentase informasi mengenai sistem dan prosedur tata kelola keuangan dan aset daerah	90%	90 %	39.885.000,00	90%	30.000.000,00	95%	30.000.000,00	97%	30.000.000,00	98%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	BPKAD
04	07	01	14	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase informasi pengelolaan pendapatan daerah yang dipublikasikan	98,2 %	100 %	30.000.000,00	95,89 %	28.768.000,00	90,00 %	30.000.000,00	100,0 %	30.000.000,00	100,00 %	30.000.000,00	100,00 %	30.000.000,00	100,0 %	30.000.000,00	Bappenda



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	2	6	01	15	Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	persentase produk arsip dan keputakaan yg dipromosikan	100%	100%	28.150.000	100%	28.440.000	100%	29.885.000	100%	29.870.000	100%	28.150.000	100%	28.150.000	100%	172.645.000	Dispustaka sip
2	1	3	1	14	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Prosentase Program/Kegiatan yang dipromosikan kepada Masyarakat	100%	100%	26.573.000	92,58%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	176.573.000	Dispora
1	0	3	01	15	Program Peningkatan Investasi Dan Promosi Daerah	Persentase informasi terkait pekerjaan umum dan tata ruang yang dipublikasikan		100%	30.000.000	100%	29.355.000	100%	31.650.000	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	36.300.000	100%	36.300.000	Dinas PUPR
					Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Persentase informasi terkait perhubungan yang dipublikasikan	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	37.258.804	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	Dinas Perhubungan
					Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Presentase Produk dan Potensi Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dipromosikan		100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	180.000.000	Disperkim
					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah	Presentase informasi terkait komunikasi dan informatika yang dipublikasikan		NA	-	71,97%	30.000.000	88,90%	30.000.000	16,66%	30.000.000	88,90%	30.000.000	88,90%	30.000.000	100%	150.000.000	Diskominfo
					Program Peningkatan	Persentase produk dan	100%	100%	24.540.000,00	100%	26.489.500,00	100%	27.151.738,00	100%	27.151.738,00	100%	27.151.738,00	100%	27.151.738,00	100%	159.636.452,00	Dinas Kependud



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Promosi dan Investasi Daerah	pelayanan yang dipromosikan																ukan dan Catatan Sipil
1	.16.	0.1.	.15,	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi	Persentase informasi terkait ketenagarkerjaan dan transmigrasi yang dipromosikan	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	180.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase informasi terkait wawasan berkebangsaan dan berpolitik yang dipromosikan	100 %	0 %	-	100 %	30.000.000	100 %	39.080.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	159.080.000	Badan Kesbangpol
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk dalam institusi DPRD yang diekspose	100 %	100 %	99.000.000,00	100 %	99.000.000,00	100 %	99.000.000,00	100 %	99.000.000,00	100 %	99.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	595.000.000,00	Sekretariat DPRD
05	08	01	14	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk terkait kepegawaian yang dipromosikan	100 %	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	BKD
				Program Peningkatan Promosi Dan Investasi Daerah	Persentase informasi terkait KORPRI yang dipublikasikan	100 %	0,95	20.442.000	100 %	29.842.000	100 %	29.842.000	100 %	29.842.000	100 %	29.842.000	100 %	29.842.000	100 %	169.652.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	Persentase kepesertaan dalam kegiatan promosi daerah	100 %	100 %	36.150.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	161.150.000	DPMD
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan		96 %	11.235.000	95 %	12.290.000	80 %	9.530.245	80 %	12.983.800	85 %	13.629.000	85 %	15.629.000	85 %	15.629.000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	75 %	99%	15.278.300	84.34%	7.590.909	100%	15.000.000	100%	15.000.000	75%	27.000.000	75%	29.000.000	85%	108.869.209	Kecamatan Teluk Sampit
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	NA	100 %	34.170.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	149.170.000	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	0 %	100 %	20.268.000	100 %	7.000.000	85,00 %	15.000.000	85,00 %	15.014.456	85,00 %	24.294.000	85,00 %	24.294.000	85,00 %	24.294.000	Kecamatan M. B. Ketapang
1	20	17	14	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	100 %	100 %	18.500.000,00	97,33 %	15.000.000,00	95 %	14.500.000,00	95 %	15.000.000,00	98 %	20.000.000,00	99 %	20.000.000,00	100 %	103.000.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	0 %	80 %	13.865.000	80 %	14.220.000	80 %	12.770.000	0 %	-	80 %	19.000.000	80 %	19.000.000	80 %	78.855.000	Kecamatan Kota Besi
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	100 %	100 %	22.700.000	100 %	15.000.000	100 %	15.500.000	100 %	18.750.000	100 %	40.377.960	100 %	42.396.858	100 %	154.724.818	Kecamatan Baamang
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	80 %	75 %	15.395.000	78 %	15.250.000	80 %	13.900.000	85 %	11.400.000	88 %	21.000.000	90 %	21.000.000	100 %	97.945.000	Kecamatan Parenggean
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	100 %	100 %	17.700.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	75 %	17.700.000	75 %	17.700.000	75 %	98.100.000	Kecamatan Mentaya Hulu
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	100 %	100 %	15.085.137	100 %	13.540.000	100 %	14.980.000	100 %	15.630.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	79.235.137	Kecamatan Bukit Santuai



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	01	22	15	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	100 %	99 %	18.498.000	83 %	13.180.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	21.000.000	100 %	21.000.000	100 %	103.678.000	Kecamatan Telaga Antang	
4	01	22	15	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	100 %	100 %	15.085.137	100 %	20.000.000	100 %	22.000.000	100 %	24.405.622	100 %	26.000.000	100 %	27.000.000	100 %	134.490.759	Kecamatan Antang Kalang	
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	99,41 %	92 %	13.700.000	96 %	14.400.000	100 %	11.227.802	95 %	11.227.802	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	90.555.604	Kecamatan Cempaga Hulu	
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	100 %	100 %	14.318.000	100 %	14.318.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	108.636.000	Kecamatan Cempaga	
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	99,93 %	100 %	20.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	110.000.000	Kecamatan Seranau	
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	63,64 %	100 %	12.000.000	100 %	15.000.000	100 %	13.670.909	75 %	15.000.000	75 %	21.395.715	75 %	22.395.715	100 %	99.462.339	Kecamatan Telawang	
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	NA	100 %	15.950.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	27.500.000	100 %	27.500.000	100 %	27.500.000	100 %	148.450.000	Kecamatan Tualan Hulu	
02	01	01	14	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase informasi terkait Kesehatan yg diekspose	100 %	100 %	27.500.000	100 %	23.081.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	150.581.000	Dinas Kesehatan	
1	5	3	7	Program Peningkata Promosi dan Investasi Daerah	Persentase edukasi Penanggulangan an Bencana yang di	0%	0%	-	0%	-	0%	-	100%	35.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	135.000.000	BPBD	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						informasikan																
					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase edukasi PMKS yang dipublikasikan	100 %	100 %		100 %	21.070.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	180.000.000	DINSOS
					Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase edukasi pendidikan yang diinformasikan / dipublikasikan	100 %	100 %	21.700.750	98,62 %	30.528.000	100%	30.000.000	100%	31.200.000	100%	33.200.000	100%	34.528.000	100%	35.528.000	Dinas Pendidikan
					Sasaran 4.1.3: Meningkatkan kualitas sektor pariwisata dan jasa	Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	NA	NA		1,34 %			1,31 %		1,34 %		1,39 %		1,41 %			
2	16	01	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Presentase tradisi budaya daerah yang dilaksanakan	99,21%	99,21%	884.598.750	97,15%	95%	1.314.740.000	95%	1.316.800.000	95%	240.000.000	95%	260.000.000	95%	280.000.000	95%	4.296.138.750	Disbudpar
2	16	01	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Presentasr group kesenian yang berkembang	95,64%	96,59%	808.598.750	96,98%	95%	467.669.820	95%	338.967.981	95%	299.972.150	95%	299.972.150	0%	-	95%	2.215.180.851	Disbudpar
2	16	01	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Presentase penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	98,72%	99,54%	999.262.000	99,21%	95%	1.159.557.000	95%	1.710.497.000	95%	999.262.000	95%	999.262.000	95%	999.262.000	95%	6.867.102.000	Disbudpar
3	02	01	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Presentase kunjungan wisatawan	93,68%	92,80%	1.012.196.000	97,26%	95%	581.664.000	95%	249.800.000	95%	585.000.000	95%	585.000.000	95%	585.000.000	95%	3.598.660.000	Disbudpar
3	02	01	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Presentase pengembangan kawasan pariwisata	99,37%	98,78%	831.987.807	63,14%	95%	4.820.598.085	95%	11.893.401.409	95%	164.337.807	95%	164.337.807	95%	163.337.807	95%	18.038.000.722	Disbudpar
3	02	01	17	Program Pengembangan Kemitraan	Presentase pengembangan kelembagaan pariwisata dan	95,66%	97,06%	194.096.000	0,00%	0%	-	0%		0%	-	0%	-	0%	-	0%	194.096.000	Disbudpar



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
						SDM pelaku usaha																	
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti		- %	-	- %	-	- %	-	-	75 %	4.000.000	80 %	6.000.000	80 %	6.000.000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan		
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	75 %	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	85%	-	-	Kecamatan Teluk Sampit		
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	NA	- -	0	100 %	10.000.000	100 %	5.000.000	100 %	- -	0	- -	0	100 %	20.000.000	Kecamatan Pulau Hanaut		
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	-	Kecamatan M. B. Ketapang		
1	20	17	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti		0 %	0	99,33 %	4.500.000,00	100 %	4.500.000,00	100 %	12.500.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	51.500.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara		
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	0 %	%	-	80 %	23.200.000	80 %	29.200.000	- %	-	80 %	30.000.000	80 %	32.000.000	80	114.400.000	Kecamatan Kota Besi	
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	100 %	%	100	12.000.000	100 %	20.000.000	100	17.500.000	100 %	17.500.000	100	28.940.625	100	30.387.656	100	126.328.281	Kecamatan Baamang
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	NA	-	-	25 %	16.740.000	40 %	20.250.000	50 %	7.750.000	75 %	21.785.000	80 %	21.000.000	100 %	87.525.000	Kecamatan Paringgean	
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mentaya Hulu	
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	NA	-	-	- -	-	100 %	7.480.000	100 %	30.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	77.480.000	Kecamatan Bukit Santuai		
4	01	22	06		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan	NA	-	-	-	-	100 %	13.000.000	-	-	100 %	21.785.000	100 %	25.750.000	60.535.000	Kecamatan Telaga Antang		



Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penangu ng Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					yang diikuti																
4	01	22	06	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	NA	-	-	100 %	10.000.000	100 %	13.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	68.000.000	Kecamatan Antang Kalang
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	NA	-	-	-	7.100.000	90 %	7.100.000	85 %	12.000.000	100 %	12.000.000	100 %	12.000.000	100 %	43.100.000	Kecamatan Cempaga Hulu
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti																Kecamatan Cempaga
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti				100 %	8.100.000	100 %	10.800.000	100 %	10.800.000	100 %	10.800.000	100 %	10.800.000	100 %	51.300.000	Kecamatan Seranau
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti															-	Kecamatan Telawang
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	NA		-		-	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	60.000.000	Kecamatan Tualan Hulu
Jumlah								1.540.102.862.809		1.512.906.458.534		1.421.443.468.000		1.433.180.277.000		1.451.336.893.000		1.468.934.183.000		8.827.904.142.343	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan mengenai seluruh program yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk mendukung 9 prioritas pembangunan daerah yang disertai dengan capaian indikator masing-masing program selama 5 tahun mendatang dan indikasi pendanaannya. Secara umum program masing-masing Perangkat Daerah dapat dipisahkan menjadi 2 kriteria sebagaimana yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana kriteria pertama adalah Program-program yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sebagai program penunjang operasional, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Untuk kriteria kedua adalah program-program operasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang diembannya dimana telah dijabarkan kedalam Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Indikator Kinerja yang dituangkan dalam RPJMD ini adalah indikator program dimana hal tersebut merupakan indikator outcome atau manfaat dari masing-masing program tersebut dalam jangka menengah.

Pagu indikatif yang direncanakan dalam RPJMD ini mencerminkan kemampuan keuangan secara minimalis, sehingga untuk membiayai program-program yang tidak mampu dibiayai dengan keuangan daerah diharapkan akan dapat didukung oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Untuk program-program yang belum mampu dibiayai mengingat keterbatasan keuangan yang ada tetap dicantumkan sebagai program stock dengan harapan akan dapat dibiayai apabila realisasi pendapatan daerah tercapai lebih dari 100%, akan tetapi belum ditetapkan targetnya pada dokumen ini. Target dari program-program tersebut akan ditentukan dalam rencana kerja (renja) Perangkat Daerah apabila pada saatnya nanti dapat terdani. Adapun kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini:



Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2016-2021 (dalam juta rupiah)

U R A I A N	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA	1.674.710,45	1.401.091,03	1.421.443,47	1.433.180,28	1.451.336,89	1.468.934,18
BELANJA TIDAK LANGSUNG	846.246,35	873.488,16	888.586,07	895.068,35	907.970,44	926.976,90
1 Belanja Pegawai	590.879,39	594.379,38	604.736,33	613.368,19	621.807,67	630.247,15
2 Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3 Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Hibah	23.574,00	33.844,86	39.126,34	41.048,49	37.509,10	43.075,58
5 Belanja Bantuan Sosial	1.398,54	8.003,77	3.714,13	1.993,36	2.443,63	2.993,86
6 Belanja Bagi Hasil	4.609,06	5.564,69	7.019,87	8.573,49	8.873,94	9.523,83
7 Belanja Bantuan Keuangan	224.785,36	230.695,46	232.989,40	229.084,82	236.336,10	240.136,49
8 Belanja Tidak Terduga	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
BELANJA LANGSUNG	828.464,10	527.602,87	532.857,40	538.111,93	543.366,46	541.957,29
1 Belanja Pegawai	22.101,15	22.613,17	23.891,28	22.394,61	22.449,15	22.470,65
2 Belanja Modal	489.617,61	233.999,30	320.316,25	286.860,64	289.960,63	278.560,46
3 Belanja Barang dan Jasa	316.745,34	270.990,40	188.649,87	228.856,68	230.956,68	240.926,18

Penentuan program-program mana saja yang akan didanai dan program-program stock tentu saja telah dipilah berdasarkan skala prioritas serta besaran dukungannya terhadap pencapaian 9 prioritas pembangunan daerah. Rincian program serta target indikator kinerja masing-masing program serta kebutuhan pendanaannya dapat dicermati pada Tabel 7.2 berikut ini:



Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
				Pendidikan																	
				Program Peningkatan PAUD	Presentase berdirinya lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	28,81 %	31,50 %	770.000.000	31,68 %	440.615.420	31,81 %	6.615.821.220	31,90 %	6.880.454.069	31,95 %	6.980.454.069	31,97 %	7.259.672.231	31,99 %	7.659.672.231	Dinas Pendidikan
				Program Wajib Belajar pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Presentase sekolah SD, SMP yang terakreditasi dan rasio jumlah jumlah siswa dan ruang kelas pendidikan dasara 9 tahun	100 %	100 %	16.274.843.530	100 %	25.650.325.080	100 %	41.232.624.120	100 %	42.881.929.085	100 %	43.881.929.085	100 %	45.637.206.248	100 %	46.637.206.248	Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan Non Formal	Prosentase lembaga Pendidikan Non Formal yang bersertifikat	%	%	165.943.300	%	280.156.520	%	265.090.520	%	275.694.141	%	280.694.141	%	291.921.906	%	295.921.906	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik	Presentase trenaga pendidik yang terakreditasi	99,80 %	100 %	10.515.532.600	99,85 %	14.417.242.480	100 %	14.468.449.980	100 %	15.047.187.479	100 %	15.147.187.479	100 %	15.753.074.978	100 %	15.953.074.978	Dinas Pendidikan
				Program Manajemen Pelayan Pendidikan	Presentase anggota dewan pendidik yang melaksanakan tupoksinya sesuai perundang-undangan pendidikan	96,95 %	97,91 %	119.845.000	85,24 %	162.220.750	98,91 %	70.000.000	98,93 %	72.800.000	98,94 %	73.800.000	98,96 %	76.752.000	98,98 %	79.752.000	Dinas Pendidikan
01	03	01	18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase lembaga pendidikan non formal yang dibina	NA	100 %	822.026.300	100 %	129.780.000	100 %	2.324.457.800	100 %	369.184.600	100 %	852.000.000	100 %	852.000.000	100 %	5.349.448.700	Sekretariat Daerah
				Kesehatan																	
1,02	1020	1020	26	Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit /	1. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	65 %	70 %	51.860.337.792,64	75 %	36.286.975.722	77,74 %	78.118.141.400	80 %	104.172.061.000	85 %	50.450.000.000	90 %	50.400.000.000	90 %	50.400.000.000	RSUD dr. Murjani Sampit



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	2			rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata																	
					2. Tercapainya Akreditasi Rumah Sakit	-	-		-		Terakreditasi	100 %		Tera kredit asi	100 %		Terakreditasi	100 %		Terakreditasi	100 %
1,0 2	1 .0 2 .0 2	2	4 6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	1. Persentase Dukungan Manajemen dan Administrasi Terhadap Operasional Kantor	100 %	93 %	69.985.855.896	91 %	81.222.006.336	100 %	72.811.811.072	100 %	61.480.671.012	100 %	103.207.650.000	100 %	105.150.000.000	100 %	105.150.000.000	RSUD dr. Murjani Sampit
				2. Tercapainya SPM Rumah Sakit	77,71 %	78 %		82 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
1,0 2	1 .0 2 .0 2	2	2 4	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Kurang Mampu / Masyarakat Miskin	Persentase pasien kurang mampu yg dilayani di rumah sakit		%		- %	-		%		%	100 %	5.100.000.000	100 %	5.300.000.000	100 %	5.300.000.000	RSUD dr. Murjani Sampit
1,0 2	1 .0 2 .0 2	2	5 0	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk yang Mengalami Gangguan Kesehatan Jiwa	Persentase kunjungan penduduk yang mengalami gangguan jiwa yang dilayani				- %	-		%		%	100 %	1.100.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	RSUD dr. Murjani Sampit
1,0 2	1 .0 2 .0 2	2	5 2	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Luas Tanah terhadap Total Kebutuhan Tanah	38 %	38 %		38 %	-	38 %		38 %		78 %		100 %		100 %		RSUD dr. Murjani Sampit
1,0 2	1 .0 2 .0 2	1	4 3	Program Peningkatan Kinerja Aparatur	Persentase karyawan yang diberikan jasa pelayanan untuk peningkatan kinerja	100 %	100 %	5.978.000.000	105 %	7.192.000.000	100 %	11.478.000.000	100 %	14.202.000.000	100 %	11.733.420.000	100 %	13.141.430.400	100 %	13.141.430.400	RSUD dr. Murjani Sampit
02	0 1	0 1	1 5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan	45 %	60 %	3.345.778.620	60 %	4.420.763.880	80 %	7.113.250.000	80 %	8.150.000.000	80 %	8.715.000.000	80 %	9.250.000.000	80 %	40.994.792.500	Dinas Kesehatan



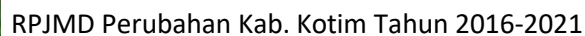
RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Kesehatan																
02	01	01	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penyediaan Sarana Kesehatan yang Standar	27 %	32 %	3.698.308.820	25 %	5.001.137.224	14 %	6.200.000.000	18 %	6.325.000.000	23 %	7.000.000.000	27 %	7.550.000.000	27 %	35.774.446.044	Dinas Kesehatan
02	01	01	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	0 %	92,43 %	472.244.700	100 %	563.777.750	97 %	1.485.000.000	98 %	1.615.000.000	99 %	1.620.000.000	100 %	1.690.000.000	100 %	7.446.022.450	Dinas Kesehatan
02	01	01	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan	75 %	100 %	163.567.996	100 %	68.095.000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	2.631.662.996	Dinas Kesehatan
02	01	01	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Upaya Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat dan Kesehatan Kerja	25 %	28 %	250.553.200	22 %	237.069.250	30 %	560.250.000	35 %	650.000.000	40 %	750.000.000	45 %	750.000.000	45 %	3.197.872.450	Dinas Kesehatan
02	01	01	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penderita Penyakit Menular yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	460.564.950	100 %	989.797.400	100 %	1.973.124.935	100 %	2.007.620.000	100 %	2.042.696.500	100 %	2.008.575.000	100 %	9.482.378.785	Dinas Kesehatan
02	01	01	25	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	persentase sarana kesehatan yg memenuhi standar	0	2	3.215.375.668	7	5.376.569.359	48 %	12.120.000.000	76 %	11.675.000.000	86 %	10.890.000.000	100 %	11.100.000.000	100 %	54.376.945.027	Dinas Kesehatan
02	01	01	30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Lansia yang mendapat Pelayanan Kesehatan yang Standar	100 %	100 %	2.000.000	100 %	-	100 %	675.000.000	100 %	700.000.000	100 %	750.000.000	100 %	800.000.000	100 %	2.927.000.000	Dinas Kesehatan
02	01	01	31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat	25 %	40 %	117.666.000	15 %	123.743.000	55 %	285.500.000	60 %	280.000.000	65 %	280.000.000	70 %	280.000.000	70 %	1.366.909.000	Dinas Kesehatan



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	01	01	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Ibu dan Anak yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 0	75 %	187.421.270	100 %	244.434.300	100 %	500.000.000	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000	100 %	3.181.855.570	Dinas Kesehatan
02	01	01	39	Program Pengembangan Regulasi Pelayanan Kesehatan	persentase tenaga dan sarana kesehatan yg berijin	0 0	100 %	131.260.000	100 %	-	0 0	220.000.000	0 0	220.000.000	0 0	220.000.000	0 0	220.000.000	0 0	1.011.260.000	Dinas Kesehatan
02	01	01	40	Program Manajemen dan Kebijakan Kesehatan	Persentase pelaporan yang lengkap dan tepat waktu	0 0	75 %	276.663.421	75 %	350.649.654	81 %	520.000.000	90 %	550.000.000	95 %	600.000.000	100 %	580.000.000	100 %	2.877.313.075	Dinas Kesehatan
02	01	01	41	Program Peningkatan Sumber daya manusia kesehatan	Persentase tenaga kesehatan dipelayanan kesehatan sesuai standar	34 %	35 %	8.951.242.294	40 %	12.171.012.986	37 %	23.772.700.000	38 %	25.616.300.000	40 %	27.459.900.000	42 %	29.303.500.000	42 %	127.274.655.280	Dinas Kesehatan
02	01	01	45	Program Kalimantan Tengah Barigas	Persentase jumlah ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Masyarakat sesuai standar	20 F a s k e s	20 F a s k e s	8.892.939.101	22 F a s k e s	14.460.064.282	23 F a s k e s	-	23 F a s kes	-	23 F a s kes	-	23 F a s kes	-	23 F a s kes	23.353.003.383	Dinas Kesehatan
02	01	01	47	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Cakupan Penderita Penyakit Tidak Menular Mendapatkan yang Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	88.246.800	100 %	139.715.300	100 %	533.125.000	100 %	542.460.000	100 %	551.960.000	100 %	577.000.000	100 %	2.432.507.100	Dinas Kesehatan
02	01	01	48	Program Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 %	65 %	21.421.028.736	85 %	16.582.383.905	95 %	-	95 %	-	95 %	-	95 %	-	95 %	38.003.412.641	Dinas Kesehatan
02	01	01	49	Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	persentase puskesmas yg memenuhi standar pelayanan kesehatan	20 F a s k e s	20 F a s k e s	15.158.418.010	22 F a s k e s	17.756.999.758	23 F a s k e s	33.155.163.510	23 F a s kes	35.518.132.111	23 F a s kes	39.227.144.287	23 F a s kes	43.149.858.716	23 F a s kes	183.965.716.392	Dinas Kesehatan
				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
	0			Program	Persentase	NA	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Sekretariat

BAB VII



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					dalam kondisi baik.																
1	03	01	32	Program Pengembangan Dan Penunjang Bidang Cipta Karya	Jumlah kegiatan penunjang Bidang Cipta Karya yang dilaksanakan	1 Dok	- Dok	-	- Dok	-	1 Dok	305.750.000,00	1 Dok	200.000.000,00	-	-	-	-	2 Dok	505.750.000,00	Dinas PUPR
1	03	01	35	Program Pembangunan Sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	59 %	47,5 %	297.900.000,00	-	3,45 %	839.450.000,00	5,84 %	1.422.450.000,00	42,69 %	10.400.000.000,00	48,03 %	11.700.000.000,00	100,00 %	24.361.900.000,00	Dinas PUPR	
1	03	01	24	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	30 %	18,00 %	3.526.235.000,00	20,00 %	7.123.416.609,00	49,00 %	14.103.600.000,00	27,71 %	6.976.895.000,00	31,72 %	6.069.025.000,00	35,73 %	6.158.675.000,00	35,73 %	43.957.846.609,00	Dinas PUPR
				Program Pengembangan Bidang Jasa Konstruksi Dan Pengendalian	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan alat, uji Laboratorium dan informasi data penyedia jasa konstruksi.		-	-	-	-	-	-							-	Dinas PUPR	
1	03	01	34	Program Pengembangan Bidang Pengendalian Dan Peralatan	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan alat, uji Laboratorium dan informasi data penyedia jasa konstruksi.		23,08 %	516.371.104,00	10,39 %	352.035.000,00	53,00 %	1.795.475.000,00	10,04 %	340.000.000,00	13,28 %	450.000.000,00	13,28 %	450.000.000,00	100 %	3.387.510.000,00	Dinas PUPR
1	03	01	39	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kesesuaian Rencana Tata Ruang	NA			33,87 %	203.588.616,00	33,89 %	41.700.000,00	34,13 %	472.400.000,00	34,69 %	1.100.000.000,00	35,13 %	850.000.000,00	35,13 %	2.667.688.616,00	Dinas PUPR
1	03	01	40	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang.	NA	-	-	29,35 %	176.421.180,00	29,57 %	427.950.000,00	30,02 %	868.155.000,00	30,61 %	1.150.000.000,00	31,17 %	1.100.000.000,00	31,17 %	3.722.526.180,00	Dinas PUPR
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian Rencana Tata Ruang	NA	-	-	8,32 %	50.000.000,00	8,36 %	77.078.000	-	-	8,44 %	150.000.000,00	8,57 %	250.000.000,00	8,57 %	527.078.000,00	Dinas PUPR



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Luas areal RTH yang terpelihara dan tertata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
01	03	01	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai		-	17,57	993.200.000,00	17,31	978.925.000,00	17,37	981.953.607,00	26,53	1.500.000.000,00	21,22	1.200.000.000,00	100,00	5.654.078.607,00	Dinas PUPR	
				Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase backlog		17,23	426.600.000	10,10	250.000.000	15,17	375.640.000	19,72	488.132.864	18,85	466.813.150	18,93	468.681.179	100	2.475.867.193	Disperkim
				Program lingkungan sehat perumahan	Persentase PSU perumahan dalam kondisi baik		0,00	-	23,70	54.400.000	76,30	175.130.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100	229.530.000	Disperkim
				Program perbaikan perumahan akibat bencana alam sosial	Persentase PSU Lingkungan Relokasi akibat bencana alam/ sosial meningkat		45,24	4.933.000.000	27,38	2.985.000.000	0,00	-	0,00	13,69	1.492.500.000	13,69	1.492.500.000	100	10.903.000.000	Disperkim	
				Program Relokasi Permukiman Akibat Bencana Alam/Sosial	Persentase Rumah yang direlokasi		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	100	-	Disperkim	
				Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Jumlah lingkungan permukiman sehat meningkat		0,00	-	0,00	-	100,00	2.450.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100	2.450.000	Disperkim
				Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kualitas Permukiman meningkat		0,00	-	10,45	869.370.000	12,45	1.370.638.400	14,45	2.000.000.000	16,45	2.000.000.000	18,45	2.000.000.000	41,42	41.420.000.000	Disperkim
				Program Sistem Informatika Kawasan Permukiman Kumuh (SIKAPKU)	Persentase basic data kawasan kumuh		0,00	-	0,00	-	0,00	-	33,33	400.000.000	33,33	400.000.000	33,33	400.000.000	100	1.200.000.000	Disperkim
				Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrika	Persentase Jaringan Instalasi Listrik PJU dalam kondisi baik		0,00	-	22,04	9.211.519.130	19,87	8.304.817.000	18,85	7.876.568.462	19,62	8.200.000.000	19,62	8.200.000.000	100	41.792.904.592	Disperkim



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				n																	
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Taman median/ trotoar dan RTH yang terkelola		37,36 %	6.863.13 9.840	16,41 %	3.014.25 0.000	11,15 %	2.048.55 2.822	11,42 %	2.098.5 52.822	11,6 9 %	2.148.55 2.822	11,97 %	2.198.55 2.822	100 %	18.371.6 01.128	Disperkim
				Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Jumlah Pemakaman Yang Terkelola		16,00 L o k a s i	2.885.46 3.160	13,00 L o k a s i	2.500.00 0.000	22,00 L o k a s i	4.121.18 8.410	19,00 Lok asi	3.562.9 62.700	14,0 0 Lok asi	2.700.00 0.000	15,00 Lok asi	2.800.00 0.000	99 Lok asi	18.569.6 14.270	Disperkim
				Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																	
01	0 5	0 3	2 2	Program Pencegahan Dini dan Penanggulanga n Bencana	Persentase Desa yang Mampu dan Tanggap dalam Penanggulangan Bencana	100%	100%	202.824. 530	100%	213.142. 880	100%	160.000. 000	100%	160.000 .000	100%	300.000. 000	100%	260.624. 530	100%	1.296.59 1.940	BPBD
01	0 5	0 3	2 7	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase pesertaa sosialisasi yang memahami pencegahan dan penanganan kebakaran	100%	100%	199.155. 000	100%	112.690. 000	0	-	100%	80.875. 000	100%	200.000. 000	100%	261.832. 905	100%	854.552. 905	BPBD
01	0 5	0 3	3 0	Program Mitigasi Bencana	Persentase Kecamatan dan Desa yang Terpetakan Potensi Bencananya	100%	100%	165.000. 000	100%	150.000. 000	100%	127.820. 000	100%	151.951 .100	100%	250.000. 000	100%	250.000. 000	100%	1.094.77 1.100	BPBD
01	0 5	0 3	3 1	Program Tanggap Darurat	Persentase kejadian tanggap darurat yang ditangani	100%	89%	545.632. 500	95%	134.227. 000	75%	974.502. 000	75%	70.210. 400	75%	815.000. 000	75%	183.975. 850	75%	2.723.54 7.750	BPBD
01	0 5	0 3	3 2	Program Logistik dan Peralatan	Persentase korban yang mendapat suplay logistik	100%	100%	37.208.5 60	100%	50.320.0 00	0	-	75%	125.000 .000	75%	200.000. 000	75%	100.000. 000	75%	512.528. 560	BPBD
01	0 5	0 3	3 3	Program Pasca Bencana	Persentase kerusakan bencana yang tervaluasikan	100%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	150.000. 000	100%	75.000.0 00	100%	225.000. 000	BPBD
01	0 5	0 3	3 4	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase sarana prasarana yang dipulihkan akibat bencana	100%	100%	6.668.84 0.700	100%	732.000. 000	75%	823.000. 000	75%	423.000 .000	75%	1.400.00 0.000	75%	1.600.00 0.000	75%	11.646.8 40.700	BPBD
01	0 5	0 3	3 5	Program Pencegahan	Persentase Penurunan kasus	-	-	-	-	-	75%	16.877.3	75%	10.188.	75%	8.300.00	75%	6.956.31	75%	42.321.9	BPBD



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				dan Penanggulang n Kebakaran Hutan	Kebakaran Hutan						37.700		280.000		0.000		8.078		35.778		
01	05	04	22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulang n Korban Bencana	Persentase desa/kecamatan tanggap bencana yang terbentuk	80%	NA	NA	NA	NA	60%	23.198.000	65%	870.000.000	70%	870.000.000	75%	870.000.000	80%	870.000.000	DPKP
01	05	04	27	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (responsivetime rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	75%	NA	NA	94,22 %	2.403.824.280	100%	3.160.421.400	75%	3.326.662.500	75%	3.326.745.625	75%	3.356.579.575	75%	3.356.579.575	DPKP
01	05	04	35	Program Pencegahan Dini dan Penanggulang n Kebakaran Hutan	Persentase desa/kecamatan tanggap bencana yang terbentuk	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80%	8.711.360.000	85%	10.453.632.000	95%	14.635.085.000	100%	14.635.085.000	DPKP
				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peserta pengembangan wawasan kebangsaan yang lulus dengan kategori baik	100 %	23,52 %	143.823.500	5,8 %	250.000.000	5,8 %	346.747.825	5,8 %	355.056.825	5,8 %	363.456.825	5,8 %	363.056.325	100 %	1.822.141.300	Badan Kesbangpol
				Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa	Persentase peserta sosialisasi yang paham dengan konsep bel anegara dan ketahanan ideologi	NA	92,21 %	267.774.400										92,21 %	267.774.400	Badan Kesbangpol	
				Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam	Persentase rekomendasi hasil forum yang digunakan sebagai dasar kebijakan	NA	95,87 %	274.541.350										95,87 %	274.541.350	Badan Kesbangpol	
				Program Peningkatan Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing	Persentase kecamatan dengan data orang asing yang lengkap	NA	100 %	59.745.500										100 %	59.745.500	Badan Kesbangpol	
				Program	Persentase	NA	99,96 %											99,96 %		Badan	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Peningkatan Pembinaan dan Peran Serta Ormas dan Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	organisasi yang memahami konsep berbangsa dan bernegara			147.253.704											147.253.704	Kesbangpol	
				Program Peningkatan Pembinaan dan Peran Serta Parpol dalam Berdemokrasi	Persentase peserta sosialisasi yang paham tentang peran Parpol	NA	95,6 %	116.124.608										95,6 %	116.124.608	Badan Kesbangpol	
				Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan wilayah pengembangan wawasan kebangsaan	NA			97,8 %	923.004.648	24 %	597.890.825	22 %	354.782.675	20,1 %	363.708.475	18,1 %	363.258.475	99,7 %	2.602.645.098	Badan Kesbangpol
				Program Pendidikan Politik	Persentase parpol/ormas yang mendapatkan pendidikan politik	NA			42,63 %	167.166.500	100 %	641.513.324	100 %	355.056.825	100 %	362.356.825	100 %	363.207.825	100 %	1.889.301.299	Badan Kesbangpol
1.05	1.05	02	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran serta aparat Satpol PP dan anggota Satlinmas dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	90 %	90 %	630.160.326	90,64 %	1.061.110.066	90 %	2.763.504.235	90 %	1.882.648.630	90 %	908.551.650	90 %	908.551.650	90 %	8.154.526.557	Satpol PP
1.05	1.05	02	16	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Kantramtibmas dan tindak kriminal yang ditangani	80 %	80 %	141.610.000	68,26 %	187.299.000	80 %	319.318.800	80 %	574.168.600	80 %	355.863.000	80 %	351.638.475	80 %	1.929.897.875	Satpol PP
1.05	1.05	02	19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase peran serta masyarakat dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan										80 %	61.650.300	80 %	30.825.150	80 %	92.475.450	Satpol PP
1.05	1.05	02	20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase pelaku usaha, masyarakat, dan lingkungan pendidikan yang	85 %	85 %	21.500.000	86,71 %	16.475.000	85 %	23.300.000	85 %	23.060.000	85 %	19.000.000	85 %	19.000.000	85 %	122.335.000	Satpol PP



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					paham tentang penyakit masyarakat																
1.05	105	02	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase keikutsertaan anggota Satlinmas dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi	100 %		95,29 %	24.286.895	100 %	25.486.895	100 %	30.885.000	100 %	56.325.100	100 %	25.500.000	100 %	162.483.890	Satpol PP	
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA	- %	99 %	3.075.000	80 %	3.100.000	- %	-	80 %	6.533.550	80 %	6.533.550	80 %	19.242.100	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA	- %	98 %	3.490.000	75 %	3.530.000	- %	-	80 %	5.453.600	80 %	5.453.600	80 %	17.927.200	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	
				Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA	- %	99 %	6.867.273	80 %	18.750.000	85 %	5.470.000	85 %	12.513.650	85 %	14.000.000	85 %	57.600.923	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	75 %	0%	0%	-	0%	-	0%	-	75%	7.000.000	75%	8.000.000	75%	15.000.000	Kecamatan Teluk Sampit	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	75 %	0%	0%	-	0%	-	0%	-	75%	15.000.000	75%	15.000.000	75%	30.000.000	Kecamatan Teluk Sampit	
				Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	75 %	0%	0%	-	0%	-	0%	-	75%	20.000.000	75%	22.500.000	75%	42.500.000	Kecamatan Teluk Sampit	
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA	- -	0	- -	0	100 %	86.731.400	100 %	4.730.000	- -	0	- -	0	100 %	91.461.400	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	Kecamatan Pulau Hanaut



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA	-	-	0	92,02 %	25.306.000	-	-	0	100 %	8000000	100 %	7.000.000	100 %	7.000.000	100 %	47.306.000	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	0 %	0 %	-	95,34 %	1.972.500	85,00 %	1.972.500	85,00 %	1.972.500	85,00 %	30.000.000	85,00 %	30.000.000	85,00 %	30.000.000	85,00 %	30.000.000	Kecamatan M. B. Ketapang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	Kecamatan M. B. Ketapang
				Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	0 %	95,34 %	31.289.500	100 %	12.000.000	85,00 %	13.322.500	85,00 %	8.322.500	85,00 %	23.000.000	85,00 %	23.000.000	85,00 %			Kecamatan M. B. Ketapang	
1	2	1	1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani		0%	0	98,11%	6.360.000,00	100%	3.510.000,00	95%	67.388.000,00	100%	5.700.000,00	100%	6.000.000,00	100%			26.650.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
1	2	1	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW		0%	0	99,09%	3.300.000,00	100%	1.560.000,00	100%	6.450.000,00	100%	20.000.000,00	100%	21.000.000,00	100%			53.830.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
1	2	1	4	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani		0%	0	98,81%	6.900.000,00	100%	8.200.000,00	100%	8.700.000,00	100%	66.000.000,00	100%	43.000.000,00	100%			136.018.200,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	0 %	%	-	70 %	1.280.000	90 %	77.924.000	%	-	%	-	%	-	80 %			79.204.000	Kecamatan Kota Besi
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	0 %	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-			Kecamatan Kota Besi
				Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	0 %	0 %	-	80 %	7.980.000	80 %	7.470.000	-	-	80 %	9.000.000	80 %	10.000.000	53			34.450.000	Kecamatan Kota Besi
				Program Peningkatan	Persentase gangguan	NA	-	-	99 %	3.075.000	80 %	3.100.000	-	-	80 %	6.533.55	80 %	6.533.55	80 %			19.242.1	Kecamatan Baaman



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	kamtibmas yang ditangani				0		0				0		0		00		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA	-	-	98 %	3.490.000	75 %	3.530.000	-	-	80 %	5.453.600	80 %	5.453.600	80 %	17.927.200	Kecamatan Baamang
				Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA %	-	-	37,79 %	20.656.600	75 %	15.042.500	75 %	17.242.500	75 %	48.000.000	75 %	48.000.000	75 %	148.941.600	Kecamatan Baamang
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA		-		-		-		-	85 %	11.575.000	90 %	17.500.000	100 %	29.075.000	Kecamatan Parenggean
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA				75 %		107.805.000	80 %	-	85 %	17.850.000	95 %	21.500.000	100 %	147.155.000	Kecamatan Parenggean
				Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA		-	57.1 %	11.250.000	66.7 %	12.500.000		-	75 %	25.000.000	100 %	27.500.000	100 %	76.250.000	Kecamatan Parenggean
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA	-	-	-	-	75 %	132.979.000	-	-	-	-	-	-	75 %	132.979.000	Kecamatan Mentaya Hulu
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mentaya Hulu
				Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA	-	-	-	-	%	-	%	-	75 %	3.000.000	75 %	3.000.000	100 %	6.000.000	Kecamatan Mentaya Hulu
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA		-	60 %	-	70 %	60.228.000	70 %	10.000.000	70 %	2.500.000	80 %	2.500.000	80 %	75.228.000	Kecamatan Bukit Santuai
				Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase keterlibatan masyarakat	NA		-	50 %	-	70 %	-	70 %	10.000.000	70 %	2.500.000	80 %	2.500.000	80 %	15.000.000	Kecamatan Bukit Santuai



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Untuk Menjaga Keterlibatan dan Keamanan	dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW																
				Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA	0 %	-	60 %	-	70 %	2.255.000	80 %	10.800.000	80 %	3.000.000	80 %	3.000.000	80 %	19.055.000	Kecamatan Bukit Santuai
4	01	22	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA	-	-	20 %	2.250.000	-	-	-	100 %	11.375.000	100 %	17.500.000	100 %	31.125.000	Kecamatan Telaga Antang	
4	01	22	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keterlibatan dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA	-	-	98 %	11.000.000	100 %	5.000.000	-	-	100 %	17.850.000	100 %	15.000.000	100 %	48.850.000	Kecamatan Telaga Antang
4	01	22	22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA	-	-	60 %	23.000.000	36 %	5.400.000	100 %	4.000.000	100 %	25.000.000	100 %	1.000.000	80 %	58.400.000	Kecamatan Telaga Antang
4	01	22	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA	-	-		-		-	-		-		-		-		Kecamatan Antang Kalang
4	01	22	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keterlibatan dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA	-	-		-		-	-		-		-		-		Kecamatan Antang Kalang
4	01	22	22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA	0 %	-	60 %	23.000.000	70 %	28.000.000	80 %	28.000.000	80 %	28.000.000	80 %	28.000.000	80 %	135.000.000	Kecamatan Antang Kalang
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA	-	-	-	-	95 %	103.334.000	100 %	85.400.000	-	-	85 %	10.000.000	85 %	198.734.000	Kecamatan Cempaga Hulu
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keterlibatan dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA	-	-	-	-	-	85 %	3.479.950	85 %	10.000.000	85 %	5.184.300	85 %	18.664.250	Kecamatan Cempaga Hulu	
				Program Pengendalian Kebakaran	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang	NA	-	-	-	-	90 %	2.100.000	100 %	850.000	100 %	6.000.000	-	-	100 %	8.950.000	Kecamatan Cempaga Hulu



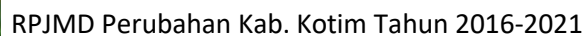
RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Hutan	ditangani																
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA		-		-		-	75 %	8.000.000	75 %	8.000.000	75 %	8.000.000	75 %	24.000.000	Kecamatan Cempaga
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA		-		-		-	75 %	46.635.280	75 %	46.635.280	75 %	46.635.280	75 %	139.905.840	Kecamatan Cempaga
				Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA		-		85 %	30.000.000	100 %	10.000.000	100 %	14.000.000	100 %	14.000.000	96,25 %	68.000.000	Kecamatan Cempaga	
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani															Kecamatan Seranau	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW			-		%		%		%		%		%		Kecamatan Seranau	
				Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA		-	100 %	8.950.000	80 %	10.550.000	80 %	10.550.000	80 %	10.550.000	80 %	10.550.000	80% %	51.150.000	Kecamatan Seranau
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani	NA						100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	30.000.000	Kecamatan Telawang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA						75 %	20.000.000	75 %	20.000.000	75 %	20.000.000	75 %	20.000.000	60.000.000	Kecamatan Telawang
				Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA			75 %	5.000.000	75 %	6.500.000	75 %	7.500.000	75 %	12.500.000	75 %	14.000.000	100 %	45.500.000	Kecamatan Telawang
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	Persentase gangguan kamtibmas yang ditangani															Kecamatan Tualan Hulu	

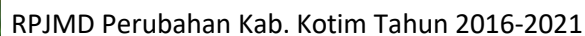


RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Lingkungan																	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keterlibatan dan Keamanan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas melalui RT/RW	NA		-		-	100 %	22.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	97.000.000	Kecamatan Tualan Hulu
				Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase kasus kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	NA		-		-	100 %	22.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	97.000.000	Kecamatan Tualan Hulu
				Sosial																	
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase jumlah PMKS yang ditangani	100 %	93,48 %	929.233.368	91,46 %	289.488.000	95 %	1.037.867.100	95 %	1.043.264.442	95 %	1.048.997.731	90 %	1.055.094.685	100 %	5.594.621.722	Dinsos
				Program pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat yang diberikan bantuan (alat bantu)	100 %	88 %	133.157.000	61,65 %	81.743.900	85 %	115.000.000	89 %	145.000.000	90 %	157.000.000	100 %	157.420.000	90 %	818.835.000	Dinsos
				Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang diberikan pendidikan dan keterampilan	100 %	100 %	900.000	100 %	600.000	100 %	27.936.600	100 %	30.730.260	100 %	33.803.286	80 %	37.183.615	100 %	190.553.761	Dinsos
				Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo	Persentase Anak Panti Yang diberikan bantuan	100 %	100 %	134.311.100	64,47 %	83.420.500	70 %	96.047.200	75 %	101.562.944	75 %	107.548.483	88 %	114.049.161	85 %	604.292.787	Dinsos
				Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberi pelatihan/keterampilan	100 %	88 %	85.300.000	52,01 %	427.181.200	85 %	2.967.000.000	85 %	42.000.000	86 %	42.000.000	95 %	42.000.000	95 %	3.442.432.500	Dinsos
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi	Persentase Kegiatan Promosi yang diikuti	100 %	98,57 %	228.492.288	76,39 %	239.449.000	80 %	448.224.940	85 %	756.491.276	90 %	664.915.958	95 %	673.502.081	100 %	3.374.157.019	Dinsos



BAB VII



BAB VII



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Perdesaan	produktif																
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	0 %	0 %	-	80 %	30.000.000	80 %	28.400.000	80 %	21.000.000	80 %	30.000.000	80 %	32.000.000	67 %	141.400.000	Kecamatan Kota Besi
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	100 %	-	-	-	-	-	-	100 %	38.000.000	100 %	57.177.414	100 %	60.036.285	100 %	155.213.699	Kecamatan Baamang
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	NA		-	20.8 %	30.000.000	21.5 %	19.500.000	56 %	9.500.000	65.5 %	25.000.000	75 %	37.500.000	100 %	121.500.000	Kecamatan Parenggean
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	NA	-	-	-	-	75 %	12.700.000	-	-	75 %	1.000.000	75 %	1.000.000	100 %	14.700.000	Kecamatan Mentaya Hulu
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	NA		-	30 %	2.750.000	30 %	15.250.000	50 %	20.010.000	50 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	68.010.000	Kecamatan Bukit Santuai
4	0129			Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	NA		-	30 %	30.000.000	60 %	19.000.000	100 %	2.000.000	100 %	25.000.000	100 %	37.500.000	100 %	113.500.000	Kecamatan Telaga Antang
4	0129			Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	NA		-	30 %	30.000.000	70 %	32.000.000	90 %	32.000.000	70 %	34.000.000	100 %	34.000.000	100 %	162.000.000	Kecamatan Antang Kalang
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif			-	50 %	12.000.000	50 %	15.000.000	50 %	17.000.000	50 %	17.000.000	50 %	17.000.000	50 %	78.000.000	Kecamatan Cempaga Hulu
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	NA		-	100 %	25.000.000	100 %	26.250.000	100 %	28.000.000	100 %	30.000.000	100 %	35.000.000	100 %	144.250.000	Kecamatan Cempaga
				Program Peningkatan Peran Perempuan di	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan	NA	100 %	15.000.000	61 %	7.650.000	85 %	16.360.000	85 %	25.000.000	85 %	25.000.000	85 %	25.000.000	85 %	114.010.000	Kecamatan Seranau



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Perdesaan	produktif																
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	NA			75 %	30.000.000	75 %	33.000.000	75 %	35.000.000	75 %	19.500.000	75 %	21.000.000	100 %	138.500.000	Kecamatan Telawang
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif	NA	85 %	52.200.000	85 %	20.000.000	85 %	22.000.000	85 %	25.000.000	85 %	25.000.000	85 %	25.000.000	85 %	169.200.000	Kecamatan Tualan Hulu
				Pangan																	
2	03	01	6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi (kkalori/kapita/hari)		3.453	144.251.550	2.662	359.809.000	2.672	398.659.000	2.727	879.574.000	2.781	731.803.482	2.863	735.840.691	2.863	3.249.937.723	Dinas Ketahanan Pangan
					Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)		127,22		72		74		75		77		79		79		Dinas Ketahanan Pangan
				Program Agribisnis Pertanian dan Keamanan Pangan	Tercapainya konsumsi energi (kkalori/kapita/hari)			227.144.550	2.169	903.322.800	2.081	438.915.000	2.091	356.540.000	2.100	612.073.660	2.110	612.073.660	2.110	3.150.069.670	Dinas Ketahanan Pangan
					Tercapainya konsumsi protein (gram/kapita/hari)				59		62		63		64		65		65		Dinas Ketahanan Pangan
				Program Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan	Tertanganinya daerah rawan pangan (desa)					2		2		2		476.100.000	2	476.100.000	8	952.200.000	Dinas Ketahanan Pangan
				Pertanahan																	
03	01	01	52	Program Pengadaan Tanah	Persentase pengadaan tanah yang terpenuhi	80 %	0 %	-	92,10 %	1.091.580.000	100 %	50.260.000	0 0	-	100 %	-	100 %	-	100 %	1.141.840.000	Dinas Pertanian
2	16	01	52	Program Pengadaan Tanah	Presentase Luas Tanah yang diadakan sesuai dengan perundang - undangan	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1,25%	1.000.000	0,00%	-	1,25%	1.000.000	Disbudpar
				Program Pengadaan Tanah	Persentase Pengadaan Tanah Yang Terlaksana		44,74 %	425.000.000	0,00 %	-	55,26 %	525.000.000	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	100 %	950.000.000	Disperkim
02	00	00	1	Program	Persentase tanah	NA	20 %		40 %		40 %		40 %		40 %		40 %		100 %		Sekretariat



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	3	1	6	penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	aset pemerintah daerah yang tersertifikasi			3.122.415.250		2.096.348.000		21.093.000.000		59.625.773.632		2.550.000.000		2.550.000.000		91.037.536.882	Daerah
02	03	01	17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang diselesaikan	NA	100 %	190.353.900	100 %	122.050.000	100 %	181.502.000	100 %	121.450.000	100 %	260.000.000	100 %	260.000.000	100 %	1.135.355.900	Sekretariat Daerah
				Program Pengadaan Tanah	Persentase aset pemerintah daerah yang disertifikasikan	N A					100 %	10.620.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	55.620.000	DPMD
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA	- %	-	- %	-	- %	-	- %	-	75 %	3.600.000	75 %	3.600.000	75 %	7.200.000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	NA	100 %	414.000.000	- %	-	- %	-	- %	-	75 %	25.000.000	75 %	25.000.000	75 %	464.000.000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Teluk Sampit
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Teluk Sampit
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	NA	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	Kecamatan M. B. Ketapang
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	Kecamatan M. B. Ketapang
1	20	17	17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani		0%	0	91,33%	3.000.000,00	95%	3.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	0%	0	100%	15.740.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	2	1	5	Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur		0 ha	0	0 ha	0	0 ha	0	0 ha	0	1 ha	92.000.000,00	1 ha	8.000.000,00	4 ha	100.000.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	0 %	%	-	%	-	%	-	70 %	1.800.000	80 %	5.000.000	90 %	8.000.000	80 %	14.800.000	Kecamatan Kota Besi
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	0 Ha	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Kecamatan Kota Besi
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA %	-	-	-	-	75 %	2.750.000	75 %	5.500.000	75 %	8.000.000	75 %	8.000.000	75 %	24.250.000	Kecamatan Baamang
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	100 %	-	-	17 %	3.877.170	-	-	-	-	-	-	-	-	17 %	3.877.170	Kecamatan Baamang
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA								-	80 %	17.500.000	95 %	15.000.000	100 %	32.500.000	Kecamatan Parenggean
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	79.50 ha		-		-		-		-		-		-	0 %	-	Kecamatan Parenggean
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mentaya Hulu
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mentaya Hulu
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA	-	-	100 %	-	100 %	1.130.000	100 %	10.000.000	100 %	2.500.000	100 %	2.500.000	100 %	16.130.000	Kecamatan Bukit Santuai
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	M2			8.892 M2	57.474.525		-		-					8.892 M2	57.474.525	Kecamatan Bukit Santuai
4	0	2	1	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA	-	-	-	-	0 %	-	-	-	100 %	17.500.000	100 %	15.000.000	100 %	32.500.000	Kecamatan Telaga Antang
4	0	2		Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang	NA	-	-	8.892 M2	113.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.892 M2	113.000.000	Kecamatan Telaga Antang



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
					sesuai prosedur																		
4	01	22	17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA		-	100 %		20.000.000	100 %		25.000.000		25.000.000	100 %		25.000.000	100 %	117.000.000	Kecamatan Antang Kalang	
4	01	22		Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	NA M2			8.892 M2		57.474.525	-		-					8.892 M2	57.474.525	Kecamatan Antang Kalang		
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA		-	-		-	-		-	-		100 %		5.000.000	100 %	5.000.000	Kecamatan Cempaga Hulu	
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur			-	-		-	-		-	-				-	-	-	Kecamatan Cempaga Hulu	
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA		-			-		75 %	8.000.000	75 %	8.000.000	75 %		8.000.000	75 %	24.000.000	Kecamatan Cempaga	
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur																	Kecamatan Cempaga	
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani																	Kecamatan Seranau	
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur																	Kecamatan Seranau	
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA							100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %		10.000.000	100 %	30.000.000	Kecamatan Telawang	
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur																	Kecamatan Telawang	
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditangani	NA		-		70 %	25.000.000	80 %	25.000.000	90 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %		25.000.000	100 %	100.000.000	Kecamatan Tualan Hulu
				Program Pengadaan Tanah	Luas pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur																	Kecamatan Tualan Hulu	



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Lingkungan Hidup																	
2.0 5.2. 05	0 1	0 1	1 5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase timbunan sampah di perkotaan yang terkelola	36.93 %	58.85 %	8.801.73 2.600	58.85 %	11.994.7 17.558	58 %	11.160.7 65.740	57 %	5.075.0 72.180	56 %	1.062.50 2.857	55 %	1.124.78 6.567	55 %	39.219.5 77.502	DLH
2.0 5.2. 05	0 1	0 1	1 6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase upaya pengendalian perusakan lingkungan hidup	-	45.62 %	560.000. 000	50 %	660.302. 500	55 %	525.351. 000	60 %	663.532 .500	65 %	140.000. 000	70 %	140.000. 000	57.60 %	2.689.18 6.000	DLH
2.0 5.2. 05	0 1	0 1	1 7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Upaya Perlindungan dan konservasi Terhadap Sumber daya Alam	-	50 %	85.000.0 00	50 %	30.350.0 00	60 %	45.700.0 00	65 %	2.750.0 00	70 %	80.000.0 00	75 %	80.000.0 00	45 %	238.800. 000	DLH
2.0 5.2. 05	0 1	0 1	1 8	Program Penyuluhan dan Pnaatan Hukum/Perunda ng Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perlindungan dan pengelolaan lingkungan	-	-	-	100 %	35.494.0 00	100 %	814.000. 000	100 %	176.900 .000	100 %	80.000.0 00	100 %	80.000.0 00	100 %	1.150.90 0.000	DLH
2.0 5.2. 05	0 1	0 1	1 9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	-	1 Keg .	133.000. 000	1 Keg .	78.700.0 00	1 Keg .	55.000.0 00	- - -	-	1 Keg .	107.500. 000	1 Keg .	92.500.0 00	4 Keg .	466.700. 000	DLH
2.0 5.2. 05	0 1	0 1	2 0	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase Jumlah Parameter yang Terakreditasi	5 %	10 %	210.000. 000	20 %	317.824. 550	5 %	292.327. 000	40 %	204.856 .500	50 %	100.000. 000	60 %	190.000. 000	60 %	1.050.00 0.000	DLH
2.0 5.2. 05	0 1	0 1	2 2	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kelompok /Masyarakat Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	-	15 Titik hot spot	25.000.0 00	15 Titik hot spot	51.800.0 00	-	-	-	-	15 Titik hot spot	50.000.0 00	15 Titik hot spot	50.000.0 00	90 Titik Hot spot	151.800. 000	DLH
2.0 5.2. 05	0 1	0 1	2 3	Program pengelolaan dan rehabilitasi	Persentase pengelolaan Rehabilitasi	-	50 %	40.000.0 00	50 %	25.350.0 00	55 %	25.489.0 00	60 %	43.577. 000	65 %	50.000.0 00	70 %	55.000.0 00	50 %	199.416. 000	DLH

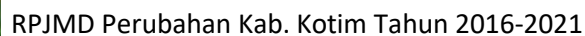


RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				ekosistem pesisir dan laut	Ekosistem Pesisir dan Laut																
2.0 5.2. 05	0 1 1 4			Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH kota dengan kondisi baik	-	-	-	-	-	-	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	150.000.000	100 %	350.000.000	DLH	
2.0 5.2. 05	0 1 1 7			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah	-	-	-	5 %	238.895.000	5 %	670.508.220	7 %	131.480.000	14 %	110.073.760	14 %	120.000.000	14 %	4.069.364.762	DLH
05	0 3 1 7			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan pemantauan pemanfaatan SDA pada titik-titik strategis yang telah ditentukan	NA	100 %	163.962.800	100 %	238.872.800	100 %	319.650.800	100 %	231.032.800	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	1.253.519.200	Sekretariat Daerah
				Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan KK yang tepat waktu	93 %	100 %	670.586.000,00	100 %	157.284.590,00	100 %	92.563.250,00	100 %	111.719.000,00	100 %	227.998.206,00	100 %	227.998.206,00	100 %	1.488.149.252,00	DISDUKCAPIL
				Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	NA	- %	-	99 %	26.830.350	80 %	26.890.605	80 %	26.890.695	85 %	45.000.000	85 %	55.000.000	85 %	180.611.650	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
				Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	75 %	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	75%	8.000.000	75%	9.000.000	75%	17.000.000	Kecamatan Teluk Sampit
				Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	NA	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	99,13 %	100 %	134.151.390	100 %	134.151.750	85,00 %	149.151.750	85,00 %	134.151.750	85,00 %	135.121.400	85,00 %	135.121.400	85,00 %	135.121.400	Kecamatan M. B. Ketapang
1	2	1	1	Program	Persentase	51%	99,78%		99,78%		70%		65%		70%		75%		100%		Kecamatan



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	0	7	5	Penataan Administrasi dan Kependudukan	jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP			80.672.085,00		80.672.085,00		26.890.695,00		28.545.075,00		75.000.000,00		66.000.000,00		358.872.795,00	Mentaya Hilir Utara	
				Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	0 %	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	Kecamatan Kota Besi	
				Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	70 %		99 %	115.264.104	100 %	107.321.400	90 %	107.321.400	-	95 %	140.885.372	96 %	147.929.640	96 %	618.721.916	Kecamatan Baamang	
				Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	63 %	%	63 %	53.660.676	74.95 %	53.660.700	78.5 %	53.781.222	83 %	87 %	53.580.240	90 %	53.580.240	100 %	322.044.300	Kecamatan Parenggean	
				Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	75 %	%	-	-	-	-	-	-	-	75 %	8.000.000	75 %	9.000.000	100 %	17.000.000	Kecamatan Mentaya Hulu	
				Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	NA															Kecamatan Bukit Santuai	
4	01	22		Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	NA		-	-	-	50 %	5.400.000	100 %	53.700.000	-	-	-	100 %	59.100.000		Kecamatan Telaga Antang	
4	01	22		Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	NA		100 %	53.660.676	100 %	53.700.000	100 %	53.700.000	100 %	53.700.000	100 %	53.700.000	100 %	53.700.000	100 %	322.160.676	Kecamatan Antang Kalang
				Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah melakukan	100 %		-	-	99,78 %	26.830.350	85 %	28.262.624	90 %	27.000.000	80 %	25.924.100	80 %	27.000.000	80 %	135.017.074	Kecamatan Cempaga Hulu



BAB VII



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
				Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa yang memanfaatkan teknologi dalam pembangunan	N A	40 %	2.364.358.300	42 %	354.531.500	45 %	175.382.250	47 %	1.003.461.061	53 %	1.108.461.061	60 %	1.108.461.061	60 %	6.114.655.233	DPMD
					Persentase temuan dengan indikasi penyimpangan penggunaan APBDesa															DPMD	
				Program Penunangan Kegiatan PKK	Persentase peningkatan kualitas PKK	N A	100 %	471.432.862	100 %	251.500.000	100 %	330.000.700	100 %	365.500.000	100 %	365.500.000	100 %	349.756.550	100 %	2.133.690.112	DPMD
				Program Penyelenggaraa n Pemilihan Pemerintah dan Kelembagaan Desa	Persentase pelaksanaan pilkades sesuai Permendagri 65/2017 dalam pilkades serentak	N A	100 %	603.116.000	100 %	5.213.906.300	100 %	3.425.753.500	100 %	348.925.000				-	100 %	9.591.700.800	DPMD
					Persentase Kepala Desa terpilih yang lulus dengan kategori baik																DPMD
				Program Sistem Informasi/Admini strasi Desa	Persentase produk hukum yang dihasilkan terhadap kebutuhan	N A			100 %	210.000.000	100 %	7.080.000	100 %	160.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	477.080.000	DPMD
				Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	NA	- %	-	- %	-	- %	-	- %	-	75 %	4.500.000	80 %	6.500.000	80 %	11.000.000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
				Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	75 %	0%	-	96.77%	9.000.000	100%	2.995.000	0%	2.995.000	75%	13.000.000	75%	14.000.000	75%	41.990.000	Kecamatan Teluk Sampit
				Program Peningkatan partisipasi	Persentase desa/kelurahan yang mengalami	NA	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	-	- -	-	- -	0	Kecamatan Pulau Hanaut



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				masyarakat dalam membangun desa	peningkatan status																
				Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	0 %	0 %	-	0 %	-	85,00 %	66.956.000	85,00 %	90.000.000	85,00 %	90.000.000	85,00 %	90.000.000	85,00 %	90.000.000	Kecamatan M. B. Ketapang
1	20	17	17	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status		0%	0	99,30%	2.870.000,00	95%	3.850.000,00	95%	5.110.000,00	98%	25.000.000,00	99%	26.000.000,00	100%	72.700.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
				Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	0 %	%	-	70 %	12.240.000	70 %	15.900.000	50 %	11.525.000	70 %	16.000.000	70 %	16.000.000	66 %	71.665.000	Kecamatan Kota Besi
				Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	100 %	-	-	100 %	11.580.000	100 %	9.900.000	100 %	11.600.000	100 %	33.256.251	100 %	34.919.064	100 %	101.255.315	Kecamatan Baamang
				Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	NA		-		-		-		-	35 %	10.500.000	50 %	14.500.000	100 %	25.000.000	Kecamatan Parenggean
				Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	75 %	1.000.000	75 %	1.000.000	100 %	2.000.000	Kecamatan Mentaya Hulu
				Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	NA	-	-	70 %	-	80 %	-	90 %	11.000.000	95 %	-	100 %	-	100 %	11.000.000	Kecamatan Bukit Santuai

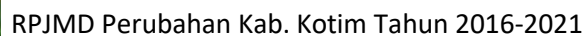


Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					membangun desa																	
4	01	22	17		Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	NA	-	-	-	-	-	-	100 %	1.050.000	100 %	14.000.000	100 %	15.050.000	Kecamatan Telaga Antang		
4	01	22	17		Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	NA	-	-	0 %	26.000.000	0 %	28.000.000	20 %	28.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	142.000.000	Kecamatan Antang Kalang
					Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	NA	-	-	80 %	5.500.000	80 %	7.000.000	80 %	8.000.000	80 %	8.000.000	80 %	8.000.000	80 %	36.500.000	Kecamatan Cempaga Hulu
					Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	NA	-	-	50 %	10.000.000	55 %	10.000.000	60 %	10.000.000	65 %	12.000.000	70 %	15.000.000	70 %	57.000.000	Kecamatan Cempaga
					Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status															Kecamatan Seranau	
					Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	NA						60 %	10.000.000	65 %	12.000.000	70 %	15.000.000	70 %	37.000.000	Kecamatan Telawang	
					Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa/kelurahan yang mengalami peningkatan status	NA	-	-	54 %	22.000.000	54 %	22.000.000	72 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	88.000.000	Kecamatan Tualan Hulu		



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
				Program Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB metode kontrasepsi MKJP	99,65 %	77,33 %	258.552.750,00	99 %	490.763.000,00	100 %	293.306.000,00	100 %	297.436.000,00	100 %	318.728.000,00	100 %	318.728.000,00	100 %	1.977.513.750,00	DP3AP2KB
				Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase KB aktif	100 %	99,24 %	222.151.750,00	94,55 %	42.965.750,00	100 %	3.060.935.000,00	100 %	4.163.215.000,00	100 %	201.547.900,00	100 %	201.547.900,00	100 %	7.892.363.300,00	DP3AP2KB
				Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase PIK Aktif	92,84 %	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	18.000.000,00	DP3AP2KB
				Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri	Persentase KB aktif	94,16 %	98,27 %	217.981.400,00	83,12 %	93.440.000,00	100 %	65.684.000,00	100 %	37.984.000,00	100 %	16.600.000,00	100 %	16.600.000,00	100 %	448.289.400,00	DP3AP2KB
				Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase Tribina Aktif (BKB,BKR,BKL)	100 %	100 %	40.814.000,00	100 %	40.814.000,00	100 %	40.814.000,00	100 %	40.814.000,00	100 %	40.814.000,00	100 %	40.814.000,00	100 %	244.884.000,00	DP3AP2KB
				Perhubungan																	
			15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase prasarana dan fasilitas transportasi darat/pelayaran/ udara yang fungsional	50 %	65 %	1.700.000.000	70 %	200.000.000	75 %	200.000.000	75 %	150.000.000	80 %	2.000.000.000	85 %	2.500.000.000	85 %	2.500.000.000	Dinas Perhubungan
			16	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase fasilitas perlengkapan keselamatan jalan dalam kondisi baik	65 %	75 %	150.000.000	79 %	250.000.000	82 %	385.000.000	90 %	600.000.000	95 %	600.000.000	95 %	600.000.000	98 %	600.000.000	Dinas Perhubungan
					Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan	45 %	55 %	500.000.000	67 %	650.000.000	72 %	400.000.000	75 %	100.000.000	80 %	750.000.000	85 %	750.000.000	85 %	750.000.000	Dinas Perhubungan



BAB VII



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan Telekomunikasi	rekomendasi yang diakomodir dalam kebijakan				%	215.650.000	7,66%	52.920.000			66%	52.920.000	66%	52.920.000	%	374.410.000	
				Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan informatika	Persentase jaringan kabel dan nirkabel yang terbangun		NA	-	90,84%	1.442.000.000	42,02%	455.775.000	0,00%	50.062.435	42,02%	455.775.000	42,02%	455.775.000	100%	2.859.387.435	Diskominfo
10	03	01	20	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan publikasi atas pelayanan tugas komunikasi, informasi dan media massa	NA	100%	1.859.671.500	100%	1.780.625.000	100%	2.545.644.784	100%	2.557.490.000	100%	1.862.150.000	100%	1.890.000.000	100%	12.495.581.284	Sekretariat Daerah
				Program Kerjasama dengan Mas Media	Persentase kegiatan yang dipublikasikan melalui media masa	100%			100%	10.000.000								100%	10.000.000	Kecamatan Seranau	
				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	
2.11	2.1.1.1	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Cakupan UMKM Binaan	2,74%	3,11%	147.141.660	3,47%	57.535.000	3,83%	115.009.870	4,19%	254.573.425	4,54%	256.000.000	4,89%	256.000.000	4,89%	256.000.000	Dinas Koperasi - UKM
2.11	2.1.1.1	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase Pelaku UMK dan Koperasi yang terampil berwirausaha	2,74%	3,14%	51.439.500	3,51%	135.014.200	3,89%	101.653.300	4,27%	56.800.000	4,65%	65.000.000	5,02%	65.000.000	5,02%	65.000.000	Dinas Koperasi - UKM
2.11	2.1.1.1	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM Baru	NA	0,61%	253.175.900	0,61%	303.016.012	0,61%	463.223.380	0,62%	384.880.000	0,62%	475.580.000	0,63%	476.161.850	0,63%	476.161.850	Dinas Koperasi - UKM
2.11	2.1.1.1	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan koperasi yang memenuhi standar perkoperasian	76%	80%	263.605.900	80%	166.897.600	80%	371.323.400	80%	466.600.000	80%	483.587.900	80%	482.600.000	80%	482.600.000	Dinas Koperasi - UKM



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Penanaman Modal																	
			15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMDN/PMA		5 PMDN / PMA	120.500.000	5 PMDN / PMA	254.500.000	5 PMDN / PMA	303.000.000	5 PMDN / PMA	352.000.000	5 PMDN / PMA	382.000.000	5 PMDN / PMA	382.000.000	30 PMDN / PMA	1.794.000.000	DPMPTSP
			16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi PMDN / PMA		Rp. 4,5 M	78.875.000	Rp. 4,5 M	78.875.000	Rp. 4,5 M	315.000.000	Rp. 4,5 M	130.000.000	Rp. 4,5 M	33.000.000	Rp. 4,5 M	500.000.000	Rp. 4,5 M	1.432.750.000	DPMPTSP
			17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Terlaksananya penyiapan potensi sarana dan prasaran		1 Kegiatan an dan Perda	200.000.000	1 Kegiatan an dan Perda	100.000.000	1 Kegiatan an dan Perda	100.000.000	1 Kegiatan an dan Perda	100.000.000	1 Kegiatan an dan Perda	100.000.000	1 Kegiatan an dan Perda	100.000.000	1 Kegiatan an dan Perda	700.000.000	DPMPTSP
			21	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah (cakupan) Informasi		1 Paket Aplikasi	50.000.000	1 Paket Aplikasi	50.000.000	1 Paket Aplikasi	100.000.000	1 Paket Aplikasi	100.000.000	1 Paket Aplikasi	100.000.000	1 Paket Aplikasi	100.000.000	1 Paket Aplikasi	500.000.000	DPMPTSP
			22	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Presentase Peningkatan Pelayanan Perizinan		70%	-	70%	-	70%	60.000.000	70%	60.000.000	70%	65.000.000	70%	70.000.000	70%	255.000.000	DPMPTSP
			xx	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	Presentase Pencapaian Pelayanan Perizinan		-	-	-	-	70%	-	70%	100.000.000	75%	250.000.000	80%	350.000.000	80%	350.000.000	DPMPTSP
			xx	Program Optimalisasi Pelayanan Jasa Usaha	Jumlah Perizinan Usaha yang di keluarkan/terbitkan		-	-	-	-	70%	-	70%	100.000.000	75%	250.000.000	80%	350.000.000	80%	350.000.000	DPMPTSP
3	06	01	26	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase produk dan potensi yang dipromosikan (Disperdagin)	N/A	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	Disperdagin
03	01	01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Promosi dan Kerjasama Investasi yang terpenuhi		0 %	-	0 %	-	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	140.000.000	Dinas Pertanian
2.1 2.2. 05	01	01	15	Program Peningkatan Promosi dan Investasi	Persentasi Informasi Edukasi Tentang Lingkungan yang		100 %	40.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	210.000.000	DLH



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Daerah	di Publikasikan																
2.12	2.11.1	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Presentase Produk UMKM yang dipromosikan	NA	NA	NA	NA	77,7 %	34.080.000	79 %	34.120.000	81 %	45.000.000	82 %	45.000.000	82 %	45.000.000	Dinas Koperasi - UKM	
2	03	01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase promosi dan kerjasama investasi yang terpenuhi		-	-	100 %	30.000.000	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	16	01	15	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Presentase sarana promosi	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	180.000.000	Disbudpar
4	04	05	14	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Prosentase informasi mengenai sistem dan prosedur tata kelola keuangan dan aset daerah	90%	90%	39.885.000,00	90%	30.000.000,00	30.000.000,00	97%	30.000.000,00	98%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	BPKAD
04	07	01	14	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase informasi pengelolaan pendapatan daerah yang dipublikasikan	98,22 %	100,0 %	30.000.000,00	95,89 %	28.768.000,00	30.000.000,00	90,00 %	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	Bappenda
1	26	01	15	Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	persentase produk arsip dan kepustakaan yg dipromosikan	100%	100%	28.150.000	100%	28.440.000	29.885.000	100%	29.870.000	100%	28.150.000	100%	28.150.000	100%	28.150.000	172.645.000	Dispustakas ip
2	13	1	14	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Prosentase Program/Kegiatan yang dipromosikan kepada Masyarakat	100%	100%	26.573.000	92,58 %	30.000.000	30.000.000	100%	30.000.000	100 %	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	176.573.000	Dispora
01	03	01	14	Program Peningkatan Investasi dan Promosi Daerah	Persentase informasi terkait pekerjaan umum dan tata ruang yang dipublikasikan		100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	33.000.000	100 %	36.300.000	100 %	36.300.000	Dinas PUPR	
			1	Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Persentase informasi terkait perhubungan yang dipublikasikan	100 %	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	30.000.000	100 %	37.258.804	100 %	38.000.000	100 %	38.000.000	100 %	38.000.000	Dinas Perhubungan	
				Program	Presentase		100 %		100,0 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Disperkim	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Produk dan Potensi Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dipromosikan			30.000.000	0	30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		180.000.000	
				Program peningkatan promosi dan kerjasama Investasi	Presentase informasi terkait komunikasi dan informatika yang dipublikasikan		NA	-	71,97 %	30.000.000	88,90 %	30.000.000	15,67 %	30.000.000	88,90 %	30.000.000	88,90 %	30.000.000	100 %	150.000.000	Diskominfo
02	01	01	14	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase informasi terkait Kesehatan yg diekspose	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Dinas Kesehatan
01	05	03	07	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase edukasi Penanggulangan Bencana yang di informasikan	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %	-	100 %	35.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	135.000.000	BPBD
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase edukasi PMKS yang dipublikasikan	100 %	100 %		100 %	21.070.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	180.000.000	Dinsos
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase edukasi pendidikan yang diinformasikan/di publikasikan	100%	100%	21.700.750	98,62%	30.528.000	100%	30.000.000	100%	31.200.000	100%	33.200.000	100%	34.528.000	100%	35.528.000	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk dan pelayanan yang dipromosikan	100 %	100 %	24.540.000,00	100 %	26.489.500,00	100 %	27.151.738,00	100 %	27.151.738,00	100 %	27.151.738,00	100 %	27.151.738,00	100 %	159.636.452,00	DISDUKCA PIL
01	16	01	15	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi	Persentase informasi terkait ketenagarkerjaan dan transmigrasi yang dipromosikan	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	180.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase informasi terkait wawasan berkebangsaan dan berpolitik yang dipromosikan	100 %	0 %	-	100 %	30.000.000	100 %	39.080.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	159.080.000	Badan Kesbangpol

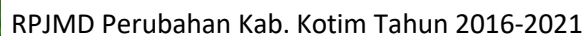


RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk dalam institusi DPRD yang diekspose	100 %	100 %	99.000.000,00	100 %	99.000.000,00	100 %	99.000.000,00	100 %	99.000.000,00	100 %	99.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	595.000.000,00	Sekretariat DPRD
05	08	01	14	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk terkait kepegawaian yang dipromosikan	100 %	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	BKD
				Program Peningkatan Promosi Dan Investasi Daerah	Persentase informasi terkait KORPRI yang dipublikasikan	100 %	0,95	20.442.000	100 %	29.842.000	100 %	29.842.000	100 %	29.842.000	100 %	29.842.000	100 %	29.842.000	100 %	169.652.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	Persentase kepesertaan dalam kegiatan promosi daerah	100 %	100 %	36.150.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	161.150.000	DPMD
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	NA	96 %	11.235.000	95 %	12.290.000	80 %	9.530.245	80 %	12.983.800	85 %	13.629.000	85 %	15.629.000	85 %	75.297.045	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	75 %	99%	15.278.300	84.34%	7.590.909	100%	15.000.000	100%	15.000.000	75%	27.000.000	75%	29.000.000	85%	108.869.209	Kecamatan Teluk Sampit
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	NA	100 %	34.170.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	149.170.000	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	0 %	100 %	20.268.000	100 %	7.000.000	85,00 %	15.000.000	85,00 %	15.014.456	85,00 %	24.294.000	85,00 %	24.294.000	85,00 %	24.294.000	Kecamatan M. B. Ketapang
1	20	17	14	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	100%	100%	18.500.000,00	97,33%	15.000.000,00	95%	14.500.000,00	95%	15.000.000,00	98%	20.000.000,00	99%	20.000.000,00	100%	102.600.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	0 %	80 %	13.865.000	80 %	14.220.000	80 %	12.770.000	0 %	-	80 %	19.000.000	80 %	19.000.000	80 %	78.855.000	Kecamatan Kota Besi



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	100 %	100 %	22.700.000	100 %	15.000.000	100 %	15.500.000	100 %	18.750.000	100 %	40.377.960	100 %	42.396.858	100 %	154.724.818	Kecamatan Baamang
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	80 %	75 %	15.395.000	78 %	15.250.000	80 %	13.900.000	85 %	11.400.000	88 %	21.000.000	90 %	21.000.000	100 %	97.945.000	Kecamatan Parenggean
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	100 %	100 %	17.700.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	75 %	17.700.000	75 %	17.700.000	75 %	98.100.000	Kecamatan Mentaya Hulu
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	100 %	100 %	15.085.137	100 %	13.540.000	100 %	14.980.000	100 %	15.630.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	79.235.137	Kecamatan Bukit Santuai
4	01	22	15	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	100 %	99 %	18.498.000	83 %	13.180.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	21.000.000	100 %	21.000.000	100 %	103.678.000	Kecamatan Telaga Antang
4	01	22	15	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	100 %	100 %	30.000.000	100 %	20.000.000	100 %	22.000.000	100 %	24.405.622	100 %	26.000.000	100 %	27.000.000	100 %	149.405.622	Kecamatan Antang Kalang
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	99,41 %	92 %	13.700.000	96 %	14.400.000	100 %	11.227.802	95 %	11.227.802	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	90.555.604	Kecamatan Cempaga Hulu
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	100 %	100 %	14.318.000	100 %	14.318.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	108.636.000	Kecamatan Cempaga
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	99,93	100 %	20.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	110.000.000	Kecamatan Seranau
				Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase produk di kecamatan yang dipromosikan	63,64 %	100 %	12.000.000	100 %	15.000.000	100 %	13.670.909	75 %	15.000.000	75 %	21.395.715	75 %	22.395.715	100 %	99.462.339	Kecamatan Telawang



BAB VII



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	3		1	Peningkatan Sarana dan prasarana Pemuda	Sarana Prasarana Olahraga yang memenuhi Standar			-		-		25.000.000		25.000.000	%	25.000.000		25.000.000		100.000.000	
13	03	01	22	Program Pembinaan/Pem berdayaan Remaja, Pemuda, Perempuan dan Olah Raga	Persentase laporan terkait remaja, pemuda, perempuan, dan olahraga yang ditangani	NA	100 %	116.262.000	100 %	228.879.100	100 %	995.634.200	100 %	818.557.000	100 %	277.000.000	100 %	277.000.000	100 %	2.713.332.300	Sekretariat Daerah
				Program Pembinaan Pemberdayaan Remaja, Pemuda, Perempuan dan Olahraga	Persentase pelajar yang memahami kesehatan di lingkungan sekolah	NA	0%	0	100,00%	4.410.000,00	95%	6.600.000,00	97%	4.500.000,00	0%	-	0%	-	97%	15.510.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
				Statistik																	
				Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase informasi dan data tentang rencana pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat	N/A N / A	100 %	58.407.000	80 %	28.649.454	80 %	40.640.000	80 %	100.640.000	80 %	100.640.000	80 %	158.523.546	80 %	487.500.000	Bappeda
				Program Pengembangan data/informasi/Statistik Daerah	Persentase data/informasi/statistik daerah yang terpublikasi		NA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.400.000	0,00%	25.000.000	0,00%	25.000.000	100 %	58.400.000	Diskominfo
				Persandian																	
				Program Optimalisasi Keamanan informasi	Persentase portal informasi Pemerintah Kab. Kotim yang terproteksi		NA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	23.400.000	0,00%	23.400.000	100 %	46.800.000	Diskominfo
				Kebudayaan																	
2	16	01	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Presentase tradisi budaya daerah yang dilaksanakan	99,21%	99,21%	884.598.750	97,15%	1.314.740.000	95,00%	1.316.800.000	95,00%	240.000.000	95,00%	260.000.000	95,00%	280.000.000	95,00%	4.296.138.750	Disbudpar
2	1	0	1	Program	Presentasr group	95,64%	96,59%		96,98%		95,00%		95,00%		95,00%		0,00%		95,00%		Disbudpar



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	6	1	6	Pengelolaan Kekayaan Budaya	kesenian yang berkembang			808.598.750		467.669.820		338.967.981		299.972.150		299.972.150		-		2.215.180.851	
2	16	01	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Presentase penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	98,72%	99,54%	999.262.000	99,21%	1.159.557.000	95,00%	1.710.497.000	95,00%	999.262.000	95,00%	999.262.000	95,00%	999.262.000	95,00%	6.867.102.000	Disbudpar
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	NA	- %	-	- %	-	- %	-	- %	75	4.000.000	80	6.000.000	80	10.000.000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	75 %	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	85%	-	-	Kecamatan Teluk Sampit	
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	NA	- -	0	100 %	10.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	- -	0	- -	0	100 %	20.000.000	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	Kecamatan M. B. Ketapang
1	20	17	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti		0%	0	99,33%	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	100%	12.500.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	48.970.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	0 %	%	-	80 %	23.200.000	80 %	29.200.000	-	-	80 %	30.000.000	80 %	32.000.000	80	114.400.000	Kecamatan Kota Besi
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	100 %	100 %	12.000.000	100 %	20.000.000	100 %	17.500.000	100	17.500.000	100	28.940.625	100	30.387.656	100	126.328.281	Kecamatan Baamang
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	NA		-	25 %	16.740.000	40 %	20.250.000	50 %	7.750.000	75 %	21.785.000	80 %	21.000.000	100 %	87.525.000	Kecamatan Parenggean
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mentaya Hulu
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	0	- -	-	- -	-	100 %	7.480.000	100 %	30.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000		77.480.000	Kecamatan Bukit Santuai
4	01	22	06	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	NA	- -	-	-	10.000.000	100 %	13.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	68.000.000	Kecamatan Telaga Antang



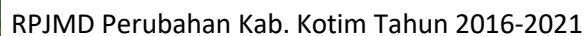
RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	0	2	0	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	NA	-	-	100 %	10.000.000	100 %	13.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	68.000.000	Kecamatan Antang Kalang
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	NA	-	-	-	90 %	7.100.000	85 %	12.000.000	100 %	12.000.000	100 %	12.000.000	100 %	43.100.000	Kecamatan Cempaga Hulu	
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti															Kecamatan Cempaga	
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti				100 %	8.100.000	100 %	10.800.000	100 %	10.800.000	100 %	10.800.000	100 %	10.800.000	100 %	51.300.000	Kecamatan Seranau
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti															Kecamatan Telawang	
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kegiatan perlombaan yang diikuti	NA		-		100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	60.000.000	Kecamatan Tualan Hulu	
				Perpustakaan																	
1	2	0	2	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah anggota perpustakaan	100%	100%	113.604.900	100%	193.810.000	100%	97.285.000	100%	78.775.000	100%	68.844.900	100%	68.844.900	100%	542.389.700	Dispustakas ip
				Kearsipan																	
1	2	0	1	Penyelamatan dan pelestarian Dokumen /Arsip Daerah	Persentase SOPD yg menerapkan standar pengelolaan kearsipa	100%	100%	586.000	100%	28.675.000	100%	62.605.000	100%	143.730.000	100%	20.586.000	100%	20.586.000	100%	276.768.000	Dispustakas ip
				Urusan Pilihan																	
				Kelautan dan Perikanan																	
3	0	1	5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase produk dan potensi perikanan yang dipromosikan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	100 %	220.000.000	Dinas Perikanan
3	0	2		Program Pengembangan	Persentase peningkatan	100 %	100 %	0	100 %	19.600.0	100 %	20.000.0	100 %	20.000.	100 %	20.000.0	100 %	20.000.0	100 %	99.600.0	Dinas Perikanan



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Budidaya Perikanan	jumlah produksi perikanan budidaya				00		00		000		00		00		00		
3	01	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	100 %	100 %	0	100 %	1.717.049.900	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	3.717.049.900	Dinas Perikanan
3	01	24		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Persentase jumlah usaha perikanan berbasis kawasan dan produk unggulan	100 %	100 %	0	100 %	96860000	100 %	510.000.000	100 %	510.000.000	100 %	510.000.000	100 %	510.000.000	100 %	2.136.860.000	Dinas Perikanan
3	01	25		Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Sentra Perikanan Terpadu	Persentase sarana prasarana kawasan Minapolitan dan Sentra Perikanan Terpadu yang dikelola	100 %	100 %	0	100 %	672305000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	3.072.305.000	Dinas Perikanan
3	01	26		Program Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang berdaya saing	100 %	100 %	0	100 %	226.228.300	100 %	305.000.000	100 %	305.000.000	100 %	305.000.000	100 %	305.000.000	100 %	1.446.228.300	Dinas Perikanan
3	01	27		Program Pendataan dan Perijinan Perikanan	Persentase jumlah rekomendasi SIUP, Tanda Pencatatan dan Pendaftaran Usaha Perikanan yang diterbitkan	100 %	100 %	0	100 %	7678000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	207.678.000	Dinas Perikanan
3	01	29		Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Persentase peningkatan daya saing produk perikanan	100 %	100 %	0	100 %	228.175.000	100 %	240.000.000	100 %	240.000.000	100 %	240.000.000	100 %	240.000.000	100 %	1.188.175.000	Dinas Perikanan
3	01	30		Program Peningkatan Potensi dan Pengelolaan Perikanan	Persentase potensi dan usaha perikanan yang dikelola	100 %	100 %	0	100 %	551.850.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	2.551.850.000	Dinas Perikanan
3	01	31		Program Pengembangan dan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	Persentase peningkatan produksi komoditas ikan unggul	100 %	100 %	402.796.000	100 %	276.979.500	100 %	300.000.000	100 %	350.000.000	100 %	400.000.000	100 %	450.000.000	100 %	2.179.775.500	Dinas Perikanan



BAB VII



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Tanaman Pangan dan Hortikultura	dan hortikultura																
03	01	01	27	Program Pengembangan Usaha Tani	Persentase berkembangnya usaha pertanian	95 %	99,65 %	1.592.386.684	92,97 %	617.533.300	100 %	603.337.800	100 %	418.594.800	100 %	477.555.088	100 %	477.555.088	100 %	4.186.962.760	Dinas Pertanian
03	01	01	28	Program Peningkatan Kualitas SDM dan SDA Pertanian Berwawasan Lingkungan	Persentase petani, kelompok tani yang telah mengikuti pelatihan	80 %	0 %	-	88,83 %	90.904.250	100 %	70.565.000	100 %	43.120.000	100 %	132.130.974	100 %	132.130.974	100 %	468.851.198	Dinas Pertanian
03	01	01	28	Program Pembinaan Perlindungan Tanaman,Gangguan Usaha dan Konservasi Lahan dan Air	Persentase terpenuhinya pengendalian OPT tanaman perkebunan	90 %	0 %	-	97,76 %	87.100.000	100 %	110.000.000	100 %	30.000.000	100 %	2.242.335.000	100 %	2.242.335.000	100 %	4.711.770.000	Dinas Pertanian
03	01	01	29	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Persentase infrastruktur perkebunan yang terpenuhinya	80 %	0 %	0	0 %	-	100 %	449.400.100	00	-	100 %	1.470.000.000	100 %	1.470.000.000	100 %	3.389.400.100	Dinas Pertanian
03	01	01	29	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian dan Peternakan	Persentase pemenuhan teknologi pertanian dan peternakan	90 %	99,61 %	4.280.692.686	96,47 %	2.026.645.950	100 %	1.591.825.000	100 %	358.160.000	100 %	3.923.382.272	100 %	4.595.834.661	100 %	16.776.540.569	Dinas Pertanian
03	01	01	30	Program Pengembangan Manajemen Administrasi dan Pemberdayaan Organisasi	Persentase pengembangan manajemen administrasi yang terpenuhi	80 %	99,49 %	162.641.000	81,16 %	155.256.000	100 %	195.260.000	100 %	214.010.200	100 %	422.940.609	100 %	427.188.676	100 %	1.577.296.485	Dinas Pertanian
03	01	01	33	Program Peningkatan Ketahanan Perkebunan	Persentase terlaksananya kemitraan usaha perkebunan	80 %	0 %	0	77,42 %	16.611.900	100 %	52.025.000	100 %	45.000.100	100 %	952.000.000	100 %	952.000.000	100 %	2.017.637.000	Dinas Pertanian
				Kehutanan																	
3.04.2.05	01	01	36	Program Pengukuhan Kawasan Hutan	Jumlah Kecamatan Pengukuhan Kawasan Hutan	-	-	-	4 Kecamatan	2.947.394.000	13 Kecamatan	3.495.275.000	-	-	3 Kecamatan	1.138.000.000	-	-	17 Kecamatan	6.442.669.000	DLH
3.04.2.	01	01	37	Program Penohijauan	Jumlah Luasan Penanaman	-	-	-	1 Ha	295.308.	2 Ha	583.982.	5 Ha	45.000.	10 Ha	100.000.	20 Ha	100.000.	38 Ha	879.290.	DLH



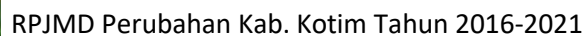
RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
05					Kawasan Konservasi				000		800		000		000		000		800		
5.0 2	5	0 2	0 2	Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Persentase Pelaksanaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	-	-	-	0	-	-	100 %	68.195.000	100 %	68.000.000	100 %	68.195.000	100 %	204.390.000	DLH	
2.0 5.2. 05	0 1	0 1	1 7	Program Penanaman Bambu pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah	Jumlah Luasan Penanaman Bambu Pada kanan Kiri Sungai	-	-	-	0	-	-	50 Ha	200.000.000	50 Ha	200.000.000	50 Ha	200.000.000	150 Ha	600.000.000	DLH	
2.0 5.2. 05	0 1	0 1	2 1	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan- Kawasan konservasi laut dan hutan	Jumlah Luasan pelaksanaan KHDTK Kebun Raya dan Hutan Kota	-	-	-	17.162.344.000	2 Ha	1.500.000.000	5 Ha	914.800.000	10 Ha	520.364.950	10 Ha	562.790.000	28 Ha	20.660.298.950	DLH	
2.0 5.2. 05	0 1	0 1	2 1	Program Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)	Jumlah Luasan Pelaksanaan Taman Hutan Raya (TAHURA)	-	-	-	-	-	-	6.400 Ha	50.000.000	400 Ha	100.000.000	400 Ha	100.000.000	800 Ha	250.000.000	DLH	
2.0 5.2. 05	0 1	0 1	2 2	Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	-	-	-	74.560.000	100 %	64.400.000	100 %	64.400.000	100 %	74.000.000	100 %	74.000.000	83,33 %	351.360.000	DLH	
				Perdagangan																	
3	0 6	0 1	1 8	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	N/A	93%	659.814.000	87,46 %	78%	2.975.720.000	80%	3.634.356.000	80%	-	80%	-	80%	11.721.092.000	Disperdagin	
3	0 6	0 1		Program Peningkatan dan Perkembangan Ekspor	Peningkatan Nilai Ekspor Bersih	N/A	0,0%		0,0%	0,0%		60%	-	60%	-	60%	-	60%	-	Disperdagin	
3	0 0	0 0	1	Program	Peningkan PAD	N/A	100%		0,0%	75%		75%		75%		75%		75%		Disperdagin	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	6	1	9	Pendataan dan Pemungutan Retribusi Pasar	dan akurasi Data Pasar			11.250.000				-		-		-		-		11.250.000	
	0	0	2	Program Peningkatan Kualitas Kebersihan dan Keamanan Lingkungan Pasar	Peningkatan Kualitas Kebersihan dan Keamanan Lingkungan Pasar	N/A	68%	137.200.000	94,88 %	50.000.000	80%	98.770.000	80%	85.000.000	80%	-	85%	-	95%	370.970.000	Disperdagin
3	0	0	2	Program Pembinaan Pedagang	Cakupan Pelayanan pasar Penyeimbang	N/A						80%		85%		90%		95%	-	Disperdagin	
3	0	0	2	Program Pengamanan Perdagangan dan Pengawasan Barang Beredar	Prosentase Peningkatan Keamanan Komoditas Perdagangan dan Peredaran Barang dalam Pengawasan	N/A	0%		92,23 %	197.146.000	85%	201.270.125	85%	-	85%	-	85%	-	85%	398.416.125	Disperdagin
3	0	0	2	Program Peningkatan Pelayanan Metrologi Legal	Jumlah/Prosentase Pengguna Peralatan Kemetrolagian yang terlayani di Kab. Kotim	N/A	0%		83,96 %	1.726.250.000	90%	3.095.512.600	90%	300.607.500	90%		90%		95%	5.122.370.100	Disperdagin
3	0	0	2	Program Peningkatan pemahaman Metrologi Legal	Jumlah/Prosentase pengguna alat UTP yang taat aturan kemetrolagian	N/A	0%		79,58 %	124.920.000		222.830.000	85%	38.100.000	85%		90%		95%	385.850.000	Disperdagin
3	0	0	2	Program Pengawasan Kemetrolagian	Jumlah/Persentase pengguna alat UTP yang terawasi untuk terip ukur	N/A	0%		0%		0%		85%		85%		85%		85%	-	Disperdagin
				Perindustrian																	
3	0	0	1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase Peningkatan Perkembangan IKM di Kab. Kotim	N/A	100%	490.760.000	99,94	473.005.000	80%	642.735.000	80%	607.100.000	80%	-	80%	-	80%	2.213.600.000	Disperdagin
3	0	0	1	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	N/A	100%	31.855.000	100%	35.800.000	80%	55.400.000	80%	129.080.000	80%	-	80%	-	80%	252.135.000	Disperdagin
3	0	0	2	Program	Persentase	N/A	0%		0%		95%		95%		100		100%		100%		Disperdagin



BAB VII



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi policy brief aspek aspek prasarana wilayah dan SDA yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	98 %	84 %	16.830.000	50 %	325.000.000	50 %	500.000.000	50 %	500.000.000	50 %	500.000.000	50 %	633.570.000	50 %	2.475.400.000	Bappeda
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA	- %	-	98 %	5.851.818	85 %	7.300.000	- %	-	80 %	8.500.000	80 %	10.500.000	80 %	32.151.818	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	75 %	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	75%	14.000.000	75%	16.000.000	75%	30.000.000	Kecamatan Teluk Sampit
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	0 %	99,83 %	28.630.000	98,22 %	14.100.000	85,00 %	13.900.000	85,00 %	31.690.000	85,00 %	31.690.000	85,00 %	31.690.000	85,00 %	31.690.000	Kecamatan M. B. Ketapang
1	20	17	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang		0%	0	100%	5.290.000,00	95%	8.700.000,00	92%	9.600.000,00	97%	18.000.000,00	98%	18.500.000,00	100%	58.490.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten																
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	0 %	0 %	-	80 %	15.000.000	80 %	18.250.000	80 %	18.250.000	80 %	19.000.000	80 %	21.000.000	80 %	91.500.000	Kecamatan Kota Besi
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	25 %	99,36 %	23.430.000	79,63 %	13.826.700	75 %	16.088.700	75 %	16.088.700	50 %	33.189.398	55 %	34.848.868	55 %	137.472.366	Kecamatan Baamang
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA	-	-	76,7 %	10.200.000	95,2 %	10.400.000	80,8 %	8.150.000	92 %	12.500.000	94,1 %	12.500.000	100 %	53.750.000	Kecamatan Parenggean
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA	-	-	-	-	-	-	-	75 %	16.000.000	75 %	16.000.000	100 %	32.000.000	Kecamatan Mentaya Hulu	
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA	90 %	-	90 %	11.750.000	90 %	12.375.000	90 %	13.750.000	90 %	12.500.000	95 %	12.500.000	95 %	62.875.000	Kecamatan Bukit Santuai
4	01	22	21	Program Perencanaan	Persentase aspirasi dalam	NA	-	-	90 %	10.000.0	100 %	9.000.00	100 %	9.000.0	100 %	12.000.0	100 %	12.000.0	95 %	52.000.0	Kecamatan Telaga



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Pembangunan Daerah	musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten				00		0		00		00		00		00	Antang	
4	01	22	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA	-	-	90 %	10.000.000	90 %	11.000.000	90 %	14.000.000	90 %	15.000.000	95 %	16.000.000	95 %	66.000.000	Kecamatan Antang Kalang
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA	-	-	100 %	8.460.000	90 %	11.750.000	90 %	11.750.000	55 %	55.000.000	55 %	60.000.000	60 %	146.960.000	Kecamatan Cempaga Hulu
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA	-	-	75 %	10.000.000	80 %	10.500.000	80 %	12.000.000	85 %	15.000.000	90 %	20.000.000	90 %	67.500.000	Kecamatan Cempaga
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA	-	-	100 %	8.100.000	100 %	10.800.000	100 %	10.800.000	100 %	10.800.000	100 %	10.800.000	100 %	51.300.000	Kecamatan Seranau
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA							75 %	12.000.000					75 %	12.000.000	Kecamatan Telawang



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					tingkat kabupaten																
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi dalam musrenbang di tingkat kecamatan yang akan diusulkan dalam musrenbang di tingkat kabupaten	NA		-		-	80 %	22.000.000	80 %	25.000.000	80 %	25.000.000	80 %	25.000.000	80 %	97.000.000	Kecamatan Tualan Hulu
				Keuangan																	
04	07	01	8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah OP Baru yang Terdata	100,00 %	56,59 %	-	101,94 %	1.116.547.343,00	100,00 %	1.130.130.000,00	100,00 %	1.497.000.000,00	100,00 %	1.675.000.000,00	100,00 %	1.780.000.000,00	100,00 %	1.780.000.000,00	Bappenda
					Persentase Peningkatan Jumlah OP Baru yang Ditetapkan	100,00 %	29,24 %	-	862,76 %	209.509.888,00	100,00 %	335.299.000,00	100,00 %	395.020.000,00	100,00 %	480.000.000,00	100,00 %	540.000.000,00	100,00 %	540.000.000,00	Bappenda
					Persentase Peningkatan Jumlah Pendapatan dari Sektor Pajak Daerah	94,09 %	140,16 %	-	137,81 %	539.409.803,00	78,85 %	412.898.000,00	112,97 %	577.848.000,00	95,19 %	815.000.000,00	117,28 %	875.000.000,00	117,28 %	875.000.000,00	Bappenda
					Prosentase OP yang Dibayarkan Oleh WP	65,21 %	63,93 %	-	65,88 %	564.016.850,00	70,00 %	282.080.000,00	75,00 %	614.090.000,00	80,00 %	320.000.000,00	85,00 %	360.000.000,00	85,00 %	360.000.000,00	Bappenda
					Prosentase Penanganan WP yang Bermasalah	70,00 %	75,00 %	-	80,00 %	153.272.500,00	85,00 %	299.475.000,00	90,00 %	356.125.000,00	95,00 %	340.000.000,00	100,00 %	380.000.000,00	100,00 %	380.000.000,00	Bappenda
4	04	05	7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Waktu penetapan Perda APBD Kabupaten Kotawaringin Timur	Tepat Waktu	Tepat Waktu	2.732.680.000,00	Tepat Waktu	2.871.640.000,00	Tepat Waktu	2.995.449.000,00	Tepat Waktu	1.924.571.600,00	Tepat Waktu	1.801.522.950,00	Tepat Waktu	1.678.473.350,00	Tepat Waktu	1.678.473.350,00	BPKAD
					Persentase realisasi penyerapan Anggaran yang telah ditetapkan	85%	85%	1.806.982.000,00	87%	1.775.080.000,00	90%	1.972.050.000,00	95%	972.050.000,00	98%	972.050.000,00	100%	972.050.000,00	100%	972.050.000,00	BPKAD
					Persentase Pelaporan Keuangan Daerah yang Sesuai Standar	90%	90%	1.017.514.000,00	90%	934.594.000,00	90%	928.677.000,00	95%	828.677.000,00	98%	828.677.000,00	100%	828.677.000,00	100%	828.677.000,00	BPKAD



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
					Akuntansi Pemerintah (SAP)																	
					Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah Dengan Nilai Aset di Neraca	90%		90%	2.738.56 6.000,00	90%	2.377.22 3.000,00	92%	2.392.96 7.500,00	95%	992.967 .500,00	97%	992.967. 500,00	98%	992.967. 500,00	98%	992.967. 500,00	BPKAD
				Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																		
05	0 8	0 1	1 6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat pengembangan sumberdaya	50 %	62,14 %	1.374.65 7.000	45,56 %	1.146.16 7.000	54,80 %	1.547.42 6.000	55,32 %	3.487.9 50.000	57,0 8 %	265.000. 000	58,25 %	-	58,25 %	7.821.20 0.000	BKD	
05	0 8	0 1	1 7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	90 %	86,23 %	2.843.26 2.700	72,41 %	2.732.24 6.000	90 %	3.094.82 4.200	90 %	3.405.8 39.900	90 %	1.422.14 7.000	90 %	1.425.14 7.000	90 %	14.923.4 66.800	BKD	
05	0 8	0 1	1 8	Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Persentase pengembangan sistem informasi manajemen	-	-	-	100 %	561.700. 000	100 %	179.400. 000	100 %	179.400 .000	100 %	115.000. 000	100 %	115.000. 000	100 %	1.150.50 0.000	BKD	
				Penelitian dan Pengembangan																		
				Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi policy brief yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	N/A	N / A	50 %	258.387. 000	50 %	164.300. 500	50 %	196.175. 000	50 %	300.000 .000	50 %	410.000. 000	50 %	493.712. 500	50 %	1.822.57 5.000	Bappeda
				Administrasi Pemerintahan																		
4	0 4	0 5	1 9	Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang diberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa	30 Desa	30 Desa	980.247. 000,00	50 Desa	569.747. 000,00	75 Desa	347.040. 000,00	100 Desa	789.000 .000,00	130 Desa	789.000. 000,00	168 Desa	789.000. 000,00	168 Desa	789.000. 000,00	BPKAD	
4.0 1	0 3	0 1	1 6	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penyelesaian tapal batas administrasi antar	NA	100 %	1.309.07 7.800	100 %	2.366.76 2.000	100 %	1.862.60 6.800	100 %	1.245.9 24.300	100 %	1.595.00 0.000	100 %	1.520.00 0.000	100 %	9.899.37 0.900	Sekretariat Daerah	



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					kecamatan																
					Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	NA	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Sekretariat Daerah
4.02	03	01	15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pelaksanaan kebijakan KDH sesuai peraturan perundangan yang berlaku	NA	100 %	1.465.367.400	100 %	1.664.199.300	100 %	1.284.423.800	100 %	1.163.517.600	100 %	1.628.000.000	100 %	1.648.000.000	100 %	8.853.508.100	Sekretariat Daerah
4.01	03	01	40	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh PNSD	NA	100 %	575.657.100	100 %	595.114.800	100 %	682.110.900	100 %	600.540.700	100 %	590.000.000	100 %	590.000.000	100 %	3.633.423.500	Sekretariat Daerah
4.01	03	01	41	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase SOPD yang menyelesaikan dokumen kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai standar	NA	100 %	701.819.500	100 %	1.043.121.800	100 %	1.343.433.455	100 %	1.215.488.100	100 %	752.000.000	100 %	852.000.000	100 %	5.907.862.855	Sekretariat Daerah
4.01	40103	01	37	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai standar dan peraturan perundangan	NA	100 %	3.335.865.374	100 %	2.438.859.400	100 %	3.959.438.500	100 %	4.437.407.900	100 %	2.885.000.000	100 %	2.990.000.000	100 %	20.046.571.174	Sekretariat Daerah
4.01	03	01	17	Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik (sesuai perencanaan)	NA	100 %	6.885.374.300	100 %	4.876.316.544	100 %	7.723.865.694	100 %	6.215.273.500	100 %	3.512.500.000	100 %	3.297.500.000	100 %	32.510.830.038	Sekretariat Daerah
4.01	03	01	39	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah	Cakupan pelayanan pembentukan keriasama antar	NA	100 %	155.700.800	100 %	145.552.000	100 %	179.118.000	100 %	131.935.000	100 %	240.000.000	100 %	240.000.000	100 %	1.092.305.800	Sekretariat Daerah



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Daerah	pemerintah daerah																
4.01	03	01	42	Program Promosi Pembangunan Daerah	Cakupan pelaksanaan koordinasi pengembangan sarana dan prasarana ekonomi	NA	100 %	268.951.000	100 %	177.543.700	100 %	242.128.000	100 %	232.226.000	100 %	310.000.000	100 %	310.000.000	100 %	1.540.848.700	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase aspirasi masyarakat yang terwakili melalui institusi DPRD	100 %	100 %	9.162.280.000,00	100 %	7.664.000.000,00	100 %	7.764.000.000,00	100 %	7.764.000.000,00	100 %	7.764.000.000,00	100 %	7.770.000.000,00	100 %	47.888.280.000,00	Sekretariat DPRD
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	100 %	100 %	16.000.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	16.000.000,00	100 %	96.000.000,00	Sekretariat DPRD
				Program Penunjang Dewan Pengurus Korpri	Persentase anggota KORPRI yang ikut serta dalam kegiatan KORPRI	NA	0,95	661.369.000		-		-		-		-		0,0581	661.369.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	
				Program Pembinaan Jiwa Korpri (KORSA)	Persentase anggota KORPRI yang ikut serta dalam kegiatan KORPRI	NA			4,96 %	241.996.000	5,58 %	279.653.350	5,03 %	288.185.750	5,63 %	326.718.150	5,01 %	295.250.550	26,21 %	1.431.803.800	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				Program Usaha Dan Kesejahteraan	Persentase anggota KORPRI peserta pelatihan yang menerapkan konsep wirausaha	NA			0,4 %	50.000.000	0,4 %	50.000.000	0,4 %	50.000.000	0,4 %	50.000.000	0,4 %	60.000.000	2,00 %	260.000.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				Program Pengayoman Dan Perlindungan Hukum	Persentase anggota KORPRI yang terlibat permasalahan hukum	NA			9,62 %	45.125.000	9,62 %	65.000.000	9,62 %	65.000.000	9,62 %	35.000.000	9,62 %	65.000.000	9,62 %	275.125.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase desa dengan batas administratif yang definitif	2 %					6 %	-	100 %	200.000.000	100 %	100.000.000	100 %	200.000.000	100 %	500.000.000	DPMD
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai	NA	0 %	-	40 %	55.650.000	100 %	74.674.922	100 %	160.000.000	100 %	160.000.000	100 %	160.000.000	100 %	610.324.922	DPMD



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Permendagri 20/2018																
				Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	NA	99 %	50.776.846	97 %	498.413.464	80 %	518.961.000	80 %	540.934.250	85 %	287.820.000	85 %	387.820.000	85 %	2.284.725.560	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA	- %	-	- %	-	- %	-	-	75 %	4.000.000	80 %	6.000.000	80 %	10.000.000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik	NA	- %	-	- %	-	- %	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	
				Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	75 %	88.69 %	76.805.700	59.55%	60.251.262	100% %	179.310.000	100%	179.310.000	75%	73.000.000	75%	75.000.000	75%	643.676.962	Kecamatan Teluk Sampit
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	75 %	0%	-	0%	-	100%	12.800.000	100%	12.800.000	75%	15.000.000	75%	16.000.000	85%	56.600.000	Kecamatan Teluk Sampit
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik		0%	-	91.42%	1.689.388.196	0%	-	0%	-	0%	-	75%	-	1.689.388.196	Kecamatan Teluk Sampit	
				Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	NA	100 %	56.050.000	97,67 %	432.150.000	100 %	442.614.000	100 %	594.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	1.644.814.000	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai	NA	- -	0	100 %	11.650.000	100 %	8.850.000	100 %	8.565.000	100 %	2.800.000	100 %	2.800.000	100 %	34.665.000	Kecamatan Pulau Hanaut



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Desa	Permendagri 20/2018																
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik	NA	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	97,70 %	99,60 %	725.841.081	97,48 %	1.862.563.420	85,00 %	2.315.290.150	85,00 %	1.095.730.054	85,00 %	1.059.860.000	85,00 %	1.059.860.000	85,00 %	1.059.860.000	Kecamatan M. B. Ketapang
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	0 %	0 %	-	93,01 %	20.400.000	85,00 %	56.740.000	85,00 %	70.000.000	85,00 %	70.000.000	85,00 %	70.000.000	85,00 %	70.000.000	Kecamatan M. B. Ketapang
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	Kecamatan M. B. Ketapang
1	2	1	2	Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	100%	99,54%	115.080.000,00	91,71%	198.480.000,00	95%	159.280.000,00	95%	180.260.000,00	98%	70.000.000,00	99%	105.000.000,00	100%	793.548.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
1	2	1	1	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018		0%	0	100%	4.200.000,00	95%	42.400.000,00	95%	50.600.000,00	0%	0	100%	20.000.000,00	100%	86.600.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
1	2	1	3	Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	97%	8.000.000,00	98%	9.000.000,00	100%	17.000.000,00	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
				Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan	0 %	70 %	199.504.520	70 %	552.522.000	80 %	807.118.000	30 %	437.245.000	50 %	570.000.000	55 %	610.000.000	59 %	3.176.389.520	Kecamatan Kota Besi



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					dengan baik																	
				Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	75 %	100 %	39.750.000	79 %	279.201.350	75 %	348.028.445	75 %	347.932.695	75 %	160.000.000	75 %	162.500.000	100 %	1.337.412.490	Kecamatan Mentaya Hulu	
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA	-	-	71 %	11.640.000	-	-	-	-	75 %	2.000.000	75 %	2.000.000	100 %	15.640.000	Kecamatan Mentaya Hulu	
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mentaya Hulu	
				Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	100 %	100 %	70.200.000	100 %	186.850.000	100 %	198.800.000	100 %	229.800.000	100 %	85.000.000	100 %	85.000.000	100 %	855.650.000	Kecamatan Bukit Santuai	
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA	100 %	-	100 %	13.200.000	100 %	12.375.000	100 %	13.750.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	99.325.000	Kecamatan Bukit Santuai	
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik	NA															Kecamatan Baamang	
40126				Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	100 %	98 %	6.549.000	92 %	153.500.000	17 %	91.975.000	100 %	216.740.000	100 %	163.000.000	100 %	168.500.000	100 %	800.264.000	Kecamatan Telaga Antang	
40172				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri	NA	-	-	100 %	6.000.000	100 %	10.800.000	-	-	100 %	26.250.000	100 %	27.250.000	100 %	70.300.000	Kecamatan Telaga Antang	



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					20/2018																
4	01	22		Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Telaga Antang	
4	01	22	16	Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	100 %	100 %	43.640.000	100 %	56.140.000	100 %	56.640.000	100 %	56.640.000	100 %	58.640.000	100 %	60.640.000	100 %	332.340.000	Kecamatan Antang Kalang
4	01	27	22	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA	-	-	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	7.188.756	100 %	8.192.878	100 %	10.791.428	100 %	38.173.062	Kecamatan Antang Kalang
4	01	22		Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik	NA														Kecamatan Antang Kalang	
				Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	85,34 %	-	-	100 %	131.720.000	85 %	166.450.000	90 %	100.000.000	75 %	80.000.000	75 %	80.000.000	75 %	558.170.000	Kecamatan Cempaga Hulu
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA	-	-	-	-	85 %	56.190.000	90 %	51.990.000	100 %	14.000.000	100 %	14.000.000	100 %	136.180.000	Kecamatan Cempaga Hulu
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Cempaga Hulu	
				Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	NA	80 %	42.200.000	80 %	46.000.000	80 %	77.300.000	80 %	104.900.000	80 %	111.200.000	80 %	35.000.000	80 %	416.600.000	Kecamatan Cempaga



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA		-	100 %	24.000.000	100 %	25.000.000	100 %	26.000.000	100 %	27.000.000	100 %	28.000.000	100 %	130.000.000	Kecamatan Cempaga
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik																Kecamatan Cempaga
				Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	99,59 %		-	88,2 %	281.360.773	90 %	390.038.320	90 %	160.500.000	90 %	160.500.000	90 %	170.000.000	90,67 %	1.162.399.093	Kecamatan Seranau
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA		-	57 %	28.350.000		-	80 %	28.350.000	80 %	28.350.000	80 %	28.350.000	80 %	113.400.000	Kecamatan Seranau
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik																Kecamatan Seranau
				Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	NA			75 %	22.000.000	75 %	23.500.000	75 %	25.000.000	75 %	30.000.000	75 %	35.000.000	75 %	135.500.000	Kecamatan Telawang
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA			75 %	10.000.000		-	100 %	14.000.000	100 %	16.000.000	100 %	20.000.000	100 %	60.000.000	Kecamatan Telawang
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik	90,49 %	100 %	22.000.000	79,39 %	76.250.000	75 %	165.800.000	75 %	76.250.000	75 %	26.500.000	75 %	28.000.000	100 %	394.800.000	Kecamatan Telawang



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	NA	70 %	40.000.000	70 %	101.500.000	80 %	56.650.000	90 %	76.650.000	100 %	76.650.000	100 %	76.650.000	100 %	428.100.000	Kecamatan Tualan Hulu
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri 20/2018	NA		-	50 %	50.000.000	60 %	30.000.000	70 %	35.000.000	90 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	185.000.000	Kecamatan Tualan Hulu
				Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Persentase rangkaian acara kegiatan keagamaan yang terlaksana dengan baik															Kecamatan Tualan Hulu	
				Pengawasan																	
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Cakupan (%) sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH yang dapat berjalan dengan baik	70 %	70 %	165.920.000,00	70 %	318.279.768,00	75 %	493.040.000,00	80 %	486.845.000,00	85 %	486.845.000,00	90 %	486.845.000,00	90 %	2.437.774.768,00	Inspektorat Daerah
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) /Pejabat Fungsional yang Bersertifikasi dan mengikuti Diklat dan/atau Bimtek serta seminar	80 %	85 %	446.290.000,00	85 %	481.748.500,00	87 %	422.945.000,00	90 %	374.842.915,00	92 %	374.842.915,00	95 %	374.842.915,00	95 %	374.842.915,00	Inspektorat Daerah
				Non Urusan																	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang	92,40 %	93,57 %	2.142.597.464	100 %	1.797.837.345	85 %	1.918.034.718	85 %	2.182.129.850	85 %	2.652.901.633	85 %	2.652.833.583	85 %	13.346.345.593	Bappeda



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan																
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	93,70 %	91,7 %	2.320.537.343	93,62 %	828.922.416	85 %	602.895.882	85 %	348.058.747	85 %	333.758.747	85 %	335.268.747	90 %	4.769.441.882	Bappeda
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	96,19 %	94,27 %	126.700.000	85 %	23.760.000	85 %	48.000.000	85 %	63.000.000	85 %	70.995.000	85 %	70.995.000	85 %	403.450.000	Bappeda
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi	N / A	N / A	N/A	N / A	N / A	N / A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bappeda
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	94,79 %	85 %	235.255.000	78 %	251.530.102	85 %	296.380.000	85 %	256.000.000	85 %	334.452.449	85 %	335.522.449	85 %	1.709.140.000	Bappeda
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	N / A	N / A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90 %	N/A	90 %	50.000.000	90 %	50.000.000	100 %	100.000.000	Bappeda
02	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	75 %	78,55 %	2.219.313.770	82,4 %	2.694.936.842	85 %	4.104.025.000	85 %	4.329.500.000	85 %	4.969.505.000	85 %	5.213.560.000	85 %	23.530.840.612	Dinas Kesehatan
02	01	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	65 %	42,86 %	447.015.650	70 %	1.082.021.325	75 %	3.953.000.000	75 %	3.447.000.000	80 %	3.705.000.000	85 %	2.172.000.000	85 %	14.806.036.975	Dinas Kesehatan
02	01	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	53.218.000	100 %	24.937.000	100 %	190.000.000	100 %	196.250.000	100 %	196.250.000	100 %	199.375.000	100 %	860.030.000	Dinas Kesehatan



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	01	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	0 %	0 %	-	0 %	-	100 %	400.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	1.300.000.000	Dinas Kesehatan
01	05	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100 %	100 %	1.881.135.748	100 %	1.887.671.620	100 %	1.850.138.508	100 %	1.532.618.420	100 %	1.828.936.080	100 %	1.730.895.748	100 %	10.711.396.124	BPBD
01	05	03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	33 %	3.272.749.541	85 %	1.045.175.200	100 %	419.181.972	100 %	1.256.738.160	100 %	872.220.670	100 %	437.082.572	100 %	7.303.148.115	BPBD
01	05	03	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasaranan penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	155.200.000	100 %	28.175.000	100 %	63.900.000	100 %	69.750.000	100 %	95.000.000	100 %	95.000.000	100 %	507.025.000	BPBD
01	05	03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	100 %	100 %	340.390.000	75 %	150.000.000	100 %	67.500.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	200.000.000	100 %	1.057.890.000	BPBD
01	05	03	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %	-	100 %	15.000.000	100 %	20.000.000	100 %	30.000.000	100 %	65.000.000	BPBD
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100 %	0 %	-	94 %	1.239.990.083	100 %	1.543.132.113	100 %	1.697.445.324	100 %	1.867.189.856	100 %	2.053.908.842	100 %	1.926.168.463	Dinsos
				Program Peninokatan	Persentase sarana	89 %	0 %	-	85 %	317.847.	86 %	445.185.	89 %	550.089	92 %	513.090.	95 %	517.252.	98 %	2.755.24	Dinsos



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Sarana dan Prasarana Apratur	dan prasarana aparatur yang memadai				234		300			.006		786		175		5.334	
				Program Peningkatan Disiplin Apratur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	89 %	0 %	-	82 %	17.100.000	86 %	27.387.500	89 %	27.935.250	92 %	28.493.955	95 %	28.785.267	98 %	194.576.972	Dinsos
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	100 %	0 %	-	96 %	63.956.448	100 %	59.690.400	100 %	60.884.208	100 %	62.101.892	100 %	63.343.930	100 %	433.830.430	Dinsos
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	100 %	0 %	-	0 %	-	100 %	20.000.000	100 %	20.400.000	100 %	20.808.000	100 %	21.224.160	100 %	82.432.160	Dinsos
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100%	100%		100%	56.250.000	100%	63.300.000	100%	65.832.000	100%	68.832.000	100%	71.585.280	100%	70.585.280	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi	100%	100%		84,94%	50.000.000	100%	112.320.000	100%	112.320.000	100%	115.320.000	100%	119.812.800	100%	120.812.800	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	99,75%	99,77%		99,20%	53.282.150	100%	53.289.150	100%	55.420.716	100%	60.420.716	100%	62.837.544	100%	64.837.544	Dinas Pendidikan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	88,25%	88,28%		90,81%	5.341.190.570	100%	5.281.696.170	100%	5.492.964.017	100%	5.592.964.017	100%	5.816.682.577	100%	5.916.682.577	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang	98,69%	98,71%		84,49%	1.554.506.230	100%	2.418.200.840	100%	2.514.928.874	100%	2.614.928.874	100%	2.719.526.028	100%	2.919.526.028	Dinas Pendidikan



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					memadai																
01	05	04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100%	NA	NA	NA	539.309.282	100%	623.632.606	100%	817.992.374	100%	849.201.587	100%	865.447.874	100%	865.447.874	DPKP
01	05	04	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	NA	NA	93,27 %	414.366.938	100%	1.379.923.444	70%	218.541.286	70%	218.541.286	70%	218.541.286	70%	218.541.286	DPKP
01	05	04	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpras penunjang kedisiplinan aparatur	80%	NA	NA	99,31 %	84.000.000	100%	159.994.200	100%	295.000.000	100%	295.000.000	100%	295.000.000	100%	295.000.000	DPKP
01	05	04	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	100%	NA	NA	92,25 %	63.100.000	100%	113.468.300	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	DPKP
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/ waktu yang sesuai kebutuhan	100 %	28,07 % 85	1.344.994.325,00	84,35 %	2.509.463.884,00	100 %	2.276.172.525,00	100 %	1.887.233.540,00	100 %	1.908.293.153,00	100 %	1.933.385.685,00	100 %	11.859.543.112,00	DISDUKCAPIL
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	60 %	73,21 %	1.706.861.712,00	95,54 %	2.159.016.916,00	100 %	151.635.423,00	100 %	877.500.082,00	100 %	959.827.700,00	100 %	952.811.709,00	100 %	6.807.653.542,00	DISDUKCAPIL
				Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase ketersediaan sarana prasarana penunjang kedisiplinan aparatur	0 %	100 %	61.005.000,00	100 %	58.260.000,00	100 %	61.612.000,00	100 %	64.055.250,00	100 %	64.055.250,00	100 %	64.055.250,00	100 %	373.042.750,00	DISDUKCAPIL
				Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	Presentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang terpenuhi	70 %	75 %	84.450.000,00	85 %	140.950.000,00	100 %	91.125.000,00	100 %	66.512.502,00	100 %	116.739.000,00	100 %	116.739.000,00	100 %	475.565.502,00	DISDUKCAPIL
				Program Pelayanan	Persentase pelayanan	100 %	96,49 %	1.721.032.851,00	98,58 %	1.906.647.735,00	100 %	2.022.079.970,00	100 %	1.788.043.350,00	100 %	1.198.506.326,00	100 %	1.223.626.076,00	100 %	9.859.897.308,00	DP3AP2KB



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Administrasi Perkantoran	administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan									00							
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	96,16 %	302.979.270,00	86,48 %	1.132.547.938,00	100 %	992.747.630,00	100 %	1.376.237.250,00	100 %	139.989.524,00	100 %	139.989.524,00	100 %	4.084.491.136,00	DP3AP2KB
				Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	35.760.000,00	99,28 %	55.992.000,00	100 %	59.700.000,00	100 %	45.900.000,00	100 %	51.050.000,00	100 %	51.050.000,00	100 %	299.452.000,00	DP3AP2KB
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi	100 %	69,66 %	25.510.000,00	100 %	7.750.000,00	100 %	33.420.000,00	100 %	86.510.000,00	100 %	46.660.000,00	100 %	46.660.000,00	100 %	246.510.000,00	DP3AP2KB
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100 %	100 %	2.701.759.924,00	100 %	1.955.236.902,00	100 %	1.930.588.325,00	100 %	1.940.741.395,00	100 %	1.934.505.048,00	100 %	1.926.168.463,00	100 %	12.389.000.057,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	80 %	80 %	764.872.067,00	80 %	106.865.000,00	80 %	107.933.650,00	80 %	109.012.986,50	80 %	110.103.116,37	80 %	111.583.967,99	80 %	1.310.370.787,86	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	80 %	80 %	68.850.000,00	80 %	68.850.000,00	80 %	31.212.000,00	80 %	31.836.240,00	80 %	38.250.000,00	80 %	38.250.000,00	80 %	277.248.240,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	80 %	80 %	129.290.000,00	80 %	40.000.000,00	80 %	40.000.000,00	80 %	40.000.000,00	80 %	40.000.000,00	80 %	40.000.000,00	80 %	329.290.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA			100 %	30.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	190.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				SKPD																	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	90 %	92,16 %	815.630.314	95,26 %	1.686.580.918	100 %	1.392.188.898	100 %	930.812.153	100 %	930.812.153	100 %	955.437.953	100 %	5.731.346.228	Badan Kesbangpol
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	97,13 %	833.094.621	97,9 %	705.392.440	100 %	302.822.903	100 %	282.495.172	100 %	282.495.172	100 %	282.495.172	100 %	2.688.795.480	Badan Kesbangpol
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	48.895.000	100 %	21.180.000	100 %	36.050.000	100 %	50.750.000	100 %	50.750.000	100 %	50.750.000	100 %	258.375.000	Badan Kesbangpol
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi	100 %	100 %	113.837.568	100 %	64.500.000	100 %	18.000.000	100 %	152.880.000	100 %	152.880.000	100 %	152.880.000	100 %	654.977.568	Badan Kesbangpol
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA			100 %	15.000.000	100 %	8.100.000							23.100.000	Badan Kesbangpol	
1.05	1.05	021		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dlm mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	90,78 %	96,20 %	747.754.004	91,67 %	847.289.727	90,78 %	1.007.065.840	90,78 %	941.817.785	90,78 %	914.774.950	90,78 %	914.774.950	90,78 %	5.373.477.256	Satpol PP
1.05	1.05	022		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	85 %	95,83 %	293.867.870	92,10 %	486.941.152	85 %	787.812.630	85 %	407.677.385	85 %	442.253.000	85 %	471.753.000	85 %	2.890.305.037	Satpol PP
1.05	1.05	023		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kedisiplin Aparatur	80 %	100 %	127.972.000	94,30 %	206.282.000	80 %	160.250.000	80 %	144.855.000	80 %	160.291.000	80 %	227.491.000	80 %	1.027.141.000	Satpol PP



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.05	1.05	02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	80 %	100 %	54.881.600	64,37 %	174.726.099	80 %	125.940.000	80 %	160.900.000	80 %	256.282.000	80 %	256.282.000	80 %	1.029.011.699	Satpol PP
4.01	03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	NA	100 %	14.339.817.238	100 %	13.856.007.720	100 %	14.543.036.015	100 %	13.340.821.115	100 %	13.015.000.000	100 %	13.111.590.750	100 %	82.206.272.838	Sekretariat Daerah
4.01	4.01	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	NA	100 %	16.073.041.662	100 %	34.105.958.286	100 %	28.706.252.952	100 %	22.790.174.092	100 %	11.437.290.700	100 %	11.522.290.700	100 %	124.635.008.392	Sekretariat Daerah
4.01	4.01	01	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	NA	100 %	382.200.000	100 %	407.030.000	100 %	311.250.000	100 %	376.000.000	100 %	434.200.000	100 %	434.200.000	100 %	2.344.880.000	Sekretariat Daerah
4.01	03	01	04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi	NA	100 %	6.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	-	-	-	-	-	100 %	16.000.000	Sekretariat Daerah
4.01	03	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	NA	100 %	407.538.000	100 %	753.354.000	100 %	870.019.000	100 %	997.374.000	100 %	852.253.600	100 %	852.253.600	100 %	4.732.792.200	Sekretariat Daerah
	03			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA	100 %	63.480.000	100 %	-	100 %	-	100 %	-	-	-	-	-	100 %	63.480.000	Sekretariat Daerah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang	100 %	100 %	8.030.765.400,00	100 %	7.453.835.100,00	100 %	7.765.801.800,00	100 %	7.772.550.400,00	100 %	7.967.506.600,00	100 %	8.021.340.600,00	100 %	47.011.799.900,00	Sekretariat DPRD



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					sesuai kebutuhan																
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	100 %	3.147.96 4.675,00	100 %	1.850.00 0.000,00	100 %	1.850.00 0.000,00	100 %	1.850.00 0.000,00	100 %	1.850.00 0.000,00	100 %	1.855.00 0.000,00	100 %	12.402.9 64.675,0 0	Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	476.895. 000,00	100 %	400.000. 000,00	100 %	400.000. 000,00	100 %	440.000 .000,00	100 %	440.000. 000,00	100 %	440.000. 000,00	100 %	2.596.89 5.000,00	Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi	100 %	100 %	452.900. 000,00	100 %	452.900. 000,00	100 %	452.900. 000,00	100 %	452.900 .000,00	100 %	452.900. 000,00	100 %	452.900. 000,00	100 %	2.717.40 0.000,00	Sekretariat DPRD
05	0 8	0 1	0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	90 %	91,27 %	2.138.94 6.510	91,89 %	2.385.89 8.495	100 %	3.005.90 1.310	100 %	1.835.8 05.900	100 %	2.159.48 1.000	100 %	2.199.15 2.200	100 %	13.725.1 85.415	BKD
05	0 8	0 1	0 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	90 %	58,57 %	196.998. 355	100 %	975.655. 105	100 %	2.378.29 0.815	100 %	174.276 .000	100 %	87.500.0 00	100 %	70.500.0 00	100 %	3.883.22 0.275	BKD
05	0 8	0 1	0 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	102.100. 000	100 %	27.250.0 00	100 %	102.100. 000	100 %	70.000. 000	100 %	105.000. 000	100 %	70.000.0 00	100 %	70.000.0 00	BKD
05	0 8	0 1	0 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	90 %	68,39 %	259.227. 500	100 %	321.105. 000	30,27 %	259.227. 500	30,27 %	381.152 .000	30,2 7 %	265.000. 000	37,58 %	315.000. 000	57 %	315.000. 000	BKD
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100 %	100 %	1.118.05 7.595,00	100 %	994.295. 050,00	100 %	955.458. 770,00	100 %	825.743 .060,00	100 %	825.743. 060,00	100 %	825.743. 060,00	100 %	5.545.04 0.595,00	Inspektorat Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana	100 %	100 %	136.689. 455,00	100 %	241.991. 000,00	100 %	839.053. 355,00	100 %	448.632 .925,00	100 %	448.632. 925,00	100 %	448.632. 925,00	100 %	2.563.63 2.585,00	Inspektorat Daerah



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Prasarana Aparatur	aparatur yang memadai																
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur															Inspektorat Daerah	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	91,38 %	100 %	357.821.302	100 %	350.169.302	100 %	320.169.302	100 %	320.169.302	100 %	320.169.302	100 %	320.169.302	100 %	1.988.667.812	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	92,81 %	100 %	39.706.738	100 %	43.706.738	100 %	24.706.738	100 %	24.706.738	100 %	24.706.738	100 %	24.706.738	100 %	182.240.428	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	13.200.000	100 %	13.200.000	100 %	13.200.000	100 %	13.200.000	100 %	13.200.000	100 %	13.200.000	100 %	79.200.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	98,65 %	100 %	72.559.960	100 %	72.559.960	100 %	72.559.960	100 %	72.559.960	100 %	72.559.960	100 %	72.559.960	100 %	435.359.760	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	63,63 %	100 %	6.640.000	100 %	6.640.000	100 %	6.640.000	100 %	6.640.000	100 %	6.640.000	100 %	6.640.000	100 %	39.840.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100 %	100 %	1.644.810.978	100 %	3.301.235.389	100 %	2.184.296.478	100 %	813.881.783	100 %	889.524.439	100 %	952.134.439	100 %	9.785.883.506	DPMD
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	100 %	588.500.000	100 %	249.812.070	100 %	122.247.400	100 %	434.200.000	100 %	434.200.000	100 %	504.000.000	100 %	2.332.959.470	DPMD
				Program Peningkatan	Persentase ketersediaan	100 %	100 %	49.824.9	100 %	28.000.0	100 %	45.628.0	100 %	115.250	100 %	100.250.	100 %	100.250.	100 %	439.202.	DPMD



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Disiplin Aparatur	sarpra penunjang kedisiplinan aparatur			92		00		00		.000		000		000		992	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	100 %	100 %	3.300.000			100 %	1.610.000	100 %	1.610.000	100 %	1.610.000	100 %	1.610.000	100 %	9.740.000	DPMD
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi	58 %	65 %	175.000.000	65 %	166.000.000	65 %	71.600.000	65 %	131.570.256	65 %	105.195.000	65 %	121.005.875	65 %	770.371.131	DPMD
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	NA	97 %	445.914.596	99 %	505.702.609	85 %	648.367.255	85 %	565.909.755	85 %	640.476.175	85 %	640.476.175	85 %	3.446.846.565	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	NA	99 %	451.360.271	98 %	1.000.312.462	80 %	614.409.305	80 %	124.220.000	85 %	628.984.780	85 %	645.900.000	85 %	3.465.186.818	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	NA	99 %	18.871.272	98 %	14.700.000	80 %	136.434.000	- %	-	85 %	20.900.000	85 %	30.900.000	85 %	221.805.272	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi	NA	- %	-	- %	-	- %	-	- %	-	75 %	50.000.000	75 %	50.000.000	75 %	100.000.000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	NA	99 %	16.400.000	100 %	25.000.000	80 %	10.000.000	80 %	5.000.000	80 %	26.250.000	80 %	26.250.000	80 %	108.900.000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA	- %	-	- %	-	- %	-	- %	-	75 %	35.000.000	75 %	35.000.000	75 %	70.000.000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan



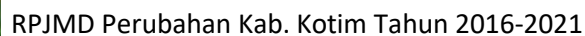
RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	75 %	97,84%	437.056.188	95.11%	496.785.405	100%	586.252.070	100%	589.152.070	75%	547.826.421	75%	571.312.063	90%	3.228.384.217	Kecamatan Teluk Sampit
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	75 %	99%	603.581.677	95.35%	478.150.503	100% %	165.860.280	100%	900.832.800	75%	398.100.000	75%	403.100.000	85%	2.949.625.260	Kecamatan Teluk Sampit
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	75 %	0%	-	99.71%	8.475.000	100% %	12.750.000	100%	12.750.000	75%	25.000.000	75%	28.000.000	75%	86.975.000	Kecamatan Teluk Sampit
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Teluk Sampit
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	75 %	95.59%	13.000.000	92.86 %	32.500.000	100% %	82.500.000	100%	82.500.000	75%	41.000.000	75%	35.000.000	75%	286.500.000	Kecamatan Teluk Sampit
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	75%	8.769.354	75%	14.775.886	75%	23.545.240	Kecamatan Teluk Sampit
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	NA	98,69 %	409.188.345	99,58 %	569.545.725	100 %	680.109.500	100 %	786.605.760	100 %	418.941.950	100 %	419.211.650	100 %	3.283.602.930	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	NA	99,43 %	308.244.280	98,08 %	452.984.555	100 %	892.158.700	100 %	1.014.991.240	100 %	431.040.000	100 %	441.040.000	100 %	3.540.458.775	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan	NA	100 %	7.700.000	- -	0	100 %	7.600.000	- -	-	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	45.300.000	Kecamatan Pulau Hanaut



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					aparatur																
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi	NA	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	NA	94,57 %	37.448.000	100 %	32.000.000	100 %	40.000.000	100 %	44.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	273.448.000	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA	- -	0	99,8 %	1.996.000	- -	0	- -	0	- -	0	- -	0	99,8 %	1.996.000	Kecamatan Pulau Hanaut
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	95,29 %	98,19 %	1.449.987.470	99,54 %	1.462.827.850	85,00 %	1.455.940.490	85,00 %	990.743.340	85,00 %	130.539.070	85,00 %	130.539.070	85,00 %	130.539.070	Kecamatan M. B. Ketapang
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	88,97 %	99,35 %	31.874.400.343	96,26 %	2.368.430.480	85,00 %	3.877.548.210	85,00 %	78.956.000	85,00 %	616.380.280	85,00 %	645.172.280	85,00 %	645.172.280	Kecamatan M. B. Ketapang
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	99,99 %	100 %	76.472.000	99,01 %	83.950.000	85,00 %	307.456.500	85,00 %	36.000.000	85,00 %	170.000.000	85,00 %	170.000.000	85,00 %	170.000.000	Kecamatan M. B. Ketapang
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	Kecamatan M. B. Ketapang
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	90,10 %	96,57 %	132.007.285	91,43 %	70.000.000	85,00 %	45.000.000	85,00 %	126.000.000	85,00 %	129.840.000	85,00 %	129.840.000	85,00 %	129.840.000	Kecamatan M. B. Ketapang
				Program peningkatan pengembangan	Persentase pelaporan capaian kinerja	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	Kecamatan M. B. Ketapang



BAB VII



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	0 %	80 %	21.945.000	80 %	21.000.000	80 %	28.600.000	40 %	7.600.000	80 %	30.000.000	80 %	32.000.000	73 %	141.145.000	Kecamatan Kota Besi
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi														-	Kecamatan Kota Besi	
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	0 %	60 %	98.335.000	90 %	183.040.000	80 %	135.390.000	30 %	51.100.000	60 %	130.000.000	85 %	145.000.000	68 %	742.865.000	Kecamatan Kota Besi
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	0 %	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	Kecamatan Kota Besi
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	NA %	99 %	568.752.192	89 %	660.846.021	75 %	698.429.364	75 %	638.222.464	75 %	1.081.987.109	75 %	1.135.861.464	81 %	4.784.098.614	Kecamatan Baamang
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	NA %	98 %	1.332.930.443	97 %	2.225.655.974	75 %	2.067.153.561	75 %	198.334.786	75 %	1.419.544.825	75 %	1.315.469.196	75 %	8.559.088.784	Kecamatan Baamang
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	NA %	100 %	58.005.250	100 %	33.332.500	75 %	41.100.000	75 %	33.500.000	75 %	144.146.886	100 %	189.642.677	87 %	499.727.314	Kecamatan Baamang
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi	NA %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Baamang
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang ternenuhi	NA %	100 %	168.668.540	92 %	115.500.000	75 %	100.000.000	75 %	100.000.000	75 %	282.660.190	75 %	296.793.200	75 %	1.063.621.930	Kecamatan Baamang



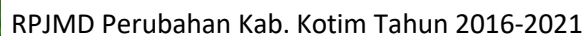
RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA %	-	-	73 %	16.413.691	100 %	21.407.600	100 %	22.150.000	100 %	7.500.000	100 %	7.500.000	95 %	74.971.291	Kecamatan Baamang
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	78 %	80 %	740.979.019	82 %	792.095.485	85 %	795.106.128	88 %	685.294.128	90 %	738.110.860	98 %	716.409.760	100 %	4.467.995.380	Kecamatan Parenggean
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	60 %	68 %	169.806.500	78 %	346.780.000	80 %	472.690.000	86 %	71.502.000	89 %	293.175.000	98 %	247.303.900	100 %	1.601.257.400	Kecamatan Parenggean
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	75 %	78 %	34.800.000	80 %	24.272.730	85 %	45.000.000	-	90 %	24.650.000	95 %	37.500.000	100 %	166.222.730	Kecamatan Parenggean	
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi															Kecamatan Parenggean	
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	88 %	99,86 %	52.284.113	87 %	67.334.800	83 %	70.000.000	90 %	42.900.000	85 %	75.000.000	90 %	117.650.000	100 %	425.168.913	Kecamatan Parenggean
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi		-	-	-	-	-	-	100 %	14.425.000	100 %	16.750.000	100 %	31.175.000	Kecamatan Parenggean		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	75 %	98,03 %	707.888.150	97,26 %	706.321.128	75 %	615.016.355	75 %	570.449.305	75 %	555.118.200	75 %	560.377.600	100 %	3.715.170.738	Kecamatan Mentaya Hulu
				Program peningkatan	Persentase sarana dan	75 %	99,66 %	311.377.	90,21 %	409.361.	75 %	462.367.	75 %	426.350	75 %	521.500.	75 %	526.000.	100 %	2.656.95	Kecamatan Mentaya



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				sarana dan prasarana aparatur	prasarana aparatur yang memadai			900		000		200		.000		000		000		6.100	Hulu
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	NA	100 %	17.400.000	100 %	8.500.000	75 %	7.600.000	75 %	11.000.000	75 %	28.400.000	75 %	28.400.000	100 %	101.300.000	Kecamatan Mentaya Hulu
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mentaya Hulu
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	75 %	99,9 %	80.631.000	93 %	93.892.900	75 %	92.650.000	75 %	50.000.000	75 %	129.500.000	75 %	129.500.000	100 %	576.173.900	Kecamatan Mentaya Hulu
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA	-	-	-	-	-	-	-	75 %	19.500.000	75 %	19.500.000	75 %	39.000.000	Kecamatan Mentaya Hulu	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	93 %	99 %	557.679.445	100 %	794.367.475	100 %	769.913.725	100 %	782.027.600	100 %	535.136.500	100 %	540.962.850	100 %	3.980.087.595	Kecamatan Bukit Santuai
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	95 %	100 %	149.186.063	98 %	190.490.000	100 %	114.994.875	100 %	576.300.000	100 %	323.664.000	100 %	332.164.000	100 %	1.686.798.938	Kecamatan Bukit Santuai
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	25.200.000	100 %	7.700.000	100 %	17.400.000	100 %	22.450.000	100 %	26.200.000	100 %	23.000.000	100 %	121.950.000	Kecamatan Bukit Santuai
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi	%														Kecamatan Baamang	
				Program peningkatan kapasitas	Persentase peningkatan kapasitas	29 %	90 %	35.350.000	76 %	39.500.000	80 %	33.000.000	100 %	50.000.000	100 %	72.000.000	100 %	72.000.000	100 %	301.850.000	Kecamatan Bukit Santuai



BAB VII



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					sesuai kebutuhan																
4	0122			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	95 %	100 %	479.571.912	98 %	418.826.328	100 %	427.330.500	100 %	427.330.500	100 %	427.330.500	100 %	427.330.500	100 %	2.607.720.240	Kecamatan Antang Kalang
4	0123			Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	7.500.000	100 %	22.500.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	90.000.000	Kecamatan Antang Kalang
4	012			Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi															Kecamatan Antang Kalang	
4	0125			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	29 %	90 %	35.350.000	70 %	145.000.000	70 %	145.000.000	80 %	145.000.000	100 %	145.000.000	100 %	145.000.000	100 %	760.350.000	Kecamatan Antang Kalang
4	0126			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	100 %	0 %	-	100 %	9.500.000	0 %	9.500.000	0 %	9.500.000	0 %	12.500.000	0 %	15.500.000	0 %	56.500.000	Kecamatan Antang Kalang
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	89,22 %	97,87 %	541.785.586	99,41 %	705.883.781	90 %	648.782.824	95 %	718.271.156	100 %	683.133.000	100 %	700.135.000	100 %	3.997.991.347	Kecamatan Cempaga Hulu
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	NA	99,89 %	53.397.403	99,59 %	165.150.114	90 %	133.372.000	95 %	101.577.668	100 %	121.000.000	100 %	154.000.000	100 %	728.497.185	Kecamatan Cempaga Hulu
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	97,71 %	- -		- -		95 %	7.600.000	100 %	7.600.000	100 %	20.000.000	- -		100 %	35.200.000	Kecamatan Cempaga Hulu
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang	NA	- -		- -		- -		- -		- -		- -		- -	-	Kecamatan Cempaga Hulu



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					terpenuhi																
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	55,63 %	79,42 %	43.673.000	88,28 %	104.586.400	90 %	84.100.000	95 %	105.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	437.359.400	Kecamatan Cempaga Hulu
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA	- -		100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100 %	8.500.000	100 %	8.500.000	100 %	8.500.000	100 %	41.500.000	Kecamatan Cempaga Hulu
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	NA	85 %	500.636.200	85 %	558.115.200	85 %	584.922.875	85 %	608.300.000	85 %	643.246.788	85 %	670.600.000	85 %	3.565.821.063	Kecamatan Cempaga
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	95,54 %	85 %	259.959.800	85 %	632.180.800	85 %	560.637.275	85 %	457.770.920	85 %	415.520.332	85 %	451.363.270	85 %	2.777.432.397	Kecamatan Cempaga
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	NA	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	60.000.000	100 %	64.000.000	100 %	68.000.000	100 %	342.000.000	Kecamatan Cempaga
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi															Kecamatan Cempaga	
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	NA	100 %	132.500.000	100 %	130.000.000	100 %	120.000.000	100 %	130.000.000	100 %	130.000.000	100 %	140.000.000	100 %	782.500.000	Kecamatan Cempaga
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi															Kecamatan Cempaga	
				Program	Persentase	82,35 %	90,52 %		82,3 %		88,81 %		88,8 %		88,8 %		88,8 %		88,8 %		Kecamatan



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan			519.243.799		524.810.406		590.482.916		616.945.866		617.445.866		612.352.193		3.481.281.046	Seranau
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	95,82	38,26 %	162.857.798	88,4 %	667.855.000	74 %	329.283.564	71,5 %	506.834.454	71,5 %	448.833.909	71,5 %	402.890.350	71,5 %	2.518.555.075	Kecamatan Seranau
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	%	-	100 %	25.000.000	100 %	102.024.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	217.024.000	Kecamatan Seranau
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi															Kecamatan Seranau	
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	99,59 %	99,99 %	96.991.900	82,7 %	66.150.000	90 %	101.000.000	85 %	110.000.000	85 %	110.000.000	85 %	110.000.000	87,95 %	594.141.800	Kecamatan Seranau
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi			-		-		-		-		-		-		-	Kecamatan Seranau
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	91,05 %	91,30 %	413.557.840	99,29403026	527.030.580	75 %	518.599.001	75 %	573.706.210	75 %	594.672.935	75 %	626.191.536	100 %	3.253.758.102	Kecamatan Telawang
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	91,56 %	80,52 %	59.865.000	98,12 %	442.251.866	75 %	572.310.300	75 %	261.424.000	75 %	313.092.915	75 %	282.324.514	100 %	1.931.268.595	Kecamatan Telawang
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan anaratur	89,78 %	99,50 %	5.920.000			75 %	90.606.000	75 %	15.000.000	75 %	20.771.875	75 %	20.771.875	100 %	153.069.750	Kecamatan Telawang



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi														-	Kecamatan Telawang	
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	52,57 %		100 %	13.500.000	75 %	36.000.000	75 %	40.000.000	75 %	40.200.000	75 %	41.700.000	100 %	171.400.000	Kecamatan Telawang	
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi														-	Kecamatan Telawang	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	NA	75 %	554.625.000	85 %	457.800.000	85 %	534.703.000	100 %	554.256.000	100 %	570.809.000	100 %	590.362.000	100 %	3.262.555.000	Kecamatan Tualan Hulu
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	NA	85 %	112.725.000	85 %	495.000.000	85 %	378.500.000	0,85	312.000.000	0,85	248.000.000	0,85	248.000.000	100 %	1.794.225.000	Kecamatan Tualan Hulu
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	NA	100 %	12.000.000	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	98.000.000	Kecamatan Tualan Hulu
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS yang terpenuhi															Kecamatan Tualan Hulu	
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	NA	100 %	81.800.000	100 %	70.000.000	100 %	77.000.000	100 %	140.000.000	100 %	150.000.000	100 %	143.000.000	100 %	661.800.000	Kecamatan Tualan Hulu
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA		-					5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	15.000.000	Kecamatan Tualan Hulu	



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				capaian kinerja dan keuangan																	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		NA		80 %	1.077.123.750	86,05 %	1.533.400.380	50 %	1.160.757.505	86,05 %	1.533.400.380	86,05 %	1.533.400.380	100 %	6.838.082.395	Diskominfo
				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		NA		89 %	1.338.468.207	89 %	1.546.342.120	50 %	682.440.900	89,33 %	1.546.342.120	89,33 %	1.546.342.120	100 %	6.659.935.467	Diskominfo
				Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya fasilitas baru		NA	-	-	-	89,33 %	505.100.000	15,67 %	126.525.000	89,33 %	505.100.000	89,33 %	505.100.000	100 %	1.641.825.000	Diskominfo
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya fasilitas baru yang memadai		NA	-	95,82 %	369.081.657	50,60 %	372.355.000	18,32 %	94.495.500	50,60 %	372.355.000	50,60 %	372.355.000	100 %	1.580.642.157	Diskominfo
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	terpenihinya sarana peralatan yang menunjang fasilitas		NA	-	90,17 %	408.672.520	50,60 %	374.467.120	15,68 %	200.003.360	50,60 %	374.467.120	50,60 %	374.467.120	100 %	1.732.077.240	Diskominfo
				Pengandaan Mebeleur	terpenuhinya fasilitas kerja yang memadai		NA	-	46,87 %	191.449.030	50,33 %	10.550.000	19,33 %	128.959.040	50,33 %	10.550.000	50,33 %	10.550.000	100 %	352.058.070	Diskominfo
				Pemeliharaan Rutin/Berkala/Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang terpelihara secara berkala/rutin		NA	-	99,65 %	261.425.000	50,02 %	95.000.000	18,45 %	20.658.000	50,02 %	95.000.000	50,02 %	95.000.000	100 %	567.083.000	Diskominfo
				Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Kendaraan dinas operasional		NA	-	63,52 %	100.540.000	48,89 %	181.820.000	18,45 %	111.800.000	48,98 %	181.820.000	48,98 %	181.820.000	100 %	757.800.000	Diskominfo



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Pengadaan Mesin Kartu Absensi	Persentase keaktifan ASN di lingkungan diskominfo		NA	-	0,00%	7.300.000	5000%	7.050.000	0,00%	-	50,00%	7.050.000	50,00%	7.050.000	100%	28.450.000	Diskominfo
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur		NA	-	95,90%	24.000.000	4321%	30.200.000	15,53%	13.750.000	43,21%	30.200.000	43,21%	30.200.000	100%	128.350.000	Diskominfo
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Persentase pakaian dinas yang di sediakan/di beli		NA	-	95,90%	24.000.000	4321%	30.200.000	15,53%	13.750.000	43,21%	30.200.000	43,21%	30.200.000	100%	128.350.000	Diskominfo
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi		NA	-	40,47%	39.531.025	4460%	40.020.400	15,72%	89.600.000	44,60%	40.020.400	44,60%	40.020.400	100%	249.192.225	Diskominfo
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		100 %	2.585.017.828	100 %	1.941.910.240	100 %	2.331.747.813	100 %	2.334.334.388	100 %	2.339.340.963	100 %	2.344.347.538	100 %	13.876.698.770	Disperkim
				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		100 %	519.936.322	100 %	395.212.330	100 %	219.300.000	100 %	219.300.000	100 %	219.300.000	100 %	219.300.000	100 %	1.792.348.652	Disperkim
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur		100 %	91.000.000	100 %	52.150.000	100 %	105.000.000	100 %	115.000.000	100 %	125.000.000	100 %	135.000.000	100 %	623.150.000	Disperkim
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian yang disediakan/ dibeli		200,000 stell	91.000.000	200,000 stell	52.150.000	200,000 stell	105.000.000	200,000 stell	115.000.000	200,000 stell	125.000.000	200,000 stell	135.000.000	200,000 stell	623.150.000	Disperkim
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang		100 %	47.580.000	100 %	75.075.000	100 %	47.580.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	320.235.000	Disperkim



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					terpenuhi																
				Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persenase Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS yang terpenuhi								45.95 %	17.000.000	14 %	5.000.000	41 %	15.000.000	100 %	37.000.000	Disperkim
			1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100 %	100 %	2.682.754.920	100 %	2.682.754.920	100 %	2.246.326.884	100 %	2.357.891.096	100 %	2.357.891.096	100 %	2.357.891.096	100 %	2.357.891.096	Dinas Perhubungan
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	100 %	204.200.000	100 %	204.200.000	100 %	533.691.416	100 %	154.770.000	100 %	154.770.000	100 %	154.770.000	100 %	154.770.000	Dinas Perhubungan
			3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	142.025.000	100 %	142.025.000	100 %	15.750.000	100 %	96.150.000	100 %	96.150.000	100 %	96.150.000	100 %	96.150.000	Dinas Perhubungan
			5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi	25 %	25 %	172.400.000	25 %	172.400.000	25 %	110.600.000	25 %	125.000.000	25 %	125.000.000	25 %	125.000.000	25 %	125.000.000	Dinas Perhubungan
1	03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		100 %	3.414.968.634,00	100 %	5.948.616.380,00	100 %	5.244.791.900,00	100 %	6.043.571.490,00	100 %	6.647.928.639,00	100 %	7.312.721.503,00	100 %	7.312.721.503	Dinas PUPR
1	03	01	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		100 %	707.511.900,00	100 %	1.152.072.422,00	100 %	1.364.889.630,00	100 %	1.674.334.576,00	100 %	1.841.768.034,00	100 %	2.025.944.837,00	100 %	2.025.944.837	Dinas PUPR
					Persentasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Publik dalam kondisi baik	1936,99 m ²	41,64 %	2.923.750.000,00	19,71 %	6.170.333.000,00	9,59 %	1.041.600.000,00	96,70 %	428.900.000,00	97,06 %	900.000.000,00	100,00 %	1.500.000.000,00	100 %	1.500.000.000,00	Dinas PUPR
					Persentase kendaraan dinas dan peralatan		2,00 kg	630.984.787,00	19,18 %	847.965.000,00	19,36 %	955.275.000,00	84,75 %	932.250.000,00	100 %	1.100.000.000,00	100 %	1.100.000.000,00	100 %	1.100.000.000,00	Dinas PUPR



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					mesin kantor dalam kondisi baik																
1	03	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur		100 %	59.600.000,00	100 %	127.000.000,00	100 %	98.400.000,00	100 %	63.345.000	100 %	69.679.500,00	100 %	76.647.450,00	100 %	76.647.450	Dinas PUPR
1	03	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi		100 %	53.105.000,00	100 %	520.050.000,00	100 %	434.190.000,00	100 %	121.240.000,00	100 %	133.364.000,00	100 %	146.700.400,00	100 %	146.700.400	Dinas PUPR
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100%	98,66 %	1.169.979.520	98,01 %	1.177.054.112	100%	1.343.325.776	100%	1.224.092.860	100 %	1.396.336.170	100%	1.396.336.170	100%	7.707.124.608	Dispora
				Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Prosentase Aparatur yang dilayani Sarana dan prasarana yang memadai	100%	92,83 %	127.142.575	91,73 %	211.167.492	100%	129.756.424	100%	97.303.490	100 %	140.000.000	100%	140.000.000	100%	845.369.981	Dispora
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Pelanggaran Disiplin Aparatur	100%	99,57 %	93.125.000	84,10 %	5.000.000	100%	49.825.000	0%	-	100 %	95.000.000	100%	95.000.000	100%	337.950.000	Dispora
				Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Prosentase Sumber Daya Aparatur yang meningkat Kompetensinya	100%	96,55 %	732.000.000	96,72 %	107.700.196	100%	161.000.000	100%	98.000.000	100 %	78.000.000	100%	78.000.000	100%	1.254.700.196	Dispora
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD	100%	71,86 %	27.290.000	97,44 %	7.814.000	100%	35.625.000	100%	41.000.000	100 %	48.700.000	100%	48.700.000	100%	209.129.000	Dispora
1,02	102	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	11.622.913.474	84 %	11.726.419.242	100 %	12.961.040.628	100 %	14.350.151.488	100 %	20.223.104.600	100 %	22.649.878.100	100 %	22.649.878.100	RSUD dr. Murjani Samoit
1,02	102	1	2	Program Peningkatan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana	46 %	66 %	3.297.524.415	68 %	-	82 %	199.558.000	88 %	680.762.500	94 %	2.245.000.000	100 %	2.266.000.000	100 %	2.266.000.000	RSUD dr. Murjani Samoit



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	2 0 2				Prasarana Aparatur	aparatur yang memadai																
1,0 2	1 0 2 0 2	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	100 %	100 %	459.245.000	42 %	360.000.000	100 %	1.129.550.000	100 %	1.061.650.000	100 %	1.194.188.800	100 %	1.337.492.000	100 %	1.337.492.000	RSUD dr. Murjani Sampit
1	2 6	0 1	0 1		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100%	100%	598.072.810	100%	791.206.660	100%	741.109.985	100%	492.654.550	100%	591.037.810	100%	591.037.810	100%	3.805.119.625	Dispustakas ip
1	2 6	0 1	0 2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	77.412.852	100%	740.239.040	100%	292.929.365	100%	198.225.000	100%	204.503.490	100%	204.503.490	100%	1.717.813.237	Dispustakas ip
1	2 6	0 1	0 3		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100%	100%	7.200.000	100%	22.600.000	100%	38.960.200	100%	27.300.000	100%	7.200.000	100%	7.200.000	100%	110.460.200	Dispustakas ip
1	2 6	0 1	0 5		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	100%	100%	85.160.000	100%	116.460.000	100%	147.970.000	100%	109.100.000	100%	139.860.000	100%	139.860.000	100%	738.410.000	Dispustakas ip
04	0 7	0 1	0 1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	95,87 %	85,52 %	3.071.011.319,00	85,09 %	3.009.567.264,00	95,00 %	3.409.193.720,00	95,00 %	3.632.431.040,00	95,00 %	3.791.750.000,00	95,00 %	3.902.000.000,00	95,00 %	3.902.000.000,00	Bappenda
04	0 7	0 1	0 1		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	84,65 %	56,59 %	266.835.297,00	84,62 %	1.086.001.930,00	90,00 %	832.052.280,00	90,00 %	731.045.360,00	90,00 %	660.000.000,00	90,00 %	750.000.000,00	90,00 %	750.000.000,00	Bappenda
04	0 7	0 1	0 3		Program peningkatan	Persentase ketersediaan	100,00 %	90,34 %	108.410.	83,82 %	62.700.0	90,00 %	163.685.	100,00 %	148.750	100,00 %	128.000.	100,00 %	128.000.	100,00 %	128.000.	Bappenda



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				disiplin aparatur	sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur			000,00		00,00		000,00		.000,00		000,00		000,00		000,00	
04	07	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	75,83 %	59,04 %	188.587.780,00	60,40 %	460.884.778,00	85,00 %	383.400.000,00	85,00 %	495.903.600,00	90,00 %	225.000.000,00	90,00 %	250.000.000,00	90,00 %	250.000.000,00	Bappenda
4	04	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	80%	80%	6.390.911.525,00	83%	6.498.821.600,00	84%	5.182.631.570,00	85%	4.839.661.000,00	87%	4.839.661.000,00	90%	4.839.661.000,00	90%	4.839.661.000,00	BPKAD
4	04	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	90%	90%	3.160.971.195,09	93%	5.559.980.900,00	95%	1.449.039.680,00	96%	1.252.570.000,00	97%	1.375.618.650,00	98%	1.498.668.250,00	98%	1.498.668.250,00	BPKAD
4	04	05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sapra penunjang kedisiplinan aparatur	85%	85%	126.900.000,00	85%	72.900.000,00	86%	146.700.000,00	87%	155.400.000,00	88%	155.400.000,00	90%	155.400.000,00	90%	155.400.000,00	BPKAD
4	04	05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	90%	90%	707.575.000,00	90%	679.075.000,00	90%	431.125.000,00	90%	480.000.000,00	90%	480.000.000,00	90%	480.000.000,00	90%	480.000.000,00	BPKAD
4	04	05	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	85%	85%	459.403.000,00	86%	635.140.000,00	87%	525.724.500,00	88%	286.158.000,00	89%	286.158.000,00	90%	286.158.000,00	90%	286.158.000,00	BPKAD
2	16	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang tersedia kebutuhan	98,28%	98,52%	1.586.765.486	93,24%	2.006.337.385	95,00%	1.895.689.005	95,00%	1.244.829.236	95,00%	1.244.829.236	95,00%	1.244.829.236	100%	9.223.279.584	Disbudpar
2	16	01	02	Program Peningkatan	Presentase aparatur yang	97,62%	97,62%	919.831.	96,99%	1.329.86	95,00%	406.758.	95,00%	364.761	95,00%	384.789.	95,00%	404.816.	100%	3.810.82	Disbudpar



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Sarana dan Prasarana Apatur	diyani sarana dan prasarana memadai			607		7.710		085		.957		057		157		4.573	
2	16	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase pelanggaran disiplin apratur	99,00%	99,00%		94,78%		95,00%		95,00%		95,00%		95,00%		100%		Disbudpar
								70.400.000		101.400.000		38.400.000		38.400.000		38.400.000		38.400.000		325.400.000	
2	16	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya	87,96%	87,96%		95,30%		95,00%		95,00%		95,00%		95,00%		100%		Disbudpar
								71.880.000		192.782.000		164.030.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		728.692.000	
2	16	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase laporan yang valid / sesuai standar	95,94%	95,94%		99,68%		95,00%		95,00%		95,00%		95,00%		100%		Disbudpar
								16.200.000		17.700.000		21.800.000		16.200.000		16.200.000		16.200.000		104.300.000	
2	03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		99,45 %		95,64 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Ketahanan Pangan
								3.247.109.410		1.773.736.700		1.693.363.000		1.355.279.290		2.453.130.872		2.501.842.644		13.024.461.916	
2	03	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		100 %		85,25 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Ketahanan Pangan
								518.594.100		376.781.000		713.713.000		314.994.310		980.801.947		918.018.175		3.822.902.532	
2	03	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		100 %		95,21 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Ketahanan Pangan
								164.750.000		23.800.000		49.750.000		31.500.000		37.800.000		45.360.000		352.960.000	
2	03	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang terpenuhi		100 %		93,5 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Ketahanan Pangan
								240.800.000		181.500.000		124.000.000		118.400.000		130.240.000		136.752.000		931.692.000	
2	03	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi		100 %		98,74 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Ketahanan Pangan
								14.135.000		15.800.000		16.600.000		16.600.000		17.017.551		17.017.551		97.170.102	
2.11	2.	01		Program Pelayanan	Persentase pelayanan	90 %	90 %	632.115.825	75 %	801.356.160	75 %	826.571.300	75 %	866.161.250	75 %	866.161.250	75 %	876.161.250	75 %	876.161.250	Dinas Koperasi -



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	1 1 .			Administrasi Perkantoran	administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan															UKM	
2.11	2 . 1 1 .	0 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	90 %	90 %	179.667.026	90 %	615.620.234	90 %	397.556.550	90 %	208.400.500	90 %	266.850.000	90 %	281.850.000	90 %	281.850.000	Dinas Koperasi - UKM
2.11	2 . 1 1 .	0 3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	31.707.000	100 %	19.831.750	100 %	17.300.000	100 %	37.350.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	Dinas Koperasi - UKM
2.11	2 . 1 1 .	0 5		Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi	56 %	70 %	50.401.375	70 %	159.857.006	70 %	60.000.000	70 %	199.700.000	70 %	60.000.000	70 %	60.000.000	70 %	60.000.000	Dinas Koperasi - UKM
2.11	2 . 1 1 .	0 6		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	NA	NA	NA	75 %	1.750.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Koperasi - UKM	
2.05.2.05	0 1	0 1	0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1.178.625.000	100 %	4.304.123.204	100 %	9.008.893.168	100 %	8.535.367.740	100 %	939.773.250	100 %	1.939.773.250	100 %	25.906.555.612	DLH
2.05.2.05	0 1	0 1	0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	404.000.000	100 %	3.206.716.188	100 %	2.659.352.072	100 %	1.927.916.580	100 %	469.925.183	100 %	469.925.183	100 %	9.137.835.206	DLH
2.05.2.05	0 1	0 1	0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Jumlah pegawai yang diadakan pakaian khusus hari-hari tertentu	100 %	100 %	60.000.000	100 %	128.220.000	100 %	66.800.000	-	-	100 %	81.000.000	100 %	81.000.000	100 %	417.020.000	DLH
2.05.2.05	0 1	0 1	0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti Diklat formal	100 %	100 %	80.000.000	100 %	429.936.000	100 %	64.584.000	100 %	72.816.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	847.336.000	DLH
3.04.2.05	0 1	0 1	2 2	Program Peningkatan Pengembangan	Persentase Dokumen Pelaporan	100 %	-	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	33 %	20.000.000	DLH



RPJMD Perubahan Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Kinerja dan Keuangan																
3	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100 %	100 %	1.744.507.648	100 %	1.713.781.991	100 %	1.756.000.000	100 %	1.765.000.000	100 %	1.772.500.000	100 %	1.775.000.000	100 %	10.526.789.639	Dinas Perikanan
3	01	02		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	100 %	1.192.892.050	100 %	939.082.400	100 %	532.500.000	100 %	532.500.000	100 %	532.500.000	100 %	532.500.000	100 %	4.261.974.450	Dinas Perikanan
3	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	38.600.000	100 %	21.900.000	100 %	28.000.000	100 %	28.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	176.500.000	Dinas Perikanan
3	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	100 %	100 %	65.453.550	100 %	35.400.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	600 pegawai	340.853.550	Dinas Perikanan
3	01	06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	100 %	100 %	29.650.000	100 %	32.910.000	100 %	29.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	181.560.000	Dinas Perikanan
03	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	90 %	98,79 %	2.250.664.866	95,98 %	3.167.035.936	100 %	3.934.959.950	100 %	3.920.802.450	100 %	2.992.982.716	100 %	3.080.475.216	100 %	19.346.921.134	Dinas Pertanian
03	01	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	90 %	97,88 %	752.037.957	89,29 %	703.349.600	100 %	831.188.500	100 %	333.898.400	100 %	222.266.888	100 %	222.266.888	100 %	3.065.008.233	Dinas Pertanian
03	01	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana penunjang kedisiplinan aparatur	90 %	100 %	102.720.000	84,80 %	100.700.000	100 %	134.400.000	100 %	105.000.000	100 %	130.673.734	100 %	130.673.734	100 %	704.167.468	Dinas Pertanian



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
03	01	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	80 %	45,12 %	29.756.828	99,40 %	99.901.911	100 %	101.340.000	100 %	107.550.000	100 %	355.181.172	100 %	355.181.172	100 %	1.048.911.083	Dinas Pertanian
03	01	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	80 %	95,26 %	2.510.000	85,68 %	16.279.000	100 %	18.499.000	100 %	20.000.000	100 %	203.241.275	100 %	203.241.275	100 %	463.770.550	Dinas Pertanian
3	06	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	N/A	97%	4.166.294.876	94%	4.297.200.695	78%	5.093.450.905	78%	4.648.785.640	78%	4.550.780.650	78%	4.702.018.975	78%	27.458.531.741	Disperdagin
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai	N/A	100%	867.120.449	95%	2.289.315.630	70%	598.335.245	70%	394.135.560	78%	627.856.350	78%	450.500.000	78%	5.227.263.234	Disperdagin
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur	N/A	100%	70.840.000	0%		80%	112.947.250	80%	97.905.000	80%	100.000.000	80%	150.000.000	80%	531.692.250	Disperdagin
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya	N/A	98%	126.250.000	92,50 %	255.760.000	65%	284.850.000	70%	200.180.000	70%	180.800.000	70%	210.000.000	70%	1.257.840.000	Disperdagin
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah (cakupan) laporan yang valid/sesuai standar	N/A	0%		0%		0%		100%	-	100 %	8.000.000	100%	8.000.000	100%	16.000.000	Disperdagin
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		70%	2.279.798.785	70%	1.641.881.785	70%	1.951.959.053	70%	2.277.557.911	70%	2.619.191.597	70%	3.012.070.337	70%	13.782.459.468	DPMPTSP
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana		70%	580.539.915	70%	189.726.915	70%	5.993.185.952	70%	897.163.845	70%	200.000.000	70%	500.000.000	70%	8.360.616.627	DPMPTSP



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Aparatur	memadai																
			3	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur		70%	133.350.000	70%	-	70%	-	70%	-	70%	67.738.422	70%	45.899.185	70%	246.987.607	DPMPTSP
			5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya		70%	103.120.000	70%	85.000.000	70%	97.750.000	70%	112.412.500	70%	129.274.375	70%	148.665.531	70%	676.222.406	DPMPTSP
			6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah (cakupan) laporan yang valid/sesuai standar		70%		70%		70%	40.000.000	70%	46.000.000	70%	52.900.000	70%	60.835.000	70%	199.735.000	DPMPTSP
Jumlah								1.540.102.862.809		1.512.906.458.534		1.421.443.468.000		1.433.180.277.000		1.451.336.893.000		1.468.934.183.000		8.827.904.142.343	



BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Adapun indikator kinerja pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2. Penentuan target indikator kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan tren set data selama beberapa tahun terakhir. Proyeksi secara matematis dilakukan menggunakan pendekatan logaritma natural.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian		Target			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	68,61	69,42	70,17	69,34	69,56	69,76	69,94
2	Rasio konektivitas jalan darat antar pusat kegiatan	rasio	NA	NA	92,00	92,00	96,00	100,00	100,00
3	Inflasi	persen	5,72	2,46	3,29	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7
4	PDRB per Kapita	juta rupiah	32,45	34,24	36,15	37,57	39,12	41,07	42 - 44
5	Tingkat Kemiskinan	persen	6,42	6,32	6,24	5,91	5,51	5,32	4 - 5
6	Tingkat Pengangguran	persen	3,53	NA	4,92	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4
7	Indeks Gini	indeks	0,28	0,32	0,35	≤0,35	≤0,35	≤0,35	≤0,35
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	NA	NA	NA	71,47	72,15	73,14	73,75
9	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	indeks	NA	NA	NA	C	CC	B	A
10	Pertumbuhan Ekonomi	persen	7,62	7,93	7,99	7,82	7,88	7,95	8,11

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian		Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1.1	Usia Harapan Hidup	tahun	69,51	69,60	69,70	69,83	69,91	70,02	70,17	70,17
1.2	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,70	7,88	7,89	8,49	8,55	8,72	9,00	9,00



No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian		Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.3	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,05	12,21	12,59	12,41	12,52	12,62	12,71	12,71
1.4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	86,79	NA	87,73	87,28	87,62	87,93	88,20	88,20
1.5	Prevalensi kekerasan terhadap anak-anak	persen	NA	NA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
II Aspek Pelayanan Umum										
2.1	Persentase jalan dalam kondisi baik	persen	NA	NA	48,88	48,90	49,00	50,00	61,00	61,00
2.2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	persen	NA	NA	46,07	46,07	46,00	47,00	49,00	49,00
2.3	Konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan	persen	NA	NA	90,27	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00
2.4	Jumlah kecelakaan lalu lintas	jumlah	NA	NA	149,00	141,00	134,00	127,00	120,00	120,00
2.5	Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar	persen	NA	NA	51,07	62,00	63,00	64,00	65,00	65,00
2.6	Persentase masyarakat yang terlayani air bersih	persen	NA	NA	76,62	83,00	89,00	95,00	100,00	100,00
2.7	Persentase tingkat pencermaran air	persen	NA	NA	NA	5,22	5,01	4,80	4,35	4,35
2.8	Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	persen	NA	NA	60,50	58,00	57,00	56,00	55,00	55,00
2.9	Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU)	persen	NA	NA	50,00	50,00	60,00	66,70	75,00	75,00
2.10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	kategori	NA	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.11	Persentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang terlayani jaringan kabel dan nirkabel	persen	NA	NA	61,54	61,54	61,54	65,38	71,15	71,15
2.12	Persentase RTH kota dengan kondisi baik	persen	NA	NA	2,38	2,34	2,33	2,34	2,34	2,34
2.13	Luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati	ha	NA	NA	49,42	47,42	45,42	43,42	41,42	41,42
2.14	Penurunan titik api (Hot Spot)	persen	NA	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.15	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	persen	NA	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
III Aspek Daya Saing Daerah										
3.1	Persentase angkatan kerja terampil/terdidik dan jumlah angkatan kerja	persen	NA	NA	32,03	33,70	34,16	34,58	34,96	34,96
3.2	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	persen	NA	NA	87,30	93,50	95,99	97,65	98,70	98,70
3.3	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	persen	NA	NA	85,90	90,20	91,60	93,00	94,40	94,40
3.4	Nilai Tukar Petani (NTP)	indeks	NA	NA	78,26	78,75	79,24	79,72	80,21	80,21
3.5	Persentase pertumbuhan kredit usaha masyarakat (IKM dan UMKM)	persen	NA	NA	13,21	16,00	17,00	18,00	20,00	20,00
3.6	Partisipasi masyarakat dalam pencegahan bencana	persen	NA	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.7	Kemandirian Fiskal Daerah	persen	11,79	11,16	14,98	12,32	12,65	13,13	13,83	13,83
3.8	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	persen	NA	NA	76,18	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00
3.9	Capaian implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	kategori	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
3.10	Nilai akuntabilitas kinerja	nilai	CC	CC	B	B	B	BB	A	A
3.11	Opini BPK terhadap LKPD	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.12	Nilai LPPD	nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik



No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian		Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.13	Jumlah desa berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun)	jumlah desa	NA	NA	Sangat tertinggal: 72 Tertinggal: 83 Berkembang: 12 Maju: 1 Mandiri : 0	Sangat tertinggal: 55 Tertinggal: 68 Berkembang: 37 Maju: 7 Mandiri : 1	Sangat tertinggal: 51 Tertinggal: 64 Berkembang: 41 Maju: 10 Mandiri : 2	Sangat tertinggal: 47 Tertinggal: 60 Berkembang: 45 Maju: 13 Mandiri: 3	Sangat tertinggal: 43 Tertinggal: 56 Berkembang: 49 Maju: 16 Mandiri: 4	Sangat tertinggal : 43 Tertinggal: 56 Berkembang: 49 Maju: 16 Mandiri: 4
3.14	Persentase pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	persen	6,06	8,64	6,90	6,06	6,41	6,98	7,31	7,31
3.15	Persentase pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	persen	9,28	8,80	11,19	8,80	9,12	9,40	9,78	9,78
3.16	Persentase pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	persen	9,35	8,07	8,70	8,07	8,33	8,61	8,90	8,90
3.17	Rasio nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	persen	NA	NA	68,96	23,78	23,78	24,97	24,97	24,97
3.18	Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB	persen	1,41	1,40	1,34	1,31	1,34	1,39	1,41	1,41

BAB IX PENUTUP

Perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dilakukan dengan dasar hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dan organisasi penyesuaian Perangkat Daerah. Dokumen Perubahan RPJMD ini adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses Konsultasi Publik, Focus Group Discussion (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sedangkan pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atasbawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan secara berjenjang di daerah hingga nasional, serta dengan penyelarasan kebijakan dan program nasional dan provinsi.

RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana melaksanakan RPJMD, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi agar RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah, dan kolaborasinya dengan pemerintah pusat dalam koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

9.1 Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD Tahun 2020 s.d 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 ini;



2. Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021– 2026 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh PD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur agar melaksanakan program-program dalam perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap PD berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada perubahan RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
4. Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten;
5. RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi acuan bagi setiap PD/unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja-PD) dengan pendekatan pencapaian hasil (*outcomes*);
6. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan dasar dalam



- penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
7. Renja-PD yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA-PD) dan menjadi kontrak kinerja Kepala PD/Unit kerja;
 8. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.